



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2025



dr. H. Khairul, M.Kes
Wali Kota Tarakan



Ibnu Saud, Is
Wakil Wali Kota Tarakan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tarakan Tahun 2025 ini dapat disusun dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup berbagai sektor, termasuk pembangunan ekonomi, pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, serta tata kelola pemerintahan selama periode satu tahun.

LPPD ini merupakan dokumen resmi yang menggambarkan capaian kinerja pemerintahan daerah berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, baik dalam aspek makro maupun sektoral. Beberapa capaian penting dalam laporan ini mencakup peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengurangan angka kemiskinan, pengurangan angka pengangguran, peningkatan pendapatan perkapita, perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah, serta tingkat ketimpangan yang rendah.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi referensi bagi pemangku kebijakan, akademisi, serta masyarakat luas dalam memahami perkembangan pembangunan di Kota Tarakan. Selain itu, laporan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi yang konstruktif guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak guna perbaikan dan penyempurnaan laporan di tahun-tahun mendatang.

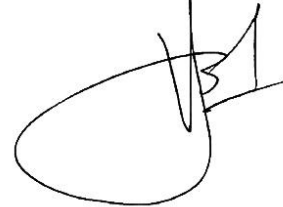
Kami juga ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Tarakan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pihak-pihak terkait lainnya yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan laporan ini.

Akhir kata, semoga LPPD ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan, serta menjadi acuan dalam perumusan kebijakan yang lebih baik demi kemajuan Kota Tarakan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tarakan, 25 Maret 2026

Wali Kota Tarakan



dr. H. Khairul, M.Kes

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.1.1 Penjelasan Umum	I-1
a. Undang-Undang Pembentukan Daerah.....	I-1
b. Data Geografis Wilayah.....	I-4
c. Jumlah Penduduk	I-7
d. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan.....	I-13
e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintahan	I-17
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	I-26
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	I-64
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	I-70
b. Visi dan Misi Kepala Daerah	I-81
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	I-94
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	I-103
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	I-125
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	II-1
2.1 Capaian Kinerja Makro.....	II-1
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	II-6
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci	II-8
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	II-29
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	II-33
a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja	II-35
b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja.....	II-37
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTU	III-1

1. Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Pembantuan	III-1
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kota Tarakan ..	III-3
3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	III-7
3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Kota Tarakan	III-7
3.1.1. Target Kinerja	III-8
3.1.2. Realisasi	III-8
3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Kota Tarakan ..	III-10
3.2.1. Target Kinerja	III-11
3.2.2. Realisasi	III-11
3.3. Permasalahan dan Kendala	III-13
3.4. Saran dan Tindak Lanjut	III-13

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN

MINIMAL	IV-1
4.1. Urusan Pedidikan	IV-1
4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar	IV-1
4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	IV-3
4.1.3. Realisasi	IV-3
4.1.4. Alokasi Anggaran	IV-6
4.1.5. Dukungan Personil	IV-7
4.1.6. Permasalahan dan Solusi	IV-8
4.2. Urusan Kesehatan	IV-11
4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar	IV-11
4.2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	IV-14
4.2.3. Realisasi	IV-17
4.2.4. Alokasi Anggaran	IV-39
4.2.5. Dukungan Personil	IV-40
4.2.6. Permasalahan dan Solusi	IV-41
4.3. Urusan Pekerjaan Umum	IV-43
4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar	IV-44
4.3.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	IV-46
4.3.3. Realisasi	IV-48
4.3.4. Alokasi Anggaran	IV-51
4.3.5. Dukungan Personil	IV-53
4.3.6. Permasalahan dan Solusi	IV-53
4.4. Urusan Permukiman dan Perumahan Rakyat	IV-55
4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar	IV-56
4.4.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	IV-58
4.4.3. Realisasi	IV-59
4.4.4. Alokasi Anggaran	IV-61

4.4.5. Dukungan Personil	IV-63
4.4.6. Permasalahan dan Solusi	IV-64
4.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV-67
4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar	IV-67
4.5.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	IV-70
4.5.3. Realisasi	IV-73
4.5.4. Alokasi Anggaran	IV-86
4.5.5. Dukungan Personil	IV-87
4.5.6. Permasalahan dan Solusi	IV-87
4.6. Urusan Sosial	IV-90
4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar	IV-91
4.5.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	IV-92
4.5.3. Realisasi	IV-94
4.5.4. Alokasi Anggaran	IV-101
4.5.5. Dukungan Personil	IV-103
4.5.6. Permasalahan dan Solusi	IV-103
4.7. Program dan Kegiatan	IV-105
 BAB V PENUTUP	 V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Tarakan	I-5
Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025	I-8
Tabel 1.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025	I-9
Tabel 1.4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Tahun 2025	I-10
Tabel 1.5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025	I-11
Tabel 1.6. Jumlah Penyandang Disabilitas Tahun 2025	I-12
Tabel 1.7. Pertumbuhan Penduduk Tahun 2025.....	I-13
Tabel 1.8. Kecamatan Tarakan Timur dan Kelurahanya Tahun 2025	I-14
Tabel 1.9. Kecamatan Tarakan Tengah dan Kelurahanya Tahun 2025	I-14
Tabel 1.10. Kecamatan Tarakan Barat dan Kelurahanya Tahun 2025	I-14
Tabel 1.11. Kecamatan Tarakan Utara dan Kelurahanya Tahun 2025	I-15
Tabel 1.12. Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Kota Tarakan	I-17
Tabel 1.13. Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025	I-20
Tabel 1.14. Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2025	I-20
Tabel 1.15. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2025	I-21
Tabel 1.16. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir.....	I-22
Tabel 1.17. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Tarakan	I-23
Tabel 1.18. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025 ...	I-30
Tabel 1.19. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Tarakan	I-31
Tabel 1.20. Target dan Realisasi PAD Kota Tarakan Tahun 2025	I-35
Tabel 1.21. Target dan Realisasi Transfer Kota Tarakan Tahun 2025	I-39
Tabel 1.22. Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Tahun 2025 ..	I-44
Tabel 1.23. Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025	I-47
Tabel 1.24. Rincian Belanja Operasi Kota Tarakan Tahun 2025.....	I-52
Tabel 1.25. Rincian Belanja Modal Kota Tarakan Tahun 2025.....	I-56
Tabel 1.26. Rincian Belanja Tidak Terduga (BTT) Kota Tarakan Tahun 2025	I-59
Tabel 1.27. Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025	I-62
Tabel 1.28. Program Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025	I-94
Tabel 1.29. Kegiatan Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025.....	I-102
Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Makro Kota Tarakan	II-2
Tabel 2.2. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) per Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Tarakan.....	II-9
Tabel 2.3. Capaian Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan di Kota Tarakan.....	II-30
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	II-36
Tabel 2.5. Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	II-37

Tabel 2.6. Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tarakan	II-40
Tabel 2.7. Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Utara dan Capaian Nasional Tahun 2025.....	II-41
Tabel 2.8. Indikator Kinerja	II-43
Tabel 2.9. Capaian Indikator Usia Harapan Hidup (UHH).....	II-45
Tabel 2.10. Perbandingan Capaian Usia Harapan Hidup Kalimantan Utara dan Capaian Nasional	II-46
Tabel 2.11. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran terhadap Pencapaian Kinerja Tahun 2025 Indikator Angka Usia Harapan Hidup	II-49
Tabel 2.12. Capaian Indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	II-54
Tabel 2.13. Perbandingan Capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah Sekolah Kalimantan Utara dengan Capaian Nasional	II-55
Tabel 2.14. Capaian Indikator Angka Harapan Lama Sekolah	II-59
Tabel 2.15. Perbandingan Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Kalimantan Utara dengan Capaian Nasional	II-60
Tabel 2.16. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran terhadap Pencapaian Kinerja Tahun 2025 Indikator Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama sekolah	II-64
Tabel 2.17. Capaian Indikator Indeks Ketimpangan Gender.....	II-68
Tabel 2.18. Perbandingan Capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kalimantan Utara dengan Capaian Nasional Tahun 2024	II-69
Tabel 2.19. Capaian Indikator Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga).....	II-75
Tabel 2.20. Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kalimantan Utara dengan Capaian Nasional	II-77
Tabel 2.21. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran terhadap Pencapaian Kinerja Tahun 2025 Indikator Indeks ketimpangan gender dan Indeks pembangunan keluarga.....	II-82
Tabel 2.22. Capaian Indikator Angka Kemiskinan	II-85
Tabel 2.23. Perbandingan Capaian Angka Kemiskinan Kalimantan Utara Dengan Capaian Nasional	II-87
Tabel 2.24. Capaian Indikator Angka Kemiskinan Ekstrem	II-89
Tabel 2.25. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran terhadap Pencapaian Kinerja Tahun 2025 Indikator Angka kemiskinan dan Angka Kemiskinan Ekstrem	II-93
Tabel 2.26. Sasaran dan Indikator	II-97
Tabel 2.27. Capaian Indikator Indeks Infrastruktur	II-99
Tabel 2.28. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran terhadap Pencapaian Kinerja Tahun 2025 Indikator Indeks Infrastruktur	II-102
Tabel 2.29. Capaian Indikator Indeks Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan ...	II-107

Tabel 2.30. Perbandingan Capaian Persentase rumah rangka dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan Kalimantan Utara	II-108
Tabel 2.31. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran terhadap Pencapaian Kinerja Tahun 2025 Indikator Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak terjangkau dan berkelanjutan.....	II-112
Tabel 2.32. Capaian Indikator Tujuan Gini Rasio.....	II-118
Tabel 2.33. Perbandingan Capaian Angka Kemiskinan Ekstrem Kalimantan Utara dengan Capaian Nasional	II-120
Tabel 2.34. Indikator Kinerja.....	II-121
Tabel 2.35. Capaian Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi	II-123
Tabel 2.36. Perbandingan Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Utara dengan Capaian Nasional	II-124
Tabel 2.37. Capaian Indikator Tingkat Inflasi	II-129
Tabel 2.38. Perbandingan Capaian Tingkat Inflasi Kalimantan Utara dengan Capaian Nasional	II-130
Tabel 2.39. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran terhadap Pencapaian Kinerja Tahun 2025 Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat inflasi	II-135
Tabel 2.40. Capaian Indikator Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	II-140
Tabel 2.41. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran terhadap Pencapaian Kinerja Tahun 2025 Indikator Indeks Ketenteraman dan ketertiban umum	II-143
Tabel 2.42. Capaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	II-147
Tabel 2.43. Perbandingan Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalimantan Utara dengan Capaian Nasional	II-148
Tabel 2.44. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran terhadap Pencapaian Kinerja Tahun 2025 Indikator Tingkat pengangguran terbuka ..	II-151
Tabel 2.45. Capaian Indikator Tujuan Indeks Reformasi Birokrasi.....	II-155
Tabel 2.46. Perbandingan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kalimantan Utara	II-157
Tabel 2.47. Indikator Kinerja.....	II-158
Tabel 2.48. Capaian Indikator Nilai SAKIP	II-161
Tabel 2.49. Perbandingan Capaian Nilai SAKIP Kalimantan Utara.....	II-163
Tabel 2.50. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran terhadap Pencapaian Kinerja Tahun 2025 Indikator Nilai SAKIP	II-166
Tabel 2.51. Capaian Indikator Opini BPK.....	II-171
Tabel 2.52. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran terhadap Pencapaian Kinerja Tahun 2025 Indikator Opini BPK	II-175
Tabel 2.53. Capaian Indikator Indeks Pelayanan Publik	II-179

Tabel 2.54. Perbandingan Capaian Indeks Pelayanan Publik Kalimantan Utara	II-180
Tabel 2.55. Capaian Indikator Indeks	II-187
Tabel 2.56. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran terhadap Pencapaian Kinerja Tahun 2025 Indikator Indeks Pelayanan Publik dan Indeks SPBE	II-192
Tabel 2.57. Capaian Indikator Tujuan Indeks Risiko Bencana	II-197
Tabel 2.58. Perbandingan Capaian Indeks Resiko Bencana Kab/Kota Kalimantan Utara	II-199
Tabel 2.59. Indikator Kinerja.....	II-200
Tabel 2.60. Capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2025.....	II-203
Tabel 2.61. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Tarakan Tahun 2025 .	II- 204
Tabel 2.62. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran terhadap Pencapaian Kinerja Tahun 2025 Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	II-208
Tabel 2.63. Capaian indikator kinerja Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2025.....	II-214
Tabel 2.64. Perbandingan Capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kab/Kota Kalimantan Utara.....	II-216
Tabel 2.65. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran terhadap Pencapaian Kinerja Tahun 2025 Indikator Indeks Ketahanan Daerah.....	II-219
Tabel 3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten / Kota Tugas pembantuan	III-9
Tabel 3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota	III-12
Tabel 4.1. Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan	IV-1
Tabel 4.2. Pencapaian Target SPM Bidang Pendidikan	IV-3
Tabel 4.3. Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan	IV-6
Tabel 4.4. Dukungan Personil SPM Bidang Pendidikan	IV-8
Tabel 4.5. Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Pendidikan	IV-9
Tabel 4.6. Jenis Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan	IV-11
Tabel 4.7. Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	IV-16
Tabel 4.8. Capaian Penerapan SPM Bidang Kesehatan	IV-18
Tabel 4.9. Capaian Mutu Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan	IV-20
Tabel 4.10. Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan	IV-39
Tabel 4.11. Dukungan Personil SPM Bidang Kesehatan	IV-41
Tabel 4.12. Permasalahan dan Solusi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	

Urusan Kesehatan	IV-42
Tabel 4.13. Jenis Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum	IV-44
Tabel 4.14. Jenis Pelayanan Dasar Pengolahan Air Limbah	IV-47
Tabel 4.15. Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum	IV-48
Tabel 4.16. Alokasi Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum	IV-52
Tabel 4.17. Dukungan Personil SPM Bidang Pekerjaan Umum	IV-53
Tabel 4.18. Permasalahan dan Solusi SPM Urusan Pekerjaan Umum	IV-54
Tabel 4.19. Jenis Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat	IV-56
Tabel 4.20. Target Pencapaian SPM	IV-59
Tabel 4.21. Realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat	IV-60
Tabel 4.22. Alokasi anggaran SPM Urusan Perumahan Rakyat	IV-62
Tabel 4.23. Dukungan Personil SPM Permukiman dan Perumahan Rakyat	IV-64
Tabel 4.24. Permasalahan dan Solusi SPM Urusan Perumahan Rakyat	IV-65
Tabel 4.25. Jenis Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV-68
Tabel 4.26. Target Pencapaian SPM	IV-72
Tabel 4.27. Realisasi SPM Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV-74
Tabel 4.28. Alokasi Anggaran SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV-86
Tabel 4.29. Dukungan Personil Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umu ..	IV-87
Tabel 4.30. Permasalahan dan Solusi SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV-89
Tabel 4.31. Jenis Pelayanan Dasar Urusan Sosial	IV-91
Tabel 4.32. Target Pencapaian SPM	IV-93
Tabel 4.33. Realisasi SPM Urusan Sosial	IV-96
Tabel 4.34. Alokasi Anggaran SPM Urusan Sosial	IV-102
Tabel 4.35. Jumlah Dukungan Personil	IV-103
Tabel 4.36. Permasalahan Dan Solusi SPM Urusan Sosial	IV-104
Tabel 4.37. Urusan Pendidikan	IV-107
Tabel 4.38. Urusan Kesehatan	IV-112
Tabel 4.39. Urusan Pekerjaan Umum	IV-113
Tabel 4.40. Urusan Permukiman dan Perumahan Rakyat	IV-118
Tabel 4.41. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV-120
Tabel 4.42. Urusan Sosial	IV-133

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peta Administratif Kota Tarakan	I-5
Gambar 1.2. Persentase Luas Daratan	I-7
Gambar 1.3. Kecamatan dan Kelurahan di Kota Tarakan.....	I-16
Gambar 1.4. Struktur Pendapatan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025	I-33
Gambar 1.5. Struktur PAD Kota Tarakan Tahun 2025	I-37
Gambar 1.6. Struktur Pendapatan Transfer Kota Tarakan Tahun 2025	I-41
Gambar 1.7. Realisasi Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun 2025	I-50
Gambar 1.8. Realisasi Belanja Operasi Kota Tarakan Tahun 2025	I-53
Gambar 1.9. Realisasi Belanja Modal Kota Tarakan Tahun 2025	I-57
Gambar 2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tarakan.....	II-40
Gambar 2.2. Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Utara dan Capaian Nasional Tahun 2025.....	II-42
Gambar 2.3. Capaian Indikator Usia Harapan Hidup (UHH)	II-45
Gambar 2.4. Capaian Indikator Angka Harapan Lama sekolah	II-60
Gambar 2.5. Indeks Ketimpangan Gender	II-69
Gambar 2.6. Indeks Ketimpangan Gender Kota Tarakan	II-70
Gambar 2.7. Capaian Indikator Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) ...	II-76
Gambar 2.8. Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kalimantan Utara dengan Capaian Nasional	II-77
Gambar 2.9. Capaian Indikator Angka Kemiskinan Kota Tarakan.....	II-86
Gambar 2.10. Perbandingan Capaian Angka Kemiskinan Kalimantan Utara dengan Capaian Nasional	II-87
Gambar 2.11. Capaian Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan Kalimantan Utara	II-109
Gambar 2.12. Capaian Indikator Tujuan Gini Rasio.....	II-119
Gambar 2.13. Perbandingan Capaian Angka Kemiskinan Ekstrem Kalimantan Utara dengan Capaian Nasional	II-120
Gambar 2.14. Capaian Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi	II-123
Gambar 2.15. Perbandingan Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Utara dengan Capaian Nasional	II-124
Gambar 2.16. Capaian Indikator Tingkat Inflasi	II-130
Gambar 2.17. Perbandingan Capaian Tingkat Inflasi Kalimantan Utara dengan Capaian Nasional	II-131
Gambar 2.18. Capaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	II-148
Gambar 2.19. Perbandingan Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalimantan Utara dengan Capaian Nasional	II-149
Gambar 2.20. Capaian Indikator Tujuan Indeks Reformasi Birokrasi.....	II-156

Gambar 2.21. Perbandingan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kalimantan Utara	II-158
Gambar 2.22. Capaian Indikator Nilai SAKIP	II-162
Gambar 2.23. Perbandingan Capaian Nilai SAKIP Kalimantan Utara	II-163
Gambar 2.24. Capaian Indikator Indeks Pelayanan Publik	II-180
Gambar 2.25. Perbandingan Capaian Indeks Pelayanan Publik Kalimantan Utara	II-181
Gambar 2.26. Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Tarakan 2025	II-182
Gambar 2.27. Capaian Indikator Indeks	II-188
Gambar 2.28. Capaian Indikator Tujuan Indeks Risiko Bencana	II-198
Gambar 2.29. Perbandingan Capaian Indeks Resiko Bencana Kab/Kota Kalimantan Utara	II-200
Gambar 2.30. Profil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	II-204
Gambar 2.31. Grafik Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	II-205
Gambar 2.32. Grafik Capaian Indeks Per Komponen yang dicapai Kota Tarakan tahun 2025	II-215
Gambar 2.33. Capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Tarakan	II-216
Gambar 3.1. Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Tarakan, Kabupaten di Kaltara Provinsi Kaltara dan Nasional	III-10
Gambar 3.2. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Tarakan, Kabupaten di Kaltara, Provinsi Kaltara dan Nasional Tahun 2025	III-15
Gambar 3.3. Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Tarakan, Kabupaten di Kaltara, Provinsi Kaltara dan Nasional Tahun 2025	III-20
Gambar 3.4. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Tarakan, Kabupaten di Kaltara, Provinsi Kaltara dan Nasional Tahun 2024	III-25
Gambar 3.5. Indeks Pembangunan keluarga (iBangga) Kota Tarakan, Kabupaten di Kaltara, Provinsi Kaltara dan Nasional	III-32
Gambar 3.6. Angka Kemiskinan Kota Tarakan, Kabupaten di Kaltara, Provinsi Kaltara dan Nasional Tahun 2025	III-37
Gambar 3.7. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan Kota Tarakan, Kabupaten di Kaltara, Provinsi Kaltara dan Nasional Tahun 2025	III-48
Gambar 3.8. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tarakan, Kabupaten di Kaltara, Provinsi Kaltara dan Nasional Tahun 2025	III-52
Gambar 3.9. Tingkat Inflasi Kota Tarakan, Kabupaten di Kaltara, Provinsi Kaltara dan Nasional Tahun 2025	III-56
Gambar 3.10. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tarakan, Kabupaten di Kaltara, Provinsi Kaltara dan Nasional Tahun 2025	III-62



Gambar 3.11. Nilai SAKIP Kota Tarakan, Kabupaten di Kaltara, dan Provinsi Kaltara Tahun 2025	III-67
Gambar 3.12. Indeks Pelayanan Publik Kota Tarakan, Kabupaten diKaltara, Provinsi Kaltara dan Nasional Tahun 2025	III-75
Gambar 3.13. Indeks SPBE Kota Tarakan, Kabupaten di Kaltara, Provinsi Kaltara dan Nasional Tahun 2024	III-81
Gambar 3.14. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Tarakan, Kabupaten di Kaltara, dan Provinsi Kaltara.....	III-88

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Kota Tarakan merupakan sebuah kota yang terletak di Pulau Tarakan yang sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur. Mengingat perkembangan Kota Tarakan yang cukup pesat, maka melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1981 Kota Tarakan ditetapkan menjadi Kota Administratif yang meliputi 2 (dua) wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Tarakan Barat dan Kecamatan Tarakan Timur, dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai sarana dalam pembinaan wilayah dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kota Administratif Tarakan ini selanjutnya terus tumbuh dan berkembang sebagai kota perdagangan dan industri bagi Kalimantan Timur bagian utara serta menunjukkan kemajuan yang cukup pesat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu Kota Administratif Tarakan secara geografis mempunyai kedudukan dan peranan yang strategis ditinjau dari segi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Perkembangan Kota Administratif Tarakan tersebut, ternyata mempunyai dampak positif dalam pertumbuhan perekonomian masyarakat di berbagai bidang. Disamping sektor perdagangan dan industri, Pemerintah Kota Administratif Tarakan telah berhasil

menggali dan mengolah potensi wilayah lainnya di bidang transportasi, jasa, pertanian dan perikanan.

Perkembangan Kota Administratif Tarakan tersebut di atas diikuti pula dengan peningkatan jumlah penduduk yang cepat. Pada tahun 1991 penduduk berjumlah 84.648 jiwa, sedangkan pada tahun 1996 meningkat menjadi 108.790 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 5,18% pertahun. Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan serta pelayanan masyarakat di Kota Administratif Tarakan.

Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, maka dibentuklah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan sebagai Kotamadya Daerah Tingkat II baru melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan. Undang-Undang ini diresmikan pada Tanggal 15 Desember 1997, yang sekaligus menandai hari jadi Kota Tarakan.

Dalam rangka pembinaan wilayah mengingat luasnya wilayah dan perkembangan penduduk yang cukup pesat, maka kecamatan-kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan ditata dan ditetapkan dari 2 (dua) kecamatan menjadi 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Tarakan Barat, Kecamatan Tarakan Tengah dan Kecamatan Tarakan Timur. Dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan, maka Kota Administratif Tarakan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1981 dihapus. Dengan demikian, Kabupaten Daerah

Tingkat II Bulungan wilayahnya berkurang seluas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan.

Sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi daerah dimaksud untuk mempercepat terwujudnya, kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi daerah, maka daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pembentukan Kota Tarakan tentunya dilandasi oleh kebutuhan akan pengelolaan pemerintahan daerah yang lebih efektif dan efisien, serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, pembentukan Kota Tarakan dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, cepat, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam konteks tersebut, Pemerintah Kota Tarakan menetapkan arah pembangunan melalui dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan.

b. Data Geografis Wilayah

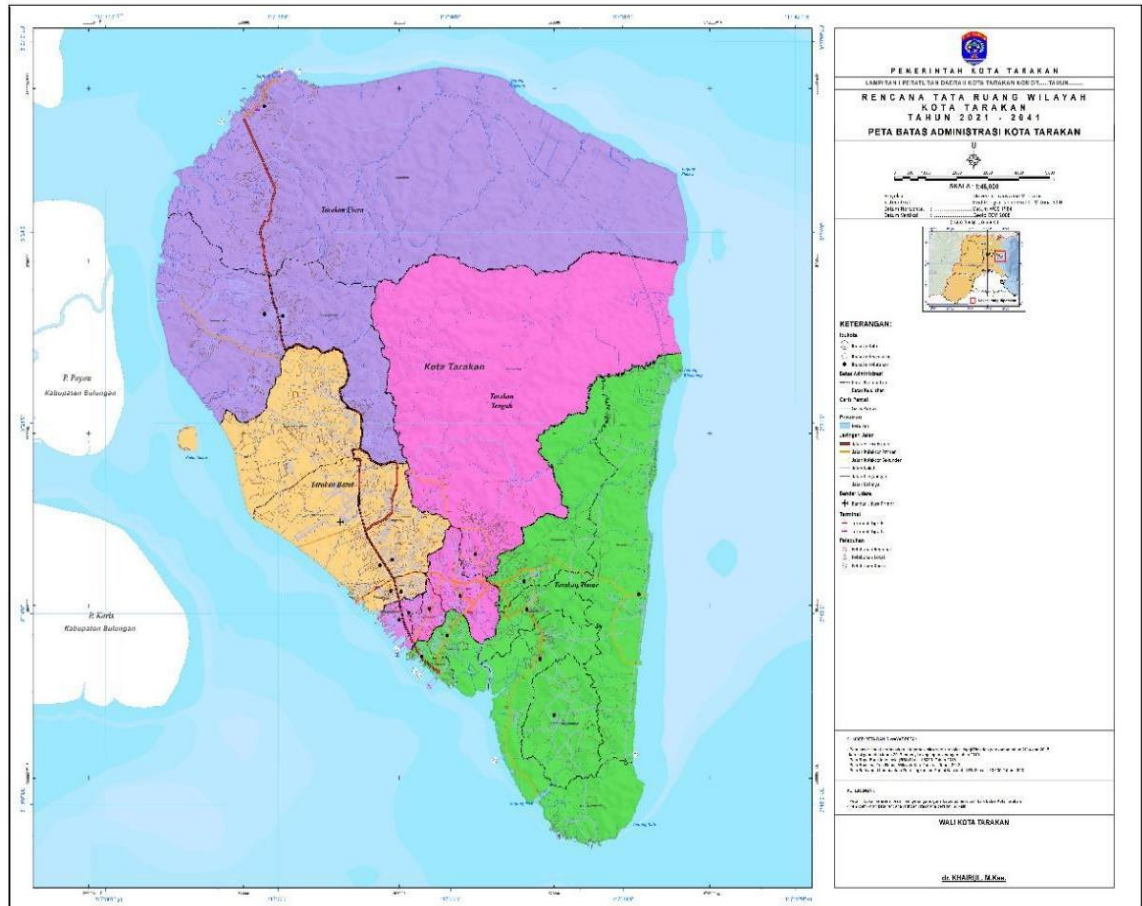
Kota Tarakan secara geografis terletak pada 3°14'30" Lintang Utara - 3°26'37" Lintang Utara dan 117°30'50" Bujur Timur - 117°40'12" Bujur Timur. Kota Tarakan berada di sebuah pulau kecil yang memiliki posisi strategis dimana selama ini berfungsi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah utara dan pintu gerbang utama bagi Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam RTRW Nasional, Kota Tarakan ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) untuk mendukung wilayah hinterland-nya yang kaya akan hasil hutan, pertanian, dan perkebunan. Kota Tarakan dapat dijadikan sebagai pusat industri pengolahan hasil pertanian dan kehutanan serta pendistribusian barang dan jasa.

Kota Tarakan terdiri dari 2 (dua) pulau yaitu Pulau Tarakan dan Pulau Sadau dengan luas wilayah daratan seluas ± 250,80 Km². Secara administratif pemerintahan, wilayah Kota Tarakan terbagi ke dalam 4 Kecamatan yaitu Tarakan Timur, Tarakan Tengah, Tarakan Barat, dan Tarakan Utara, serta 20 Kelurahan yaitu Kelurahan Pantai Amal, Mamburungan, Mamburungan Timur, Kampung Enam, Kampung Empat, Lingkas, Gunung Lingkas, Sebengkok, Pamusian, Kampung Satu, Selumit, Selumit Pantai, Karang Anyar, Karang Anyar Pantai, Karang Harapan, Karang Rejo, Karang Balik, Juata Kerikil, Juata Permai, Juata Laut, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Bulungan dan Tana Tidung
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bulungan
- Sebelah Timur : Laut Sulawesi
- Sebelah Barat : Kabupaten Bulungan

Gambar 1.1
Peta Adminitratif Kota Tarakan



Sumber: DPUPR Kota Tarakan, 2026

Tabel 1.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Tarakan

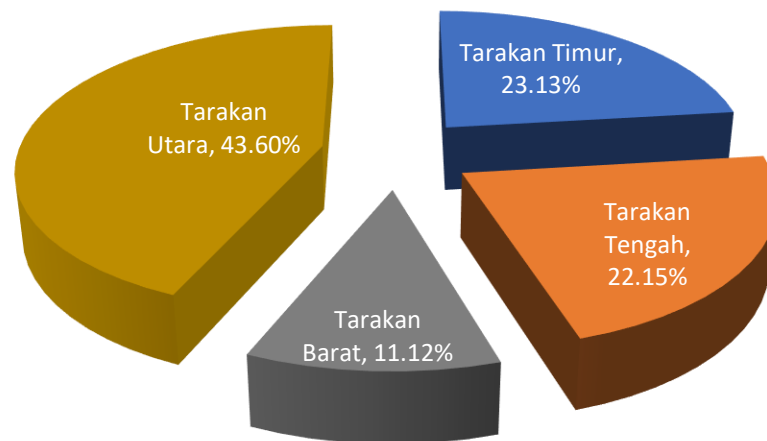
No	Kecamatan	Wilayah (Kilometer persegi)		Kelurahan
		Daratan	Lautan	
1	Tarakan Timur	58,01	-	7 Kelurahan: Kelurahan Pantai Amal, Mamburungan, Mamburungan Timur, Kampung Enam, Kampung Empat, Lingkas, Gunung Lingkas.

No	Kecamatan	Wilayah (Kilometer persegi)		Kelurahan
		Daratan	Lautan	
2	Tarakan Tengah	55,54	-	5 Kelurahan: Sebengkok, Pamusian, Kampung Satu, Selumit, Selumit Pantai
3	Tarakan Barat	27,89	-	5 Kelurahan: Karang Anyar, Karang Anyar Pantai, Karang Harapan, Karang Rejo, Karang Balik
4	Tarakan Utara	109,36	-	3 kelurahan: Juata Kerikil, Juata Permai, Juata Laut
Tarakan		250,80	-	20 kelurahan

Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka 2026, diolah

Kecamatan Tarakan Utara merupakan kecamatan dengan wilayah daratan terluas di Kota Tarakan dengan luas 109,36 Km² atau sekitar 43,60 persen terhadap luas wilayah daratan Kota Tarakan. Sedangkan wilayah terkecil di Kota Tarakan adalah Kecamatan Tarakan Barat yaitu seluas 27,89 Km² atau 11,12 persen terhadap luas wilayah daratan Kota Tarakan.

Gambar 1.2
Persentase Luas Daratan



Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka 2026, diolah

c. Jumlah Penduduk

Perkembangan kependudukan merupakan faktor penting untuk menjadi perhatian karena penduduk merupakan subyek dalam pembangunan suatu wilayah. Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Didukcapil Kota Tarakan Tahun 2025, jumlah penduduk Kota Tarakan pada Tahun 2025 sebanyak 258.011 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 133.491 jiwa atau sebesar 51,74% dan penduduk perempuan sebanyak 124.520 jiwa atau sebesar 48,26%. Pada tahun 2025 besarnya angka rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 107,20 yang berarti bahwa di antara 100 penduduk perempuan, terdapat 107 sampai 108 penduduk laki-laki di Kota Tarakan tahun 2025. Sebaran penduduk tiap kecamatan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Kecamatan/Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
1	Tarakan Barat				
	Karang Anyar	16.658	15.786	32.444	
	Karang Rejo	4.247	3.951	8.198	
	Karang Anyar Pantai	11.736	10.865	22.601	
	Karang Balik	4.357	4.202	8.559	
	Karang Harapan	7.256	7.130	14.386	
	Jumlah	44.254	41.934	86.188	33,40
2	Tarakan Tengah				
	Kampung I Skip	7.369	6.844	14.213	
	Pamusian	7.857	7.566	15.423	
	Sebengkok	8.695	8.145	16.840	
	Selumit	3.505	3.298	6.803	
	Selumit Pantai	9.821	8.667	18.488	
	Jumlah	37.247	34.520	71.767	27,82
3	Tarakan Timur				
	Lingkas Ujung	6.400	5.910	12.310	
	Gunung Lingkas	4.619	4.452	9.071	
	Kampung Empat	2.835	2.751	5.586	
	Kampung Enam	3.860	3.701	7.561	
	Mamburungan	6.119	5.670	11.789	
	Pantai Amal	6.242	5.569	11.811	
	Mamburungan Timur	2.337	2.169	4.506	
	Jumlah	32.412	30.222	62.634	24,28
4	Tarakan Utara				
	Juata Laut	8.868	8.180	17.048	
	Juata Permai	6.656	6.011	12.667	
	Juata Kerikil	4.054	3.653	7.707	
	Jumlah	19.578	17.844	37.422	14,50
	Kota Tarakan	133.491	124.520	258.011	100

Sumber: DKB Disdukcapil Tarakan Tahun 2025 semester 2

Berdasarkan tabel diatas, persebaran penduduk ditiap kecamatan menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Tarakan Barat yaitu sebanyak 86.188 jiwa atau 33,40%, diikuti Kecamatan Tarakan Tengah sebanyak 71.767 jiwa atau 27,82%, dan Kecamatan Tarakan Timur sebanyak 62.634 jiwa atau 24,28%. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Tarakan Utara sebanyak 37.422 jiwa atau 14,50%. Jika ditinjau dari persebaran penduduk di Tingkat kelurahan, jumlah penduduk terbanyak berada di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat yaitu sebanyak 32.444 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kelurahan Mamburungan Timur Kecamatan Tarakan Timur yaitu sebanyak 4.506 jiwa.

Selanjutnya juga dapat digambarkan Jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia yang disajikan pada table berikut.

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki		Perempuan		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	0-4	10.095	3,91	9.395	3,64	19.490	7,55
2	5-9	12.168	4,71	11.551	4,48	23.719	9,19
3	10-14	12.880	4,99	11.968	4,64	24.848	9,63
4	15-19	11.956	4,63	11.120	4,31	23.076	8,94
5	20-24	12.292	4,76	11.351	4,40	23.643	9,16
6	25-29	11.366	4,41	10.583	4,10	21.949	8,51
7	30-34	10.373	4,03	9.609	3,72	19.982	7,75
8	35-39	9.453	3,66	9.107	3,53	18.560	7,19
9	40-44	10.002	3,88	9.754	3,78	19.756	7,66

No	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki		Perempuan		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
10	45-49	9.512	3,69	8.701	3,37	18.213	7,06
11	50-54	7.636	2,96	6.814	2,64	14.450	5,60
12	55-59	5.981	2,32	5.273	2,04	11.254	4,36
13	60-64	3.855	1,49	3.690	1,43	7.545	2,92
14	65-69	2.839	1,10	2.615	1,01	5.454	2,11
15	70-74	1.719	0,67	1.501	0,58	3.220	1,25
16	≥ 75	1.364	0,53	1.488	0,58	2.852	1,11
	Jumlah	133.491	51,74	124.520	48,26	258.011	100

Sumber: DKB Disdukcapil Tarakan Tahun 2025 semester 2

Dari data tersebut diatas menunjukkan jumlah penduduk usia 10-14 tahun adalaah yang terbanyak yaitu 24.848 atau 9,63% dan jumlah penduduk dengan umur ≥ 75 Tahun adalah yang paling sedikit yaitu 2.825 atau 1,11% dari jumlah penduduk Kota Tarakan. Selanjutnya untuk penduduk produktif antara 15-64 tahun di Kota Tarakan adalah sebanyak 178.428 jiwa dengan rasio sebesar 69,16%.

Jumlah penduduk berdasarkan agama tersaji sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Tahun 2025

No	Agama	Jumlah Penduduk		Total	%
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Islam	114.202	106.559	220.761	85,56
2	Kristen	12.823	12.131	24.954	9,67
3	Katholik	4.977	4.280	9.257	3,59
4	Hindu	44	46	90	0,03
5	Budha	1.399	1.455	2.854	1,11

No	Agama	Jumlah Penduduk		Total	%
		Laki-Laki	Perempuan		
6	Konghucu	44	48	92	0,04
7	Kepercayaan	2	1	3	0,00
	Jumlah	133.491	124.520	258.011	100

Sumber: DKB Disdukcapil Tarakan Tahun 2025 semester 2

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Kota Tarakan beragama Islam sejumlah 220.761 jiwa dengan rasio sebesar 85,56 %.

Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah penduduk Kota Tarakan berada pada tingkatan pendidikan sebagaimana tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 1.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk		Total	%
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Tidak/Belum Sekolah	41.160	38.699	79.859	30,95
2	Belum Tamat SD/Sederajat	12.709	11.797	24.506	9,50
3	Tamat SD/Sederajat	18.070	17.324	35.394	13,72
4	SLTP/Sederajat	17.112	16.440	33.552	13,00
5	SLTA/Sederajat	36.207	30.531	66.738	25,87
6	Diploma I/II	292	466	758	0,29
7	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	1.350	2.193	3.543	1,37
8	Diploma IV/Strata I	6.044	6.693	12.737	4,94
9	Strata II	514	362	876	0,34
10	Strata III	33	15	48	0,02
	Jumlah	133.491	124.420	258.011	100

Sumber: DKB Disdukcapil Tarakan Tahun 2025 semester 2

Komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa tingkat pendidikan untuk kategori tingkat pendidikan tinggi (Diploma dan Strata), tertinggi didominasi tingkat pendidikan Diploma IV/Strata I sebanyak 12.737 jiwa. Sedangkan untuk tingkat Pendidikan Menengah dan Dasar, didominasi oleh tingkat pendidikan SLTA/ sederajat sebanyak 66.738 orang dan untuk yang tidak/ belum sekolah sebanyak 79.859 orang. Selanjutnya untuk jumlah penduduk dengan Pendidikan SLTA ke atas adalah sebanyak 84.700 orang atau 32,83%.

Jumlah penduduk penyandang disabilitas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.6
Jumlah Penyandang Disabilitas Tahun 2025

No	Jenis	Jumlah Penduduk		Total	%
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Disabilitas Fisik	34	27	61	13,35
2	Disabilitas Netra/ Buta	15	15	30	6,56
3	Disabilitas Rungu/Wicara	57	44	101	22,10
4	Disabilitas Mental/Jiwa	116	80	196	42,89
5	Disabilitas Fisik dan Mental	15	8	23	5,03
6	Disabilitas Lainnya	21	25	46	10,07
	Jumlah	258	199	457	100

Sumber: DKB Disdukcapil Tarakan Tahun 2025 semester 2

Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah Penyandang Disabilitas sebanyak 457 jiwa dengan rasio 0,18% dari total penduduk Kota Tarakan Tahun 2025.

Pada Tahun 2025 tercatat jumlah penduduk di Kota Tarakan mengalami peningkatan sebanyak 5.281 jiwa atau meningkat sebesar 0,90% dibanding Tahun 2024. Pertumbuhan penduduk Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.7
Pertumbuhan Penduduk Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk				Pertumbuhan Penduduk	
		2024		2025			
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Tarakan Barat	85.230	33,38	86.188	33,40	958	1,12
2	Tarakan Tengah	71.183	27,88	71.767	27,82	584	0,82
3	Tarakan Timur	62.376	24,43	62.634	24,28	258	0,41
4	Tarakan Utara	36.521	14,30	37.422	14,50	901	2,46
	Tarakan	255.310	100	258.011	100	2.701	1,06

Sumber: DKB Disdukcapil Tarakan Tahun 2024 dan 2025

Pertumbuhan penduduk Kota Tarakan dapat tabel di atas menunjukkan bahwa Tingkat pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi di Kecamatan Tarakan Utara sebesar 2,46, dan Tingkat pertumbuhan penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Tarakan Timur sebesar 0,41%.

d. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan

Kota Tarakan, sebagai salah satu kota di Provinsi Kalimantan Utara, memiliki 4 kecamatan dan 20 kelurahan yang membagi wilayah administratifnya. Struktur ini memungkinkan pembagian tugas dan pelayanan publik yang lebih efisien di berbagai wilayah dalam kota. Berikut adalah daftar kecamatan yang ada di Kota Tarakan:

Kecamatan Tarakan Timur adalah salah satu kecamatan yang berkembang pesat, dengan banyaknya pemukiman dan aktivitas perdagangan di wilayah ini. Kecamatan ini juga memiliki akses langsung ke pantai dan beberapa fasilitas wisata alam.

Tabel 1.8
Kecamatan Tarakan Timur dan Kelurahanannya Tahun 2025

Kecamatan	Kelurahan
Tarakan Timur	Lingkas Ujung
	Gunung Lingkas
	Kampung Empat
	Kampung Enam
	Mamburungan
	Pantai Amal
	Mamburungan Timur
Jumlah	7 Kelurahan

Kecamatan Tarakan Tengah merupakan pusat administratif dan ekonomi utama Kota Tarakan. Sebagian besar kawasan bisnis dan pusat perbelanjaan terletak di kecamatan ini. Kawasan ini juga menjadi pusat pemerintahan kota, termasuk kantor-kantor pemerintah, instansi, dan fasilitas publik lainnya.

Tabel 1.9
Kecamatan Tarakan Tengah dan Kelurahanannya Tahun 2025

Kecamatan	Kelurahan
Tarakan Tengah	Kampung 1 Skip
	Pamusian
	Sebengkok
	Selumit
	Selumit Pantai
Jumlah	5 Kelurahan

Kecamatan Tarakan Barat berada di sisi barat Kota Tarakan dan meliputi daerah yang sebagian besar terdiri dari kawasan pemukiman dan beberapa area komersial. Kecamatan ini juga menjadi jalur utama menuju area-area yang lebih terpencil di pulau-pulau sekitar.

Tabel 1.10
Kecamatan Tarakan Barat dan Kelurahanannya Tahun 2025

Kecamatan	Kelurahan
Tarakan Barat	Karang Anyar
	Karang Rejo
	Karang Anyar Pantai
	Karang Balik
	Karang Harapan
Jumlah	5 Kelurahan

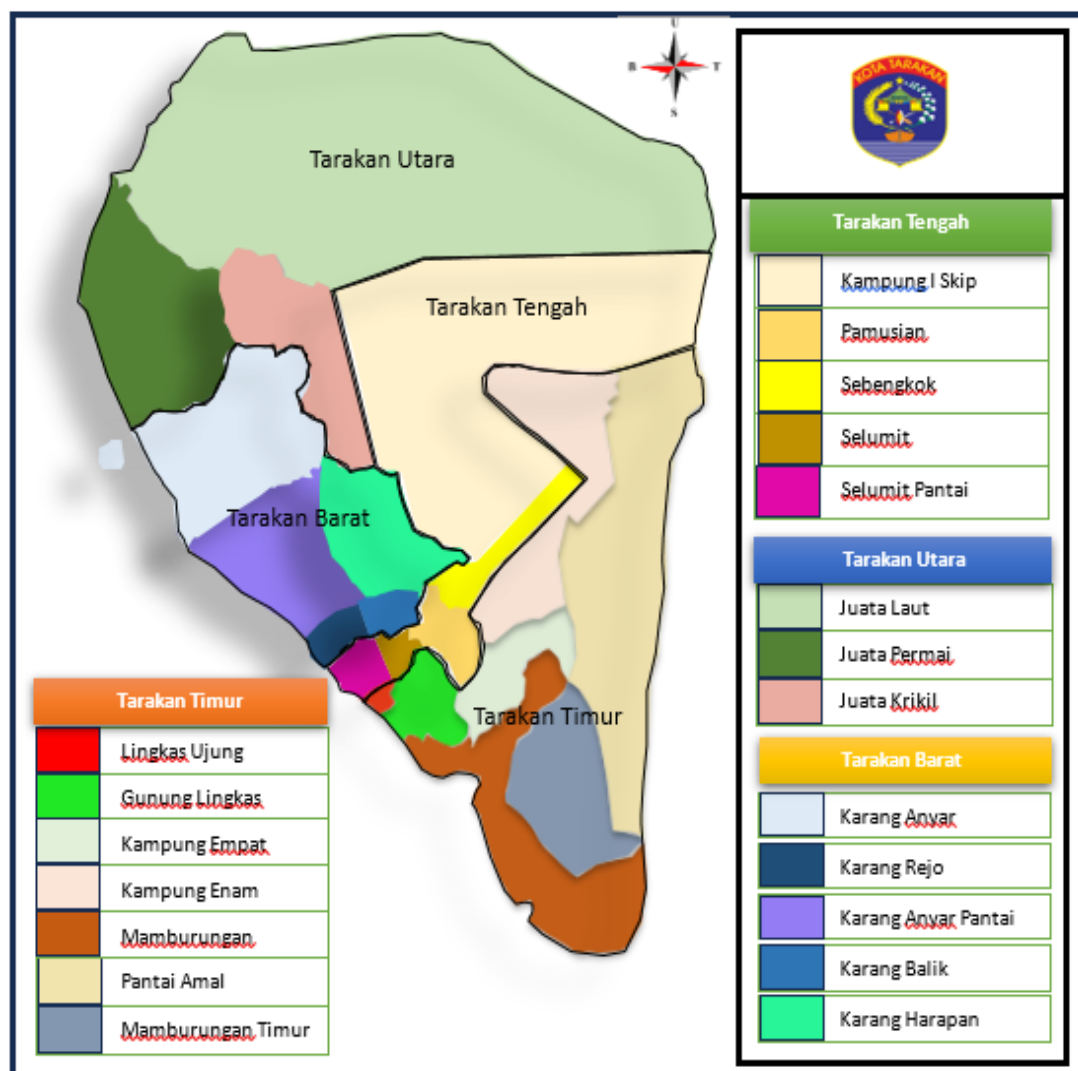
Kecamatan Tarakan Utara mencakup wilayah yang sebagian besar terdiri dari kawasan permukiman serta beberapa area industri ringan. Kecamatan ini juga memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi yang berbasis di laut dan perikanan.

Tabel 1.11
Kecamatan Tarakan Utara dan Kelurahanannya Tahun 2025

Kecamatan	Kelurahan
Tarakan Utara	Juata Laut
	Juata Permai
	Juata Kerikil
Jumlah	3 Kelurahan

Gambar ini memberikan representasi visual mengenai posisi dan distribusi kecamatan serta kelurahan yang ada di Kota Tarakan, membantu dalam memahami tata ruang wilayah serta mendukung perencanaan pembangunan daerah secara lebih efektif. Berikut gambar posisi kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Tarakan:

Gambar 1.3
Kecamatan dan Kelurahan di Kota Tarakan



Sumber: DPUTR, 2026

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintahan

Kota Tarakan sebagai daerah otonom, memiliki struktur pemerintahan yang terdiri dari perangkat daerah yang bertugas untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan dan pelayanan publik. Struktur ini mencakup Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah, dan pegawai pemerintahan yang menjalankan fungsi administratif dan pelayanan kepada masyarakat. Berikut Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah kota Tarakan

Tabel 1.12
Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Kota Tarakan

No	Nama Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1	Dinas Pendidikan	Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tarakan Nomor 63 Tahun 2020
2	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat	Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tarakan Nomor 55 Tahun 2021
3	Dinas Kesehatan	Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tarakan Nomor 52 Tahun 2021
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2026
5	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tarakan Nomor 67 Tahun 2021
6	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tarakan Nomor 64 Tahun 2021
7	Dinas Lingkungan Hidup	Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tarakan Nomor 58 Tahun 2021

No	Nama Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
8	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tarakan Nomor 54 Tahun 2021
9	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tarakan Nomor 57 Tahun 2021
10	Dinas Perikanan	Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tarakan Nomor 63 Tahun 2021
11	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Serta Pariwisata	Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tarakan Nomor 65 Tahun 2021
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tarakan Nomor 56 Tahun 2021
13	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan	Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tarakan Nomor 66 Tahun 2021
14	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tarakan Nomor 59 Tahun 2021
15	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tarakan Nomor 72 Tahun 2021
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tarakan Nomor 61 Tahun 2021
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tarakan Nomor 37 Tahun 2025
18	Badan Penanggulangan Bencana	Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tarakan Nomor 83 Tahun 2020
19	Sekretariat Dewan	Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tarakan Nomor 51 Tahun 2021

No	Nama Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
20	Sekretariat Daerah	Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tarakan Nomor 50 Tahun 2021
21	Dinas Perhubungan	Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tarakan Nomor 60 Tahun 2021
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tarakan Nomor 68 Tahun 2021
23	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah	Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tarakan Nomor 69 Tahun 2021
24	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tarakan Nomor 70 Tahun 2021
25	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tarakan Nomor 71 Tahun 2021
26	Inspektorat	Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tarakan Nomor 62 Tahun 2020
27	Kecamatan Tarakan Barat	Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tarakan Nomor 87 Tahun 2020
28	Kecamatan Tarakan Tengah	Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tarakan Nomor 88 Tahun 2020
29	Kecamatan Tarakan Timur	Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tarakan Nomor 86 Tahun 2020
30	Kecamatan Tarakan Utara	Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tarakan Nomor 89 Tahun 2020

Sumber : Bagian Organisasi, 2026 (Tambahkan UPT termasuk sekolah)

Setiap perangkat daerah memiliki unit kerja yang lebih spesifik untuk menjalankan tugas administratif dan operasional sehari-hari. Unit kerja ini terdiri dari subbagian, seksi, dan bidang yang memiliki peran masing-masing dalam mendukung kegiatan perangkat daerah.

Pegawai pemerintahan di Kota Tarakan adalah SDM yang bekerja di bawah naungan perangkat daerah untuk menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota Tarakan per tanggal 31 Desember 2025 sebanyak 2.489 orang.

Tabel 1.13
Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025
1.	PNS	
	Jumlah PNS Laki-laki	1.144
	Jumlah PNS Perempuan	1.345
	Jumlah seluruh PNS	2.489

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kota Tarakan, 2026

Berdasarkan data PNS menurut jenis kelamin, secara keseluruhan PNS Kota Tarakan didominasi oleh Perempuan dengan jumlah 1.345 orang atau 54,04%. Sedangkan PNS laki-laki di Kota Tarakan berjumlah 1.144 orang atau 45,96%.

Tabel 1.14
Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025
1.	Jumlah PNS Pejabat Struktural	378
2.	Jumlah PNS Staf dan Tenaga Fungsional	2.111
	Total	2.489

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kota Tarakan, 2026

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa jumlah PNS yang memegang jabatan struktural adalah sebanyak 378 Orang atau 15,19%. Sedangkan PNS sebagai staf dan fungsional adalah sebanyak 2.111 orang atau 84,81%.

Jika dikelompokkan berdasarkan golongan, maka dapat diketahui bahwa jumlah PNS terbanyak ada pada golongan III dan paling sedikit pada golongan I sebagaimana yang disajikan dalam Tabel 1.10. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga yang memiliki keterampilan dan pengalaman bekerja masih mendominasi jumlah PNS di Kota Tarakan.

Tabel 1.15
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025
1.	Jumlah PNS Golongan I	6
2.	Jumlah PNS Golongan II	181
3.	Jumlah PNS Golongan III	1.921
4.	Jumlah PNS Golongan IV	381
Jumlah seluruh PNS		2.489

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kota Tarakan, 2026

Berdasarkan tabel diatas, Jumlah PNS dengan tingkat golongan golongan III dan IV adalah yang terbanyak yaitu 2.302 orang atau 92,49%.

Tabel 1.16
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

No.	Uraian	Tahun 2025
1.	SD	3
2.	SMP	3
3.	SMA	404
4.	Diploma I	0

5.	Diploma II	3
6.	Diploma III	202
7.	Diploma IV	44
8.	Strata I	1.566
9.	Strata II	262
10.	Strata III	2
	Jumlah seluruh PNS	2.489

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kota Tarakan, 2026

Berdasarkan Tingkat Pendidikan, PNS di Kota Tarakan didominasi dengan PNS yang berpendidikan S1-S3 yaitu sebanyak 1.830 orang atau 73,52% dari seluruh PNS.

Sebaran PNS Kota Tarakan pada 30 Perangkat Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I.17
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Tarakan

No	Perangkat Daerah	Urusan	Rincian ASN				%
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	Total	
1	Dinas Pendidikan	Pendidikan	15	711	108	834	33,51
2	Dinas Kesehatan	Kesehatan	31	223	69	323	12,98
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9	5	46	60	2,41
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan	7	5	26	38	1,53
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	13	27	62	102	4,10
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penanggulangan Bencana	10	0	15	25	1,00
7	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat	6	3	10	19	0,76

No	Perangkat Daerah	Urusan	Rincian ASN				%
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	Total	
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6	3	13	22	0,88
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Ketahanan Pangan, dan Pertanian	8	19	15	42	1,69
10	Dinas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	11	7	46	64	2,57
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	7	17	28	1,13
12	Dinas Perhubungan	Perhubungan	12	4	36	52	2,09
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Komunikasi dan Informatika, serta Statistik, Persandian	9	6	8	23	0,92
14	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Koperasi, UMKM, dan Perdagangan	7	4	22	33	1,33
15	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	4	17	17	38	1,53
16	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	10	6	32	48	1,93
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpustakaan dan Kearsipan	5	5	16	26	1,05
18	Dinas Perikanan	Perikanan	7	7	14	28	1,13
19	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Perindustrian, dan Tenaga Kerja	7	12	15	34	1,37
20	Sekretariat Daerah	Penunjang Pemerintahan Daerah	21	28	61	110	4,42
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Perencanaan Pembangunan Daerah	7	11	14	32	1,29
22	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	19	2	58	79	3,17

No	Perangkat Daerah		Urusan	Rincian ASN				%
				Struktural	Fungsional	Pelaksana	Total	
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia		Manajemen Kepegawaian Daerah, dan Pengembangan SDM	7	13	20	40	1,61
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Kesatuan Bangsa dan Politik	6	4	12	22	0,88
25	Inspektorat		Pengawasan dan Pengendalian	5	31	5	41	1,65
26	Sekretariat DPRD			6	3	26	35	1,41
27	Kecamatan Tarakan Barat		Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	7	0	11	18	0,72
	1	Kelurahan Karang Anyar	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	6	0	7	13	0,52
	2	Kelurahan Karang Anyar Pantai	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	4	0	8	12	0,48
	3	Kelurahan Karang Balik	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	4	0	6	10	0,40
	4	Kelurahan Karang Harapan	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	5	0	6	11	0,44
	5	Kelurahan Karang Rejo	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	5	0	5	10	0,40
28	Kecamatan Tarakan Tengah		Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	6	0	10	16	0,64
	1	Kelurahan Kampung 1/Skip	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	5	0	5	10	0,40
	2	Kelurahan Pamusian	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	5	0	6	11	0,44
	3	Kelurahan Sebengkok	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	5	0	5	10	0,40
	4	Kelurahan Selumit	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	5	0	5	10	0,40

No	Perangkat Daerah		Urusan	Rincian ASN				%
				Struktural	Fungsional	Pelaksana	Total	
	5	Kelurahan Selumit Pantai	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	5	0	7	12	0,48
29	Kecamatan Tarakan Timur		Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	7	0	12	19	0,76
	1	Kelurahan Gunung Lingkas	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	5	0	7	12	0,48
	2	Kelurahan Kampung Empat	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	5	0	5	10	0,40
	3	Kelurahan Kampung Enam	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	5	0	8	13	0,52
	4	Kelurahan Lingkas Ujung	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	5	0	5	10	0,40
	5	Kelurahan Mamburungan	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	5	0	8	13	0,52
	6	Kelurahan Mamburungan Timur	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	5	0	3	8	0,32
	7	Kelurahan Pantai Amal	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	5	0	6	11	0,44
30	Kecamatan Tarakan Utara		Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	7	0	11	18	0,72
	1	Kelurahan Juata Krikil	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	5	0	7	12	0,48
	2	Kelurahan Juata Laut	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	5	0	7	12	0,48
	3	Kelurahan Juata Permai	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	5	0	5	10	0,40
Jumlah				378	1.163	948	2.489	100

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia, 2026

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan cerminan kinerja pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Tarakan dalam satu tahun anggaran. Realisasi tersebut menunjukkan tingkat pencapaian pelaksanaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang telah ditetapkan dalam APBD, serta menjadi dasar evaluasi atas efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah..

Penyusunan APBD Kota Tarakan dilaksanakan melalui tahapan perencanaan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Rancangan APBD yang telah disusun selanjutnya dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan untuk memperoleh persetujuan bersama dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagai dasar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam satu tahun anggaran.

APBD Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025 disusun untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kesejahteraan daerah. Struktur APBD meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang dialokasikan secara terarah dan proporsional sesuai dengan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan wujud pengelolaan keuangan daerah Tahun 2025, telah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tarakan

Tahun Anggaran 2025 melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. APBD Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp 1.176.463.228.204,00 terdiri atas Pendapatan Daerah Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, dengan rincian:

- a. Pendapatan Daerah Rp 1.152.995.228.204,00
- b. Belanja Daerah Rp 1.176.463.228.204,00
- c. Pembiayaan Daerah Rp 23.468.000.000,00

Seiring berjalannya penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2025, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi dan berdampak terhadap penggunaan anggaran Tahun 2025. Sebagaimana ketentuan pasal 16 Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD dengan terlebih dahulu melakukan perubahan penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD dan Laporan Realisasi Anggaran.

Berdasarkan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan Juni 2025, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025 memerlukan perubahan APBD Tahun 2025 dalam rangka:

1. Perubahan asumsi ekonomi makro yang berpengaruh terhadap kemampuan fiskal daerah;
2. Perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2025 sesuai dengan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat, dana transfer bagi hasil pajak dari provinsi dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 dan memperhitungkan potensi riil pendapatan asli daerah yang dapat diraih;
3. Perubahan penganggaran Belanja Daerah sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengakomodir kegiatan yang bersifat mendesak dan darurat, penyesuaian belanja yang bersumber dari dana transfer.

Rencana perubahan anggaran tersebut ditindaklanjuti melalui KUA dan PPAS yang telah disepakati melalui Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Tarakan dan DPRD Kota Tarakan Nomor 900.1.1.4/05/DPRD dan Nomor 900.1.1/423/BPKPAD Tanggal 16 Agustus 2025 tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025 dan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Tarakan dan DPRD Kota Tarakan Nomor 900.1.1.1/06/DPRD dan Nomor 900.1.1/424/BPKPAD tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro dan dinamika permasalahan di

masyarakat, sehingga berimbas pada struktur APBD Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025. Untuk itu ditetapkanlah Peraturan Daerah (Perda) Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Walikota Kota Tarakan Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp 1.176.463.228.204,00 dan bertambah sebesar Rp 38.207.120.599,87 sehingga menjadi Rp 1.214.670.348.803,87.

Tabel 1.18
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025

No	Uraian	Semula Jumlah (Rp)	Setelah Jumlah (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pendapatan Daerah	1.152.995.228.204,00	1.174.827.216.368,10	21.831.988.164,10
2	Belanja Daerah	1.176.463.228.204,00	1.214.670.348.803,87	38.207.120.599,87
3	Pembiayaan Daerah			
a	Penerimaan Pembiayaan	25.468.000.000,00	51.119.851.910,77	25.651.851.910,77
b	Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	11.276.719.475,00	9.276.719.475,00
c	Pembiayaan Neto	23.468.000.000,00	39.843.132.435,77	16.375.132.435,77
d	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah , 2026

Tabel ini menunjukkan perubahan APBD Kota Tarakan yang mencakup pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah sebelum dan setelah perubahan anggaran tahun 2025. Perubahan anggaran ini dilakukan dalam APBD Perubahan (APBD-P) sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika penerimaan dan pengeluaran daerah selama tahun berjalan.

Secara keseluruhan, perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Tarakan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah, perkembangan ekonomi, kebijakan pemerintah, keadaan darurat, serta realisasi pelaksanaan belanja daerah. Penyesuaian ini bertujuan untuk mewujudkan anggaran pendapatan yang lebih realistis, optimal, dan efektif dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan komponen utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Target pendapatan daerah setiap tahun ditetapkan secara terukur berdasarkan potensi riil daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya, perkembangan kondisi ekonomi, kebijakan fiskal, serta faktor lainnya dapat mempengaruhi pencapaian target pendapatan yang telah ditetapkan. Rincian target dan realisasi Pendapatan Daerah secara garis besar dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1.19
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Tarakan

Kode	Pendapatan Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	247.314.067.284,10	232.176.631.389,82	93,87
4.2	Pendapatan Transfer	917.157.149.084,00	882.116.940.606,00	96,04
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	10.356.000.000,00	11.383.720.751,00	109,92
TOTAL		1.174.827.216.368,10	1.125.677.292.746,82	95,71

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah , 2026

Realisasi Pendapatan Daerah merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan data pada tabel tersebut, secara keseluruhan Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp1.174.827.216.368,10 dan terealisasi sebesar Rp1.125.677.292.746,82, atau mencapai 95,71 persen dari target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pendapatan daerah secara umum berada pada kategori baik, meskipun masih terdapat beberapa komponen yang belum sepenuhnya mencapai target.

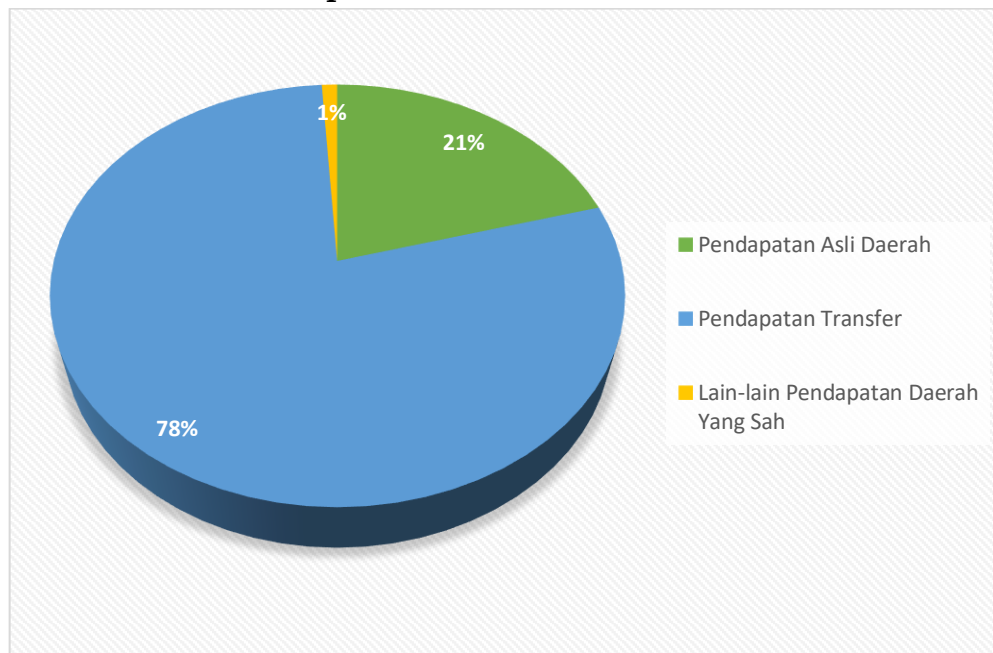
1. Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp247.314.067.284,10 dengan realisasi sebesar Rp232.176.631.389,82, atau mencapai 93,87 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa PAD belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh belum optimalnya realisasi beberapa sumber PAD, seperti pajak daerah dan retribusi daerah, yang antara lain disebabkan oleh dinamika aktivitas ekonomi masyarakat serta tingkat kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi. Meskipun demikian, realisasi PAD tetap menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam mendukung kemandirian fiskal daerah.

2. Pendapatan Transfer merupakan komponen pendapatan terbesar dalam struktur Pendapatan Daerah. Pada tahun anggaran 2025, Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp 917.157.149.084,00 dan terealisasi sebesar Rp882.116.940.606,00, atau mencapai 96,04 persen. Capaian ini mencerminkan kinerja yang relatif baik dan menunjukkan dukungan pemerintah pusat yang cukup optimal terhadap pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Selisih antara target dan realisasi terutama disebabkan oleh penyesuaian penyaluran dana transfer yang mengikuti kebijakan dan realisasi nasional.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp10.356.000.000,00, dengan realisasi sebesar Rp11.383.720.751,00, atau mencapai 109,92 persen. Capaian ini melampaui target yang telah ditetapkan, yang menunjukkan adanya penerimaan tambahan di luar perkiraan awal, seperti pendapatan bunga, pengembalian dana, atau penerimaan sah lainnya. Kinerja ini memberikan kontribusi positif dalam menutup sebagian kekurangan realisasi pada komponen pendapatan lainnya.

Secara keseluruhan, realisasi Pendapatan Daerah telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dan mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang tersedia. Ke depan, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat guna menjaga stabilitas dan optimalisasi Pendapatan Transfer.

Berikut adalah grafik realisasi pendapatan daerah Kota Tarakan tahun 2025.

Gambar 1.4
Struktur Pendapatan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah , 2026

Berdasarkan komposisi Pendapatan Daerah Kota Tarakan sebagaimana tergambar dalam diagram, struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh Pendapatan Transfer. Pendapatan Transfer memberikan kontribusi terbesar, yaitu sekitar 78 persen dari total Pendapatan Daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Kota Tarakan masih sangat bergantung pada dukungan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi.

Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi sebesar kurang lebih 21 persen terhadap total Pendapatan Daerah. Capaian ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli,

seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Meskipun kontribusi PAD belum menjadi sumber utama pendapatan, perannya tetap strategis dalam mendukung kemandirian fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan transfer.

Adapun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memberikan kontribusi yang relatif kecil, yakni sekitar 1 persen dari total Pendapatan Daerah. Porsi yang kecil ini menunjukkan bahwa penerimaan dari kelompok pendapatan tersebut bersifat pelengkap, namun tetap memberikan kontribusi positif dalam memperkuat struktur pendapatan daerah secara keseluruhan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen strategis dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berperan sebagai sumber pembiayaan utama bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. PAD mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola potensi sumber daya lokal guna meningkatkan kemandirian fiskal serta mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

Di Kota Tarakan, PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Target PAD ditetapkan setiap tahun secara terukur sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, realisasi PAD dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, antara lain kondisi perekonomian, kebijakan perpajakan, serta efektivitas pengelolaan pendapatan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah secara berkelanjutan melakukan evaluasi dan upaya optimalisasi PAD agar pengelolaannya semakin efektif dan berkontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Berikut ini rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tarakan Tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.20
Target dan Realisasi PAD Kota Tarakan Tahun 2025

Kode	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	247.314.067.284,10	232.176.631.389,82	93,87
4.1.01	Pajak Daerah	135.128.400.000,00	121.901.179.782,37	90,21
4.1.02	Retribusi Daerah	21.754.679.784,50	22.881.137.888,45	105,17
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31.501.958.687,10	31.142.958.687,12	98,86
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	58.929.028.812,50	56.251.355.031,88	95,45

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 2026

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator utama dalam menilai tingkat kemandirian fiskal daerah. Pada tahun anggaran 2025, PAD Kota Tarakan ditargetkan sebesar Rp247.314.067.284,10 dan terealisasi sebesar Rp232.176.631.389,82, atau mencapai 93,87 persen dari target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja PAD secara umum berada pada kategori cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa komponen yang belum sepenuhnya mencapai target.

Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp135.128.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp121.901.179.782,37, atau mencapai 90,21 persen. Capaian ini belum memenuhi target yang direncanakan, yang antara lain dipengaruhi oleh dinamika aktivitas ekonomi daerah serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Meskipun demikian, Pajak Daerah tetap menjadi kontributor terbesar dalam struktur PAD dan memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah.

Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp21.754.679.784,50 dan terealisasi sebesar Rp22.881.137.888,45, atau mencapai 105,17 persen. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan, yang menunjukkan adanya peningkatan kinerja pelayanan publik serta optimalisasi pemungutan retribusi daerah pada beberapa sektor layanan.

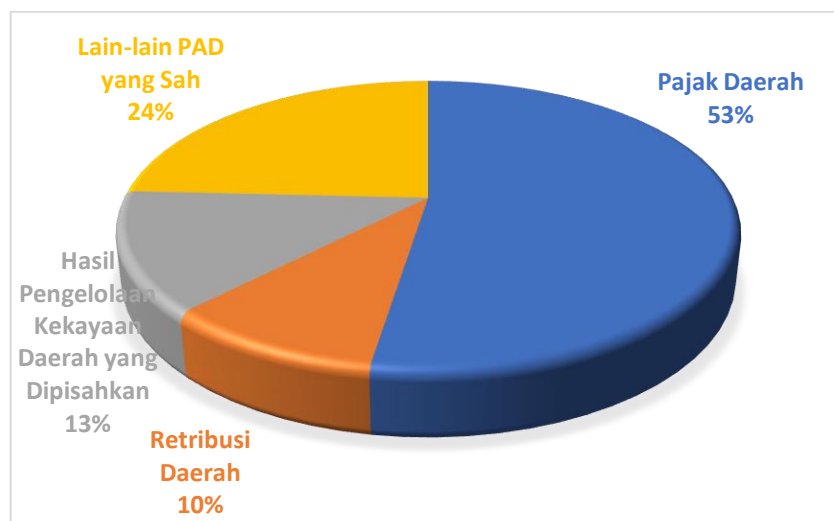
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp31.501.958.687,10 dengan realisasi sebesar Rp31.142.958.687,12, atau mencapai 98,86 persen. Capaian ini menunjukkan kinerja yang relatif optimal dan mencerminkan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta penyertaan modal pemerintah daerah yang berjalan dengan baik.

Lain-lain PAD yang Sah ditargetkan sebesar Rp58.929.028.812,50 dan terealisasi sebesar Rp56.251.355.031,88, atau mencapai 95,45 persen. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa penerimaan dari komponen ini relatif stabil dan mampu memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap PAD, meskipun belum sepenuhnya mencapai target.

Secara keseluruhan, realisasi PAD Kota Tarakan menunjukkan kinerja yang cukup baik dan mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber

pendapatan daerah. Ke depan, diperlukan penguatan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, khususnya pada sektor Pajak Daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik guna mendorong peningkatan penerimaan retribusi daerah secara berkelanjutan.

Gambar 1.5
Struktur PAD Kota Tarakan Tahun 2025



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 2026

Berdasarkan komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tarakan sebagaimana tergambar dalam diagram, sumber PAD terbesar masih berasal dari Pajak Daerah yang memberikan kontribusi sekitar 53 persen terhadap total PAD. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah merupakan tulang punggung utama penerimaan PAD dan memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah.

Selanjutnya, Lain-lain PAD yang Sah memberikan kontribusi sebesar kurang lebih 24 persen dari total PAD. Kontribusi ini menunjukkan bahwa penerimaan dari kelompok pendapatan

tersebut cukup signifikan dan berperan sebagai sumber pendukung dalam struktur PAD, yang berasal dari berbagai penerimaan sah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memberikan kontribusi sekitar 13 persen terhadap total PAD. Capaian ini mencerminkan kinerja pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta penyertaan modal pemerintah daerah yang relatif stabil dan memberikan manfaat fiskal bagi daerah.

Adapun Retribusi Daerah memberikan kontribusi sekitar 10 persen terhadap total PAD. Meskipun kontribusinya relatif lebih kecil dibandingkan komponen PAD lainnya, Retribusi Daerah tetap memiliki peran penting sebagai bentuk imbal jasa atas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, struktur PAD Kota Tarakan menunjukkan masih dominannya peran Pajak Daerah, sehingga ke depan diperlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, di samping mengoptimalkan sumber PAD lainnya melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan aset daerah yang lebih produktif, guna memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan/atau sumber lainnya, yang dialokasikan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan Transfer tidak dipungut secara langsung oleh pemerintah daerah, melainkan disalurkan melalui mekanisme

transfer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk dana perimbangan, dana transfer lainnya, maupun bantuan keuangan.

Berikut ini rincian Pendapatan Transfer Kota Tarakan Tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.21
Target dan Realisasi Transfer Kota Tarakan Tahun 2025

Kode	Pendapatan Transfer	Target-P (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
4.2	Pendapatan Transfer	918.434.453.084,00	882.116.940.606,00	96,04
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	818.970.495.205,00	806.789.383.767,00	98,51
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	99.463.957.879,00	75.327.556.839,00	75,73

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah , 2026

Pendapatan Transfer merupakan salah satu komponen utama Pendapatan Daerah yang berperan penting dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta peningkatan pelayanan publik di Kota Tarakan. Pada tahun anggaran 2025, Pendapatan Transfer Kota Tarakan ditargetkan sebesar Rp918.434.453.084,00 dan terealisasi sebesar Rp882.116.940.606,00, atau mencapai 96,04 persen dari target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa secara umum kinerja Pendapatan Transfer berada pada kategori baik.

Pendapatan Transfer tersebut bersumber dari dua kelompok utama, yaitu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat ditargetkan sebesar Rp818.970.495.205,00 dan terealisasi sebesar Rp806.789.383.767,00,

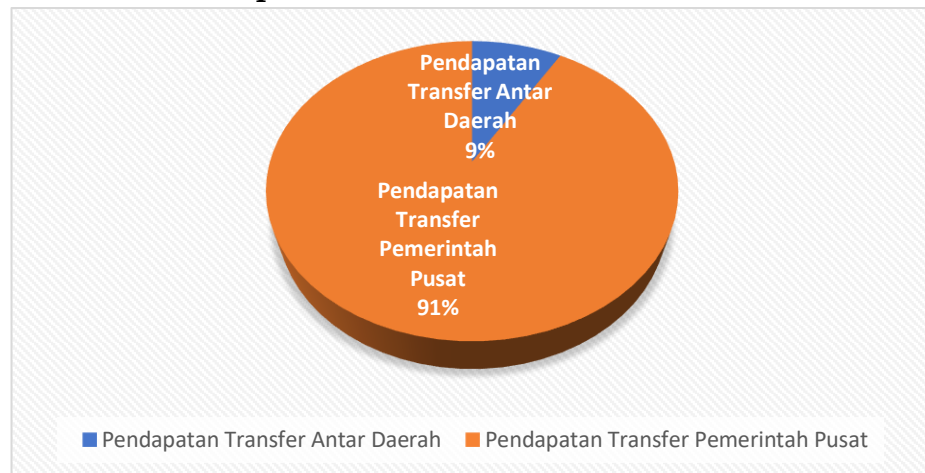
atau mencapai 98,51 persen. Tingginya tingkat realisasi ini mencerminkan optimalnya penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Kota Tarakan, yang antara lain meliputi Dana Perimbangan dan dana transfer lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Transfer Antar Daerah ditargetkan sebesar Rp99.463.957.879,00 dengan realisasi sebesar Rp75.327.556.839,00, atau mencapai 75,73 persen. Capaian ini relatif lebih rendah dibandingkan komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, yang antara lain dipengaruhi oleh penyesuaian alokasi serta realisasi bantuan keuangan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah lainnya yang tidak sepenuhnya tersalurkan sesuai dengan target yang direncanakan.

Secara keseluruhan, realisasi Pendapatan Transfer Kota Tarakan menunjukkan kinerja yang cukup baik dan memberikan kontribusi signifikan terhadap total Pendapatan Daerah. Ke depan, Pemerintah Kota Tarakan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, guna mendorong optimalisasi penerimaan Pendapatan Transfer dan mendukung kesinambungan pembangunan daerah.

Berikut adalah grafik realisasi Pendapatan Transfer Kota Tarakan pada tahun 2025:

Gambar 1.6
Struktur Pendapatan Transfer Kota Tarakan Tahun 2025



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah , 2026

Berdasarkan komposisi Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Tarakan sebagaimana ditunjukkan pada gambar tersebut, Pendapatan Transfer didominasi oleh Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan kontribusi sekitar 91 persen dari total Pendapatan Transfer. Dominasi ini menunjukkan bahwa sumber pendanaan utama dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta peningkatan pelayanan publik di Kota Tarakan masih sangat bergantung pada alokasi dana yang bersumber dari pemerintah pusat.

Sementara itu, Pendapatan Transfer Antar Daerah memberikan kontribusi yang relatif lebih kecil, yaitu sekitar 9 persen dari total Pendapatan Transfer. Porsi ini mencerminkan terbatasnya penerimaan yang berasal dari bantuan keuangan pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah lainnya, baik dari sisi alokasi maupun realisasi penyalurannya.

Secara keseluruhan, struktur Pendapatan Transfer tersebut menggambarkan tingginya ketergantungan fiskal Kota Tarakan terhadap pemerintah pusat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tarakan terus melakukan upaya peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, guna memastikan keberlanjutan dan optimalisasi pendapatan transfer dalam mendukung pembangunan daerah.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah salah satu komponen dalam struktur pendapatan daerah yang bersumber dari penerimaan di luar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat maupun antar daerah. Komponen ini mencakup berbagai jenis pendapatan yang tidak termasuk dalam kategori pajak, retribusi, atau dana transfer, tetapi tetap diakui sebagai sumber pendapatan daerah yang legal dan sah menurut peraturan yang berlaku.

Pendapatan ini dapat berasal dari beberapa sumber, antara lain:

1. Hibah Daerah

Dana atau barang yang diterima dari pihak lain (misalnya pemerintah pusat, organisasi internasional, swasta, atau individu) yang diberikan secara sukarela tanpa ada kewajiban pengembalian.

2. Dana Darurat

Bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk menangani keadaan darurat seperti bencana alam, krisis ekonomi, atau kejadian luar biasa lainnya yang berdampak pada daerah.

3. Pendapatan dari Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Pendapatan yang diperoleh dari kerja sama dengan perusahaan, BUMN, BUMD, atau swasta dalam pengelolaan aset atau layanan publik.

4. Pendapatan dari BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan Investasi Daerah

Laba atau dividen yang diperoleh daerah dari kepemilikan saham atau penyertaan modal di BUMD.

5. Pendapatan Denda dan Sanksi Administratif

Penerimaan yang berasal dari denda atau sanksi yang dikenakan atas pelanggaran peraturan daerah (Perda) atau ketentuan lain yang berlaku.

6. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan

Penerimaan dari pemanfaatan aset atau sumber daya daerah yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah.

Pentingnya Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah sebagai sumber tambahan pendapatan daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah, mengurangi ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat, sehingga daerah memiliki fleksibilitas keuangan yang lebih baik, dan meningkatkan efisiensi dan kreativitas pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan yang tidak hanya bergantung pada pajak dan retribusi.

Berikut ini rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.22
Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Tahun 2025

Kode	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Target-P (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	10.356.000.000,00	11.383.720.751,00	109,92
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10.356.000.000,00	11.383.720.751,00	109,92
4.3.04	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah , 2026

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan komponen Pendapatan Daerah yang bersumber dari penerimaan sah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berfungsi sebagai pendukung dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Pada tahun anggaran bersangkutan, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Tarakan ditargetkan sebesar Rp10.356.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp11.383.720.751,00, atau mencapai 109,92 persen dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan kinerja yang sangat baik, karena realisasi pendapatan melampaui target yang telah direncanakan.

Berdasarkan rinciannya, seluruh penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tersebut berasal dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang terealisasi sebesar Rp11.383.720.751,00 atau 109,92 persen dari target. Tingginya realisasi pada komponen ini menunjukkan adanya penerimaan tambahan yang bersifat sah dan tidak terprediksi secara optimal pada saat penyusunan anggaran.

Sementara itu, pada komponen Pendapatan Hibah tidak terdapat target maupun realisasi pada tahun anggaran tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tarakan tidak menerima pendapatan hibah selama periode pelaporan atau hibah yang diterima tidak dicatat sebagai pendapatan daerah pada pos tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara keseluruhan, realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Tarakan memberikan kontribusi positif terhadap total Pendapatan Daerah dan turut mendukung pencapaian target pendapatan secara keseluruhan. Ke depan, Pemerintah Kota Tarakan akan terus meningkatkan akurasi perencanaan pendapatan serta mengoptimalkan pencatatan dan pengelolaan penerimaan daerah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja

Belanja adalah jumlah belanja yang telah dikeluarkan atau dibelanjakan oleh pemerintah sesuai dengan anggaran yang telah disetujui untuk periode tertentu, seperti tahunan. Realisasi belanja menggambarkan pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah dalam rangka menjalankan program dan kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan.

Belanja pemerintah umumnya dikelompokkan dalam beberapa jenis yang mencerminkan kategori pengeluaran untuk berbagai kebutuhan. Berikut adalah jenis-jenis belanja yang biasanya digunakan dalam laporan keuangan pemerintah:

a. Belanja Pegawai

Belanja yang terkait dengan pengeluaran untuk gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi aparatur sipil negara (ASN), seperti pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja yang digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.

c. Belanja Modal

Belanja yang digunakan untuk pengadaan aset atau investasi dalam bentuk barang berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, seperti pembangunan infrastruktur dan pengadaan peralatan besar.

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja yang digunakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk uang tunai atau barang, sesuai dengan program sosial yang dijalankan oleh pemerintah.

e. Belanja Transfer

Belanja yang diberikan kepada pemerintah daerah atau pihak lain dalam rangka mendukung pelaksanaan program yang bersifat bersama atau kegiatan yang membutuhkan dana tambahan.

f. Belanja Tidak Terduga (BTT)

Belanja yang diperuntukkan untuk pengeluaran yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan bersifat mendesak, seperti untuk penanggulangan bencana alam atau keadaan darurat lainnya.

Belanja daerah merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yang bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Kota Tarakan, sebagai salah satu daerah yang terus berkembang, mengalokasikan anggaran belanjanya untuk berbagai sektor guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Belanja daerah Kota Tarakan Tahun 2025 memberikan gambaran mengenai alokasi anggaran untuk berbagai program dan kegiatan, termasuk belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, serta transfer ke daerah. Transparansi dalam pengelolaan belanja daerah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran serta memastikan bahwa setiap pengeluaran memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Berikut adalah rincian belanja daerah Kota Tarakan untuk tahun 2025.

Tabel 1.23
Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025

Kode	Belanja Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
5	Belanja Daerah	1.215.947.652.803,87	1.088.958.402.498,77	89,55
5.1	Belanja Operasi	1.010.482.137.654,04	911.268.083.540,48	90,18
5.2	Belanja Modal	200.465.515.149,83	177.340.280.958,29	88,46
5.3	Belanja Tidak Terduga	4.700.000.000,00	50.038.000,00	1,06
5.4	Belanja Transfer	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 2026

Alokasi Belanja Daerah tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.215.947.652.803,87 dan terealisasi sebesar Rp1.088.958.402.498,77, atau mencapai 89,55 persen. Realisasi belanja tersebut terdiri atas:

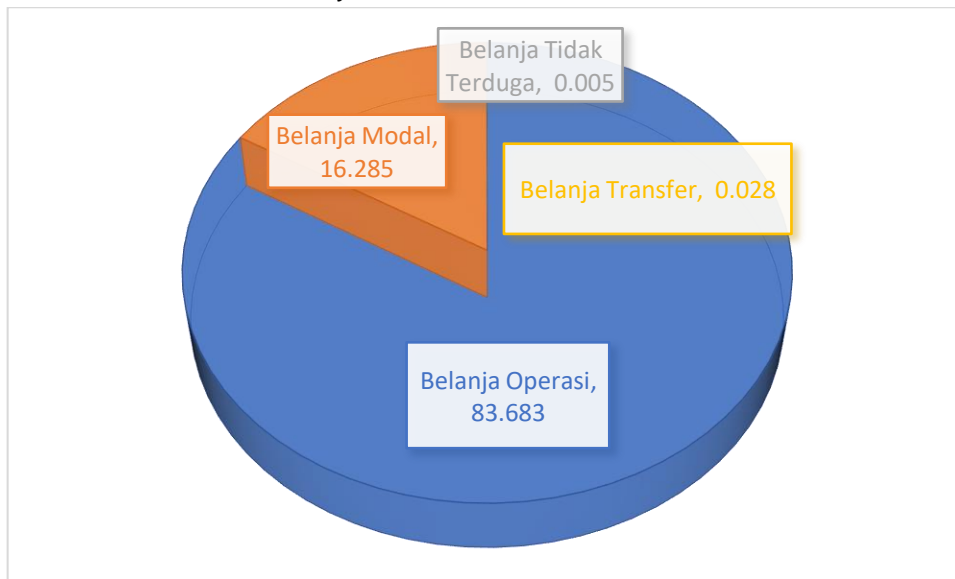
1. Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp1.010.482.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp911.268.058.968,54, atau mencapai 90,18 persen. Pencapaian Belanja Operasi sebesar Rp911.268.058.968,54 atau 90,18% dari target yang ditetapkan menunjukkan bahwa penyerapan anggaran yang cukup baik. Hal ini terjadi karena terdapat pembayaran pegawai atau insentif yang ditunda ke periode berikutnya, Efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa, seperti penghematan biaya operasional atau pemanfaatan aset secara lebih optimal, dan tidak semua hibah dan bantuan sosial tersalurkan, bisa jadi karena perubahan regulasi atau syarat yang tidak terpenuhi oleh penerima bantuan. Untuk itu perlu memastikan secara detail terhadap penggunaan anggaran dalam penghematan agar tidak berdampak pada layanan publik.
2. Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp200.465.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp177.340.334.506,28, atau mencapai 88,46 persen. Belum tingginya pencapaian belanja modal yang sebesar 88,46% menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan proyek pembangunan. Hal ini disebabkan oleh perencanaan yang matang, efisiensi pelaksanaan proyek, kapasitas SDM yang baik, minimnya hambatan eksternal, serta dukungan kebijakan dan pengawasan yang ketat. Namun, untuk memastikan efektivitas belanja modal ini benar-benar berdampak bagi masyarakat, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terkait kualitas proyek yang telah dilaksanakan.

3. Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp4.700.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp50.038.000,00, atau mencapai 1,06 persen, yang mencerminkan minimnya kejadian darurat selama tahun anggaran berjalan. Pencapaian rendahnya Belanja Tidak Terduga sebesar 1,06 persen menunjukkan bahwa tidak banyak situasi darurat yang memerlukan penggunaan dana ini, sehingga perlu mengevaluasi apakah ada kebutuhan mendesak yang bisa dibiayai dari dana ini sebelum tahun anggaran berakhir.
4. Belanja transfer tercapai 100,00% atau senilai Rp300.000.000,00 yang telah dialokasikan dan direalisasikan untuk membantu pemerintah daerah lain yang terdampak bencana alam pada Provinsi Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Secara keseluruhan, realisasi belanja daerah sudah cukup baik, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan terutama dalam penyerapannya agar lebih optimal dan tepat sasaran.

Berikut adalah grafik realisasi Belanja Daerah Kota Tarakan pada tahun 2025:

Gambar 1.7
Realisasi Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun 2025



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah , 2026

Belanja operasi merupakan jenis belanja yang digunakan untuk kegiatan rutin pemerintahan, seperti pembayaran gaji pegawai, pemeliharaan kantor, dan kebutuhan operasional lainnya. Proporsi yang besar (83,68%) dari total belanja daerah menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran dialokasikan untuk membiayai kegiatan rutin penyelenggaraan pemerintahan.

Belanja modal adalah jenis belanja yang digunakan untuk investasi jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, gedung), pengadaan peralatan, dan proyek-proyek strategis lainnya. Proporsi yang lebih kecil (16,29%) dari total belanja daerah menunjukkan alokasi untuk investasi yang lebih sedikit dibandingkan dengan belanja operasi.

Belanja tidak terduga dialokasikan untuk menghadapi kejadian-kejadian yang tidak terduga, seperti bencana alam atau situasi darurat lainnya. Proporsi yang sangat kecil (0,005%) menunjukkan bahwa alokasi untuk jenis belanja ini sangat minim,

yang mungkin mengindikasikan bahwa daerah Tarakan jarang mengalami kejadian yang tidak terduga.

Belanja transfer dialokasikan untuk membantu pemerintah daerah lain yang terdampak bencana alam pada Provinsi Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan komponen utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pelayanan publik secara berkelanjutan. Belanja ini bersifat rutin dan berkesinambungan, karena diperlukan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, serta menjaga keberlangsungan operasional perangkat daerah.

Belanja Operasi meliputi belanja pegawai yang digunakan untuk memenuhi hak keuangan aparatur pemerintah daerah, termasuk gaji, tunjangan, dan kewajiban iuran jaminan sosial; belanja barang dan jasa yang dimanfaatkan dalam menunjang kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat; belanja hibah yang diberikan kepada lembaga, organisasi, dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; serta belanja bantuan sosial yang diarahkan untuk membantu masyarakat yang mengalami risiko sosial atau kondisi tertentu. Selain itu, Belanja Operasi juga mencakup belanja pemeliharaan yang bertujuan menjaga dan mempertahankan fungsi aset daerah agar tetap dapat digunakan secara optimal.

Pengelolaan Belanja Operasi dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, sehingga alokasi anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan

secara tepat sasaran dalam rangka mendukung kinerja pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berikut ini rincian Belanja Operasi Daerah Kota Tarakan Tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.24
Rincian Belanja Operasi Kota Tarakan Tahun 2025

Kode	Belanja Operasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
5.1	Belanja Operasi	1.010.482.137.654,04	911.268.083.540,48	90,18
5.1.01	Belanja Pegawai	533.590.810.026,64	477.784.660.814,00	89,54
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	354.237.561.511,33	316.166.217.510,98	89,25
5.1.05	Belanja Hibah	118.130.700.416,07	112.985.497.671,52	95,64
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.523.065.700,00	4.331.707.543,98	95,76

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 2026

Realisasi belanja pegawai mencapai 89,54% dari target yang telah ditetapkan. Belanja pegawai merupakan komponen terbesar dalam belanja operasi, sehingga realisasi yang cukup tinggi ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai. Penyebab tidak tercapainya adalah mutasi atau perpindahan pegawai, pengangkatan atau pemberhentian pegawai, kenaikan gaji atau tunjangan, perubahan peraturan terkait gaji dan tunjangan, dan terjadinya efisiensi dan penghematan anggaran.

Realisasi belanja barang dan jasa yang mencapai 89,25 persen dari target menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran telah dialokasikan untuk pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan dalam rencana kerja pemerintah daerah yang mengakibatkan beberapa kegiatan yang membutuhkan

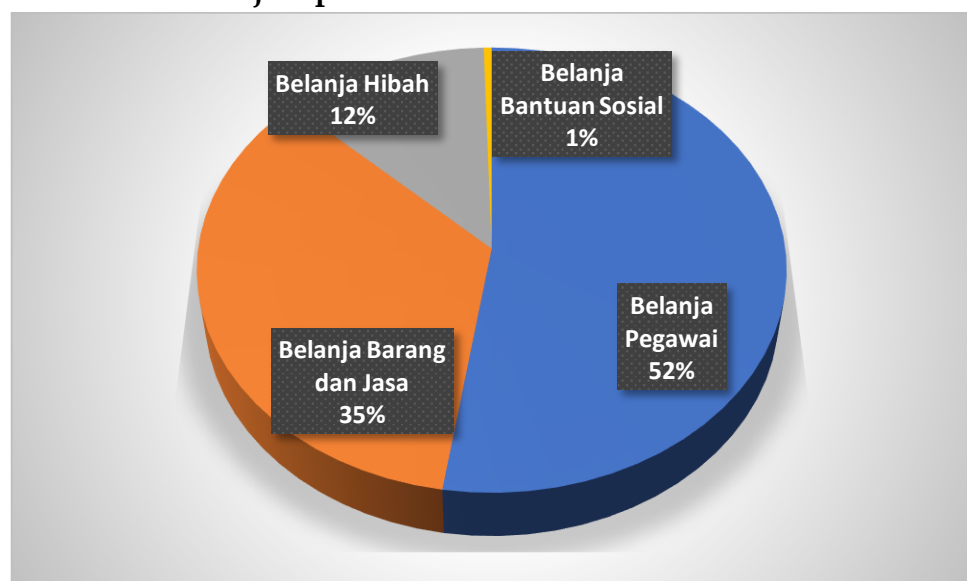
belanja barang dan jasa dibatalkan atau ditunda dan terjadinya perubahan harga.

Realisasi belanja hibah mencapai 95,64% dari target. Ini merupakan realisasi tertinggi dibandingkan kategori belanja lainnya, yang menunjukkan bahwa penyerapan anggaran untuk belanja hibah sangat baik. Penyebab tidak targetnya adalah proses penyaluran hibah mengalami keterlambatan yang diakibatkan oleh masalah administrasi, verifikasi data, atau kendala teknis lainnya.

Realisasi belanja bantuan sosial mencapai 95,76% dari target. Realisasi yang tinggi ini menunjukkan bahwa program-program bantuan sosial berjalan dengan baik dan penyerapan anggaran dilakukan dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan data penerima yang sudah tidak memenuhi syarat.

Berikut adalah grafik realisasi Belanja Operasi Kota Tarakan pada tahun 2025:

Gambar 1.8
Realisasi Belanja Operasi Kota Tarakan Tahun 2025



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah , 2026

Proporsi belanja pegawai yang paling besar (52%) menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran belanja operasi dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai. Hal ini umum terjadi di sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia, di mana belanja pegawai menjadi komponen terbesar dalam APBD.

Proporsi belanja barang dan jasa yang cukup besar (35%) menunjukkan bahwa pemerintah Kota Tarakan juga mengalokasikan anggaran yang besar untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Belanja ini penting untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Alokasi anggaran untuk belanja hibah sebesar 12% menunjukkan bahwa pemerintah Kota Tarakan berpartisipasi dalam mendukung program atau kegiatan yang *целевой* nya bermanfaat bagi masyarakat atau daerah lain. Sementara Alokasi anggaran untuk belanja bantuan sosial yang hanya 1% dari total belanja operasi menunjukkan bahwa kemungkinan besar program-program bantuan sosial di kota Tarakan tidak didanai secara langsung melalui belanja operasi.

Belanja Modal

Belanja Modal merupakan salah satu instrumen strategis dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Melalui alokasi belanja modal yang terencana dan tepat sasaran, Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik, serta penguatan aset daerah guna menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pelaksanaan Belanja Modal memberikan manfaat yang signifikan, antara lain dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik yang memadai, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui investasi pada sektor-sektor produktif yang berpotensi menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah, serta memperkuat daya saing daerah dalam mendukung iklim investasi dan pembangunan jangka panjang.

Pendanaan Belanja Modal bersumber dari berbagai komponen pendapatan daerah, antara lain Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber pendapatan sah lainnya; dana transfer dari pemerintah pusat, yang meliputi Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional; serta sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pinjaman daerah apabila diperlukan untuk mendukung pelaksanaan proyek-proyek strategis daerah.

Pengelolaan Belanja Modal dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan akuntabilitas.

Berikut ini rincian Belanja Modal Daerah Kota Tarakan Tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.25
Rincian Belanja Modal Kota Tarakan Tahun 2025

Kode	Belanja Modal	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
5.2	Belanja Modal	200.465.515.149,83	177.340.280.958,29	88,46
5.2.01	Belanja Modal Tanah	10.372.617.540,00	8.941.551.472,00	86,20
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.771.575.835,31	28.765.553.783,00	65,71

Kode	Belanja Modal	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.329.377.009,23	34.240.309.071,45	94,24
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	104.163.849.251,29	99.903.597.937,84	95,91
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	133.734.600,00	28.100.000,00	21,01
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	5.694.360.914,00	5.461.168.694,00	95,90

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah , 2026

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya merupakan pencapaian terendah dari seluruh komponen belanja modal, hal ini disebabkan oleh masalah dalam proses perencanaan dan pengadaan. Oleh karena itu diperlukan strategi yang tepat mengatasi masalah tersebut.

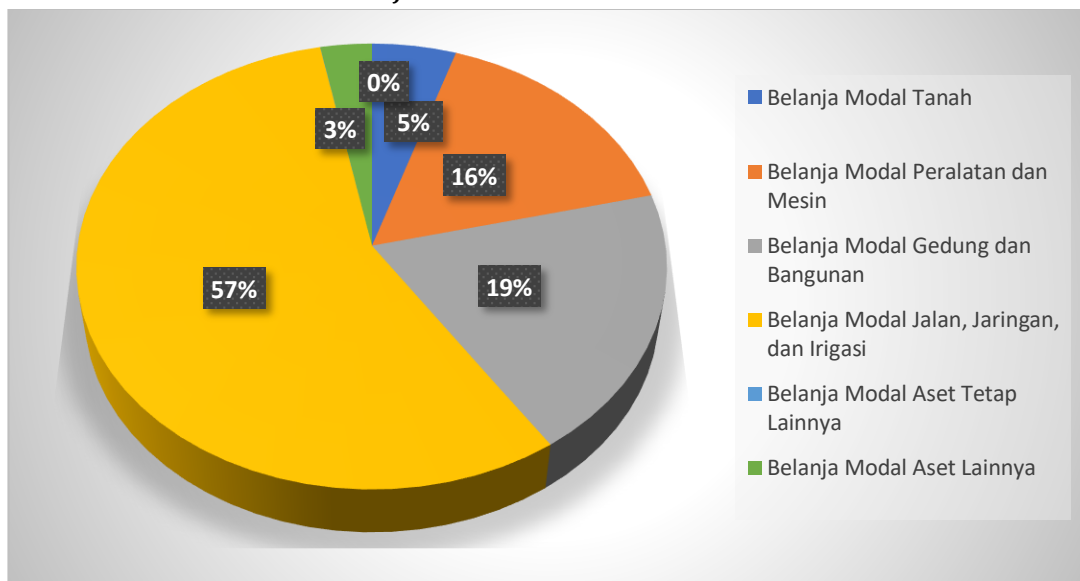
Capaian Belanja Modal Tanah cukup baik sebesar 86,20% yang terealisasi, hal ini dipengaruhi oleh keterlambatan pengadaan atau efisiensi anggaran. Sedangkan capaian Belanja Modal Peralatan dan Mesin kurang baik atau jauh dibawah target yaitu hanya sekitar 65,71% anggaran yang belum terealisasi, hal ini disebabkan oleh keterlambatan pengadaan atau efisiensi anggaran. Capaian Belanja Modal Gedung dan Bangunan sangat baik yaitu 94,24% dari target yang menunjukkan bahwa proyek pembangunan berjalan sesuai rencana dengan sedikit deviasi.

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi merupakan pencapaian tertinggi dalam realisasi anggaran yaitu 95,91%, menandakan proyek infrastruktur berjalan sangat baik dan sesuai jadwal. Secara keseluruhan, belanja modal tahun 2024 telah berjalan efektif dan mendekati target yang ditetapkan. Perlu fokus

pada percepatan pengadaan tanah agar dapat mencapai realisasi yang lebih optimal.

Berikut adalah grafik realisasi Belanja Modal Kota Tarakan pada tahun 2025:

Gambar 1.9
Realisasi Belanja Modal Kota Tarakan Tahun 2025



Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi (57%) hal ini merupakan proporsi terbesar dari belanja modal, menunjukkan fokus utama pada pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jaringan, dan irigasi di kota Tarakan. Belanja Modal Gedung dan Bangunan (19%), belanja ini dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan gedung dan bangunan, untuk fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, atau kantor pemerintahan. Belanja Modal Peralatan dan Mesin (16%), hal ini menunjukkan investasi dalam pengadaan peralatan dan mesin, yang bisa digunakan di berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, atau pekerjaan umum. Sementara Belanja Modal Tanah (5%) dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (0,02%) sedang porsi Belanja Modal Aset Lainnya 3%.

Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga (BTT) merupakan salah satu komponen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk membiayai kebutuhan mendesak dan keadaan darurat yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya serta tidak dapat ditunda penanganannya. Penyediaan Belanja Tidak Terduga dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas kepada Pemerintah Daerah dalam merespons secara cepat dan tepat berbagai kondisi luar biasa yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan, sosial, dan ekonomi daerah.

Penganggaran dan penggunaan Belanja Tidak Terduga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Ketentuan tersebut menjadi dasar dalam penetapan kriteria, mekanisme penggunaan, serta pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga dalam pengelolaan keuangan daerah.

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menanggulangi keadaan darurat, seperti bencana alam, wabah penyakit, dan kondisi lain yang membahayakan keselamatan masyarakat; menangani krisis sosial dan ekonomi yang terjadi secara tiba-tiba; serta membiayai kebutuhan mendesak lainnya yang belum teranggarkan dalam APBD awal dan memerlukan penanganan segera. Penggunaan BTT hanya dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria tidak terduga, bersifat darurat dan mendesak, serta tidak dapat ditunda.

Mekanisme penggunaan Belanja Tidak Terduga dilaksanakan melalui pengajuan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait, penetapan oleh Kepala Daerah sesuai kewenangan setelah melalui pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, serta pencairan dan pencatatan anggaran sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Seluruh penggunaan Belanja Tidak Terduga dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel serta dicatat dalam laporan keuangan daerah.

Berikut ini rincian Belanja Tidak Terduga (BTT) Daerah Kota Tarakan Tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.26
Rincian Belanja Tidak Terduga (BTT) Kota Tarakan Tahun 2025

Kode	Belanja Tidak Terduga	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
5.3	Belanja Tidak Terduga	4.700.000.000,00	50.038.000,00	1,06
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.700.000.000,00	50.038.000,00	1,06

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 2026

Dari total anggaran Rp4,7 miliar, realisasi penggunaan BTT hanya sebesar Rp50,03 juta atau 1,06% dari total anggaran yang dialokasikan. Serapan anggaran masih sangat rendah tersebut sehingga mayoritas anggaran belum digunakan, menyisakan lebih dari 98% dari total anggaran. Hal ini diakibatkan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang bertanggung jawab atas pengelolaan Belanja Tidak Terduga mungkin belum mengajukan kebutuhan atau masih menunggu situasi mendesak.

Dampak Rendahnya Realisasi Belanja Tidak Terduga adalah:

1. Dampak Positif:

Jika realisasi rendah karena tidak ada keadaan darurat, maka itu berarti daerah Tarakan tidak mengalami kejadian buruk yang membutuhkan dana tak terduga. Anggaran yang tidak digunakan bisa dialihkan untuk kepentingan lain dalam APBD Perubahan.

2. Dampak Negatif:

Jika ada kebutuhan mendesak tetapi anggaran sulit dicairkan, ini bisa menghambat respons cepat dalam menangani situasi darurat. Bisa menjadi indikator bahwa sistem pencairan dana darurat tidak cukup efektif.

Pembiayaan

Pengelolaan pembiayaan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen keuangan daerah dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Pembiayaan daerah diarahkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah, serta mengelola kebutuhan pendanaan secara terencana, terukur, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pembiayaan daerah dilakukan melalui pengelolaan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, termasuk pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan yang sah guna menjaga stabilitas APBD. Dalam pengelolaannya, Pemerintah Daerah senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta risiko jangka panjang yang mungkin timbul.

Melalui pengelolaan pembiayaan daerah yang prudent dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah diharapkan memiliki fleksibilitas fiskal yang memadai dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan prioritas pembangunan, tanpa mengurangi kesehatan keuangan daerah di masa yang akan datang.

Secara umum, realisasi penerimaan pembiayaan daerah yang terdiri atas Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kota Tarakan, merupakan sumber pembiayaan yang dihasilkan dari selisih antara pendapatan dan belanja daerah yang tidak terpakai pada tahun anggaran sebelumnya. SILPA ini dapat digunakan untuk mendanai kekurangan pembiayaan dalam anggaran tahun berjalan, baik untuk kegiatan pembangunan maupun kegiatan operasional yang belum terakomodasi dalam anggaran.

SILPA merupakan indikator efisiensi dalam pengelolaan anggaran, yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola pendapatan dan belanja dengan baik sehingga sebagian anggaran dapat dihemat. Selain itu, penerimaan SILPA ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada sumber pembiayaan lain, seperti pinjaman atau penerbitan surat utang.

Namun, meskipun SILPA memberikan fleksibilitas finansial, pemerintah daerah harus tetap berhati-hati dalam penggunaannya. SILPA yang digunakan secara berlebihan tanpa perencanaan yang matang dapat menyebabkan ketergantungan pada dana sisa anggaran, sementara dana tersebut juga harus dipastikan dapat digunakan secara efektif dan produktif untuk mendukung program-program prioritas yang mendesak. Dengan demikian, pengelolaan SILPA yang tepat dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah, mendukung keberlanjutan pembangunan, dan

memperkuat stabilitas fiskal Kota Tarakan. Berikut rincian dari pembiayaan daerah Kota Tarakan tahun 2024.

Tabel 1.27
Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025

Kode	Pembiayaan Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Surplus/Defisit	(39.843.132.435,77)	36.718.890.248,05	(92,15)
	PEMBIAYAAN			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	51.119.851.910,77	51.119.851.910,77	100,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	51.119.851.910,77	51.119.851.910,77	100,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	11.276.719.475,00	9.660.501.625,00	85,66
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	11.276.719.475,00	9.660.501.625,00	85,66
	Pembiayaan Netto	39.843.132.435,77	41.459.350.285,77	104,05
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahim Berkenaan (SILPA)	0,00	78.178.240.533,82	0,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah , 2026

Pemerintah daerah Kota Tarakan memiliki kelebihan anggaran sebesar Rp 78,18 miliar yang tidak terpakai dalam tahun anggaran berjalan. Ini bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti serapan realisasi belanja yang lebih rendah dari target dan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Untuk Tahun berikutnya perlu adanya perencanaan anggaran yang lebih akurat, jika SILPA terus meningkat setiap tahun, artinya ada perencanaan anggaran yang perlu disesuaikan agar lebih realistis.

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, perencanaan pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan juga bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, pengoptimalan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya. Karena itu disusun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di bidang perencanaan, diamanatkan juga bahwa Pemerintahan Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini memiliki makna bahwa Pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka pembangunan Nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus bersinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan Nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara.

Pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan rencana sebagai permulaan dari siklus perencanaan pembangunan. Berdasarkan Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pada Tanggal 27 November 2024 Kota Tarakan telah melaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota serentak. Berdasarkan hasil pilkada, ditetapkan pasangan dr. H. Khairul, M.Kes dan Ibnu Saud Is sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan Periode 2025-2029 yang secara resmi dilantik oleh Presiden Republik Indonesia pada Kamis, 20 Februari 2025. Prosesi pelantikan berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, bersamaan dengan pelantikan 961 kepala daerah lainnya dari seluruh Indonesia, yang terdiri dari gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih berkewajiban menyusun RPJMD dan menetapkan dalam bentuk Perda paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik, Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Dengan demikian, visi dan misi serta program prioritas kepala daerah terpilih menjiwai seluruh muatan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 dan harus dioperasionalkan oleh seluruh perangkat daerah sesuai kewenangannya.

Dalam penyusunan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029, Pemerintah Kota Tarakan menerapkan beberapa pendekatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pendekatan perencanaan pembangunan Daerah yang dimaksud, meliputi:

1. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
3. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menterjemahkan visi dan misi kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional.

RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 juga memperhatikan pemenuhan pendekatan substansi penyusunan dokumen perencanaan, antara lain:

1. Pendekatan Holistik-Tematik: dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
2. Pendekatan Integratif: dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
3. Pendekatan Spasial: dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Penyusunan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 merupakan rangkaian yang berkesinambungan, mulai dari tahap persiapan sampai dengan penetapan Perda tentang RPJMD. Pada tahap persiapan telah dilakukan penyusunan Rancangan teknokratik RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029, sesuai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Hasil dari Rancangan Teknokratik RPJMD menjadi salah satu input bagi penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Selanjutnya, Rancangan Awal disusun dan disempurnakan melalui hasil konsultasi publik, pembahasan dan kesepakatan dengan DPRD Kota Tarakan serta hasil konsultasi ke Gubernur Kalimantan Utara.

Rancangan Awal yang telah disempurnakan selanjutnya menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Hasil dari penyempurnaan Renstra PD menjadi rancangan Renstra menjadi masukan untuk perumusan Rancangan RPJMD dan siap untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD. Selanjutnya Hasil musrenbang RPJMD digunakan untuk penyempurnaan menjadi rancangan Akhir RPJMD. Rancangan Akhir RPJMD selanjutnya diajukan ke DPRD untuk dibahas dan disetujui menjadi perda RPJMD. Setelah disetujui, maka Ranperda tentang RPJMD dievaluasi oleh Gubernur. Hasil evaluasi Gubernur menjadi dasar penyempurnaan Ranperda tentang RPJMD, yang selanjutnya ditetapkan dengan Perda tentang RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029 menjadi dokumen yang sangat strategis, yang akan digunakan sebagai:

1. Media untuk mengimplementasikan janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat.
2. Penjabaran pelaksanaan RPJPD Kota Tarakan Tahun 2025-2045 periode/tahap pertama.
3. Pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun.
4. Pedoman penyusunan rencana kerja tahunan (RKPD) Kota Tarakan.
5. Instrumen pengendalian bagi satuan pengawas internal (SPI) dan Bappeda.
6. Instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.
7. Pedoman penilaian keberhasilan Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan urusan Pemerintahan Daerah yang dimiliki.

Selanjutnya, RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 yang disusun akan menjadi dasar bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategik di RPJMD dengan perencanaan operasional di perangkat daerah, dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Kota Tarakan.

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan, serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan maupun tantangan yang dihadapi Kota Tarakan meliputi permasalahan dan tantangan terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat; pelayanan umum seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur wilayah, pemerintahan; keamanan wilayah; lingkungan hidup yang berkelanjutan; serta daya saing ekonomi daerah, sehingga diperlukan skala prioritas penanganan permasalahan. Perumusan permasalahan dilakukan dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan hasil analisis gambaran umum daerah.

1) Aspek Kesejahteraan Masyarakat

- Pertumbuhan ekonomi yang walaupun tumbuh 5,71% ditahun 2024; lebih baik dari pertumbuhan ekonomi nasional dan kaltara, namun belum mampu mengembalikan Tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi di tahun 2018 yang tumbuh 7,50% dan 2019 yang tumbuh 7,68%.
- PDRB perkapita Kota Tarakan masih perlu untuk ditingkatkan.

- Indeks gini Kota Tarakan walaupun dalam kategori rendah, namun masih terus harus diturunkan agar kesenjangan pendapatan penduduk dapat diperkecil.
- Penduduk miskin dan penduduk miskin ekstrem kota Tarakan belum memenuhi target capaian persentase kemiskinan yang diinginkan yaitu 5% dan 0% ditahun 2024.
- Indeks Pembangunan Manusia termasuk kategori tinggi (78,03 di tahun 2024), namun indeks Pendidikan dan indeks pengeluaran perkapita belum memberikan daya ungkit yang besar pada peningkatan IPM yang di targetkan.
- Laju inflasi Kota Tarakan telah dapat dikendalikan rendah dan stabil di angka $2,5 \pm 1$ di tahun 2024, namun sebagai kota yang bukan penghasil, Kota Tarakan rentan akan kelancaran distribusi pasokan bahan pangan.
- Rata-rata lama sekolah di Kota Tarakan masih sebesar 10,37 Tahun pada tahun 2024, yang artinya bahwa penduduk yang berusia 25 Tahun ke atas dalam menjalani Pendidikan formal pada tahun 2024 setara dengan kelas 1 SMA.
- Pravelensi stunting Kota Tarakan, walaupun sudah mampu menurunkan Tingkat pravelensi stunting sebesar 14,8 namun dirasakan sinergitas dan kolaborasi antar stakeholder belum optimal.
- Angka pengangguran Kota Tarakan masih di atas provinsi Kaltara yaitu 5,11persen ditahun 2024.
- Gedung kesenian yang khusus untuk pegelaran seni belum ada.
- Rendahnya persentase kelompok kesenian yang aktif.
- Gedung olahraga sudah memadai, namun lapangan olahraga masyarakat masih sangat minim, seperti lapangan sepak bola.

2) Aspek Pelayanan Umum

a) Urusan Pendidikan

- Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dalam 5 tahun terakhir cakupannya dibawah 30%.
- Rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) bagi penduduk usia 13-15 tahun.

b) Urusan Kesehatan

- Belum optimalnya penanganan dan pelayanan kesehatan terhadap kematian bayi, balita, dan ibu melahirkan di Kota Tarakan. Hal ini ditandai dengan peningkatan kasus kematian bayi di tahun 2022-2024.
- Kinerja pelayanan penderita hipertensi masih rendah.
- Belum optimalnya pelayanan Kesehatan pada penderita Diabetes Militus, Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ).

c) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Belum optimalnya proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap.
- Belum optimalnya kapasitas drainase dalam menghadapi hujan dengan kapasitas deras.
- Overloaded TPA Aki Balak dalam menampung kapasitas sampah Kota Tarakan.
- Masih ada masyarakat yang kesulitan akses sanitasi layak dan Kota Tarakan yang didominasi wilayah pesisir Pantai masih sulit menaikkan capaian akses sanitasi aman.

d) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- Kawasan kumuh di Kota Tarakan masih relatif luas yang didominasi oleh infastruk wilayah yang tidak memadai. Untuk itu pengurangan Kawasan kumuh masih perlu

intervensi kebijakan secara bertahap dan berkelanjutan.

➤ Jumlah rumah tidak layak huni masih relatif banyak.

e) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

➤ Pelanggaran K3 dan Pelanggaran Perda masih terjadi.

➤ Potensi tidak terpenuhinya tingkat waktu tanggap daerah layanan manajemen kebakaran karena Lokasi PMK yang belum mewakili disemua wilayah kecamatan.

f) Urusan Sosial

➤ Belum optimalnya layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditandai dengan belum optimalnya operator data DTKS di tingkat kelurahan setiap triwulan.

g) Urusan Tenaga Kerja

➤ Rasio pencari kerja yang ditempatkan (atau serapan tenaga kerja) tahun 2019-2024 cenderung rendah.

h) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

➤ Proporsi kursi yang diduduki Perempuan di DPRD belum 20%.

➤ Jumlah kejadian KDRT selama 5 tahun terakhir cenderung tinggi.

➤ Masih adanya kasus kekerasan pada perempuan dan anak.

i) Urusan Pangan

➤ Kebutuhan pokok pangan masih tergantung pada daerah luar pulau Tarakan.

j) Urusan Lingkungan Hidup

➤ Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Tarakan pada tahun 2024 masih dalam kategori sedang, sedangkan tahun 2021 IKLH Tarakan sudah masuk kategori baik.

- Persentase timbunan sampah cenderung meningkat, Hal ini menunjukkan belum optimalnya pengelolaan sampah di tingkat tingkat kelurahan. Armada pengangkut sampah yang tidak dapat mengangkut seluruh sampah dan total timbunan sampah melebihi kapasitas TPS dan TPA. TPA Aki Balak over kapasitas, selain itu belum dilakukan pemrosesan akhir sampah di TPA.
- k) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - Angka kepemilikan dokumen kependudukan setiap tahunnya meningkat baik KK, KTPel maupun KIA. Namun pada tahun 2024 untuk penduduk yang berKTP Kota Tarakan belum mencapai 100%.
 - Meskipun jumlah penduduk yang nemiliki akta kelahiran terus meningkat dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) namun capaian masih banyak penduduk yang belum memiliki akta kelahiran yang perlu segera untuk dilayani.
- l) Urusan Pertanahan
 - Belum optimalnya pengelolaan asset tanah di Kota Tarakan yang ditandai dengan pensertifikatan lahan yang dimiliki oleh pemerintah Kota Tarakan.
- m) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - Masih belum optimalnya posyandu dalam meningkatkan jumlah sasaran pelayanan pada balita.
 - Pendampingan keluarga stunting yang belum optimal.
- n) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - Persentase pemakaian alat kontrasepsi pada tahun 2024 masih rendah, hal ini menunjukkan pengendalian kelahiran penduduk belum optimal, sehingga perlu dilakukan peningkatan pemberdayaan dan ketahanan keluarga.

o) Urusan Perhubungan

- Belum optimalnya pelayanan transportasi yang terintegrasi, kinerja pelayanan angkutan umum, pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan, dan pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi. Tingginya kebutuhan transportasi moda darat dan tingkat kesadaran dari masyarakat dalam berlalu lintas masih rendah.

p) Urusan Komunikasi dan Informatika

- Belum maksimalnya penyelenggaraan informasi publik yang ditandai dengan pengumpulan data dari produsen data yang terlambat dari batas waktu, kurangnya kemitraan antara masyarakat dan pemerintah dalam mendiseminisasikan, serta data sektoral belum dimanfaatkan sebagai evaluasi Pembangunan.
- Belum tersedianya persandian antar perangkat daerah dan tingkat keamanan persandian belum kuat.
- Penyebarluasan informasi publik untuk mengakses informasi kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

q) Urusan Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah

- Pemberdayaan koperasi dan UMKM masih belum optimal, hal ini ditandai dengan rasio koperasi aktif yang masih rendah ditahun 2024.

r) Urusan Penanaman Modal

- Belum optimalnya realisasi investasi yang dimana realisasi PMA dan PMDN walaupun cenderung meningkat namun persentase kenaikan investasinya dibanding tahun sebelumnya cenderung menurun.

- Rasio ketepatan waktu perizinan masih sering terlambat dari target yang diakibatkan ketidaklengkapan syarat administrasi dan gangguan system informasi (OSS dan Si Cantik). Untuk itu sosialisasi, diseminasi kemudahan syarat administrasi dan skema pelayanan manual dirasa perlu untuk disiapkan.
- s) Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
 - Masih minimnya prestasi olahraga tingkat nasional dan internasional yang disebabkan oleh iklim pelatihan atlet belum terstruktur
 - Daya saing pemuda belum optimal yang ditunjukan oleh hanya 1 persen pemuda di Kota Tarakan yang merupakan wirausahawan.
- t) Urusan Statistik
 - Data yang ditampilkan di laman satu data tidak sepenuhnya ditemukan, banyak data yang kosong. Beberapa konfirmasi hasil analisis data sektoral yang tidak ditanggapi. Data sektoral dan publikasi statistik yang dihasilkan oleh produsen data belum seluruhnya terinput dalam portal data.
- u) Urusan Kebudayaan
 - Pengembangan potensi kebudayaan belum optimal. Belum memiliki gedung kesenian Proyek pembangunan pariwisata masih terus dilaksanakan pada tahap III.
 - Belum semua kekayaan budaya Kota Tarakan dilestarikan.
- v) Urusan Perpustakaan dan Kearsipan
 - Belum optimalnya pembangunan literasi Masyarakat, sarana dan prasarana belum optimal sesuai standar ditandai dengan kompetensi SDM perpustakaan masih terbatas serta

promosi layanan perpustakaan masih belum massif serta meningkatnya tren literasi secara daring dan sebaran perpustakaan masih kurang merata

- Jumlah pengunjung mulai membaik pasca pandemi covid-19, namun belum menyamai Tingkat kunjungan ke perpustakaan sebelum pandemi covid-19.
- Belum optimalnya pengelolaan arsip secara baku.

w) Urusan Pariwisata

- Jumlah kunjungan wisatawan cenderung meningkat dalam tiga tahun terakhir, namun lama kunjungan wisata masih dibawah 2 hari.
- Pengembangan sektor pariwisata yang belum optimal, area dengan fokus wisata yaitu Pantai Ratu Intan Amal yang juga banyak mengalami kendala sosial.
- Kondisi fasilitas Sarana dan Prasarana Pariwisata yang berkualitas pada tahun 2024 belum terpenuhi semua. Untuk menarik minat wisatawan.

x) Urusan Pertanian

- Rendahnya kapasitas pelaku usaha sektor pertanian yang ditandai dengan kurangnya sarana dan teknologi yang mendukung pertanian.
- Penurunan angka hasil komoditas sektor pertanian menjadikan problematika krusial dan faktor penyumbang inflasi beberapa tahun belakang ini pada tanaman (Pangan, Hortikultur, Perkebunan).
- Perkiraan akan terjadinya perang global, kekacauan cuaca dan iklim yang ekstrim, transformasi lahan tanam ke pemukiman, harus dimitigasi dalam rangka mengambil langkah untuk mengantisipasi kelangkaan bahan pangan.

y) Urusan Perdagangan

- Sektor perdagangan berkontribusi 5 terbesar dalam PDRB, tetapi laju pertumbuhan fluktuatif cenderung melambat.
- Masih rendahnya peminatan para pelaku usaha yang menginvasi pasar global (*export lokal end of produk*).

z) Urusan Perindustrian

- Masih rendahnya industri yang mengajukan ijin usaha industri dikarenakan kesadaran pelaku usaha untuk mengajukan permohonan;
- Masih banyaknya IKM dan produk IKM yang belum bersertifikasi.

aa) Urusan Kelautan dan Perikanan

- Pendapatan pelaku usaha perikanan masih rendah. Belum terintegrasinya rantai pemasaran produk perikanan dan kurangnya pengetahuan pembudidaya ikan dan pola pembinaan untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan bagi nelayan kurang sehingga produktivitas kurang belum optimalnya pemasaran produk
- Besarnya porsi biaya dan tingginya harga pakan, karena sebagian besar bahan baku pakan masih impor dan kenaikan harga ikan tidak seimbang dengan kenaikan harga pakan.
- Skala usaha pembudidaya ikan didominasi oleh pembudidaya skala kecil sehingga porsi biaya tetap yang dikeluarkan menjadi besar sehingga biaya produksi menjadi tidak efisien sedangkan akses untuk permodalan bagi pengembangan usaha perikanan budidaya terbatas berdampak pada daya saing produk rendah.

bb) Urusan Perencanaan

- Belum optimalnya konsistensi penjabaran dokumen perencanaan yang ditandai dengan koordinasi antar instansi masih kurang maksimal.
- Belum maksimalnya kualitas proses penyusunan dokumen perencanaan dan sinkronisasi penganggaran. Meskipun seluruh dokumen perencanaan telah disusun sesuai tahapan namun masih terdapat hasil rekomendasi pengendalian yang ditindaklanjuti.

cc) Urusan Penelitian dan Pengembangan

- Skor inovasi daerah Kota Tarakan masih dalam kategori cukup.

dd) Urusan Keuangan

- Pengelolaan pendapatan daerah belum optimal di mana kontribusi PAD terhadap pendapatan baru mencapai 15%.

ee) Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

- Rendahnya Indeks Profesionalitas ASN yang ditandai dengan penurunan persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan dalam 5 tahun terakhir.

ff) Urusan Pengawasan

- Belum optimalnya tindak lanjut temuan BPK yang ditandai dengan belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK.

gg) Urusan Sekretariat Dewan

- Belum optimalnya penyelenggaraan kinerja, tugas, dan fungsi DPRD yang ditandai dengan belum maksimalnya penyusunan dan pembahasan raperda.

hh) Urusan Sekretariat Daerah

- Maturitas UKPBJ belum optimal dan Standarisasi LPSE belum merata.

ii) Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol)

- Pembinaan masyarakat terhadap ideologi pancasila dan wasbang masih kurang.
- Presentase ormas yang terbina belum optimal.

Isu Strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan di daerah. Hal ini dikarenakan isu strategis memiliki dampak yang signifikan bagi daerah. Sebuah isu strategis memiliki karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah atau panjang, dan memiliki peranan dalam menentukan pencapaian tujuan pembangunan pemerintah daerah di masa mendatang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan melalui identifikasi berbagai isu internasional, nasional, dan regional. Isu strategis yang diambil oleh Pemerintah Kota Tarakan berasal dari permasalahan pembangunan yang diprioritaskan untuk diselesaikan maupun dari dunia internasional, nasional maupun regional. Berikut ini disajikan isu strategis daerah yang memiliki pengaruh pada 5 (lima) tahun mendatang.

Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber antara lain: (1) isu strategis dinamika internasional, nasional dan regional yang berpengaruh terhadap Kota Tarakan, (2) Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah jangka panjang Kota Tarakan, serta (3) Isu strategis yang bersumber dari analisis situasi dan kondisi pemerintahan umum saat ini serta kemungkinan di masa mendatang.

Setelah melakukan analisis dan kajian terhadap kondisi Kota Tarakan dari berbagai aspek pembangunan, maka dapat dirumuskan isu strategis sebagai bagian dari penyusunan RPJMD Kota Tarakan 2025-2029. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu dan arah kebijakan yang sudah disampaikan di atas, serta mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan, maka dapat diidentifikasi 5 (lima) isu strategis Kota Tarakan yang perlu mendapat prioritas penanganan dalam rencana pembangunan Kota Tarakan selama kurun waktu 5 tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Daya Saing SDM dan Inklusi Sosial.
2. Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Dasar
3. Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi
4. Penguatan Tata Kelola Pemerintah yang Adaptif dan Resonsif
5. Penciptaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana.

b. Visi Dan Misi Kepala Daerah

Visi pembangunan daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 adalah:

Terwujudnya Tarakan Sebagai Kota Cerdas yang Bertumpu pada Sektor Jasa, Perdagangan, Perikanan dan Kelautan, serta Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Maju Menuju Masyarakat Sejahtera.

Pernyataan visi Kota Tarakan 2019-2024 memiliki makna sebagai berikut:

Terwujudnya Tarakan sebagai **Kota Cerdas (Smart City)** menggambarkan komitmen untuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berbasis teknologi

informasi. Kota cerdas adalah kota yang memiliki kinerja baik dalam enam dimensi utama: ekonomi cerdas, mobilitas cerdas, lingkungan cerdas, masyarakat cerdas, kehidupan cerdas, dan pemerintahan cerdas, yang semuanya didukung oleh partisipasi warga yang aktif. (Giffinger *et al.* 2007). Artinya, Kota Tarakan akan diarahkan menjadi kota yang: Mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam tata kelola pemerintah, Meningkatkan efisiensi layanan publik, Mendorong partisipasi aktif masyarakat, dan Menyediakan solusi inovatif terhadap tantangan kota seperti transportasi, sampah, pendidikan, dan kesehatan. Kota cerdas tidak hanya berarti penggunaan teknologi digital dalam pelayanan publik, tetapi juga menciptakan sistem yang terintegrasi dalam bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, lingkungan, serta keamanan. Dengan pendekatan ini, pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien, sekaligus mendorong partisipasi aktif warga dalam pembangunan daerah.

Bertumpu pada **sektor jasa dan perdagangan** dimaknai dengan perekonomian Kota Tarakan dikembangkan melalui pelayanan jasa profesional dan kegiatan perdagangan antar daerah dan antar negara, fasilitasi iklim investasi dan kemudahan berusaha, dan peningkatan infrastruktur pasar, logistik, dan sistem distribusi barang.

Selanjutnya, bertumpu pada **sektor perikanan dan kelautan** dimaknai dengan perekonomian Kota Tarakan menekankan pada pemanfaatan potensi laut dan pesisir secara berkelanjutan dan modern, pengembangan sektor perikanan tangkap dan budidaya, dan meningkatkan nilai tambah hasil laut melalui industri pengolahan.

Adapun bertumpu pada sektor **ekonomi kreatif** dimaknai dengan perekonomian Kota Tarakan difokuskan pada mendorong tumbuhnya sektor kreatif berbasis inovasi, seni, budaya, dan teknologi, pengembangan UMKM kreatif seperti kuliner, fashion, desain, musik, dll, serta memberdayakan pemuda dan komunitas dalam menciptakan produk kreatif lokal.

Selanjutnya, **berdaya saing dan maju kelautan** dimaknai bahwa Berdaya Saing (*Competitive*) artinya, Kota Tarakan mampu bersaing dengan daerah lain dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, SDM, dan pelayanan publik. Adapun aspek yang mendukung daya saing Kota Tarakan antara lain SDM yang berkualitas, iklim investasi yang kondusif, produk unggulan lokal, infrastruktur digital dan fisik yang memadai. Sedangkan Maju (*Progressive*) mengandung arti bahwa Kota Tarakan mengalami perkembangan secara berkelanjutan di berbagai bidang, menuju standar kota modern. Ciri kota yang maju di konteks Tarakan adalah pemerintahan digital (*e-Government*), ekonomi tumbuh stabil, infrastruktur berkembang, masyarakat sejahtera dan inklusif. "Berdaya saing dan maju" bagi Kota Tarakan berarti menjadi kota modern yang mampu bersaing secara ekonomi dan pelayanan, sekaligus berkembang secara merata dengan memanfaatkan potensi daerah, teknologi, dan pemberdayaan masyarakat.

Keseluruhan upaya tersebut bermuara pada menuju **masyarakat yang sejahtera**, masyarakat sejahtera adalah kondisi dimana penduduk hidup dalam keadaan aman, damai, berkecukupan secara ekonomi, sehat, terdidik, dan memiliki akses terhadap layanan publik yang adil dan berkualitas. Frasa ini menandakan bahwa pemerintah Kota Tarakan sedang berproses

membangun sistem dan layanan yang bisa mengangkat taraf hidup masyarakat. Bukan hanya soal ekonomi, tapi juga kualitas hidup secara menyeluruh. Komponen utama menuju masyarakat sejahtera meliputi kesejahteraan ekonomi yang tergambar pada peningkatan pendapatan masyarakat melalui lapangan kerja, UMKM, dan kewirausahaan, harga kebutuhan pokok yang stabil dan terjangkau, angka kemiskinan, pengangguran turun; kesehatan yang baik melalui Akses layanan kesehatan yang mudah dan murah, program pencegahan penyakit dan gizi seimbang, infrastruktur kesehatan yang memadai; pendidikan berkualitas melalui pendidikan yang inklusif dan terjangkau bagi semua kalangan, peningkatan kualitas guru dan sarana belajar, pendidikan vokasi untuk mendorong kemandirian ekonomi; lingkungan layak huni melalui pemukiman yang sehat, bersih, dan tertata, Infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan listrik tersedia merata, ruang terbuka hijau untuk kualitas hidup masyarakat; keadilan sosial dan keamanan melalui layanan publik yang adil tanpa diskriminasi, jaminan sosial bagi masyarakat rentan, serta keamanan dan ketertiban yang terjaga.

Untuk mencapai visi diatas, maka perlu ditentukan beberapa misi, sehingga jelas apa saja yang akan dilakukan dalam jangka menengah yang kemudian dijabarkan dalam arah kebijakan, tujuan, strategi, program dan kegiatan. Untuk itu perlu diketahui lebih dahulu pengertian dari misi menurut ahli.

Misi pada dasarnya hanya bukan usaha formal untuk memperjelas apa yang dikehendaki, namun misi merupakan tahapan aksi yang akan dilaksanakan dari visi yang telah ada, guna mencapai suatu tujuan.

Berdasarkan dari visi yang telah dirumuskan dan dijelaskan sebelumnya, Kota Tarakan memiliki 5 (lima) misi pembangunan. Misi pembangunan ini adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah 2025-2029. Dalam misi (agenda) Pembangunan tersebut. Perumusan dan penjelasan misi RPJMD Kota Tarakan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing berarti membangun masyarakat yang memiliki pengetahuan, keterampilan, karakter, dan kesehatan yang baik sehingga mereka mampu bersaing secara aktif dalam dunia kerja, usaha, maupun kehidupan sosial.

Kota Tarakan sedang berkembang menuju kota cerdas (*smart city*) dan pusat ekonomi berbasis jasa, perdagangan, kelautan, dan ekonomi kreatif. Semua sektor ini butuh SDM yang siap pakai, inovatif, dan adaptif terhadap teknologi.

Fokus Utama Pengembangan SDM di Tarakan:

1. Pendidikan Berkualitas dan Merata, melalui Peningkatan mutu guru dan fasilitas Pendidikan, Pemerataan akses pendidikan sampai ke daerah pesisir dan pulau kecil, Dukungan terhadap pendidikan vokasi dan keterampilan kerja.
2. Pelatihan dan Keterampilan Kerja, melalui Balai latihan kerja (BLK) untuk pelatihan keahlian praktis: nelayan, UMKM, pariwisata, TIK, dll, Program magang industri dan kerja sama dengan dunia usaha, Sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.

3. Literasi Digital dan Teknologi, melalui Pelatihan digital untuk masyarakat umum, guru, pelaku usaha, dan ASN, Dukungan terhadap startup lokal dan inovator muda di bidang teknologi, Edukasi penggunaan teknologi untuk pertanian, perikanan, dan bisnis.
4. Kesehatan Masyarakat, melalui Akses layanan kesehatan yang baik sebagai dasar SDM yang produktif, Program gizi, sanitasi, dan pengendalian penyakit untuk anak dan usia kerja.
5. Karakter dan Soft Skill, melalui Penanaman nilai integritas, etos kerja, disiplin, dan semangat gotong royong, Pendidikan karakter di sekolah dan pelatihan kepemudaan.

Adapun dampaknya Bagi Tarakan adalah Meningkatnya kualitas tenaga kerja lokal yang bisa mengisi posisi strategis di sektor jasa dan industri, Tumbuhnya wirausaha muda dan pelaku UMKM kreatif, Berkurangnya ketergantungan pada tenaga kerja dari luar daerah, Terwujudnya masyarakat yang mandiri, kreatif, dan siap bersaing di era global.

Akhirnya Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing di Kota Tarakan adalah kunci utama pembangunan berkelanjutan, agar kota ini tidak hanya tumbuh secara fisik dan ekonomi, tetapi juga kuat dari sisi manusianya.

Dalam mewujudkan misi pertama pembangunan ini maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mempromosikan keadilan sosial agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama terhadap pemenuhan pelayanan kesehatan, gizi, pendidikan, perlindungan sosial, serta perlindungan dari kekerasan.

2. Kesehatan untuk seluruh masyarakat dapat ditandai dengan meningkatnya usia harapan hidup masyarakat, menurunnya angka kematian ibu, menurunnya prevalensi stunting, meningkatnya kemampuan manajemen tuberculosi, menurunnya tingkat kemiskinan, meningkatnya cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, meningkatnya angka penyandang disabilitas bekerja di sektor formal.
3. Pendidikan berkualitas yang merata dapat ditandai dengan meningkatnya angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, meningkatnya angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni (APM), literasi membaca, meningkatnya persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi,
4. Identitas budaya ditandai dengan menguatnya nilai-nilai budaya masyarakat Tarakan sehingga mempunyai fungsi sentral dan mendasar sebagai landasan utama pelaksanaan pembangunan.
5. Memantapkan ketahanan sosial dan keluarga.
6. Membangun keluarga dan masyarakat yang inklusif bagi semua individu tanpa memandang latar belakang, identitas, disabilitas, status, dan gender.
7. Gotong royong merupakan nilai luhur dan program pembangunan mewujudkan nilai tersebut dalam bentuk kerjasama dan saling mendukung. Gotong royong sangat penting bagi masyarakat terutama untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan kelurahan.

8. Pemberdayaan masyarakat, peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha.
9. Peningkatan lingkungan yang inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya.
10. Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja, antara lain melalui penerapan *care economy*, penguatan norma keluarga, pelayanan ketenagakerjaan yang merata dan inklusif, pemanfaatan teknologi digital, dan peningkatan keterampilan.

2. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar yang handal.

Misi kedua ini mencerminkan upaya pemerintah Kota Tarakan untuk memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tapi merata hingga ke daerah pesisir, dan pulau-pulau kecil serta menyediakan infrastruktur dasar (seperti jalan, air bersih, listrik, sanitasi, pendidikan, dan kesehatan) secara merata dan berkualitas untuk semua masyarakat.

Adapun tujuan strategis dari misi kedua ini adalah untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah di Kota Tarakan, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar yang layak dan aman, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan kualitas hidup masyarakat, serta mewujudkan keadilan sosial melalui pembangunan yang inklusif.

Fokus Pembangunan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar:

1. Transportasi dan Akses Jalan, melalui pembangunan dan perbaikan jalan lingkungan, jalan penghubung antar kelurahan/kecamatan, peningkatan akses ke daerah pesisir, transportasi umum yang terintegrasi dan ramah lingkungan.
2. Listrik dan Energi, melalui penyediaan listrik yang merata, pengembangan energi alternatif (misalnya tenaga surya) untuk daerah yang sulit dijangkau.
3. Air Bersih dan Sanitasi, melalui pembangunan sistem distribusi air bersih ke permukiman padat penduduk dan daerah yang belum terlayani, dan pengelolaan limbah dan sanitasi yang sehat dan ramah lingkungan.
4. Kesehatan, melalui pembangunan dan pemerataan fasilitas kesehatan (puskesmas, klinik, rumah sakit), dan penyediaan tenaga medis dan layanan kesehatan yang terjangkau di seluruh wilayah.
5. Pendidikan, melalui penyediaan sekolah berkualitas di semua kecamatan, dan peningkatan fasilitas pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium, dan akses internet.
6. Digitalisasi dan Teknologi, melalui penguatan infrastruktur TIK untuk menunjang layanan publik digital (*smart city*), dan akses internet hingga ke daerah yang belum terjangkau.

Karena Tarakan terdiri dari wilayah daratan dan pesisir, pemerataan pembangunan sangat penting agar warga di wilayah terluar tidak tertinggal dalam hal akses dan layanan publik, pembangunan mendorong pertumbuhan ekonomi di semua wilayah, bukan hanya di pusat kota, serta menjadi fondasi kuat untuk mendukung Kota Tarakan sebagai kota cerdas dan maju.

“Meningkatkan pemerataan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar yang handal” di Kota Tarakan berarti membangun kota yang adil, inklusif, dan siap menghadapi tantangan masa depan, di mana setiap warga punya akses yang sama terhadap layanan dan fasilitas yang dibutuhkan untuk hidup sejahtera.

3. Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui dukungan kemudahan berusaha yang berkeadilan dan bertumpu pada sektor Jasa, perdagangan, Perikanan Kelautan, Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Kerakyatan (UMKM).

Misi ketiga ini menunjukkan arah strategis pembangunan ekonomi Kota Tarakan yang fokus pada mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara adil dan inklusif, dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berusaha, dan mengembangkan sektor-sektor unggulan yang memiliki potensi besar di wilayah Tarakan, serta memberdayakan pelaku ekonomi lokal, terutama UMKM dan masyarakat kecil agar ikut terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi daerah.

Tujuan Pembangunan Ekonomi ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Masyarakat, menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, dan mnumbuhkan pelaku usaha lokal yang tangguh dan berdaya saing, serta menjadikan Tarakan sebagai pusat ekonomi jasa dan perdagangan di wilayah Kalimantan Utara.

Misi ketiga ini akan dibangun melalui :

1. Kemudahan Berusaha yang Berkeadilan, melalui penyederhanaan izin usaha dan perizinan berbasis OSS (*Online Single Submission*), bantuan permodalan melalui koperasi, perbankan, dan program pemerintah, penyediaan ruang usaha yang merata (pasar, kios UMKM, area kuliner, dll), serta penguatan regulasi yang tidak diskriminatif, baik untuk usaha besar maupun kecil.
2. Pengembangan Sektor Unggulan Ekonomi Daerah, disektor jasa diharapkan dapat mewujudkan Tarakan sebagai pusat layanan pendidikan, kesehatan, transportasi, dan logistik di Kalimantan Utara, serta pengembangan jasa keuangan, transportasi laut dan udara, serta pariwisata. Di sektor perdagangan dilakukan melalui optimalisasi potensi perdagangan antar pulau dan ekspor ke negara tetangga (seperti Malaysia dan Brunei), pengembangan pasar modern dan tradisional, serta digitalisasi UMKM agar bisa bersaing di pasar online. Di sektor perikanan dan kelautan dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya laut yang melimpah secara berkelanjutan, dukungan terhadap nelayan dalam bentuk alat tangkap modern, pelatihan, dan akses pasar, serta pengembangan industri pengolahan hasil laut. Di sektor ekonomi kreatif dilakukan melalui pemberdayaan anak muda dan komunitas lokal di bidang kuliner, fashion, seni, musik, dan digital, pelatihan dan promosi produk kreatif lokal, serta festival dan kegiatan budaya sebagai daya tarik ekonomi. Di sektor ekonomi kerakyatan/UMKM dilakukan melalui penguatan koperasi dan usaha kecil sebagai tulang punggung ekonomi lokal, akses pelatihan,

promosi, dan pembiayaan untuk UMKM, serta penyediaan ruang usaha strategis dan pembinaan secara berkelanjutan.

Tarakan adalah kota strategis di kawasan perbatasan dengan potensi besar sebagai penghubung perdagangan regional. Dengan sumber daya laut dan budaya lokal yang kaya, pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan dan sektor jasa menjadi fondasi untuk menciptakan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Meningkatkan pembangunan ekonomi di Tarakan artinya memastikan semua lapisan masyarakat punya peluang untuk maju, usaha bisa tumbuh dengan mudah, dan sektor-sektor unggulan bisa dioptimalkan secara berkelanjutan, sehingga perekonomian kota semakin kuat, mandiri, dan merata.

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif serta menjaga stabilitas ketertiban dan ketentraman kota.

Misi keempat ini menggambarkan komitmen Pemerintah Kota Tarakan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang modern, terbuka, cepat tanggap, dan mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman serta kebutuhan masyarakat, dan menjaga kondisi kota yang aman, tertib, dan nyaman, sebagai fondasi penting untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan warga.

Tujuan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menyediakan layanan publik yang efektif, efisien, dan berbasis teknologi. menciptakan suasana kota yang kondusif dan damai, bebas dari konflik sosial

maupun kriminalitas, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengawasan.

Misi keempat ini akan dibangun melalui :

1. Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Responsif.
Pemerintah yang adaptif tergambar dimana pemerintah harus mampu menyesuaikan kebijakan, program, dan sistem kerja dengan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang berkembang, mendorong transformasi digital (*smart governance*) untuk meningkatkan efisiensi layanan. Responsif ditandai dengan pemerintah dengan cepat menanggapi keluhan, aspirasi, dan kebutuhan Masyarakat, optimalisasi layanan pengaduan online, call center, dan aplikasi layanan public, serta tanggap terhadap bencana, konflik sosial, serta situasi darurat lainnya.
2. Menjaga Stabilitas, Ketertiban, dan Ketentraman Kota
Menjaga stabilitas ditandai dengan terjaminnya kondisi sosial-politik daerah yang aman dan terkendali, terpeliharanya hubungan baik antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat.
Menjaga ketertiban dan ketentraman ditandai dengan penegakan peraturan daerah secara adil dan konsisten, pengelolaan lalu lintas, parkir, pasar, dan ruang publik agar tertib, paya preventif terhadap gangguan keamanan dan sosial, penguatan sistem keamanan lingkungan (siskamling, CCTV, patroli), pendidikan warga tentang pentingnya toleransi, hidup rukun, dan kepedulian sosial.

5. *Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh menghadapi bencana.*

Misi kelima ini mencerminkan tekad Pemerintah Kota Tarakan untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan mengelola sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan, serta Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan infrastruktur kota terhadap berbagai potensi bencana, baik bencana alam maupun non-alam.

Tujuan dari Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh menghadapi bencana adalah untuk mencegah kerusakan lingkungan dan menurunkan risiko bencana, meningkatkan kualitas hidup masyarakat lewat lingkungan yang sehat dan aman, memastikan pembangunan berjalan tanpa merusak ekosistem, dan membangun kota yang tangguh, berdaya tahan, dan siap menghadapi perubahan iklim.

Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh terhadap bencana di Kota Tarakan berarti menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam, sambil memastikan kesiapan seluruh elemen kota menghadapi potensi bencana secara sistematis dan berkelanjutan.

**c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen
Perencanaan Jangka Menengah**

Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah adalah serangkaian kebijakan dan langkah-langkah strategis yang disusun untuk mencapai tujuan pembangunan dalam periode waktu tertentu, umumnya lima tahun, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD merupakan dokumen penting yang

mengarahkan semua aktivitas pembangunan di tingkat daerah dengan memperhatikan visi, misi, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Pembangunan daerah yang efektif dan terukur memerlukan perencanaan yang matang, serta pelaksanaan yang terkoordinasi dan terarah. Program-program yang terdapat dalam RPJMD harus berfokus pada pencapaian hasil yang spesifik, terukur, dan berdampak positif bagi masyarakat. Berikut adalah uraian mengenai program-program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah.

Tabel 1.28
Program Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	
1	Dinas Pendidikan	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Pengelolaan Pendidikan
		3	Program Pengembangan Kurikulum
		4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
		5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
		6	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra
2	Dinas Kesehatan	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
		4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
		5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	a. RSUKT Kota Tarakan	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	
	b. Puskesmas Karang Rejo	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	c. Puskesmas Juata	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	d. Puskesmas Sebengkok	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	e. Puskesmas Pantai Amal	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	f. Puskesmas Gunung Lingkas	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	g. Puskesmas Mamburungan	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	h. Laboratorium Kesehatan	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
		3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		4	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
		5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
		7	Program Penataan Bangunan Gedung
		8	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
		9	Program Penyelenggaraan Jalan
		10	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
		11	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Pengembangan Perumahan
		3	Program Kawasan Permukiman
		4	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
		5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
		6	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
		7	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
		8	Program Penatagunaan Tanah
5	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
		3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
6	Badan Penanggulangan Bencana	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Penanggulangan Bencana
7	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Pemberdayaan Sosial
		3	Program Rehabilitasi Sosial
		4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	
		5	Program Penanganan Bencana
		6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
		7	Program Administrasi Pemerintahan Desa
		8	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
		3	Program Perlindungan Perempuan
		4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
		5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
		6	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
		7	Program Perlindungan Khusus Anak
		8	Program Pengendalian Penduduk
		9	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)
		10	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
9	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
		3	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		4	Program Penanganan Kerawanan Pangan
		5	Program Pengawasan Keamanan Pangan
		6	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
		7	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		8	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		9	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
		10	Program Perizinan Usaha Pertanian
		11	Program Penyuluhan Pertanian
10	Dinas Lingkungan Hidup	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
		3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	
		5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
		6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
		7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
		10	Program Pengelolaan Persampahan
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Pendaftaran Penduduk
		3	Program Pencatatan Sipil
		4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan
12	Dinas Perhubungan	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
		3	Program Pengelolaan Pelayaran
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
		3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
		5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
14	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
		3	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
		4	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
		5	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
		6	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
		7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)
		8	Program Pengembangan Umkm

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	
		9	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
		10	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		11	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
		12	Program Pengembangan Ekspor
		13	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		3	Program Promosi Penanaman Modal
		4	Program Pelayanan Penanaman Modal
		5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		6	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
16	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, dan Pariwisata	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
		4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
		5	Program Pengembangan Kebudayaan
		6	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
		7	Program Pembinaan Sejarah
		8	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
		9	Program Pengelolaan Permuseuman
		10	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		11	Program Pemasaran Pariwisata
		12	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Pembinaan Perpustakaan
		3	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
		4	Program Pengelolaan Arsip
		5	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	
18	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Perencanaan Tenaga Kerja
		3	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
		4	Program Penempatan Tenaga Kerja
		5	Program Hubungan Industrial
		6	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		7	Program Pengendalian Izin Usaha Industri
		8	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
19	Dinas Perikanan	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		4	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
		5	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
20	Sekretariat Daerah	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
		3	Program Perekonomian Dan Pembangunan
21	Sekretariat Dewan	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		4	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
23	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
		4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Kepegawaian Daerah
		3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
25	Inspektorat	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Penyelenggaraan Pengawasan
		3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
26	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
		3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
		4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
		6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
27	Kec.Tarakan Barat	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
28	Kec.Tarakan Tengah	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
29	Kec.Tarakan Timur	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	
		3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
30	Kec.Tarakan Utara	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen

Perencanaan Tahunan

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan adalah serangkaian aktivitas yang diorganisir dan dilaksanakan selama satu tahun yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD). Setiap tahun, pemerintah daerah merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang lebih spesifik, terukur, dan terkait langsung dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Kegiatan ini bersifat operasional dan bertujuan untuk mendorong pencapaian hasil yang optimal sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang ada di daerah tersebut. Berikut uraian mengenai kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan:

Tabel 1.29
Kegiatan Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	
1	DINAS PENDIDIKAN	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		2	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
		3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		8	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
		9	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		10	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
		11	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		12	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
		13	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		14	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		15	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	DINAS KESEHATAN	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		7	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		8	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

NO	PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	
		9	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
		10	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		11	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
		12	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		13	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
		14	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
		15	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
		16	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		17	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		18	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	RUMAH SAKIT UMUM KOTA TARAKAN	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		2	Peningkatan Pelayanan BLUD
		3	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	PUSKESMAS KARANG REJO	1	Peningkatan Pelayanan BLUD
		2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	PUSKESMAS JUATA	1	Peningkatan Pelayanan BLUD
		2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

NO	PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	
		3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	PUSKESMAS SEBENGKOK	1	Peningkatan Pelayanan BLUD
		2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	PUSKESMAS PANTAI AMAL	1	Peningkatan Pelayanan BLUD
		2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	PUSKESMAS GUNUNG LINGKAS	1	Peningkatan Pelayanan BLUD
		2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	PUSKESMAS MAMBURUNGAN	1	Peningkatan Pelayanan BLUD
		2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	1	Peningkatan Pelayanan BLUD
3	DINAS PU-TR	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	
		8	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		9	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		10	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
		11	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
		12	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
		13	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
		14	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
		15	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
		16	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
		17	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
		18	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		19	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
		20	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
		21	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
		22	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
4	DINAS PERKIM	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	
		7	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
		8	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
		9	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
		10	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
		11	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
		12	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
		13	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
		14	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
		15	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		16	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
5	SATPOL-PP PMK	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		8	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		9	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
		10	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan
		11	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
		12	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
		13	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

NO	PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	
6	BPBD	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		8	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
		9	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
		10	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
		11	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
7	DINSOS PM	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		7	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
		8	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
		9	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
		10	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		11	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
		12	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
		13	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

NO	PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	
		14	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
8	DP3AP2KB	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		7	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
		8	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
		9	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
		10	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
		11	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		12	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		13	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		14	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		15	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		16	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

NO	PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	
		17	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		18	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
		19	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		20	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		21	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		22	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
		23	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
		24	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
		25	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
		26	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
		27	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
9	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		8	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		9	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	
			Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
		10	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
		11	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
		12	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
		13	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
		14	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
		15	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
		16	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
		17	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer
		18	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
		19	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
		20	Pengembangan Prasarana Pertanian
		21	Pembangunan Prasarana Pertanian
		22	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota
		23	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
		24	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
		25	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
		26	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
		27	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan
		28	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
		29	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		30	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan,

NO	PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	
			Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
		31	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan
		32	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		6	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
		7	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
		8	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
		9	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
		10	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
		11	Penyimpanan sementara Limbah B3
		12	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		13	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		14	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		15	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
		16	Pengelolaan Sampah
11	DISDUKCAPIL	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		7	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		8	Penataan Pendaftaran Penduduk
		9	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
		10	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
		11	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
		12	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		13	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		15	Penyusunan Profil Kependudukan
12	DISHUB	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		3	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
		4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		6	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		10	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota
		11	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
		12	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
		13	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
		14	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
13	DKISP	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		7	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		8	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		9	Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
		10	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
14	DKUMP	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		7	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
		8	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
		9	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		10	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
		11	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		12	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
		13	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
		14	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
		15	Penerbitan Tanda Daftar Gudang

NO	PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	
		16	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)
		17	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
		18	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
		19	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		20	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
		21	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		22	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		23	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
15	DPMPTSP	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		7	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		8	Pembuatan Peta Potensi Investasi kabupaten/Kota
		9	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		10	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		11	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		12	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

NO	PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	
16	DISBUDPORAPAR	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		6	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
		7	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		8	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		9	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		10	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
		11	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
		12	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
		13	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
		14	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		15	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		16	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		17	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
		18	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
		19	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
		20	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
		21	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
		22	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
		23	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
		24	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

NO	PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	
		25	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
17	DISPUSPAN	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		7	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		8	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		9	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota
		10	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		11	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
		12	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
		13	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota
18	DPTK	1	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		7	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
		8	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
		9	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
		10	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
		11	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
		12	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk

NO	PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	
			Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		13	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
		14	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
		15	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
		16	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
19	DINAS PERIKANAN	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		8	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
		9	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
		10	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
		11	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
		12	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
		13	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
		14	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
		15	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

NO	PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	
20	SETDA	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		7	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		8	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
		9	Penataan Organisasi
		10	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		11	Administrasi Tata Pemerintahan
		12	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
		13	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
		14	Fasilitasi Kerja Sama Daerah
		15	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
		16	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
		17	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
		18	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
21	SETWAN	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		7	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
		8	Layanan Administrasi DPRD
		9	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
		10	Pembahasan Kebijakan Anggaran
		11	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
		12	Peningkatan Kapasitas DPRD
		13	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
		14	Fasilitasi Tugas DPRD

NO	PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	
22	BAPPEDA LITBANG	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		7	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
		8	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
		9	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
		10	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		11	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
		12	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
		13	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
		14	Pengembangan Inovasi dan Teknologi
23	BPKPAD	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		8	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
		9	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
		10	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		11	Pengelolaan Barang Milik Daerah
		12	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	
24	BKPSDM	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		6	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
		7	Mutasi dan Promosi ASN
		8	Pengembangan Kompetensi ASN
		9	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
		10	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
25	INSPEKTORAT	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		8	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
		9	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
		10	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
		11	Pendampingan dan Asistensi
26	KESBANGPOL	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	
		8	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		9	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
		10	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		11	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
		12	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
27	KEC.TARAKAN BARAT	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		7	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
		8	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
		9	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		10	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
		11	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
28	KEC. TARAKAN TENGAH	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		7	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
		8	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
		9	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
		10	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		11	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
		12	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
29	KEC. TARAKAN TIMUR	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		7	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
		8	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
		9	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		10	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
		11	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
30	KEC. TARAKAN UTARA	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		7	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
		8	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

NO	PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	
		9	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		10	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
		11	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kota Tarakan merupakan langkah penting dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Berikut adalah uraian mengenai dasar pertimbangan, dasar penerapan, kebijakan umum daerah, serta komitmen pemerintah daerah dalam penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

1. Dasar Pertimbangan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Dasar pertimbangan penerapan SPM di Kota Tarakan mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Beberapa pertimbangan utama yang menjadi dasar penerapan SPM adalah:

- Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kepentingan

masyarakat, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.

- c) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang menetapkan standar-standar pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap daerah, termasuk bidang kesehatan, pendidikan, ketertiban, dan sosial.
- d) RPJMD Kota Tarakan sebagai dokumen perencanaan yang merumuskan kebijakan pembangunan daerah selama periode tertentu, yang mencakup pencapaian target SPM.

Berdasarkan dasar pertimbangan tersebut, penerapan SPM di Kota Tarakan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga kota mendapatkan hak atas pelayanan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga tercapai kualitas hidup yang lebih baik.

2. Dasar Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Dasar penerapan SPM di Kota Tarakan tidak hanya mengacu pada regulasi nasional, tetapi juga pada kebutuhan lokal yang disesuaikan dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Kota Tarakan. Beberapa dasar penerapan SPM yang perlu diperhatikan adalah:

- a) Ketersediaan dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Menjamin bahwa setiap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah di bidang kesehatan, pendidikan, ketertiban, sosial, dan lainnya dikelola oleh SDM yang kompeten dan terlatih.

b) Anggaran dan Infrastruktur

Penerapan SPM membutuhkan alokasi anggaran yang memadai dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung tercapainya standar pelayanan.

c) Keterlibatan Masyarakat

Pelayanan yang efektif tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pelayanan. Oleh karena itu, masyarakat perlu dilibatkan dalam proses perencanaan dan evaluasi pelayanan.

d) Pemantauan dan Evaluasi

Untuk memastikan bahwa SPM dapat tercapai, dibutuhkan sistem pemantauan dan evaluasi yang baik untuk mengukur pencapaian dan perbaikan berkelanjutan.

3. Kebijakan Umum Daerah dalam Rencana Penerapan dan Pencapaian SPM

Pemerintah Kota Tarakan menetapkan kebijakan umum daerah dalam penerapan dan pencapaian SPM berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan prioritas pembangunan daerah. Kebijakan ini dituangkan dalam RPJMD Kota Tarakan yang menjadi acuan bagi penganggaran dan pelaksanaan program-program pembangunan daerah. Beberapa kebijakan umum daerah dalam pencapaian SPM adalah:

a) Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik

Pemerintah Kota Tarakan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik di seluruh sektor, termasuk kesehatan, pendidikan, sosial, dan infrastruktur, sesuai dengan standar yang ditetapkan.

b) Pendekatan Berbasis Masyarakat

Kebijakan ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelayanan publik, untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

c) Penguatan Kinerja Aparatur Pemerintah

Pemerintah daerah akan terus mengembangkan kapasitas SDM aparat melalui pelatihan, penyuluhan, dan pembekalan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

d) Pemanfaatan Teknologi untuk Efisiensi Pelayanan

Penerapan teknologi informasi akan dimaksimalkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, termasuk dalam hal transparansi dan akses informasi.

e) Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi

Untuk memastikan pencapaian SPM, pemerintah daerah akan memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi terhadap program-program pelayanan publik agar dapat segera diambil langkah-langkah perbaikan jika ditemukan hambatan.

4. Gambaran Orientasi dan Komitmen Pemerintah Daerah dalam Penerapan SPM

Komitmen pemerintah Kota Tarakan untuk menerapkan dan mencapai SPM dapat dilihat dalam orientasi dan langkah-langkah yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun dalam rangka penerapan SPM. Komitmen ini tercermin dalam

kebijakan dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang mengalokasikan anggaran untuk program-program yang mendukung pencapaian SPM. Beberapa orientasi dan komitmen tersebut antara lain:

a) Penyusunan Rencana Aksi yang Terukur

Pemerintah Kota Tarakan menetapkan rencana aksi yang spesifik, terukur, dan berbasis waktu untuk pencapaian SPM di setiap sektor pelayanan. Ini mencakup target-target yang jelas terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ketentraman, dan perumahan.

b) Prioritas Penganggaran untuk Pencapaian SPM

Dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA), pemerintah Kota Tarakan memberikan prioritas pada anggaran yang dialokasikan untuk program yang berkaitan dengan pemenuhan SPM, termasuk penyediaan fasilitas dasar seperti puskesmas, sekolah, rumah susun, dan sarana publik lainnya.

c) Monitoring dan Evaluasi Tahunan

Setiap tahun, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian SPM di seluruh sektor pelayanan untuk melihat apakah target yang ditetapkan dalam RPJMD tercapai. Berdasarkan evaluasi tahunan ini, pemerintah daerah dapat menyusun langkah-langkah perbaikan dan penguatan untuk tahun berikutnya.

d) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Pemerintah Kota Tarakan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas SDM, baik di tingkat pemerintahan

maupun masyarakat, untuk dapat melaksanakan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.

e) Partisipasi Masyarakat

Pemerintah daerah memastikan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses penilaian, perencanaan, dan pelaksanaan pelayanan publik, dengan mendengarkan aspirasi dan umpan balik dari warga.

Berikut adalah penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kota Tarakan secara rinci di berbagai urusan

1. Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor pendidikan bertujuan untuk memastikan seluruh anak usia sekolah di Kota Tarakan mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas. Pemenuhan standar pendidikan yang minimal mencakup ketersediaan fasilitas sekolah, tenaga pengajar, serta mutu pendidikan yang dihasilkan. Untuk itu Pemerintah Kota Tarakan memastikan jumlah sekolah yang memadai baik di tingkat pendidikan dasar (SD) maupun menengah (SMP dan SMA). Ini termasuk upaya untuk memenuhi standar ruang kelas yang cukup, fasilitas pendidikan, dan jumlah guru yang sesuai dengan rasio jumlah murid, menjaga rasio guru terhadap murid sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga kualitas pengajaran tetap optimal, dan meningkatkan akses pendidikan untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak yang berada di daerah terpencil atau perbatasan.

Ini melibatkan pembangunan sekolah baru di daerah yang membutuhkan serta pemberian beasiswa bagi siswa yang kurang mampu.

Indikator Pencapaian:

- a) Tingkat partisipasi pendidikan Dasar 7-15 Tahun
- b) Tingkat partisipasi pendidikan anak usia dini 5-6 Tahun
- c) Tingkat partisipasi Pendidikan Kesetaraan 7 - 18 Tahun
- d) Rasio murid per guru

2. Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor kesehatan bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, serta menurunkan angka kematian ibu dan anak serta angka kemiskinan terkait kesehatan. Untuk itu Pemerintah Kota Tarakan memastikan adanya ketersediaan puskesmas, rumah sakit, klinik, dan tenaga medis yang memadai untuk melayani masyarakat. Ini termasuk penyediaan fasilitas kesehatan di daerah yang jauh dari pusat kota, penyediaan tenaga medis yang cukup seperti dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya di setiap fasilitas Kesehatan, dan Menjamin pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas, termasuk di daerah pinggiran.

Hal ini juga mencakup layanan gawat darurat dan kesehatan ibu serta anak.

Indikator Pencapaian:

- a) Jumlah puskesmas dan rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan
- b) Angka kematian ibu dan anak
- c) Rasio jumlah tenaga medis

3. Pekerjaan Umum

Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor air bersih dan sanitasi bertujuan untuk memastikan seluruh warga Kota Tarakan memiliki akses terhadap air bersih yang aman dan sanitasi yang layak. Untuk itu Pemerintah Kota Tarakan berusaha memastikan distribusi air bersih yang merata, termasuk mengembangkan jaringan perpipaan di wilayah perumahan dan kawasan yang belum terjangkau, pemeliharaan dan peningkatan kualitas air, agar sesuai dengan standar kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan penyediaan fasilitas sanitasi yang layak, seperti jamban sehat, sistem pembuangan air limbah yang terkelola dengan baik, pembangunan jalan yang baik, pemeliharaan jembatan, serta pembangunan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung kegiatan ekonomi dan mempermudah akses masyarakat, dan penyediaan transportasi publik yang terjangkau dan efisien, serta memperhatikan kelayakan armada dan fasilitas transportasi umum di Kota Tarakan.

Indikator Pencapaian:

- a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih
- b) Ketersediaan sarana sanitasi yang layak di daerah permukiman
- c) Persentase panjang jalan yang sesuai dengan standar
- d) Persentase wilayah yang memiliki akses transportasi publik yang terjangkau

4. Permukiman dan Perumahan Rakyat

Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Permukiman dan Perumahan Rakyat bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara, khususnya yang tinggal di daerah perkotaan dan perdesaan, mendapatkan akses terhadap perumahan yang layak dan sehat. Di Kota Tarakan, penerapan SPM untuk permukiman dan perumahan rakyat berfokus pada penyediaan hunian yang memenuhi standar kelayakan, fasilitas dasar yang diperlukan, serta aksesibilitas terhadap layanan infrastruktur seperti air bersih, sanitasi, dan transportasi.

Untuk itu Pemerintah Kota Tarakan berupaya memperbaiki rumah yang tidak layak huni melalui program renovasi rumah atau pembangunan rumah baru di daerah yang membutuhkan, adanya penyediaan lahan yang cukup untuk pengembangan permukiman, baik di kawasan perkotaan maupun pinggiran, dan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan menjadi kunci penting dalam menciptakan permukiman yang sehat dan ramah lingkungan.

Indikator Pencapaian:

- a) Persentase rumah yang terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), melalui harga yang sesuai dengan daya beli mereka
- b) Persentase sampah yang dikelola dengan baik

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kota Tarakan bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat hidup dalam kondisi yang aman, nyaman, dan terlindungi dari gangguan keamanan serta potensi ancaman yang merusak ketertiban dan kenyamanan. Pemerintah Kota Tarakan bekerja sama dengan aparat keamanan, seperti Kepolisian dan Satpol PP, serta masyarakat, untuk menciptakan suasana yang kondusif melalui berbagai kebijakan dan program yang terstruktur. Untuk itu Pemerintah Kota Tarakan mendukung sistem keamanan lingkungan atau *Siskamling* yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tingkat lingkungan atau kelurahan. Setiap wilayah di Tarakan diharapkan memiliki pos keamanan atau sistem patroli yang efektif.

Pemerintah Kota Tarakan menyediakan program perlindungan bagi warga, terutama yang rentan terhadap tindak kejahatan atau bencana alam. Perlindungan ini mencakup keselamatan fisik, serta perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat. Kota Tarakan menerapkan sistem kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai keadaan darurat, baik itu bencana alam (banjir, gempa bumi) maupun kejadian-kejadian yang membahayakan ketertiban umum.

Indikator Pencapaian:

- a) Persentase daerah yang rawan bencana dan gangguan ketertiban memiliki sistem kesiapsiagaan yang memadai dan dapat dioperasikan dengan baik dalam waktu darurat

- b) Persentase masyarakat di wilayah yang rentan memiliki akses ke perlindungan yang memadai, baik dari segi keamanan maupun kebijakan sosial.

6. Sosial

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Urusan Sosial di Kota Tarakan bertujuan untuk menjamin terciptanya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, mengurangi ketimpangan sosial, serta memastikan perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Urusan sosial di Kota Tarakan mencakup penyediaan layanan untuk kesejahteraan masyarakat, perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat miskin, serta penyelesaian masalah sosial lainnya. Pemerintah Kota Tarakan, bersama dengan berbagai instansi terkait, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelayanan sosial diberikan secara merata, tepat sasaran, dan berkualitas.

Untuk itu Pemerintah Kota Tarakan memberikan bantuan sosial kepada warga yang kurang mampu, termasuk bantuan pangan, bantuan untuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan anak-anak, menyusun program-program yang efektif untuk mengurangi angka kemiskinan, seperti pemberdayaan masyarakat, pelatihan kerja, dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga dan kelompok usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Indikator Pencapaian:

- a) Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan sosial
- b) Tingkat pengurangan angka kemiskinan

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro Kota Tarakan menggambarkan sejauh mana pencapaian indikator-indikator ekonomi dan pembangunan yang lebih besar di tingkat kota dalam kurun waktu tertentu, serta bagaimana hasil tersebut berkontribusi pada tujuan pembangunan jangka panjang. Kinerja makro melibatkan berbagai aspek penting, seperti pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas infrastruktur, dan penyediaan layanan publik yang memadai bagi masyarakat.

Pencapaian kinerja makro ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah, alokasi anggaran, serta keberhasilan dalam mengelola sumber daya yang ada. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi perekonomian nasional dan global juga dapat mempengaruhi hasil yang dicapai oleh kota Tarakan. Oleh karena itu, capaian kinerja makro juga mencerminkan efektivitas dari berbagai kebijakan pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

Beberapa aspek yang umumnya diperhatikan dalam capaian kinerja makro antara lain:

1. **Pertumbuhan Ekonomi:** Sejauh mana ekonomi Kota Tarakan berkembang, diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang mencakup sektor-sektor seperti perdagangan, industri, pertanian, dan jasa.
2. **Pengurangan Kemiskinan:** Perkembangan dalam penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang

tercermin dalam indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan angka pengangguran.

3. Ketersediaan Infrastruktur: Capaian dalam pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, air bersih, dan listrik, yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.
4. Peningkatan Layanan Publik: Kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan yang baik bagi warga kota.

Capaian kinerja makro yang baik akan memberikan dasar yang kuat untuk perencanaan pembangunan di masa depan. Namun, pencapaian ini tidak hanya dilihat dari angka-angka semata, tetapi juga bagaimana dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk peningkatan taraf hidup, kesempatan kerja, maupun kualitas hidup yang lebih baik secara keseluruhan.

Capaian kinerja pemerintah daerah Kota Tarakan dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1.
Pencapaian Kinerja Makro Kota Tarakan

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia	78,03	78,62	+0,59 0,76%
2	Angka Kemiskinan	5,56	5,03	-0,53 9,53%
3	Angka Pengangguran	5,11	5,06	-0,05 0,98%
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,71	5,02***	-0,69 12,08%

5	Pendapatan Perkapita	221.043,64	233.098,36***	+12.054,72 5,45%
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,232	0,238	+0,006 2,59%

* Data Sementara

** Data Sangat Sementara

Sumber : BPS Tarakan, 2026

Berdasarkan data capaian ekonomi makro Kota Tarakan, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan perkembangan signifikan serta tantangan yang perlu diatasi:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tarakan mengalami peningkatan dari 78,03 pada tahun sebelumnya menjadi 78,62 pada tahun berjalan, dengan kenaikan sebesar 0,59 persen. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas hidup masyarakat, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, maupun standar hidup. Peningkatan ini dapat dikaitkan dengan berbagai program pemerintah yang berfokus pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, serta peningkatan daya beli masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi dan bantuan sosial.

2. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan di Kota Tarakan mengalami penurunan dari 5,56 persen menjadi 5,03 persen, atau berkurang sebesar 9,53 persen. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilakukan, seperti bantuan sosial, pemberdayaan usaha mikro, serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, telah membuahkan hasil yang positif. Penurunan angka kemiskinan ini juga mencerminkan adanya

peningkatan kesejahteraan masyarakat, di mana lebih banyak penduduk yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

3. Angka Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka di Kota Tarakan mengalami sedikit penurunan dari 5,11 persen menjadi 5,06 persen, atau sebesar 0,98 persen. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja di Kota Tarakan, yang kemungkinan besar didukung oleh program pelatihan tenaga kerja, fasilitasi pencari kerja, serta pertumbuhan sektor usaha kecil dan menengah yang membuka peluang kerja baru. Meskipun penurunan ini positif, angka pengangguran yang masih di atas 5 persen mengindikasikan perlunya upaya lebih lanjut dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan berkelanjutan.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Tarakan mengalami sedikit perlambatan dari 5,71 persen menjadi 5,02 persen, atau turun sebesar 12,08 persen. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perlambatan investasi, penurunan daya beli masyarakat, atau tantangan dalam sektor industri utama yang menjadi penggerak ekonomi daerah. Meskipun masih berada pada tingkat pertumbuhan yang positif, diperlukan strategi lebih lanjut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, seperti peningkatan investasi, penguatan sektor produktif, serta inovasi dalam ekonomi berbasis teknologi dan industri kreatif.

5. Pendapatan Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kota Tarakan mengalami peningkatan dari Rp 221,043 juta menjadi Rp 233,098 juta, atau naik sebesar 5,45 persen. Peningkatan ini mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi yang memberikan dampak positif

pada pendapatan rata-rata masyarakat. Kenaikan PDRB per kapita ini menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat secara umum meningkat, yang dapat disebabkan oleh pertumbuhan sektor ekonomi yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan individu dan rumah tangga.

6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio):

Ketimpangan pendapatan di Kota Tarakan mengalami peningkatan dari 0,232 menjadi 0,238, atau naik sebesar 2,59 persen. Walaupun mengalami peningkatan, namun angka gini rasio masih pada kategori rendah, sehingga hal ini merupakan indikasi positif bahwa distribusi pendapatan di Kota Tarakan semakin merata, dengan adanya peningkatan kesejahteraan bagi kelompok berpenghasilan rendah. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penurunan ini dapat mencakup program subsidi, bantuan sosial, serta peningkatan kesempatan kerja yang lebih inklusif. Namun, meskipun terjadi perbaikan, tetap diperlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga distribusi pendapatan yang lebih adil dan berkelanjutan di masa depan.

Secara keseluruhan, Kota Tarakan menunjukkan beberapa pencapaian positif, seperti peningkatan IPM, penurunan angka kemiskinan, penurunan angka pengangguran, dan peningkatan pendapatan per kapita. Namun, perlambatan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya ketimpangan pendapatan menjadi tantangan yang perlu segera ditangani agar pembangunan ekonomi tetap inklusif dan berkelanjutan. Strategi yang lebih fokus pada peningkatan investasi, serta penguatan sektor produktif dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan tersebut.

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kota Tarakan menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah berhasil dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, serta pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan mencakup berbagai aspek, seperti kebijakan publik, pengelolaan administrasi negara, pelayanan masyarakat, dan pengawasan terhadap berbagai program dan kegiatan pembangunan.

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan urusan pemerintahan dengan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas tinggi, agar pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik. Capaian kinerja ini juga mencerminkan bagaimana efektivitas program-program yang ada dalam mendukung pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kualitas hidup masyarakat Kota Tarakan.

Beberapa aspek yang umumnya diperhatikan dalam capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan di antaranya:

1. Kualitas Pelayanan Publik

Menilai sejauh mana pemerintah daerah berhasil menyediakan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, dan infrastruktur.

2. Efektivitas Program Pembangunan

Menilai apakah program-program pembangunan yang telah disusun dalam APBD dan dokumen perencanaan lainnya berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

3. Pengelolaan Sumber Daya

Meliputi pengelolaan keuangan daerah, sumber daya manusia, serta potensi lokal dengan efektif untuk mendukung program dan kebijakan pemerintah daerah.

4. Keterlibatan Masyarakat dan Partisipasi Publik

Sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan melalui mekanisme musyawarah atau forum-forum konsultasi publik.

5. Pengawasan dan Evaluasi

Melibatkan proses pengawasan internal dan eksternal terhadap kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, baik oleh lembaga pengawasan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maupun evaluasi dari masyarakat dan lembaga independen.

Pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sangat penting untuk memastikan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat. Selain itu, ini juga memberikan gambaran tentang seberapa baik pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas.

Oleh karena itu, capaian kinerja ini harus dievaluasi secara terus-menerus untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan, dan memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian kebijakan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah alat yang digunakan untuk mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan atau kebijakan pemerintah tercapai. IKK berfungsi sebagai alat ukur yang objektif untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan pencapaian hasil dari program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dalam konteks pemerintahan daerah, IKK mencerminkan aspek-aspek penting yang langsung berhubungan dengan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

IKK digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja pemerintah. Dengan adanya indikator yang jelas dan terukur, pemerintah daerah dapat melakukan pemantauan yang lebih baik terhadap progres yang telah dicapai, serta mengambil langkah-langkah perbaikan jika diperlukan. Selain itu, IKK juga membantu dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, karena hasilnya dapat dipublikasikan kepada masyarakat, memberikan gambaran mengenai pencapaian yang telah dihasilkan dari penggunaan sumber daya publik.

Melalui penggunaan IKK yang efektif, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang diterapkan berjalan sesuai dengan rencana, memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, dan mendukung terwujudnya tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Tabel 2.2**Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) per Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Tarakan**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.a.1	Pendidikan	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	77,62%	Dinas Pendidikan Kota Tarakan
1.a.2		Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	85,74%	Dinas Pendidikan Kota Tarakan
1.a.3		Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	36,54%	Dinas Pendidikan Kota Tarakan
1.a.4		Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	69,62%	Dinas Pendidikan Kota Tarakan
1.a.5		Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	77,95%	Dinas Pendidikan Kota Tarakan



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.b.1	Kesehatan	Persentase kematian ibu	0,13%	Dinas Kesehatan Kota Tarakan
1.b.2		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	4,55%	Dinas Kesehatan Kota Tarakan
1.b.3		Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	97,34%	Dinas Kesehatan Kota Tarakan
1.b.4		Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	98,34%	Dinas Kesehatan Kota Tarakan
1.b.5		Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan Kota Tarakan
1.b.6		Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	56,10%	Dinas Kesehatan Kota Tarakan
1.b.7		Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	95,45%	Dinas Kesehatan Kota Tarakan
1.b.8		Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	67,97%	Dinas Kesehatan Kota Tarakan
1.b.9		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	92,60%	Dinas Kesehatan Kota Tarakan



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.b.10		Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan Kota Tarakan
1.b.11		Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan Kota Tarakan
1.b.12		Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	95,02%	Dinas Kesehatan Kota Tarakan
1.b.13		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan Kota Tarakan
1.b.14		Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan Kota Tarakan



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.c.1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	27,43%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.c.2		Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	73,79%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.c.3		Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	87,23%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.c.4		Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	42,96%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.c.5		Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	69,23%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.c.6		Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	75,75%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.c.7		Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.c.8		Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.c.9		Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	35,27%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.c.10		Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	95,80%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.d.1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	100%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1.d.2		Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	86,14%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1.d.3		Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	100%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1.d.4		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Tidak dapat dilaksanakan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.e.1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	0	BPBD
1.e.2		Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	100%	Satpol PP dan PMK Kota Tarakan
1.e.3		Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	100%	Satpol PP dan PMK Kota Tarakan
1.e.4		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	BPBD
1.e.5		Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Satpol PP dan PMK Kota Tarakan



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.e.6		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	88,14%	Satpol PP dan PMK Kota Tarakan
1.f.1	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1.f.2		Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1.f.3		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1.f.4		Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1.f.5		Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap	100%	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		darurat bencana kabupaten/kota		
1.f.6		Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	100%	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
2.a.1	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	86,67%	Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja
2.a.2		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).	3,93%	Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja
2.a.3		Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan	97,98%	Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan		
2.b.1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.c.1	Pangan	Persentase jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	60,82%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.d.1	Pertanahan	Persentase Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	45,79%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.d.2		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	49,55%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
2.d.3		Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	49,55%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
2.e.1	Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	100%	Dinas Lingkungan Hidup
2.e.2		Persentase jumlah sampah yang tertangani	94,84%	Dinas Lingkungan Hidup



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.f.1	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan	99,35%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.f.2		Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	63,62%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.f.3		Persentase data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.f.4		Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	98,49%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.f.5		Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.f.6		Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.f.7		Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.g.1	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	Tidak dapat dilaksanakan	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
2.g.2		Persentase peningkatan status desa mandiri	Tidak dapat dilaksanakan	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
2.g.3		Persentase fasilitasi kerja sama desa	Tidak dapat dilaksanakan	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
2.h.1	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun	103,57%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.h.2		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	72,33%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.h.3		Persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need)	32,14%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.i.1	Perhubungan	Konektivitas Kabupaten/Kota	0,70	Dinas Perhubungan
2.i.2		Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,41	Dinas Perhubungan
2.i.3		Persentase Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	100%	Dinas Perhubungan
2.j.1	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	100%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.j.2		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	88,89%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.j.3		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	83,99%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.k.1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	58,90%	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2.k.2		Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	100%	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2.l.1	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	-15,81%	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.l.2		Realisasi total terhadap target investasi	209,85%	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.m.1	Kepemudaan dan Olahraga	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	3,51%	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.m.2		Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	22,41%	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.m.3		Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	100%	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.m.4		Persentase jumlah atlet berprestasi	100%	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.n	Statistik	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	84,78%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.o	Persandian	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.p.1	Kebudayaan	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	39,29%	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.p.2		Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	2,35%	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.q.1	Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat	57,97	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.q.2		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	16,24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.r	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	73,70%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.a.1	Kelautan dan Perikanan	Produksi perikanan tangkap dan budidaya	97,60%	Dinas Perikanan
3.a.2		Angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)	40,83%	Dinas Perikanan
3.b.1	Pariwisata	Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	66,43%	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.b.2		Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	-18,94%	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
3.b.3		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	48,67%	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
3.c.1	Pertanian	Peningkatan produksi tanaman pangan	217,44%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.c.2		Peningkatan produksi hortikultura	8,48%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.c.3		Peningkatan produksi komoditas peternakan	5,07%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.c.4		Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	93,53%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.d	Kehutanan			Tidak Ada



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.e	Energi dan Sumber Daya Mineral			Tidak Ada
3.f	Perdagangan	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	90,35%	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3.g.1	Perindustrian	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota; 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5.	0	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota		
3.g.2		Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	0,38%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.g.3		Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.g.4		Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.h	Transmigrasi	Tidak Ada Kewenangan Kabupaten/Kota		Tidak Ada

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana penyelenggaraan fungsi-fungsi administratif dan pendukung dalam pemerintahan daerah dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan utama. Fungsi penunjang ini meliputi berbagai aspek yang tidak langsung terkait dengan pelayanan publik, namun memiliki peranan penting dalam mendukung operasional dan kelancaran seluruh kegiatan pemerintahan, seperti pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, pengadaan barang/jasa, serta pengelolaan data dan informasi.

IKK untuk fungsi penunjang ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh sistem pendukung pemerintahan berjalan dengan efektif, efisien, dan akuntabel, serta mendukung tercapainya sasaran pembangunan yang lebih luas. Kinerja yang baik pada fungsi penunjang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan, mengoptimalkan penggunaan anggaran, serta mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan daerah.

Melalui pengukuran IKK untuk fungsi penunjang ini, pemerintah daerah dapat mengevaluasi seberapa baik fungsi-fungsi tersebut bekerja dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas. Dengan demikian, IKK tidak hanya digunakan untuk menilai kinerja urusan pemerintahan utama, tetapi juga untuk memastikan bahwa semua fungsi administratif dan penunjang dapat bekerja dengan optimal demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.



Tabel 2.2.

Capaian Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan di Kota Tarakan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.a.1	Perencanaan	Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	88,24%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
4.b.1	Keuangan	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	39,59%	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
4.b.2		Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	20,63%	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
4.b.3		Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	61,80%	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.b.4		Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	35,60%	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
4.c	Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	67,65%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
4.d	Penelitian dan Pengembangan	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	96,30%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
4.e.1	Pengawasan	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2	Inspektorat
4.e.2		Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	3	Inspektorat
4.e.3		Manajemen risiko Indeks	2	Inspektorat



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.e.4		Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	87,55%	Inspektorat
4.f.1	Pengadaan	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	40	Sekretariat Daerah
4.f.2		Pemanfaatan sistem pengadaan	26,81	Sekretariat Daerah
4.f.3		Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	27	Sekretariat Daerah
4.g.1	Hubungan dengan Perwakilan Daerah	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	Tepat Waktu	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
4.g.2		Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N	36,36%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
4.h	Pelayanan Publik	Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	73,58	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah merujuk pada kewajiban pemerintah daerah untuk bertanggung jawab terhadap hasil yang dicapai dari berbagai kegiatan dan program yang dilaksanakan, baik yang bersumber dari anggaran daerah maupun kebijakan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas ini melibatkan proses pertanggungjawaban yang transparan, efisien, dan efektif kepada masyarakat, lembaga pengawasan, serta instansi terkait lainnya.

Pentingnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah tidak hanya untuk menunjukkan sejauh mana anggaran dan sumber daya yang ada digunakan dengan baik, tetapi juga untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pencapaian tujuan pembangunan dan program-program yang telah direncanakan. Akuntabilitas menciptakan transparansi, kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Prinsip-Prinsip Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah:

1. Transparansi

Pemerintah daerah harus memastikan bahwa semua proses, baik dalam hal pengelolaan anggaran, pelaksanaan program, dan hasil yang dicapai, disajikan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik. Ini termasuk laporan keuangan yang jelas dan terbuka, serta informasi mengenai kebijakan dan pelaksanaan program.

2. Efisiensi

Pengelolaan sumber daya yang terbatas harus dilakukan secara efisien, yaitu dengan meminimalkan pemborosan dan memastikan bahwa setiap anggaran digunakan untuk mencapai hasil yang maksimal. Efisiensi juga mencakup penggunaan waktu, tenaga, dan sumber daya lainnya yang optimal.

3. Efektivitas

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah harus memberikan dampak positif dan relevansi yang nyata bagi masyarakat. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan dan program yang diterapkan mampu mencapai tujuan yang diinginkan, serta memenuhi harapan masyarakat.

4. Partisipasi Publik

Masyarakat berhak untuk mengetahui dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program yang ada.

5. Pengawasan dan Evaluasi

Untuk menjaga akuntabilitas, diperlukan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga internal maupun eksternal, seperti Inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Evaluasi berkala terhadap program yang dilaksanakan akan membantu mengetahui apakah sasaran yang ditetapkan tercapai dan memberikan dasar bagi perbaikan kebijakan.

6. Pertanggungjawaban

Pemerintah daerah wajib memberikan laporan tentang kegiatan dan penggunaan anggaran yang telah dilakukan. Ini mencakup laporan kinerja tahunan yang menguraikan pencapaian, kendala yang dihadapi, serta solusi atau tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.

Tujuan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

1. Meningkatkan Kepercayaan Publik: Masyarakat akan lebih percaya dan mendukung kebijakan pemerintah jika mereka melihat bahwa pemerintah bertanggung jawab dan transparan dalam kinerjanya.
2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik: Dengan adanya akuntabilitas, program-program pemerintah akan lebih fokus pada hasil yang bermanfaat bagi masyarakat, sehingga kualitas layanan publik akan semakin baik.
3. Meminimalkan Penyalahgunaan Anggaran: Proses pengawasan dan transparansi membantu mengurangi peluang untuk penyalahgunaan sumber daya dan anggaran negara.
4. Perbaikan Berkelanjutan: Evaluasi dan tindak lanjut atas temuan-temuan dalam proses akuntabilitas memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.

Melalui akuntabilitas kinerja yang baik, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan, memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat, serta menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Tabel di bawah ini menyajikan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Tarakan tahun 2025. Setiap tujuan dan sasaran strategis memiliki indikator kinerja yang diukur untuk menilai keberhasilan pencapaian target yang telah direncanakan.

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	2	3		4
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Usia Harapan Hidup (UHH)	74,3
2	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	2	Rata-Rata Lama Sekolah	10,53
		3	Harapan Lama Sekolah	14,41
3	Meningkatnya kesetaraan gender dan kualitas keluarga	4	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,351
		5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	66,9
4	Menurunnya angka kemiskinan	6	Angka kemiskinan	5,4
		7	Angka kemiskinan ekstrem	0,5
5	Meningkatnya kualitas infrastruktur dan daerah	8	Indeks Infrastruktur	67,15
6	Meningkatnya layanan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	9	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	71,08
7	Meningkatnya pertumbuhan dan stabilitas ekonomi	10	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,09
		11	Tingkat Inflasi	2,5
8	Menurunnya pengangguran	12	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,9
9	Meningkatnya stabilitas ketertiban dan ketentraman kota	13	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	85
10	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	14	Nilai SAKIP	66,03
11	Meningkatnya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah	15	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP
12	Meningkatnya kualitas digitalisasi pelayanan publik	16	Indeks pelayanan publik	4,08
		17	Indeks SPBE	3

13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	18	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70,06
14	Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana daerah	19	Indeks Ketahanan Daerah	0,712

Sumber : Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2025

b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Realisasi capaian akuntabilitas kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2025 berdasarkan Tabel di atas, dari 19 indikator kinerja sasaran yang diperjanjikan pada tahun 2025, sebanyak 10 (sepuluh) indikator terealisasi sesuai atau melebihi target kinerja, dan 6 (enam) indikator belum mencapai sesuai target yang ditetapkan serta terdapat 3 (tiga) Indikator yang belum mempunyai data realisasi (N/A) dikarenakan belum rilisnya data realisasi di tahun 2025, hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.5.
Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Perjanjian Kinerja
Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	74,3	74,40	100,13
2	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	10,53	10,46	99,34
		Harapan Lama Sekolah	14,41	14,23	98,75
3	Meningkatnya kesetaraan gender dan kualitas keluarga	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,351	N/A	N/A

		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	66,9	74,10	110,76
4	Menurunnya angka kemiskinan	Angka kemiskinan	5,4	5,03	106,85
		Angka kemiskinan ekstrem	0,5	N/A	N/A
5	Meningkatnya kualitas infrastruktur dan daerah	Indeks Infrastruktur	67,15	68,47	101,97
6	Meningkatnya layanan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	71,08	77,68	109,29
7	Meningkatnya pertumbuhan dan stabilitas ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,09	4,92	80,79
		Tingkat Inflasi	2,5±1	2,88	100,00
8	Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,90	5,06	96,73
9	Meningkatnya stabilitas ketertiban dan ketentraman kota	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	85	83,00	97,65
10	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	66,03	66,48	100,68
11	Meningkatnya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	N/A	N/A
12	Meningkatnya kualitas digitalisasi pelayanan publik	Indeks pelayanan publik	4,08	4,36	106,86
		Indeks SPBE	3	3,11	103,67

13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70,06	78,70	112,33
14	Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana daerah	Indeks Ketahanan Daerah	0,712	0,70	98,31

sumber : Data Capaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2025

Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting dalam mengukur kualitas sumber daya manusia suatu daerah, yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Jika IPM Kota Tarakan mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam akses dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sebagai kota yang terus berkembang, Tarakan menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas utama dalam pembangunan. Dengan fokus pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pemerintah berupaya menciptakan masyarakat yang lebih terampil, mandiri, dan berdaya saing untuk mencetak generasi unggul dan siap menghadapi tantangan global.

Berikut adalah data terkait indikator kinerja yang mencerminkan perkembangan IPM di Kota Tarakan

Tabel 2.6.
Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tarakan

Indikator Kinerja	Realisasi			2025			Akhir RPJMD (2029)	
	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,7	77,53	78	78,41	78,62	100,27	80,41	97,77

Sumber: BPS, 2026

Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tarakan dari tahun 2022 hingga 2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2022, IPM tercatat sebesar 76,7 poin, kemudian meningkat menjadi 76,53 poin pada tahun 2023. Kenaikan terjadi juga pada tahun 2024, di mana IPM mencapai 78 poin, dan terus meningkat hingga 78,62 poin pada tahun 2025.

Gambar 2.1.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tarakan



Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat, yang menunjukkan bahwa program pembangunan sumber daya manusia yang dijalankan pemerintah mulai memberikan hasil positif. Secara rata-rata, IPM Kota Tarakan tumbuh sekitar 0,63 poin per tahun, dengan kenaikan terbesar terjadi antara tahun 2022 dan 2023 sebesar 0,83 poin. Meskipun pertumbuhan ini cukup stabil, tantangan ke depan adalah memastikan peningkatan IPM merata di seluruh lapisan masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan investasi yang berkelanjutan dalam pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang lebih baik, serta peningkatan daya saing tenaga kerja lokal. Dengan kebijakan yang tepat, Kota Tarakan dapat terus mempertahankan dan bahkan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya di masa mendatang.

Sementara Capaian IPM untuk Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7.

**Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kalimantan Utara dan Capaian Nasional Tahun 2025**

Indikator Sasaran	Realisasi						
	Nasional	Kaltara	Tarakan	Bulungan	Malinau	Nunukan	Tana Tidung
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,9	74,04	78,62	74,53	75,21	69,87	71,48

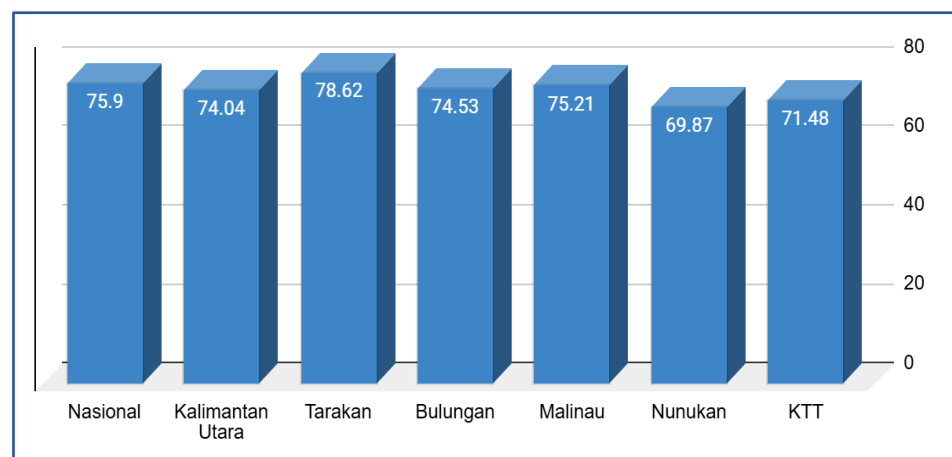
Sumber : BPS, 2026

Berdasarkan Tabel diatas Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terlihat bahwa IPM nasional mencapai 75,90 poin. Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mencatat IPM sebesar 74,04 poin, berada

di bawah rata-rata nasional. Di antara kabupaten/kota di Kaltara, Kota Tarakan memiliki IPM tertinggi sebesar 78,62 poin, melampaui rata-rata nasional dan provinsi, yang menunjukkan tingkat pembangunan manusia yang lebih baik, terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kabupaten Bulungan dan Malinau masing-masing memiliki IPM sebesar 74,53 dan 75,21 poin, sedikit di atas rata-rata provinsi namun masih di bawah rata-rata nasional.

Sementara itu, Kabupaten Nunukan dengan 69,87 poin dan Kabupaten Tana Tidung (KTT) dengan 71,48 poin mencatatkan IPM terendah di wilayah ini, yang menunjukkan bahwa pembangunan manusia di kedua daerah tersebut masih memerlukan perhatian lebih, terutama dalam meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. Perbedaan capaian IPM antarwilayah ini mencerminkan disparitas pembangunan yang perlu diatasi agar pembangunan di Kaltara dapat lebih merata.

Gambar 2.2.
Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kalimantan Utara dan Capaian Nasional Tahun 2025



Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran dan indikator-indikator yang akan diukur sesuai definisi operasional dari masing-masing indikator yaitu :

Tabel 2.8.
Indikator Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	74,3	74,40	100,13
2	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	10,53	10,46	99,34
		Harapan Lama Sekolah	14,41	14,23	98,75
3	Meningkatnya kesetaraan gender dan kualitas keluarga	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,351	N/A	N/A
		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	66,9	74,10	110,76
4	Menurunnya angka kemiskinan	Angka kemiskinan	5,4	5,03	106,85
		Angka kemiskinan ekstrem	0,5	N/A	N/A

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2026

Adapun analisis capaian dari masing-masing Sasaran dan indikator sebagai berikut :

Sasaran 1. Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat

Penetapan sasaran “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat” oleh Pemerintah Kota Tarakan dilandasi oleh pentingnya kesehatan sebagai fondasi utama pembangunan daerah dan prasyarat peningkatan kualitas sumber daya

manusia, mengingat kondisi kesehatan masyarakat berpengaruh langsung terhadap produktivitas, kesejahteraan, serta capaian Indeks Pembangunan Manusia melalui indikator usia harapan hidup. Penguatan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas, disertai peningkatan upaya promotif dan preventif, menjadi strategi untuk menekan angka kesakitan, kematian ibu dan bayi, serta permasalahan gizi dan penyakit tidak menular, sehingga risiko sosial dan beban pembiayaan kesehatan dapat diminimalkan. Dengan demikian, sasaran ini tidak hanya berorientasi pada penyediaan layanan kesehatan, tetapi juga pada penciptaan dampak jangka panjang berupa masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing guna mendukung pembangunan Kota Tarakan secara berkelanjutan.

Indikator : Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia harapan hidup bisa diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu. Dalam hal ini berdasarkan serangkaian *Age Specific Rate* atau rata-rata umur spesifik dari kematian, besar kecilnya usia harapan hidup suatu generasi sangat dipengaruhi oleh banyaknya penduduk yang mampu melewati umur tertentu, dan banyaknya penduduk yang dilahirkan hidup dari suatu generasi sampai mencapai umur tertentu. Sasaran meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dengan indikator usia harapan hidup menunjukkan rata-rata harapan lama hidup manusia (umur) yang dihitung sejak lahir.

Untuk mengetahui capaian indikator Usia Harapan Hidup, maka dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2.9.

Capaian Indikator Usia Harapan Hidup (UHH)

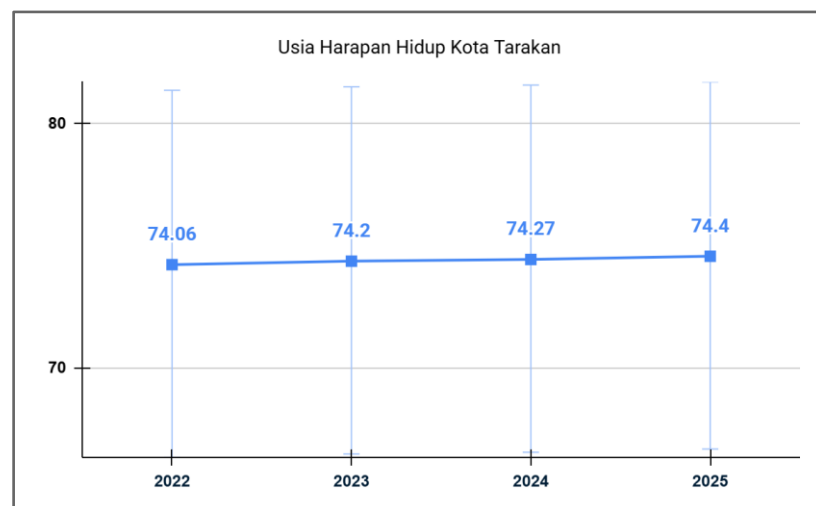
Indikator Kinerja	Realisasi			2025			Akhir RPJMD (2029)	
	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
Usia Harapan Hidup	74,06	74,2	74,27	74.3	74.40	100.13	75.72	98.26

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2026

Data Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Tarakan menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2022 hingga 2025, meskipun masih berada di bawah target akhir RPJMD sebesar 98,26 tahun. Pada tahun 2022, UHH tercatat sebesar 74,06 tahun, kemudian mengalami sedikit peningkatan menjadi 74,2 tahun pada tahun 2023. Kenaikan juga terjadi pada tahun 2024 dengan capaian 74,27 tahun, dan terus meningkat hingga 74,4 tahun pada tahun 2025. Tingkat pencapaian terhadap target RPJMD sudah berada di angka 99,98,26 persen, yang menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesehatan masyarakat telah berjalan cukup baik.

Gambar 2.3.

Capaian Indikator Usia Harapan Hidup (UHH)



Tabel 2.10.
Perbandingan Capaian Usia Harapan Hidup
Kalimantan Utara dan Capaian Nasional

Indikator Sasaran	Realisasi						
	Nasional	Kaltara	Tarakan	Bulungan	Malinau	Nunukan	Tana Tidung
Usia Harapan Hidup	75,9	74,04	78,62	74,53	75,21	69,87	71,48

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2026

Berdasarkan data realisasi Usia Harapan Hidup (UHH), Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mencatatkan angka sebesar 74,04 tahun, sedikit mendekati realisasi nasional sebesar 75,9 tahun. Kota Tarakan memiliki UHH tertinggi di Kaltara, yaitu 78,62 tahun, yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan, pola hidup, dan akses terhadap fasilitas kesehatan di daerah ini relatif lebih baik. Kabupaten Malinau juga mencatatkan UHH di atas rata-rata provinsi sebesar 75,21 tahun.

Sebaliknya, Kabupaten Bulungan, Tana Tidung (KTT) , dan Nunukan memiliki UHH lebih rendah, masing-masing sebesar 74,53 tahun, 71,48 tahun, dan 69,87 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di daerah tersebut memiliki tingkat harapan hidup lebih rendah, yang kemungkinan dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan, kualitas lingkungan, dan pola hidup sehat.

Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kendala

Keberhasilan Kota Tarakan dalam meningkatkan Usia Harapan Hidup (UHH) tidak terlepas dari kualitas layanan kesehatan yang relatif lebih baik dibandingkan daerah lain di Provinsi Kalimantan Utara. Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan memudahkan akses masyarakat terhadap layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Program kesehatan ibu dan anak, imunisasi, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta intervensi penurunan stunting berjalan cukup efektif sehingga berdampak pada menurunnya angka kematian bayi dan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara umum.

Selain itu, faktor sosial dan infrastruktur turut mendukung capaian tersebut. Tingkat pendidikan dan literasi kesehatan masyarakat yang relatif baik mendorong kesadaran terhadap pola hidup bersih dan sehat serta pemanfaatan layanan kesehatan sejak dini. Dukungan infrastruktur dasar seperti akses air bersih, sanitasi, dan transportasi dalam kota juga memperkecil risiko penyakit berbasis lingkungan. Sinergi lintas sektor dalam pembangunan kesehatan, termasuk jaminan kesehatan dan penguatan intervensi gizi, semakin memperkuat fondasi peningkatan usia harapan hidup secara berkelanjutan.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala yang perlu diantisipasi. Laju peningkatan UHH cenderung bertahap sehingga membutuhkan akselerasi kebijakan agar target akhir RPJMD dapat tercapai optimal. Ancaman penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit degeneratif berpotensi menahan peningkatan usia harapan hidup apabila tidak dikendalikan secara sistematis. Selain itu, dinamika pertumbuhan penduduk dan mobilitas

masyarakat sebagai kota perdagangan juga meningkatkan risiko penyebaran penyakit, sehingga diperlukan penguatan sistem surveilans kesehatan, peningkatan kualitas SDM kesehatan, dan inovasi pelayanan berbasis pencegahan.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam upaya peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH) di Kota Tarakan dapat dilihat dari perbandingan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran program pendukung. Pada tahun 2025, indikator UHH mencapai 74,40 tahun atau 100,13% dari target 74,30 tahun, yang menunjukkan bahwa kinerja sasaran telah melampaui target yang ditetapkan. Sementara itu, rata-rata realisasi anggaran dari program-program pendukung di sektor kesehatan tercatat sebesar 74,66% dari total anggaran yang dialokasikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja yang optimal dapat diraih meskipun serapan anggaran tidak mencapai 100 persen, sehingga mencerminkan pemanfaatan sumber daya yang cukup efisien.



Tabel 2.11
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran terhadap Pencapaian Kinerja Tahun 2025 Indikator Angka Usia Harapan Hidup

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rata-Rata Capaian (%)	Program Pendukung	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Rata-Rata Capaian (%)	Tingkat Efisiensi
Angka Usia Harapan Hidup	74,3	74,40	100,13	100,13	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	401.590.200,00	261.268.218,00	65,06	74,66	34,12% (Efisien)
					Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.690.534.000,00	2.141.580.600,00	79,60		
					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	35.760.969.597,00	27.722.445.272,98	77,52		
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.450.654.000,00	1.109.199.520,00	76,46		

Sumber : Bappeda Litbang, 2026

Program-program yang mendukung pencapaian indikator tersebut meliputi Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, serta Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan. Realisasi anggaran program-program tersebut berkisar antara 65,06% hingga 79,60%, yang menunjukkan bahwa pengelolaan belanja kesehatan dilakukan secara terkendali dengan tetap mampu menghasilkan kinerja yang optimal. Berdasarkan perbandingan antara capaian indikator dan tingkat penyerapan anggaran tersebut, diperoleh tingkat efisiensi sebesar 34,12% yang termasuk dalam kategori efisien, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya telah memberikan hasil yang maksimal dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kota Tarakan.

Analisis Program/Kegiatan Penunjang

Upaya Kota Tarakan dalam meningkatkan Usia Harapan Hidup (UHH) juga dilakukan melalui pendekatan promotif, preventif, dan lintas sektor yang terintegrasi.

1. Penguatan Layanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

Kota Tarakan memperkuat pelayanan kesehatan melalui optimalisasi puskesmas, rumah sakit daerah, dan posyandu. Fokus diberikan pada peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, persalinan oleh tenaga kesehatan, imunisasi lengkap, serta deteksi dini penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes. Akses layanan yang relatif mudah di wilayah perkotaan mempercepat penanganan kasus kesehatan sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih berat.

2. Pengendalian Penyakit dan Perbaikan Gizi

Pemerintah kota menjalankan intervensi gizi spesifik dan sensitif, termasuk penanganan stunting, pemberian makanan tambahan, serta edukasi gizi keluarga. Pengendalian penyakit menular dan tidak menular juga diperkuat melalui skrining rutin dan kampanye perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Upaya ini berdampak pada penurunan angka kematian dan peningkatan kualitas kesehatan jangka panjang.

3. Perbaikan Sanitasi dan Lingkungan Sehat

Perbaikan akses air bersih, sanitasi layak, pengelolaan sampah, serta kampanye rumah tangga bebas asap rokok menjadi bagian penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap risiko penyakit infeksi dan gangguan tumbuh kembang anak, yang pada akhirnya mempengaruhi usia harapan hidup.

4. Sinergi Lintas Sektor dan Jaminan Kesehatan

Pemanfaatan jaminan kesehatan nasional, penguatan kolaborasi lintas perangkat daerah, serta integrasi program penanggulangan kemiskinan, pendidikan, dan perlindungan sosial turut mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena UHH bukan hanya indikator kesehatan semata, tetapi juga mencerminkan kualitas hidup secara menyeluruh, maka pendekatan pembangunan yang holistik menjadi kunci keberhasilan Kota Tarakan.

5. GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)

Program nasional yang bertujuan mendorong masyarakat menerapkan perilaku hidup sehat melalui pendekatan promotif dan preventif guna meningkatkan derajat kesehatan dan menekan beban penyakit, khususnya penyakit tidak menular. Program ini menekankan kegiatan sederhana namun berdampak besar seperti

rutin beraktivitas fisik, mengonsumsi buah dan sayur, tidak merokok, melakukan pemeriksaan kesehatan berkala, serta menjaga kebersihan lingkungan dan sanitasi. Melalui perubahan perilaku secara kolektif dan berkelanjutan, GERMAS mampu menurunkan angka kesakitan dan kematian sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup dan usia harapan hidup masyarakat.

Sasaran 2 : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan

Pemerintah Kota Tarakan menetapkan sasaran “Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan” sebagai prioritas strategis karena pendidikan merupakan fondasi utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menjadi modal dasar pembangunan daerah. Peningkatan akses yang merata memastikan seluruh masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan tanpa hambatan geografis maupun sosial ekonomi, sementara peningkatan mutu pembelajaran berkontribusi langsung terhadap peningkatan kompetensi, produktivitas, dan daya saing generasi muda. Selain itu, sektor pendidikan memiliki peran signifikan dalam mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mengurangi ketimpangan sosial, serta mencegah permasalahan sosial jangka panjang seperti kemiskinan dan pengangguran, sehingga penguatan akses dan kualitas pendidikan menjadi investasi strategis bagi keberlanjutan pembangunan Kota Tarakan

Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator yang menggambarkan jumlah tahun rata-rata yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.

Indikator ini mencerminkan tingkat pencapaian pendidikan masyarakat secara keseluruhan dan menjadi tolok ukur penting dalam menilai kualitas serta aksesibilitas pendidikan di suatu daerah, termasuk di Kota Tarakan. Untuk menghitung Angka Rata-Rata Lama Sekolah menggunakan Rumus

$$MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} \text{Lama Sekolah penduduk ke } i - 1$$

Keterangan

P_{15+} = Jumlah Penduduk berusia 15 tahun ke atas

Lama sekolah penduduk ke- i =

- Tidak pernah sekolah = 0
- Masih sekolah di SD sampai dengan SI = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1
- Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1
- Tidak bersekolah lagi dan tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir
- Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1

Untuk mengetahui capaian kinerja bidang pendidikan dengan indikator Angka Rata-Rata Lama Sekolah, maka dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

Tabel 2.12.

Capaian Indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Indikator Kinerja	Realisasi			2025			Akhir RPJMD (2029)	
	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
Rata-Rata Lama Sekolah	10.1	10.4	10.37	10.53	10.46	99.34	10.95	95.53

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2026

Data Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Tarakan menunjukkan tren peningkatan dalam periode 2022–2024 dari 10,1 tahun menjadi 10,37 tahun, yang mengindikasikan adanya perbaikan akses pendidikan dan keberlanjutan sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas. Pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 10,53 tahun dengan realisasi 10,46 tahun atau capaian 99,34%, sehingga meskipun belum sepenuhnya memenuhi target tahunan, kinerja indikator ini tergolong sangat baik dan relatif mendekati sasaran yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 10,95 tahun, capaian tahun 2025 telah mencapai 95,53%, yang menunjukkan bahwa akselerasi peningkatan lama sekolah perlu terus diperkuat, khususnya melalui penurunan angka putus sekolah, peningkatan partisipasi pendidikan menengah, serta perluasan akses pendidikan kesetaraan, agar target jangka menengah dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

Tabel 2.13.
**Perbandingan Capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah Sekolah
Kalimantan Utara dengan Capaian Nasional**

Indikator Sasaran	Realisasi						
	Nasional	Kaltara	Tarakan	Bulungan	Malinau	Nunukan	Tana Tidung
Rata-Rata Lama Sekolah	9,07	9,69	10,46	9,42	9,64	8,4	9,41

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2026

Berdasarkan Tabel, capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Tarakan sebesar 10,46 tahun menunjukkan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 9,07 tahun maupun rata-rata Provinsi Kalimantan Utara sebesar 9,69 tahun. Dibandingkan kabupaten/kota lain di Kalimantan Utara, Tarakan juga mencatat capaian tertinggi, melampaui Bulungan (9,42), Malinau (9,64),

Nunukan (8,40), dan Tana Tidung (9,41). Kondisi ini menunjukkan bahwa Kota Tarakan memiliki tingkat keberlanjutan pendidikan penduduk yang relatif lebih baik dan menjadi kontributor utama dalam mendorong capaian rata-rata provinsi. Meskipun demikian, keunggulan komparatif ini perlu diiringi dengan upaya berkelanjutan untuk menjaga tren peningkatan dan memperluas akses pendidikan menengah serta kesetaraan, agar posisi strategis Kota Tarakan tetap terjaga sekaligus mendukung peningkatan daya saing daerah secara regional maupun nasional.

Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kendala

Capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Tarakan yang mencapai 10,46 tahun dan berada di atas rata-rata provinsi maupun nasional menunjukkan bahwa keberlanjutan pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas relatif terjaga dengan baik. Keberhasilan ini erat kaitannya dengan karakteristik Kota Tarakan sebagai wilayah perkotaan yang memiliki akses pendidikan lebih terkonsentrasi, ketersediaan satuan pendidikan yang relatif lengkap dari jenjang dasar hingga menengah, serta dukungan pembiayaan pendidikan melalui berbagai skema bantuan bagi keluarga kurang mampu. Selain itu, tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan sebagai sarana mobilitas sosial juga berkontribusi dalam mendorong anak untuk menyelesaikan pendidikan minimal hingga jenjang menengah.

Namun demikian, dinamika RLS yang sempat mengalami fluktuasi pada 2024 mengindikasikan masih adanya tantangan dalam menjaga konsistensi lama sekolah penduduk. Faktor ekonomi keluarga, resiko putus sekolah pada jenjang menengah, serta keterbatasan partisipasi pada pendidikan tinggi menjadi variabel yang mempengaruhi

percepatan peningkatan RLS. Di samping itu, mobilitas penduduk dan masuknya kelompok usia kerja dengan latar belakang pendidikan beragam juga dapat mempengaruhi rata-rata capaian secara agregat.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Tarakan menunjukkan bahwa peningkatan capaian hingga 10,46 tahun dengan realisasi kinerja sebesar 99,34% terhadap target 2025 mengindikasikan pemanfaatan anggaran dan program pendidikan yang relatif efektif. Dengan capaian yang telah mencapai 95,53% dari target akhir RPJMD 2029, dapat diasumsikan bahwa intervensi yang dilakukan—seperti dukungan pembiayaan pendidikan, pengendalian angka putus sekolah, serta pemenuhan sarana prasarana—telah memberikan output yang sebanding dengan sumber daya yang dialokasikan. Hal ini mencerminkan bahwa strategi yang diterapkan tidak memerlukan ekspansi anggaran yang signifikan, melainkan optimalisasi program yang sudah berjalan.

Namun demikian, untuk mendorong peningkatan RLS yang semakin mendekati target 10,95 tahun pada 2029, pendekatan efisiensi perlu diarahkan pada intervensi yang lebih tepat sasaran. Fokus pembiayaan akan diprioritaskan pada kelompok rentan beresiko putus sekolah, peningkatan transisi ke jenjang pendidikan menengah dan tinggi, serta optimalisasi pendidikan kesetaraan bagi penduduk dewasa. Dengan demikian, setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar menghasilkan dampak langsung terhadap peningkatan

lama sekolah, bukan sekadar peningkatan output administratif.

Analisis Program/Kegiatan Penunjang

Analisis program/kegiatan penunjang dalam peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Tarakan menunjukkan bahwa keberhasilan indikator ini sangat dipengaruhi oleh konsistensi pelaksanaan program wajib belajar, pengendalian angka putus sekolah, serta dukungan pembiayaan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Program bantuan operasional sekolah, penyediaan perlengkapan pendidikan, serta fasilitasi transportasi bagi siswa pada wilayah tertentu menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan pendidikan hingga jenjang menengah. Di samping itu, penguatan peran satuan pendidikan dalam melakukan pemantauan kehadiran dan risiko putus sekolah turut menjadi faktor pendukung yang signifikan.

Selain program reguler pada pendidikan formal, keberadaan pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C) juga berkontribusi dalam meningkatkan lama sekolah penduduk usia dewasa yang belum menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Kegiatan sosialisasi pentingnya pendidikan, pelibatan orang tua melalui komite sekolah, serta koordinasi lintas perangkat daerah dalam penanganan anak tidak sekolah menjadi bagian dari ekosistem program penunjang yang memperkuat capaian RLS secara agregat.

Angka Harapan Lama sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS digunakan untuk mengetahui kondisi sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Untuk menghitung Angka Harapan Lama Sekolah Dinas Pendidikan Kota Tarakan Tahun 2024 menggunakan rumus adalah sebagai berikut :

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Keterangan

HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah di umur a ditahun t

E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah ditahun t

P_i^t = Jumlah penduduk usia i ditahun t

i = Usia ($a, a + 1, \dots, n$)

FK = Faktor Koreksi

Untuk mengetahui capaian kinerja bidang pendidikan dengan indikator Harapan Lama sekolah, maka dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

Tabel 2.14.
Capaian Indikator Angka Harapan Lama sekolah

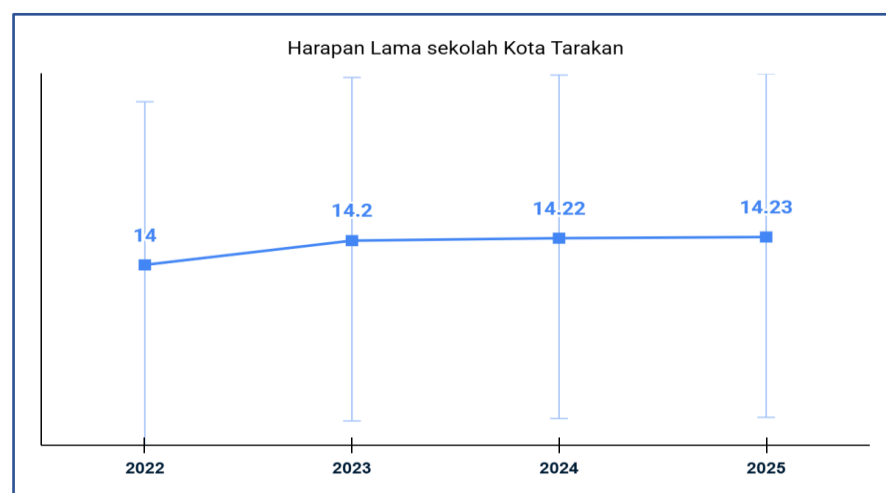
Indikator Kinerja	Realisasi			2025			Akhir RPJMD (2029)	
	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
Harapan Lama sekolah	14	14.2	14.22	14.41	14.23	98.75	14.92	95.38

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2026

Data Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Tarakan menunjukkan tren peningkatan dari 14,0 tahun pada 2022 menjadi 14,22 tahun pada 2024, yang mencerminkan adanya perbaikan ekspektasi lama pendidikan yang akan ditempuh oleh anak usia sekolah. Pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 14,41 tahun dengan realisasi 14,23 tahun atau capaian 98,75%, sehingga meskipun belum sepenuhnya mencapai target tahunan, kinerja indikator ini tetap berada pada kategori sangat baik karena mendekati sasaran yang ditetapkan.

Gambar 2.4.

Capaian Indikator Angka Harapan Lama sekolah



Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 14,92 tahun, capaian tahun 2025 telah mencapai 95,38%, yang menunjukkan bahwa percepatan peningkatan partisipasi pendidikan terutama pada jenjang menengah dan tinggi perlu terus diperkuat, guna memastikan keberlanjutan tren positif serta pencapaian target jangka menengah secara optimal dan berkelanjutan.

Tabel 2.15.
**Perbandingan Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Kalimantan
Utara dengan Capaian Nasional**

Indikator Sasaran	Realisasi						
	Nasional	Kaltara	Tarakan	Bulungan	Malinau	Nunukan	Tana Tidung
Harapan Lama sekolah	13,3	13,31	14,23	13,26	13,58	12,81	12,85

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2026

Berdasarkan perbandingan capaian Harapan Lama Sekolah (HLS), Kota Tarakan mencatat angka 14,23 tahun, yang berada di atas rata-rata nasional sebesar 13,3 tahun maupun rata-rata Provinsi Kalimantan Utara sebesar 13,31 tahun. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Kalimantan Utara, capaian Tarakan juga menjadi yang tertinggi, melampaui Bulungan (13,26), Malinau (13,58), Nunukan (12,81), dan Tana Tidung (12,85).

ondisi ini menunjukkan bahwa ekspektasi lama pendidikan anak usia sekolah di Tarakan relatif lebih baik, mencerminkan akses dan keberlanjutan pendidikan yang lebih terjamin. Posisi tersebut sekaligus menempatkan Tarakan sebagai kontributor utama dalam mendorong capaian pendidikan tingkat provinsi, namun tetap memerlukan penguatan kebijakan untuk menjaga konsistensi partisipasi hingga jenjang menengah dan pendidikan tinggi agar keunggulan komparatif ini dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kendala

Keberhasilan peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Tarakan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain ketersediaan satuan pendidikan yang relatif lengkap pada jenjang

dasar hingga menengah, dukungan program wajib belajar, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan sebagai instrumen mobilitas sosial dan peningkatan kesejahteraan. Karakteristik Tarakan sebagai wilayah perkotaan dengan aksesibilitas yang lebih baik dibanding daerah lain yang juga turut mendukung keberlanjutan partisipasi sekolah. Selain itu, keberadaan program bantuan pendidikan dan penguatan mutu pembelajaran berkontribusi dalam menjaga minat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala yang mempengaruhi percepatan peningkatan HLS, khususnya pada fase transisi ke pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi. Faktor ekonomi keluarga, keterbatasan akses terhadap pendidikan tinggi yang terjangkau, serta preferensi sebagian lulusan untuk langsung memasuki dunia kerja menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan ekspektasi lama sekolah. Di samping itu, mobilitas penduduk dengan latar belakang pendidikan yang beragam juga dapat memengaruhi dinamika capaian secara agregat. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang lebih terarah, terutama dalam bentuk dukungan pembiayaan, penguatan pendidikan vokasi, dan perluasan akses informasi pendidikan lanjutan agar peningkatan HLS dapat berlangsung lebih akseleratif dan berkelanjutan.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Peningkatan Harapan Lama Sekolah di Kota Tarakan menunjukkan bahwa intervensi pembangunan pendidikan telah diarahkan pada upaya memperluas ekspektasi keberlanjutan sekolah anak usia dini hingga jenjang menengah dan tinggi. Efisiensi penggunaan sumber daya terlihat dari fokus belanja pendidikan yang lebih

menitikberatkan pada peningkatan akses dan daya tarik sekolah, seperti dukungan biaya pendidikan, penyediaan sarana pembelajaran yang memadai, serta penguatan mutu layanan tanpa perlu ekspansi infrastruktur yang berlebihan. Optimalisasi satuan pendidikan yang sudah tersedia serta pemanfaatan program nasional secara sinergis juga mencerminkan pendekatan efisiensi berbasis kolaborasi pendanaan.

Namun demikian, untuk mendorong peningkatan ekspektasi lama sekolah hingga jenjang pendidikan yang lebih tinggi, efisiensi diperkuat melalui penajaman sasaran program pada kelompok usia transisi ke pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi. Penguatan integrasi data peserta didik, pemetaan minat dan bakat, serta dukungan beasiswa yang lebih tepat sasaran akan memastikan setiap alokasi anggaran benar-benar berkontribusi pada peningkatan keberlanjutan pendidikan.

Analisis Program/Kegiatan Penunjang

Pencapaian HLS didukung oleh berbagai program penunjang, antara lain pelaksanaan wajib belajar, fasilitasi bantuan pendidikan, serta penguatan literasi dan numerasi pada jenjang dasar sebagai fondasi keberlanjutan pendidikan. Selain itu, sosialisasi pentingnya pendidikan kepada masyarakat dan peran aktif sekolah dalam menjaga partisipasi siswa turut berkontribusi dalam membangun ekspektasi pendidikan yang lebih tinggi di kalangan keluarga.

Ke depan, program penunjang perlu diarahkan pada peningkatan transisi ke pendidikan menengah atas, vokasi, dan perguruan tinggi, termasuk pengembangan kerja sama dengan dunia usaha dan perguruan tinggi. Pendekatan preventif melalui deteksi dini risiko



putus sekolah serta penguatan layanan bimbingan konseling akan menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa harapan lama sekolah tidak hanya meningkat secara statistik, tetapi juga terealisasi secara nyata dalam keberlanjutan pendidikan generasi muda Kota Tarakan.



Tabel 2.16

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran terhadap Pencapaian Kinerja Tahun 2025 Indikator Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama sekolah

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rata-Rata Capaian (%)	Program Pendukung	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Rata-Rata Capaian (%)	Tingkat Efisiensi
Angka Rata-Rata Lama Sekolah	10,53	10,46	99,34	99,04	Program Pembinaan Perpustakaan	172.252.480,00	165.302.872,00	95,97	77,21	28,28% (Efisien)
Angka Harapan Lama sekolah	14,41	14,23	98,75		Program Pengelolaan Arsip	127.858.710,00	117.106.422,00	91,59		
					Program Pengembangan Kurikulum	69.867.200,00	41.039.316,00	58,74		
					Program Pengelolaan Pendidikan	79.868.119.720,00	73.941.818.469,00	92,58		
					Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	42.600.000,00	42.000.000,00	98,59		
					Program Pelestarian	21.950.000,00	20.350.620,00	92,71		



Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rata-Rata Capaian (%)	Program Pendukung	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Rata-Rata Capaian (%)	Tingkat Efisiensi
					Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno					
					Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	9.966.100,00	8.396.000,00	84,25		
					Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	315.815.500,00	254.045.000,00	80,44		
					Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	35.000.000,00	-	0,00		

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran *Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan* menunjukkan bahwa pencapaian indikator kinerja pendidikan telah didukung oleh pemanfaatan anggaran yang relatif optimal. Rata-rata capaian kinerja indikator mencapai 99,04%, sedangkan rata-rata realisasi anggaran program pendukung sebesar 77,21%, sehingga menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 28,28% dengan kategori efisien. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan mampu menghasilkan kinerja yang tinggi tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran secara maksimal, yang mencerminkan pengelolaan sumber daya yang cukup efektif dan terarah.

Dari sisi dukungan program, kontribusi terbesar berasal dari Program Pengelolaan Pendidikan yang memiliki porsi anggaran paling signifikan dalam mendukung penyelenggaraan layanan pendidikan, peningkatan mutu pembelajaran, serta operasional satuan pendidikan. Program lain seperti Program Pembinaan Perpustakaan, Program Pengelolaan Arsip, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta Program Pengendalian Perizinan Pendidikan turut memperkuat ekosistem pendidikan melalui peningkatan literasi, tata kelola, dan kapasitas tenaga pendidik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa program yang realisasinya belum optimal, seperti Program Pengembangan Kurikulum dan Program Pengembangan Bahasa dan Sastra, sehingga ke depan diperlukan penguatan perencanaan dan pelaksanaan program agar seluruh program pendukung dapat memberikan kontribusi yang lebih maksimal terhadap peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan di Kota Tarakan.

Sasaran 3 : Meningkatnya kesetaraan gender dan kualitas keluarga

Upaya meningkatkan kesetaraan gender dan kualitas keluarga di Kota Tarakan merupakan bagian dari strategi pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), ketahanan sosial, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kota Tarakan meningkatkan kesetaraan gender dan kualitas keluarga karena keduanya merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang sejahtera, berdaya saing, dan tangguh secara sosial maupun ekonomi. Tanpa keluarga yang kuat dan relasi gender yang setara, pembangunan daerah tidak akan berjalan optimal dan berkelanjutan.

Sebagai daerah yang berkembang dan memiliki dinamika sosial yang kompleks, Kota Tarakan membutuhkan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan daerah, penguatan peran keluarga dalam pendidikan dan perlindungan anak, kebijakan yang responsif gender dan inklusif dan integrasi isu gender dan keluarga dalam perencanaan dan penganggaran daerah

Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah indikator yang mengukur tingkat ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dalam tiga dimensi utama pembangunan manusia. Indeks ini digunakan secara global oleh United Nations Development Programme dan di Indonesia dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik.

Nilai IKG berada pada rentang **0-1**:

- **Semakin mendekati 0** → ketimpangan gender semakin rendah (lebih setara)
- **Semakin mendekati 1** → ketimpangan gender semakin tinggi

Untuk mengetahui capaian indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG), maka dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

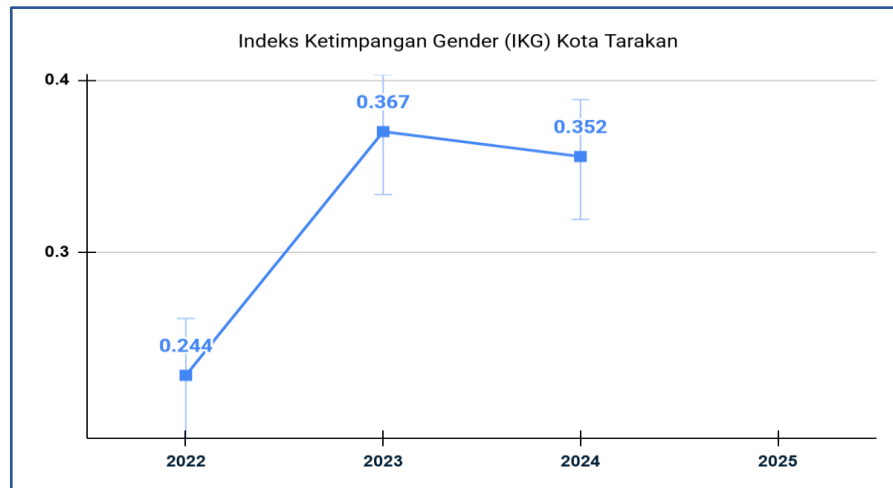
Tabel 2.17.
Capaian Indikator Indeks Ketimpangan Gender

Indikator Kinerja	Realisasi			2025			Akhir RPJMD (2029)	
	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,244	0,367	0,352	0,351	N/A	N/A	0,31	86,77

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2026

Capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) periode 2022–2024 menunjukkan tren yang berfluktuasi dan belum stabil. Pada tahun 2022 nilai IKG sebesar 0,244, kemudian meningkat tajam menjadi 0,367 pada tahun 2023 yang mengindikasikan terjadinya peningkatan ketimpangan gender. Pada tahun 2024 nilai tersebut menurun menjadi 0,352, menunjukkan adanya perbaikan dibanding tahun 2023, namun tingkat ketimpangan masih lebih tinggi dibanding kondisi tahun 2022. Dengan demikian, tren hingga 2024 memperlihatkan bahwa penurunan ketimpangan belum berlangsung konsisten dan masih memerlukan penguatan intervensi kebijakan.

Gambar 2.5.
Indeks Ketimpangan Gender



Untuk tahun 2025 ditetapkan target sebesar 0,351, namun data realisasi belum tersedia sehingga capaian kinerja belum dapat dihitung. Sementara itu, dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 0,31, posisi capaian hingga 2024 telah mencapai 86,77%. Artinya, masih terdapat selisih sebesar 0,042 poin yang perlu ditekan dalam sisa periode perencanaan agar sasaran penurunan ketimpangan gender dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

Tabel 2.18.
Perbandingan Capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Kalimantan Utara dengan Capaian Nasional Tahun 2024

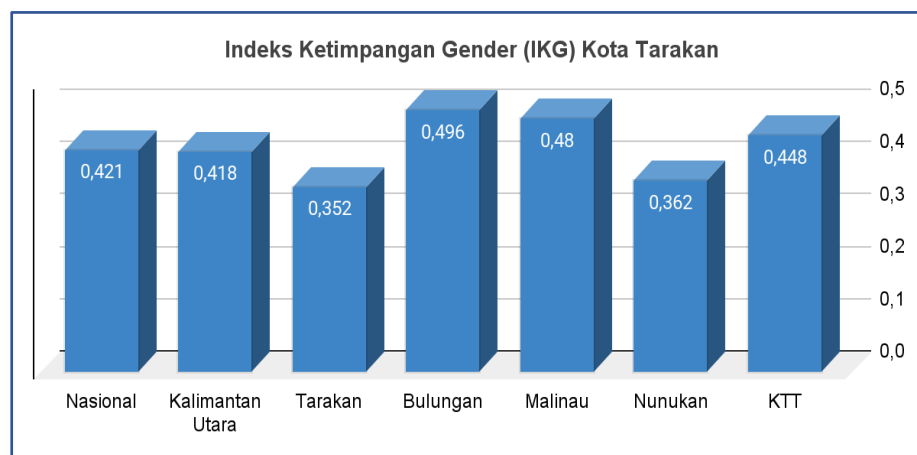
Indikator Sasaran	Realisasi						
	Nasional	Kaltara	Tarakan	Bulungan	Malinau	Nunukan	Tana Tidung
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,421	0,418	0,352	0,496	0,48	0,362	0,448

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2026

Capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Tarakan sebesar 0,352 menunjukkan kondisi yang relatif lebih baik dibandingkan rata-rata nasional (0,421) maupun Provinsi Kalimantan Utara (0,418). Jika

dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Kalimantan Utara, posisi Tarakan juga lebih rendah (lebih baik) dibanding Bulungan (0,496), Malinau (0,480), Nunukan (0,362), dan Tana Tidung/KTT (0,448). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan gender di Kota Tarakan relatif lebih terkendali dibandingkan wilayah sekitarnya.

Gambar 2.6.
Indeks Ketimpangan Gender Kota Tarakan



Meskipun demikian, nilai 0,352 masih menunjukkan adanya kesenjangan gender yang perlu terus ditekan, khususnya pada dimensi partisipasi ekonomi, pemberdayaan, dan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan. Dengan posisi yang sudah lebih baik dari rata-rata provinsi dan nasional, tantangan ke depan bukan hanya mempertahankan capaian, tetapi mendorong penurunan IKG secara lebih progresif agar ketimpangan semakin kecil dan kualitas pembangunan manusia semakin meningkat.

Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kendala

Posisi Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Tarakan sebesar 0,352 yang lebih baik dibanding rata-rata nasional dan provinsi menunjukkan adanya faktor pendukung yang cukup kuat. Beberapa penyebab keberhasilan antara lain meningkatnya akses perempuan terhadap pendidikan yang relatif setara dengan laki-laki, keterlibatan perempuan dalam sektor ekonomi perkotaan—khususnya perdagangan dan jasa—serta mulai menguatnya partisipasi perempuan dalam ruang-ruang publik dan perencanaan pembangunan. Selain itu, dukungan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak turut berkontribusi dalam memperbaiki dimensi pemberdayaan dan pasar kerja sebagai komponen pembentuk IKG.

Adapun kendala yang lebih substantif antara lain:

1. Kesenjangan partisipasi angkatan kerja perempuan yang masih tinggi, terutama pada pekerjaan formal dan sektor produktif bernilai tambah;
2. Rendahnya keterwakilan perempuan dalam posisi pengambil keputusan strategis, baik di sektor publik maupun non-publik;
3. Beban ganda perempuan dalam ranah domestik yang membatasi akses terhadap peluang ekonomi dan pengembangan kapasitas;
4. Masih terbatasnya pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran perangkat daerah (belum seluruh program berbasis analisis gender); serta
5. Kualitas dan konsistensi data terpilah gender yang belum sepenuhnya kuat untuk mendukung kebijakan berbasis bukti.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari perspektif tata kelola, efisiensi penggunaan sumber daya dalam upaya penurunan ketimpangan gender ditentukan oleh ketepatan sasaran, integrasi program, dan daya ungkit anggaran terhadap perubahan struktural. Secara umum, intervensi pemberdayaan perempuan telah berjalan melalui beberapa perangkat daerah, namun efektivitasnya sangat bergantung pada sejauh mana program tersebut benar-benar menysasar akar kesenjangan, seperti akses perempuan terhadap pekerjaan formal, peluang kepemimpinan, dan pengurangan beban ganda domestik. Apabila program masih bersifat seremonial, pelatihan jangka pendek tanpa keberlanjutan, atau belum terhubung dengan ekosistem pasar kerja, maka efisiensinya menjadi rendah karena tidak menghasilkan perubahan signifikan pada dimensi pembentuk IKG.

Selain itu, efisiensi juga dipengaruhi oleh kualitas perencanaan berbasis gender. Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang belum sepenuhnya terinternalisasi dapat menyebabkan alokasi anggaran tersebar dan tidak fokus pada kelompok sasaran prioritas. Keterbatasan data terpilah yang akurat dan mutakhir turut menghambat presisi intervensi, sehingga potensi duplikasi program atau salah sasaran masih mungkin terjadi. Ke depan, peningkatan efisiensi memerlukan konsolidasi program lintas sektor, penguatan basis data keluarga dan ketenagakerjaan perempuan, serta pengukuran kinerja berbasis outcome agar sumber daya yang digunakan benar-benar menghasilkan penurunan ketimpangan secara nyata dan berkelanjutan.

Analisis Program/Kegiatan Penunjang

Program dan kegiatan penunjang penurunan ketimpangan gender pada dasarnya tersebar di beberapa perangkat daerah dan berkontribusi pada dimensi utama pembentuk IKG, yaitu pemberdayaan, kesehatan reproduksi, dan partisipasi ekonomi. Pada dimensi pemberdayaan, berbagai kegiatan peningkatan kapasitas perempuan, pelibatan perempuan dalam forum perencanaan pembangunan, serta penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender berperan dalam memperluas akses perempuan terhadap ruang partisipasi dan pengambilan keputusan. Pada dimensi kesehatan reproduksi, program peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, penguatan edukasi kesehatan reproduksi remaja, serta upaya penurunan resiko kehamilan usia dini menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas kesehatan perempuan. Sementara itu, pada dimensi partisipasi ekonomi, kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan keterampilan, penguatan usaha mikro, serta fasilitasi akses usaha turut mendukung peningkatan keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi produktif.

Meskipun berbagai program tersebut telah berjalan dan memberikan kontribusi terhadap pengurangan ketimpangan gender, penguatan integrasi lintas sektor masih diperlukan agar intervensi yang dilakukan lebih terarah dan berdampak signifikan terhadap komponen penyusun IKG. Sebagian kegiatan masih berorientasi pada peningkatan kapasitas dan pembinaan secara umum, sehingga dampaknya terhadap peningkatan partisipasi perempuan di sektor formal maupun posisi strategis belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penajaman sasaran program berbasis data

terpilah gender, penguatan koordinasi antarperangkat daerah, serta pengukuran kinerja berbasis outcome agar setiap program dan kegiatan benar-benar berkontribusi secara langsung terhadap penurunan ketimpangan gender.

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga.

Definisi keluarga yang dipakai adalah:

1. Keluarga, adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Di luar definisi di atas dianggap sebagai keluarga khusus.
2. Keluarga khusus, adalah keluarga yang tidak memenuhi definisi keluarga, namun memiliki hubungan keluarga sesama anggotanya, misalnya kakak dan adik tanpa orang tua, seorang kakek/nenek dan cucunya, atau seorang diri (sebatang kara).

iBangga bernilai 0-100, dengan kategori sebagai berikut:

- Nilai iBangga di bawah 40, maka status pembangunan keluarga kurang baik (rentan)
- Nilai iBangga antara 40-70, maka status pembangunan keluarga cukup baik (berkembang)

Nilai iBangga di atas 70, maka status pembangunan keluarga baik (tangguh)

Meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Adapun konsep pembangunan keluarga yang terintegrasi dan komprehensif

seperti dicanangkan oleh Bappenas untuk RPJMN 2019-2025 adalah untuk mewujudkan keluarga yang kuat dan sejahtera dengan salah satu pendekatannya yaitu meningkatkan ketahanan keluarga melalui dimensi agama, landasan legalitas dan integritas keluarga, kesetaraan gender, pengasuhan dan perawatan, ekonomi, kebutuhan dasar dan sosio-budaya dan psikologi.

Dengan demikian, indikator pembangunan keluarga terdiri atas 3 dimensi yaitu kemandirian, ketenteraman dan kebahagiaan keluarga. Tujuan pembangunan keluarga ini diarahkan pada pencapaian keluarga berkualitas, berketahanan dan sejahtera lahir batin sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Untuk mengetahui capaian indikator Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.19
Capaian Indikator Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

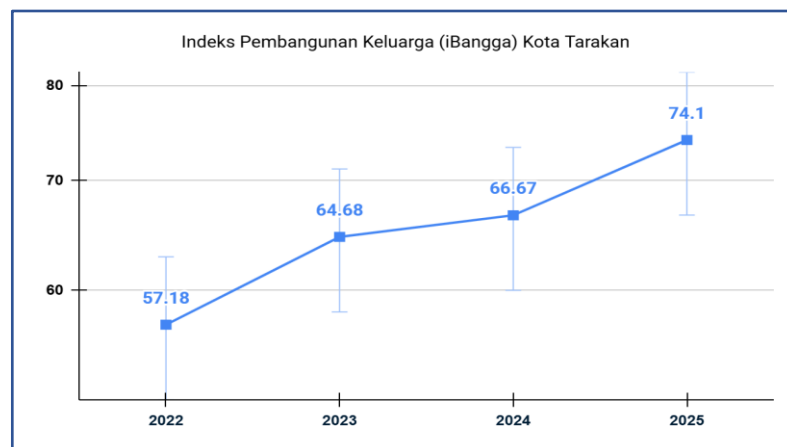
Indikator Kinerja	Realisasi			2025			Akhir RPJMD (2029)	
	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	57,18	64,68	66,67	66,9	74,10	110,76	68,68	107,89

Sumber : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2026

Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) menunjukkan tren yang sangat positif dalam periode 2022-2025. Nilai iBangga meningkat signifikan dari 57,18 pada tahun 2022 menjadi 64,68 pada tahun 2023, dan kembali naik menjadi 66,67 pada tahun 2024. Pada

tahun 2025, realisasi mencapai 74,10 dari target 66,9 atau sebesar 110,76%, yang menunjukkan kinerja melampaui target tahunan secara sangat optimal. Tren ini mengindikasikan adanya penguatan kualitas dan ketahanan keluarga yang konsisten dari tahun ke tahun.

Gambar 2.7
Capaian Indikator Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)



Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 68,68, capaian tahun 2025 telah mencapai 107,89%, artinya target jangka menengah telah terlampaui lebih awal. Kondisi ini mencerminkan efektivitas intervensi pembangunan keluarga, namun tetap perlu dijaga keberlanjutannya agar peningkatan kualitas keluarga tidak hanya tinggi secara indeks, tetapi juga merata dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

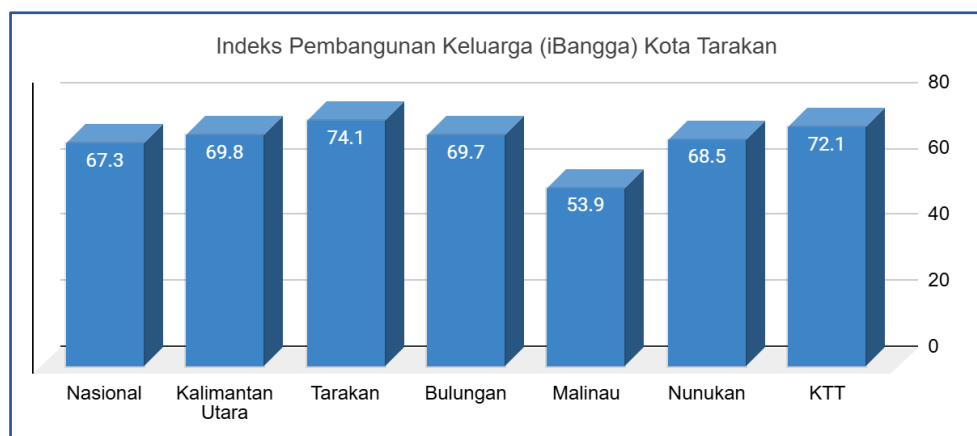
Tabel 2.20.
Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
Kalimantan Utara dengan Capaian Nasional

Indikator Sasaran	Realisasi						
	Nasional	Kaltara	Tarakan	Bulungan	Malinau	Nunukan	Tana Tidung
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	67,3	69,8	74,10	69,7	53,9	68,5	72,1

Sumber : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2026

Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kota Tarakan sebesar 74,10 menunjukkan kinerja yang sangat baik dibandingkan rata-rata nasional (67,3) maupun Provinsi Kalimantan Utara (69,8). Dibandingkan kabupaten/kota lain di Kalimantan Utara, Tarakan juga mencatat nilai tertinggi, melampaui Bulungan (69,7), Malinau (53,9), Nunukan (68,5), dan Tana Tidung/KTT (72,1). Hal ini menempatkan Tarakan sebagai daerah dengan capaian pembangunan keluarga paling unggul di tingkat provinsi.

Gambar 2.8.
Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
Kalimantan Utara dengan Capaian Nasional



Analisis penyebab Keberhasilan dan Kendala

Keberhasilan peningkatan iBangga dipengaruhi oleh penguatan intervensi pada dimensi ketenteraman dan kemandirian keluarga, terutama melalui akses layanan kesehatan dasar, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi keluarga. Sinergi lintas perangkat daerah dalam pengendalian stunting, peningkatan literasi pengasuhan, dan pembinaan keluarga pra-sejahtera turut meningkatkan kapasitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar dan menjaga stabilitas sosial. Selain itu, keberadaan jejaring kader dan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan memperluas jangkauan pembinaan hingga level mikro, sehingga intervensi tidak hanya bersifat administratif tetapi menyentuh unit keluarga secara langsung.

Di sisi lain, terdapat kendala struktural yang berpotensi menghambat keberlanjutan capaian. Ketahanan ekonomi keluarga masih rentan terhadap guncangan eksternal seperti inflasi dan fluktuasi pendapatan sektor informal. Ketimpangan kualitas pengasuhan dan literasi keluarga antarwilayah juga masih terjadi, terutama pada keluarga dengan tingkat pendidikan dan pendapatan rendah. Selain itu, integrasi data keluarga berbasis *by name by address* belum sepenuhnya optimal sehingga ketepatan sasaran intervensi masih perlu diperkuat. Tantangan sosial baru seperti tekanan psikososial keluarga perkotaan dan pengaruh digital terhadap pola relasi dalam keluarga juga menuntut pendekatan pembinaan yang lebih adaptif dan berbasis risiko. Tanpa penguatan pada aspek-aspek tersebut, peningkatan iBangga berisiko tidak sepenuhnya mencerminkan ketahanan keluarga yang kokoh dalam jangka panjang.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam peningkatan iBangga dapat dilihat dari kemampuan pemerintah daerah memanfaatkan program lintas sektor yang sudah eksisting tanpa harus membentuk struktur atau belanja baru yang bersifat duplikatif. Intervensi pembangunan keluarga pada dasarnya tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dalam program kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pengendalian stunting, serta pemberdayaan ekonomi keluarga. Pendekatan konvergensi ini meningkatkan efisiensi karena satu kegiatan dapat memberikan dampak pada beberapa dimensi sekaligus ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga, sehingga daya ungkit anggaran menjadi lebih optimal.

Namun demikian, dari perspektif efektivitas biaya (*cost-effectiveness*), masih terdapat ruang perbaikan. Sebagian intervensi pembinaan keluarga masih berorientasi pada output kegiatan (jumlah sosialisasi, jumlah peserta pelatihan) dan belum sepenuhnya mengukur perubahan perilaku atau peningkatan kapasitas keluarga sebagai outcome. Selain itu, keterbatasan integrasi data keluarga lintas perangkat daerah dapat menyebabkan potensi tumpang tindih sasaran atau belum terfokusnya alokasi pada keluarga dengan tingkat kerentanan tertinggi. Untuk meningkatkan efisiensi ke depan, diperlukan penajaman alokasi berbasis data mikro keluarga, penguatan pendekatan *by name by address*.

Analisis Program/Kegiatan Penunjang

Program dan kegiatan penunjang peningkatan iBangga pada dasarnya tersebar di beberapa perangkat daerah dan berkontribusi pada tiga dimensi utama: ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Pada dimensi ketenteraman, program perlindungan perempuan dan anak, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, konseling keluarga, serta penguatan ketahanan remaja menjadi instrumen penting dalam menciptakan stabilitas relasi dalam keluarga. Pada dimensi kemandirian, kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga, pelatihan kewirausahaan, dukungan UMKM keluarga, serta penguatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan berperan dalam meningkatkan kapasitas keluarga memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri. Sementara itu, pada dimensi kebahagiaan, edukasi pengasuhan, pembinaan keluarga harmonis, dan penguatan fungsi sosial keluarga menjadi faktor pendukung kualitas relasi dan kesejahteraan psikososial.

Secara substantif, program-program tersebut telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan indeks. Namun, dari sisi penguatan outcome, masih diperlukan penajaman desain intervensi agar tidak hanya berfokus pada aktivitas pembinaan, tetapi pada perubahan kapasitas dan perilaku keluarga secara terukur. Sinkronisasi lintas perangkat daerah juga perlu diperkuat agar tidak terjadi fragmentasi program yang berjalan sendiri-sendiri tanpa kerangka hasil yang terintegrasi. Ke depan, program penunjang perlu diarahkan lebih presisi pada keluarga rentan dan beresiko tinggi, memperkuat pendekatan berbasis data mikro, serta memastikan setiap kegiatan memiliki indikator

dampak yang terhubung langsung dengan komponen pembentuk iBangga. Dengan demikian, kontribusi program tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar memperkuat ketahanan dan kualitas keluarga secara berkelanjutan.

Tabel 2.21
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran terhadap Pencapaian Kinerja Tahun 2025
Indikator Indeks ketimpangan gender dan Indeks pembangunan keluarga

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rata-Rata Capaian (%)	Program Pendukung	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Rata-Rata Capaian (%)	Tingkat Efisiensi
Indeks ketimpangan gender	0.351	N/A	N/A	110.76	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	3,112,478,420.00	2,735,767,065.00	87.90	84.00	31,86% (Efisien)
Indeks pembangunan keluarga	66.9	74.10	110.76		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	127,672,000.00	125,728,580.00	98.48		
					Program Peningkatan Kualitas Keluarga	35,150,180.00	33,337,934.00	94.84		
					Program Administrasi Pemerintahan Desa	71,544,900.00	33,786,956.00	47.22		
					Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	4,589,200.00	4,456,173.00	97.10		
					Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	637,219,750.00	565,567,937.00	88.76		
					Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	1,118,546,000.00	1,079,058,191.00	96.47		
					Program Perlindungan Khusus Anak	362,921,370.00	260,968,825.00	71.91		
					Program Perlindungan Perempuan	267,594,580.00	157,640,406.00	58.91		
					Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	225,947,750.00	220,739,796.00	97.70		
					Program Pengendalian Penduduk	231,951,400.00	196,499,403.00	84.72		

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran meningkatnya kesetaraan gender dan kualitas keluarga dapat dilihat dari perbandingan antara capaian kinerja sasaran dengan tingkat realisasi anggaran program pendukung. Secara umum, berbagai program yang mendukung sasaran ini menunjukkan tingkat serapan anggaran yang cukup baik dengan rata-rata realisasi sekitar 84,00%, sementara rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 110,76%. Kondisi ini menunjukkan bahwa hasil kinerja yang dicapai relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pemanfaatan sumber daya yang digunakan. Dengan demikian, penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran dapat dinilai efisien, yang tercermin dari tingkat efisiensi sebesar 31,86% (Efisien).

Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh kontribusi berbagai program lintas sektor yang secara bersama-sama mendukung penguatan kesetaraan gender dan kualitas keluarga, seperti program pemberdayaan masyarakat, pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas keluarga, pembinaan keluarga berencana, perlindungan perempuan dan anak, serta pengendalian penduduk. Integrasi program yang menysar dimensi kesehatan keluarga, pemberdayaan ekonomi, perlindungan sosial, dan penguatan peran keluarga memungkinkan satu kegiatan memberikan dampak pada lebih dari satu aspek pembangunan keluarga. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa program dengan tingkat serapan anggaran yang relatif rendah sehingga perlu dilakukan penguatan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan agar alokasi sumber daya dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dan tetap menjaga efisiensi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Sasaran 4 : Menurunnya angka kemiskinan

Kota Tarakan sebagai pusat perdagangan dan jasa di Provinsi Kalimantan Utara memiliki peran strategis sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah. Namun demikian, karakteristik wilayah kepulauan dengan keterbatasan lahan dan tingginya biaya logistik menyebabkan sebagian masyarakat masih rentan terhadap gejolak ekonomi, terutama kenaikan harga kebutuhan pokok dan perlambatan aktivitas usaha. Kondisi tersebut berdampak pada kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan dasar secara layak, sehingga penurunan angka kemiskinan menjadi agenda penting dalam pembangunan daerah.

Upaya menurunkan angka kemiskinan di Kota Tarakan tidak hanya dimaknai sebagai penurunan persentase penduduk miskin secara statistik, tetapi juga sebagai strategi meningkatkan kesejahteraan, memperkuat daya saing sumber daya manusia, serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi daerah. Penurunan kemiskinan akan mendorong peningkatan daya beli masyarakat, memperluas akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan menjadi prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan secara terintegrasi, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Angka kemiskinan

Angka kemiskinan merupakan indikator penting dalam menilai kesejahteraan masyarakat dan efektivitas program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Menurunnya angka kemiskinan menunjukkan bahwa taraf hidup masyarakat semakin membaik, dengan lebih banyak warga yang memiliki akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan perumahan.

Pemerintah berupaya mengurangi angka kemiskinan melalui berbagai program strategis, seperti bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, program padat karya, serta peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan. Selain itu, penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta peningkatan investasi juga menjadi faktor penting dalam menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

Untuk mengetahui capaian indikator Angka Kemiskinan, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

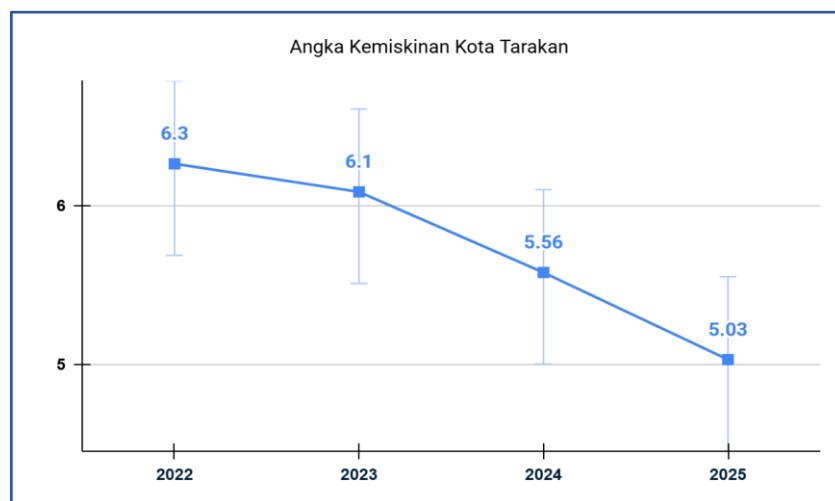
Tabel 2.22.

Capaian Indikator Angka Kemiskinan

Indikator Kinerja	Realisasi			2025			Akhir RPJMD (2029)	
	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
Angka Kemiskinan	6.3	6.1	5.56	5.4	5.03	106.85	4.18	79.67

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2026

Indikator Angka Kemiskinan pada Kota Tarakan menunjukkan tren penurunan yang konsisten dalam empat tahun terakhir. Realisasi tahun 2022 sebesar 6,30% menurun menjadi 6,10% pada 2023 dan kembali turun signifikan menjadi 5,56% pada 2024. Pada tahun 2025, ditargetkan sebesar 5,40%, dan realisasinya mampu mencapai 5,03%, dengan capaian kinerja 106,85%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan berjalan efektif dan melampaui target tahunan yang telah ditetapkan.

Gambar 2.9.**Capaian Indikator Angka Kemiskinan Kota Tarakan**

Meskipun capaian tahunan 2025 sangat baik, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 4,18%, maka progres kumulatif baru mencapai 79,67%. Artinya, masih terdapat gap sekitar 0,85 poin persentase yang perlu ditekan dalam periode tersisa. Dengan demikian, diperlukan penguatan strategi yang lebih terintegrasi, khususnya melalui pengendalian inflasi daerah, peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penajaman intervensi berbasis data keluarga miskin dan miskin ekstrem agar target akhir RPJMD dapat tercapai secara optimal.

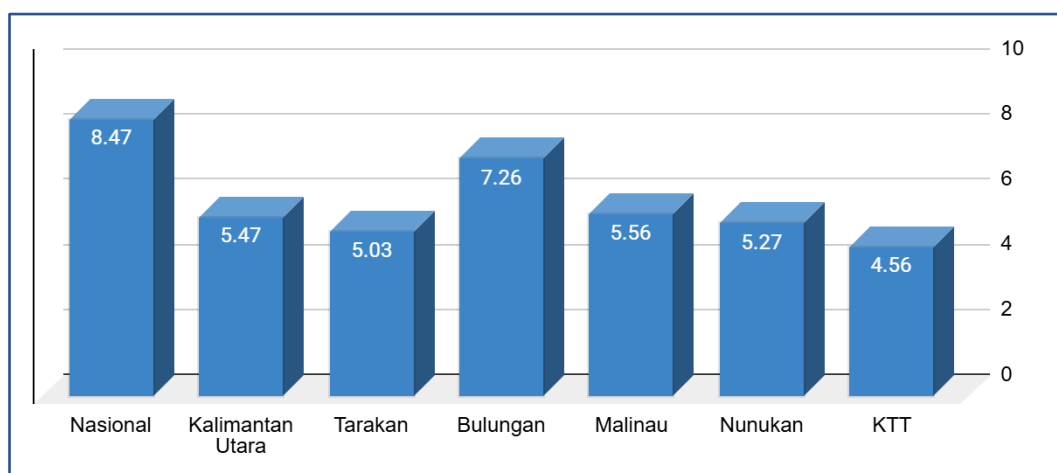
Tabel 2.23.
**Perbandingan Capaian Angka Kemiskinan Kalimantan Utara
dengan Capaian Nasional**

Indikator Sasaran	Realisasi						
	Nasional	Kaltara	Tarakan	Bulungan	Malinau	Nunukan	Tana Tidung
Angka Kemiskinan	8,47	5,47	5,03	7,26	5,56	5,27	4,56

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2026

Berdasarkan data tahun 2025, angka kemiskinan nasional tercatat sebesar 8,47 poin, sedangkan Provinsi Kalimantan Utara berada pada 5,47 poin atau lebih rendah dari rata-rata nasional. Kota Tarakan mencatat angka kemiskinan sebesar 5,03 poin, yang berarti lebih baik dibandingkan capaian provinsi maupun nasional. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Kalimantan Utara, angka kemiskinan tertinggi terdapat di Kabupaten Bulungan sebesar 7,26 poin, sementara yang terendah berada di Kabupaten Tana Tidung sebesar 4,56 poin.

Gambar 2.10.
**Perbandingan Capaian Angka Kemiskinan Kalimantan Utara
dengan Capaian Nasional**



Posisi Kota Tarakan yang berada di bawah rata-rata provinsi menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan telah berjalan cukup efektif dan kompetitif di tingkat regional. Meskipun demikian, masih terdapat ruang perbaikan untuk menekan angka kemiskinan agar semakin mendekati capaian daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di provinsi.

Angka kemiskinan ekstrem

Angka kemiskinan ekstrem adalah persentase penduduk yang berada jauh di bawah garis kemiskinan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk bertahan hidup secara layak. Secara nasional, kemiskinan ekstrem menjadi prioritas pemerintah untuk ditekan hingga mendekati nol persen melalui kebijakan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan intervensi berbasis data terpadu.

Bagi daerah seperti Kota Tarakan, penurunan angka kemiskinan ekstrem memiliki makna strategis karena kelompok ini merupakan rumah tangga paling rentan terhadap guncangan ekonomi, inflasi, maupun kehilangan mata pencaharian. Pengentasan kemiskinan ekstrem tidak hanya dilakukan melalui bantuan sosial, tetapi juga melalui peningkatan akses pekerjaan, penguatan UMKM, perbaikan kualitas hunian, serta integrasi program lintas perangkat daerah agar intervensi lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Untuk mengetahui capaian indikator Angka Kemiskinan Ekstrem, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.24

Capaian Indikator Angka Kemiskinan Ekstrem

Indikator Kinerja	Realisasi	2025			Akhir RPJMD (2029)	
	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
Angka Kemiskinan Ekstrem	0.93	0.5	N/A	N/A	0.00	50.00

sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2025

Indikator Angka Kemiskinan Ekstrem menunjukkan bahwa pada tahun 2022 dan 2023 data belum tersedia, sedangkan pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,93%. Tahun 2025 ditargetkan turun menjadi 0,50%, namun realisasi tahun berjalan belum tersedia sehingga capaian kinerja tahunan belum dapat dihitung. Adapun target akhir RPJMD tahun 2029 ditetapkan sebesar 0,00%, dengan progres capaian terhadap target akhir saat ini sebesar 50%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya penurunan kemiskinan ekstrem telah berada pada jalur yang tepat menuju penghapusan total pada akhir periode perencanaan. Meskipun demikian, diperlukan penguatan intervensi berbasis *by name by address*, integrasi bantuan sosial dengan pemberdayaan ekonomi produktif, serta kolaborasi lintas perangkat daerah agar rumah tangga miskin ekstrem tidak hanya terbentuk secara sementara, tetapi benar-benar keluar dari kondisi kemiskinan secara berkelanjutan.

Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kendala

Penurunan angka kemiskinan Kota Tarakan dari 6,30% pada tahun 2022 menjadi 5,03% pada tahun 2025 menunjukkan tren perbaikan yang konsisten. Keberhasilan ini tidak terlepas dari relatif stabilnya struktur ekonomi kota yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa, sehingga mampu menyerap tenaga kerja perkotaan secara cukup dinamis. Selain itu, penguatan perlindungan sosial dan intervensi pengendalian inflasi daerah turut menjaga daya beli kelompok rentan, terutama pada komoditas pangan strategis. Sinergi kebijakan pusat dan daerah dalam penanganan kemiskinan ekstrem juga berkontribusi terhadap penurunan jumlah rumah tangga dengan tingkat kerentanan tertinggi. Secara umum, kombinasi antara stabilitas ekonomi daerah, intervensi sosial yang adaptif, serta membaiknya akses layanan dasar menjadi faktor utama yang mendorong penurunan angka kemiskinan di Kota Tarakan.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala struktural yang perlu diantisipasi. Karakteristik Tarakan sebagai wilayah kepulauan dengan keterbatasan lahan dan ketergantungan pada distribusi logistik menyebabkan biaya hidup relatif tinggi dan sensitif terhadap gejolak harga. Struktur kemiskinan yang didominasi oleh pekerja sektor informal juga membuat sebagian rumah tangga rentan kembali jatuh miskin ketika terjadi perlambatan ekonomi atau kenaikan inflasi. Di sisi lain, meskipun angka kemiskinan menurun, progres menuju target akhir RPJMD sebesar 4,18% masih menyisakan gap yang signifikan, sehingga dibutuhkan percepatan yang lebih terarah. Tantangan lainnya terletak pada penguatan integrasi program lintas perangkat daerah agar intervensi tidak bersifat parsial, melainkan mampu mendorong graduasi keluarga miskin secara berkelanjutan.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator angka kemiskinan menunjukkan kinerja yang optimal. Target angka kemiskinan tahun 2025 sebesar 5,40% berhasil ditekan hingga mencapai 5,03%, sehingga menghasilkan tingkat capaian kinerja sebesar 106,85% atau melampaui target yang ditetapkan. Di sisi lain, realisasi anggaran dari program-program pendukung tercatat rata-rata sebesar 80,86% dari total alokasi anggaran yang tersedia. Perbandingan antara capaian kinerja yang melampaui target dengan tingkat serapan anggaran yang tidak mencapai 100% menunjukkan bahwa intervensi program telah dilaksanakan secara efisien. Hal ini tercermin dari nilai tingkat efisiensi sebesar 32,15% dengan kategori efisien, yang menunjukkan bahwa outcome penurunan kemiskinan dapat dicapai secara optimal tanpa memerlukan penggunaan seluruh sumber daya anggaran yang dialokasikan.

Dari sisi kontribusi program, pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa program utama, yaitu Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Program Penanganan Bencana. Program-program tersebut memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan sosial ekonomi kelompok masyarakat rentan melalui pemberian perlindungan sosial, rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan, serta dukungan penanganan kondisi kedaruratan yang berpotensi menurunkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun indikator angka kemiskinan ekstrem belum memiliki realisasi pada tahun 2025, pelaksanaan program-program tersebut tetap memberikan kontribusi dalam mencegah peningkatan

kerentanan sosial ekonomi dan memperkuat upaya pengurangan kemiskinan secara umum. Ke depan, efisiensi penggunaan sumber daya perlu terus ditingkatkan melalui penajaman sasaran program berbasis data terpadu, penguatan integrasi intervensi lintas perangkat daerah, serta peningkatan proporsi program yang bersifat pemberdayaan ekonomi produktif sehingga dampaknya terhadap penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem dapat semakin signifikan dan berkelanjutan.



Tabel 2.25
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran terhadap Pencapaian Kinerja Tahun 2025 Indikator Angka kemiskinan dan Angka kemiskinan ekstrem

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rata-Rata Capaian (%)	Program Pendukung	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Rata-Rata Capaian (%)	Tingkat Efisiensi
Angka kemiskinan	5.4	5.03	106.85	106.85	Program Pemberdayaan Sosial	22,511,000.00	17,946,930.00	79.73	80.86	32,15% (Efisien)
Angka kemiskinan ekstrem	0.5	N/A	N/A		Program Rehabilitasi Sosial	217,410,012.00	167,801,171.00	77.18		
					Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	113,676,500.00	83,198,965.00	73.19		
					Program Penanganan Bencana	45,457,200.00	42,427,000.00	93.33		

sumber : Bappeda Litbang, 2026

Analisis Program/Kegiatan Penunjang

Penurunan angka kemiskinan di Kota Tarakan tidak berdiri sendiri sebagai hasil satu program tertentu, melainkan merupakan akumulasi intervensi lintas sektor yang saling mendukung. Program perlindungan sosial yang dilaksanakan melalui perangkat daerah terkait berperan dalam menjaga daya beli rumah tangga rentan, khususnya pada periode tekanan inflasi pangan dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Intervensi tersebut bersifat stabilisasi jangka pendek, mencegah rumah tangga hampir miskin jatuh ke bawah garis kemiskinan. Namun demikian, kontribusi program ini lebih dominan pada aspek mitigasi risiko, bukan pada pengurangan kemiskinan secara struktural.

Di sisi lain, program pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan UMKM, fasilitasi akses permodalan, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja memiliki peran lebih strategis dalam mendorong penurunan kemiskinan secara berkelanjutan. Mengingat struktur ekonomi Tarakan yang didominasi sektor perdagangan dan jasa, dukungan terhadap pelaku usaha mikro dan pekerja informal menjadi faktor penting dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga. Selain itu, intervensi pada sektor perumahan layak huni, sanitasi, pendidikan, dan kesehatan turut memperbaiki dimensi non-pendapatan kemiskinan, yang secara tidak langsung memperkuat ketahanan sosial ekonomi keluarga miskin.

Meskipun berbagai program telah berjalan, efektivitasnya masih memerlukan penguatan dari sisi integrasi dan ketepatan sasaran. Tantangan utama terletak pada konsolidasi data keluarga miskin antar perangkat daerah agar intervensi benar-benar berbasis by name by address dan mendorong graduasi, bukan sekadar mempertahankan penerima manfaat yang sama setiap tahun. Selain

itu, pengukuran kontribusi masing-masing program terhadap penurunan angka kemiskinan belum sepenuhnya terkuantifikasi, sehingga evaluasi masih cenderung berbasis output kegiatan. Ke depan, diperlukan pendekatan yang lebih terstruktur melalui peta intervensi terpadu, penetapan indikator antara (intermediate outcome), serta monitoring berkala terhadap keluarga sasaran, sehingga program penunjang tidak hanya banyak secara kuantitas, tetapi efektif dalam mempercepat pencapaian target kemiskinan RPJMD secara terukur dan berkelanjutan.

Misi 2 : Meningkatkan pemerataan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar yang handal

Tujuan 2 : Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur daerah

Kota Tarakan sebagai daerah kepulauan dengan karakteristik geografis pesisir menghadapi tantangan infrastruktur yang cukup kompleks, mulai dari keterbatasan konektivitas antar wilayah, kerentanan terhadap genangan dan abrasi, hingga tekanan pertumbuhan kawasan permukiman yang terus meningkat. Infrastruktur yang belum merata dan belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan masyarakat berpotensi menurunkan kualitas hidup, menghambat mobilitas barang dan jasa, serta mempengaruhi daya saing daerah. Dalam konteks tersebut, kepuasan masyarakat menjadi indikator penting karena tidak hanya mencerminkan ketersediaan infrastruktur, tetapi juga kualitas, aksesibilitas, dan kebermanfaatannya secara nyata bagi warga.

Selain itu, paradigma pembangunan daerah saat ini menekankan pendekatan *outcome-oriented*, di mana keberhasilan tidak lagi semata diukur dari panjang jalan yang dibangun atau jumlah proyek yang diselesaikan, melainkan dari sejauh mana pelayanan tersebut dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan menjadikan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur sebagai tujuan, Pemerintah Kota Tarakan menegaskan komitmen untuk menghadirkan pembangunan yang lebih responsif, partisipatif, dan berorientasi pada dampak. Pendekatan ini sekaligus mendorong perangkat daerah untuk memperkuat perencanaan berbasis kebutuhan riil, meningkatkan kualitas pemeliharaan, serta memastikan keberlanjutan layanan infrastruktur secara konsisten.

Sampai dengan periode pelaporan, analisis terhadap capaian sasaran *Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Infrastruktur Daerah* belum dapat dilakukan secara komprehensif karena indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) belum tersedia. Ketiadaan data tersebut menyebabkan pengukuran outcome belum dapat dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, sehingga evaluasi terhadap tingkat kepuasan masyarakat masih bersifat kualitatif dan berbasis pada indikator antara seperti progres fisik dan penanganan aduan.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Tarakan perlu menetapkan metodologi pengukuran IKLI secara jelas, termasuk instrumen survei, mekanisme pengumpulan data, serta periode pelaksanaan yang konsisten setiap tahun. Penyediaan indikator ini menjadi penting untuk memastikan bahwa kinerja pelayanan infrastruktur dapat diukur secara objektif, terstandar, dan berkelanjutan, sehingga analisis capaian pada tahun berikutnya dapat dilakukan secara lebih akurat dan berbasis data.

Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran dan indikator-indikator yang akan diukur sesuai definisi operasional dari masing-masing indikator yaitu :

Tabel 2.26
Sasaran dan Indikator

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISA SI	CAPAIA N (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur dan daerah	Indeks Infrastruktur	67,15	68,47	101,97
2	Meningkatnya layanan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	71,08	77,68	109,29

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tarakan (BPS), DP3APPKB Kota Tarakan, 2026

Sasaran 5 : Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar daerah **Indeks Infrastruktur**

Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar daerah menjadi kebutuhan strategis bagi Kota Tarakan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemerataan pembangunan antarwilayah. Infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, air minum, sanitasi, dan penerangan jalan merupakan prasyarat utama bagi kelancaran mobilitas, aktivitas sosial, dan pelayanan publik. Kondisi infrastruktur yang belum optimal, baik dari sisi kemandirian, cakupan layanan, maupun keberlanjutan pemeliharaan, dapat menimbulkan hambatan terhadap produktivitas

masyarakat dan meningkatkan risiko permasalahan lingkungan seperti genangan dan penurunan kualitas permukiman.

Selain itu, tantangan karakteristik wilayah pesisir dan kepadatan penduduk di beberapa kawasan Kota Tarakan menuntut penyediaan infrastruktur yang tidak hanya memadai secara kuantitas, tetapi juga berkualitas dan berketahanan terhadap perubahan iklim serta dinamika pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas infrastruktur dasar diarahkan tidak hanya pada pembangunan fisik baru, tetapi juga pada peningkatan standar teknis, pemeliharaan berkelanjutan, dan pemerataan akses layanan. Pendekatan ini diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan yang lebih layak huni, mendukung daya saing daerah, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Penggunaan Indeks Infrastruktur memungkinkan Pemerintah Kota Tarakan melakukan pengukuran berbasis outcome, tidak hanya pada jumlah pembangunan fisik, tetapi pada peningkatan kualitas dan kebermanfaatannya secara menyeluruh. Melalui pendekatan indeks, capaian pembangunan dapat dianalisis secara lebih objektif dan terstandar dari waktu ke waktu, sekaligus menjadi dasar dalam menetapkan prioritas intervensi pada sektor yang masih memiliki tingkat kualitas rendah. Dengan demikian, peningkatan Indeks Infrastruktur diharapkan berkontribusi langsung terhadap peningkatan daya saing daerah dan kualitas hidup masyarakat.

Indeks infrastruktur adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat perkembangan dan kualitas infrastruktur di suatu wilayah atau sektor tertentu. Indeks ini biasanya dihitung berdasarkan berbagai indikator yang mencerminkan ketersediaan dan aksesibilitas infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, dan transportasi

Formulasi :

$$\text{Indeks Infrastruktur} = \sum_{i=1}^n (w_i \times I_i)$$

Keterangan:

- I_i = Nilai indikator ke-i (setelah dinormalisasi ke skala 0–100)
- w_i = Bobot indikator ke-i (ditentukan oleh pentingnya indikator)
- Hasil akhir: Skala 0–100, makin tinggi makin baik

Untuk mengetahui capaian indikator Indeks Infrastruktur, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.27.

Capaian Indikator Indeks Infrastruktur

Indikator Kinerja	Realisasi			2025			Akhir RPJMD (2029)	
	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
Indeks Infrastruktur	N/A	N/A	66,31	67,15	68,47	101,97	71,18	96,19

Sumber : Bappeda Litbang Kota Tarakan, 2026

Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kendala

Capaian indikator Indeks Infrastruktur pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang baik dengan realisasi sebesar 68,47 dari target 67,15, sehingga tingkat capaian mencapai 101,97%. Keberhasilan ini antara lain didukung oleh pelaksanaan berbagai program pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar daerah, khususnya pada sektor permukiman, penataan bangunan, serta penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum. Intervensi pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kualitas

kawasan permukiman dan penyediaan infrastruktur pendukung permukiman berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan infrastruktur secara bertahap. Selain itu, sinergi antara perencanaan pembangunan daerah dengan program sektoral serta dukungan pelaksanaan kegiatan yang relatif stabil turut mendorong tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan.

Meskipun capaian indikator telah melampaui target tahunan, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 71,18, realisasi tahun 2025 baru mencapai 96,19% dari target jangka menengah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang peningkatan untuk mencapai target akhir periode perencanaan. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain masih adanya keterbatasan cakupan layanan infrastruktur di beberapa kawasan, kebutuhan pemeliharaan infrastruktur yang terus meningkat, serta dinamika perkembangan wilayah perkotaan yang menyebabkan kebutuhan pembangunan infrastruktur baru terus bertambah.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur secara menyeluruh serta kompleksitas teknis pada beberapa kawasan dengan kondisi geografis dan kepadatan permukiman yang tinggi. Kondisi tersebut memerlukan perencanaan yang lebih terintegrasi, penajaman prioritas pembangunan, serta penguatan sinergi pembiayaan antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pihak terkait lainnya agar peningkatan kualitas infrastruktur daerah dapat berlangsung secara lebih optimal dan berkelanjutan hingga akhir periode RPJMD.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian indikator Indeks Infrastruktur pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang baik. Target indeks sebesar 67,15 berhasil direalisasikan sebesar 68,47, sehingga tingkat capaian mencapai 101,97% dari target yang telah ditetapkan. Sementara itu, rata-rata realisasi anggaran dari program-program pendukung tercatat sebesar 80,00% dari total pagu anggaran. Perbandingan antara capaian kinerja yang melampaui target dengan tingkat penyerapan anggaran tersebut menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan proporsi sumber daya yang digunakan, sehingga menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 27,46% dengan kategori efisien.



Tabel 2.28
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran terhadap Pencapaian Kinerja Tahun 2025 Indikator Indeks Infrastruktur

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rata-Rata Capaian (%)	Program Pendukung	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Rata-Rata Capaian (%)	Tingkat Efisiensi
Indeks Infrastruktur	67,15	68,47	101,97	101,97	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	22.444.140.090,00	21.207.691.142,00	94,49	80,00	27,46% (Efisien)
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	3.777.594.832,00	3.705.339.406,84	98,09		
					Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	1.450.000.000,00	761.538.300,00	52,52		
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	56.033.167.461,31	51.817.561.746,52	92,48		
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	599.721.400,00	32.659.000,00	5,45		
					Program Penyelenggaraan Jalan	61.204.668.061,21	60.222.350.818,00	98,40		
					Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	4.369.995.225,00	4.325.073.401,00	98,97		
					Program Pengelolaan Pelayaran	946.473.000,00	942.568.166,00	99,59		

Sumber : Bappeda Litbang, 2026

Capaian kinerja tersebut didukung oleh sejumlah program strategis yang berkaitan dengan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar daerah. Program Penyelenggaraan Jalan dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase menjadi kontributor utama karena memiliki porsi anggaran terbesar dengan tingkat realisasi yang tinggi, masing-masing sebesar 98,40% dan 92,48%. Selain itu, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, serta Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum juga menunjukkan tingkat realisasi anggaran yang tinggi sehingga turut mendukung peningkatan kualitas layanan infrastruktur yang tercermin pada peningkatan nilai indeks.

Namun demikian, masih terdapat beberapa program dengan tingkat realisasi anggaran yang relatif rendah, seperti Program Pengelolaan Sumber Daya Air dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, yang menunjukkan adanya kendala dalam pelaksanaan kegiatan atau perencanaan program. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat ruang untuk meningkatkan optimalisasi pelaksanaan kegiatan agar kontribusi program terhadap peningkatan kualitas infrastruktur dapat lebih maksimal. Ke depan, penguatan perencanaan program berbasis kebutuhan prioritas infrastruktur serta peningkatan koordinasi antarperangkat daerah diharapkan dapat semakin meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Analisis Program/Kegiatan Penunjang

Sejalan dengan hasil Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya yang menunjukkan bahwa pencapaian indikator Indeks Infrastruktur pada tahun 2025 dapat diraih secara efisien, capaian kinerja tersebut juga didukung oleh pelaksanaan berbagai program pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan secara terintegrasi. Program-program tersebut meliputi pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan jalan, sistem drainase, penyediaan air minum, pengelolaan persampahan, serta pengaturan lalu lintas dan pelayaran. Dukungan lintas sektor ini berperan dalam meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar daerah secara bertahap, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan nilai Indeks Infrastruktur yang melampaui target yang telah ditetapkan.

Di antara program-program tersebut, Program Penyelenggaraan Jalan dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase menjadi kontributor utama karena memiliki alokasi anggaran yang relatif besar serta tingkat realisasi yang tinggi, sehingga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan konektivitas wilayah dan kualitas lingkungan perkotaan. Selain itu, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, serta Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional turut mendukung peningkatan kualitas layanan infrastruktur dasar. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa program dengan tingkat realisasi yang relatif rendah, seperti Program Pengelolaan Sumber Daya Air dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, yang menunjukkan adanya ruang untuk peningkatan optimalisasi pelaksanaan kegiatan agar kontribusi

program terhadap peningkatan Indeks Infrastruktur dapat semakin maksimal.

Sasaran 6 : Meningkatnya layanan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan.

Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak terjangkau dan berkelanjutan

Meningkatnya layanan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan menjadi agenda penting dalam pembangunan Kota Tarakan, mengingat masih terdapat tantangan dalam pemenuhan standar kelayakan rumah, keterjangkauan biaya hunian, serta kualitas lingkungan permukiman. Pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan perkotaan berpotensi meningkatkan tekanan terhadap penyediaan hunian, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terintegrasi untuk memastikan setiap rumah tangga memiliki akses terhadap hunian yang memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan, sekaligus tetap terjangkau secara ekonomi.

Untuk mengukur capaian sasaran tersebut digunakan indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan. Rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi: a. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat b. Prasyarat tata

ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut: 1. Ketahanan bangunan (*durable housing*) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat, 2. Kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*) yaitu luas lantai perkapita 7,2 m² 3. Memiliki akses air minum layak 4. Memiliki akses sanitasi layak

Formulasi :

$$PHLTB = \frac{JRTHLTB}{JRT \times 100}$$

PHLTB : Persentase Rumah Tangga Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan

JRTHL : Jumlah Rumah Tangga Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan

JRT : Jumlah Rumah Tangga

Untuk mengetahui capaian indikator Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.29.
**Capaian Indikator Indeks Persentase Rumah Tangga dengan
Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan**

Indikator Kinerja	Realisasi			2025			Akhir RPJMD (2029)	
	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	-	-	68,54	71,08	77,68	109,29	80,11	96,97

Sumber : DPRKPP Kota Tarakan, 2026

Indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan menunjukkan bahwa data belum tersedia pada tahun 2022 dan 2023, sehingga tren peningkatan jangka menengah belum dapat dianalisis secara longitudinal. Pada tahun 2024, realisasi tercatat sebesar 68,54%, dan pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 71,08%. Realisasi tahun 2025 mencapai 68,53%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 96,41% dari target tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran belum sepenuhnya tercapai, meskipun selisihnya relatif kecil. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 80,11%, capaian hingga tahun 2025 baru mencapai 85,54% dari target akhir tersebut. Artinya, masih terdapat gap sekitar 11,58 poin persentase yang perlu dikejar dalam sisa periode perencanaan.

Tabel 2.30.

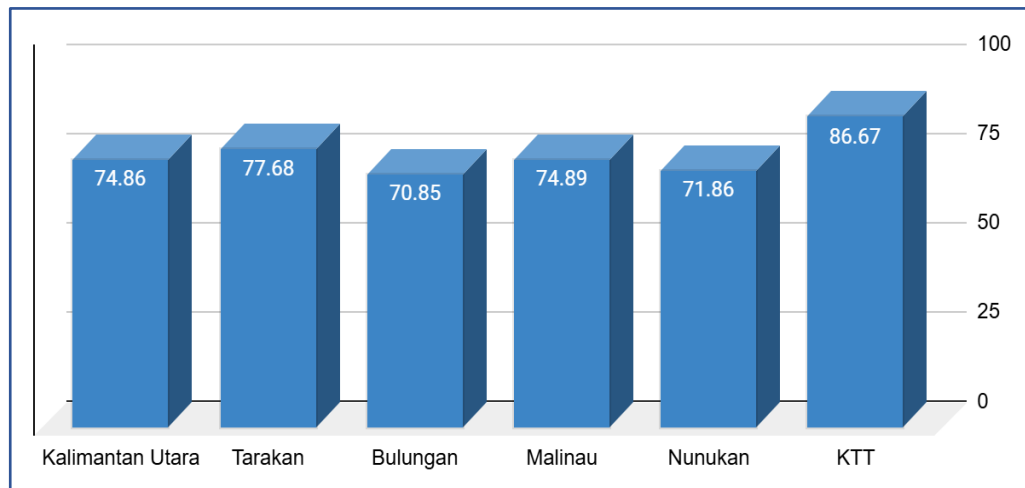
Perbandingan Capaian Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan Kalimantan Utara

Indikator Sasaran	Realisasi					
	Kaltara	Tarakan	Bulungan	Malinau	Nunukan	Tana Tidung
Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	74,86	77,68	70,85	74,89	71,86	86,67

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2026

Berdasarkan hasil benchmarking regional, capaian indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan di Kota Tarakan tercatat sebesar 77,68 poin. Nilai ini berada di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Utara yang sebesar 74,86 poin, serta lebih tinggi dibandingkan beberapa kabupaten di wilayah yang sama, yaitu Bulungan (70,85 poin), Malinau (74,89 poin), dan Nunukan (71,86 poin). Jika dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Utara, posisi Kota Tarakan menempati peringkat kedua tertinggi, yang menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap hunian layak di Kota Tarakan relatif lebih baik dibandingkan sebagian besar wilayah kabupaten di provinsi tersebut. Kondisi ini mengindikasikan bahwa intervensi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Tarakan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hunian masyarakat.

Gambar 2.11.
**Capaian Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak,
terjangkau dan berkelanjutan Kalimantan Utara**



Namun demikian, capaian Kota Tarakan masih berada di bawah Kabupaten Tana Tidung yang memiliki nilai tertinggi sebesar 86,67 poin, dengan selisih sekitar 8,99 poin. Gap ini menunjukkan masih adanya ruang peningkatan, terutama dalam memperluas cakupan layanan hunian layak melalui peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, penyediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) permukiman, serta penataan kawasan permukiman secara lebih terintegrasi. Oleh karena itu, hasil benchmarking regional ini dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Kota Tarakan dalam mengidentifikasi praktik baik dari daerah dengan capaian lebih tinggi serta memperkuat strategi intervensi agar peningkatan akses hunian layak dapat berlangsung lebih cepat dan merata. Meskipun capaian tahun 2025 belum sepenuhnya memenuhi target, realisasi yang mendekati target (96,41%) menunjukkan adanya faktor-faktor pendukung yang cukup signifikan. Keberhasilan tersebut antara lain didorong oleh :

1. Perencanaan Berbasis Prioritas Kawasan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Tarakan menetapkan lokasi kegiatan berdasarkan data kebutuhan riil di lapangan dan tingkat prioritas kawasan permukiman. Dengan cara ini, pembangunan dan peningkatan PSU difokuskan pada kawasan yang paling membutuhkan, sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran dan secara nyata menambah jumlah rumah yang terlayani sarana dan prasarana permukiman.
2. Dukungan Kebijakan dan Sinkronisasi Program Nasional, kesesuaian arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional bidang perumahan dan permukiman. Mempermudah integrasi program dan membuka peluang dukungan pembiayaan.
3. Stabilitas Kondisi Sosial dan Partisipasi Masyarakat, kondisi sosial masyarakat yang kondusif mendukung pelaksanaan kegiatan fisik. Meminimalisir hambatan sosial dan mempercepat penyelesaian pekerjaan.

Di sisi lain, belum tercapainya target secara penuh dipengaruhi oleh beberapa kendala struktural dan teknis, yaitu :

- Cakupan Layanan Masih Relatif Rendah Secara Total, dari total 79.111 unit rumah, yang telah dilengkapi PSU baru 28.433 unit (35,94%). Artinya masih terdapat sekitar 64,06% rumah yang belum memperoleh layanan PSU secara memadai
- Pertumbuhan Permukiman Lebih Cepat dari Intervensi, perkembangan kawasan perumahan baru dan

pertumbuhan jumlah rumah terus meningkat setiap tahun. Permasalahannya adalah penambahan rumah baru berpotensi memperbesar denominator indikator dan jika tidak diimbangi intervensi yang masif, persentase capaian bisa stagnan atau menurun.

- Kompleksitas Teknis pada Kawasan Tertentu, sebagian kawasan memiliki kepadatan tinggi, keterbatasan lahan, atau kondisi geografis tertentu. Permasalahannya yaitu biaya intervensi lebih tinggi dan pelaksanaan teknis lebih kompleks dan membutuhkan perencanaan matang.



Tabel 2.31

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran terhadap Pencapaian Kinerja Tahun 2025 Indikator Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak terjangkau dan berkelanjutan

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rata-Rata Capaian (%)	Program Pendukung	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Rata-Rata Capaian (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak terjangkau dan berkelanjutan	71.08	77.68	109.29	109.29	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	8,735,652,600.00	7,768,163,198.00	88.92	91.66	19,23% (Efisien)
					Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1,255,402,800.00	1,142,514,409.00	91.01		
					Program Penataan Bangunan Gedung	28,217,000,425.00	21,679,345,126.89	76.83		
					Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	123,695,730.00	122,117,040.00	98.72		
					Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	40,561,864,490.00	39,981,269,259.00	98.57		
					Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	2,114,669,300.00	2,110,627,977.00	99.81		



Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rata-Rata Capaian (%)	Program Pendukung	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Rata-Rata Capaian (%)	Tingkat Efisiensi
					Program Kawasan Permukiman	1,409,134,260.00	1,366,532,328.00	96.98		
					Program Pengembangan Perumahan	350,836,380.00	289,229,950.00	82.44		

Sumber : Bappeda Litbang, 2026

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Target indikator sebesar 71,08% berhasil direalisasikan sebesar 77,68%, sehingga tingkat capaian mencapai 109,29% dari target yang ditetapkan. Sementara itu, rata-rata realisasi anggaran dari program-program pendukung tercatat sebesar 91,66% dari total pagu anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat penggunaan anggaran, sehingga menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 19,23% dengan kategori efisien.

Dari sisi dukungan program, pencapaian indikator ini ditopang oleh beberapa program strategis yang berkaitan dengan penataan bangunan, pengembangan kawasan permukiman, serta penyediaan prasarana dan utilitas permukiman. Program dengan alokasi anggaran terbesar yaitu Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan tingkat realisasi sebesar 98,57%, yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas infrastruktur dasar permukiman. Selain itu, Program Penataan Bangunan Gedung, Program Penataan Bangunan dan Lingkungan, serta Program Kawasan Permukiman turut mendukung peningkatan kualitas hunian dan lingkungan permukiman, sedangkan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh berperan dalam peningkatan kualitas kawasan yang sebelumnya memiliki tingkat kelayakan hunian yang rendah.

Secara keseluruhan, capaian efisiensi ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pada sektor perumahan dan kawasan

permukiman telah dimanfaatkan secara cukup optimal untuk menghasilkan kinerja yang melampaui target yang ditetapkan. Meskipun demikian, masih terdapat variasi tingkat realisasi anggaran antarprogram, seperti pada Program Penataan Bangunan Gedung dan Program Pengembangan Perumahan, yang menunjukkan adanya ruang untuk peningkatan optimalisasi pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, penguatan perencanaan berbasis prioritas kawasan serta peningkatan integrasi antarprogram diharapkan dapat semakin meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Namun demikian, jika dilihat dari total cakupan layanan, efisiensi secara agregat masih menghadapi tantangan. Dari 79.111 unit rumah yang ada, baru 28.433 unit (35,94%) yang telah memperoleh layanan PSU, sehingga masih terdapat 64,06% rumah yang belum terlayani secara memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan program cukup efektif pada lokasi sasaran, skala intervensi belum cukup besar untuk menghasilkan lonjakan persentase capaian secara signifikan. Selain itu, pertumbuhan permukiman baru setiap tahun memperbesar basis penghitungan (denominator) indikator, sehingga peningkatan jumlah rumah terlayani tidak selalu diikuti peningkatan persentase yang proporsional.

Kompleksitas teknis pada kawasan padat dan wilayah dengan keterbatasan lahan juga mempengaruhi tingkat efisiensi biaya. Intervensi pada kawasan tersebut membutuhkan biaya lebih tinggi per unit layanan, perencanaan teknis lebih detail, serta waktu pelaksanaan yang lebih panjang. Dengan demikian, ke depan diperlukan strategi peningkatan efisiensi melalui pemetaan biaya per

kawasan, penajaman skala prioritas berbasis dampak, serta inovasi skema pembiayaan kolaboratif agar setiap tambahan anggaran mampu menghasilkan peningkatan cakupan layanan yang lebih signifikan dan berkelanjutan.

Analisis Program/Kegiatan Penunjang

Capaian indikator *Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan* didukung oleh sejumlah program dan kegiatan strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Tarakan. Program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH), pembangunan dan rehabilitasi prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) permukiman, serta penataan kawasan kumuh menjadi kontributor utama terhadap peningkatan jumlah rumah tangga yang memperoleh akses hunian layak. Kegiatan tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas fisik bangunan, tetapi juga memperbaiki akses jalan lingkungan, drainase, dan sanitasi yang menjadi komponen penting dalam definisi hunian layak dan berkelanjutan.

Selain kegiatan fisik, dukungan program penunjang seperti pemutakhiran basis data perumahan, perencanaan teknis berbasis kawasan, serta koordinasi lintas sektor turut memperkuat capaian indikator. Validasi data rumah tangga sasaran membantu memastikan intervensi tepat sasaran, sementara sinkronisasi dengan program pemerintah pusat dan provinsi membuka peluang pembiayaan tambahan. Pendekatan kolaboratif ini memperbesar daya ungkit program meskipun dengan keterbatasan fiskal daerah.

Namun demikian, kontribusi program penunjang masih perlu dioptimalkan agar mampu mempercepat peningkatan persentase

capaian secara lebih signifikan. Skala intervensi yang relatif terbatas dibandingkan total kebutuhan, serta pertumbuhan permukiman baru yang cukup dinamis, menuntut adanya penguatan integrasi antarprogram dan peningkatan volume kegiatan prioritas. Ke depan, penajaman fokus pada kawasan dengan backlog tinggi dan penguatan skema pembiayaan inovatif akan menjadi kunci agar program/kegiatan penunjang dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap pencapaian target akhir RPJMD.

Misi 3 : Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui dukungan kemudahan berusaha yang berkeadilan dan bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, perikanan kelautan, ekonomi kreatif dan ekonomi kerakyatan (UMKM)

Tujuan 3 : Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi

Pemerataan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan meningkatnya kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat apabila tidak disertai distribusi pendapatan yang merata. Oleh karena itu, selain mengejar peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pemerintah daerah perlu memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh kelompok masyarakat, baik berdasarkan tingkat pendapatan, wilayah, maupun akses terhadap peluang usaha dan lapangan kerja. Ketimpangan yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial, menurunkan daya beli masyarakat, serta menghambat stabilitas ekonomi daerah.

Dalam konteks tersebut, Gini Rasio digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat. Semakin rendah nilai Gini Rasio, semakin merata distribusi pendapatan, yang mencerminkan semakin inklusifnya pertumbuhan ekonomi. Dengan menjadikan Gini Rasio sebagai indikator kinerja, pemerintah daerah dapat memantau efektivitas kebijakan dalam mendorong pemerataan, seperti penguatan sektor UMKM, penciptaan lapangan kerja, perlindungan sosial, serta peningkatan akses pendidikan dan layanan dasar. Upaya ini diharapkan mampu menekan kesenjangan ekonomi sekaligus memperkuat fondasi pembangunan yang berkeadilan.

Untuk mengetahui capaian kinerja tujuan dengan indikator Gini Rasio, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.32.
Capaian Indikator Tujuan Gini Rasio

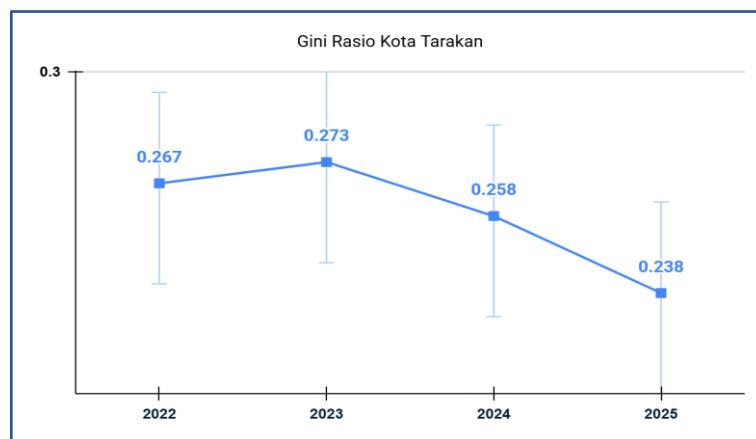
Indikator Kinerja	Realisasi			2025			Akhir RPJMD (2029)	
	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
Gini Rasio	0.267	0.273	0.258	0.25	0.238	104.80	0.24	100.83

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2026

Capaian indikator Gini Rasio menunjukkan tren perbaikan yang signifikan dalam mendukung terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi. Setelah sempat meningkat dari 0,267 pada tahun 2022 menjadi 0,273 pada tahun 2023, ketimpangan pendapatan berhasil ditekan menjadi 0,258 pada tahun 2024 dan kembali menurun menjadi 0,238 pada tahun 2025. Realisasi tahun 2025 tersebut lebih baik dari

target 0,25 dengan capaian 104,80%, serta telah melampaui target akhir RPJMD 2029 sebesar 0,24 dengan tingkat capaian 100,83%. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan masyarakat semakin merata dan kebijakan ekonomi daerah dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif, pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja, serta perlindungan sosial mulai memberikan dampak yang efektif terhadap penurunan ketimpangan.

Gambar 2.12.
Capaian Indikator Tujuan Gini Rasio



Apabila dibandingkan dengan capaian nasional serta kabupaten/kota lain di Kalimantan Utara, posisi Gini Rasio daerah ini menunjukkan kinerja yang relatif kompetitif dan mencerminkan tingkat ketimpangan yang lebih terkendali, sehingga memperkuat posisi daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di tingkat regional maupun nasional.

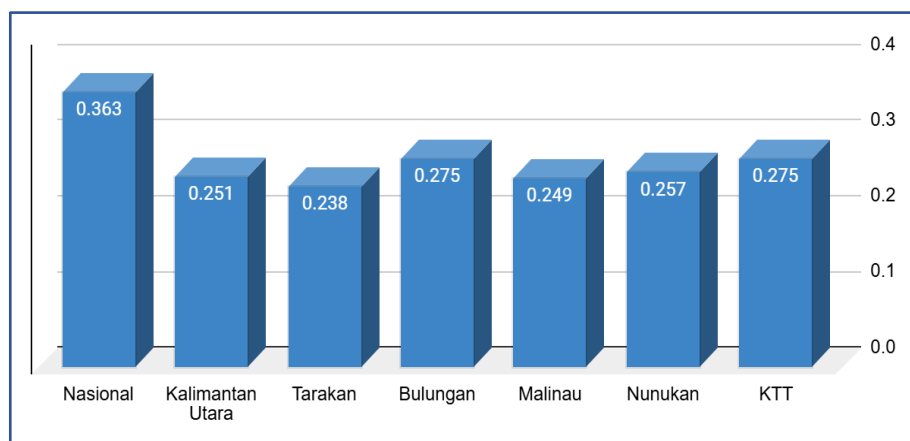
Tabel 2.33.
Perbandingan Capaian Angka Kemiskinan Ekstrem Kalimantan Utara dengan Capaian Nasional

Indikator Sasaran	Realisasi						
	Nasional	Kaltara	Tarakan	Bulungan	Malinau	Nunukan	Tana Tidung
Gini Rasio	0,363	0,251	0,238	0,275	0,249	0,257	0,275

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2026

Jika dibandingkan dengan capaian nasional dan kabupaten/kota lain di Kalimantan Utara, Gini Rasio Kota Tarakan sebesar **0,238** menunjukkan kinerja yang lebih baik karena berada di bawah rata-rata nasional (**0,363**), rata-rata Provinsi Kalimantan Utara (**0,251**), serta lebih rendah dibanding Bulungan (**0,275**), Malinau (**0,249**), Nunukan (**0,257**), dan Tana Tidung (**0,275**).

Gambar 2.13.
Perbandingan Capaian Angka Kemiskinan Ekstrem Kalimantan Utara dengan Capaian Nasional



Kondisi ini menegaskan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Tarakan relatif paling rendah di antara wilayah pembanding, sehingga mencerminkan pemerataan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada tingkat regional maupun nasional. Untuk mencapai

tujuan tersebut ditetapkan sasaran dan indikator-indikator yang akan diukur sesuai definisi operasional dari masing-masing indikator yaitu:

**Tabel 2.34.
Indikator Kinerja**

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIA N (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya pertumbuhan dan stabilitas ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6.09	4.92	80.79
		Tingkat Inflasi	2.5	2.88	115.20
2	Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	4.9	5.06	96.73
3	Meningkatnya stabilitas ketertiban dan ketentraman kota	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	85	N/A	N/A

Sasaran 7 : Meningkatnya pertumbuhan dan stabilitas ekonomi

Meningkatnya pertumbuhan dan stabilitas ekonomi Kota Tarakan menjadi agenda strategis dalam memperkuat peran kota sebagai pusat perdagangan dan jasa di wilayah perbatasan Kalimantan Utara. Sebagai daerah dengan karakteristik ekonomi berbasis sektor perdagangan, transportasi, konstruksi, serta jasa, Tarakan memerlukan pertumbuhan yang konsisten agar mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperluas basis usaha produktif. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas juga penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sehingga pemerintah dapat meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan.

Di sisi lain, stabilitas ekonomi menjadi faktor kunci untuk menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi daerah, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. Fluktuasi harga komoditas, gangguan distribusi, maupun dinamika ekonomi nasional dan global dapat mempengaruhi struktur ekonomi Kota Tarakan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang adaptif melalui penguatan sektor unggulan, pemberdayaan UMKM, pengendalian inflasi, serta sinergi antar pemangku kepentingan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya meningkat, tetapi juga stabil dan berkelanjutan.

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam mengukur kemajuan ekonomi suatu daerah. Indikator ini mencerminkan kemampuan daerah dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Untuk Kota Tarakan, pencapaian pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sektor industri, perdagangan, jasa, serta investasi di bidang infrastruktur dan sumber daya manusia. Stabilitas ekonomi global, kebijakan pemerintah daerah, serta daya beli masyarakat juga menjadi faktor penentu dalam pertumbuhan ekonomi.

Untuk mengetahui capaian kinerja sasaran dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

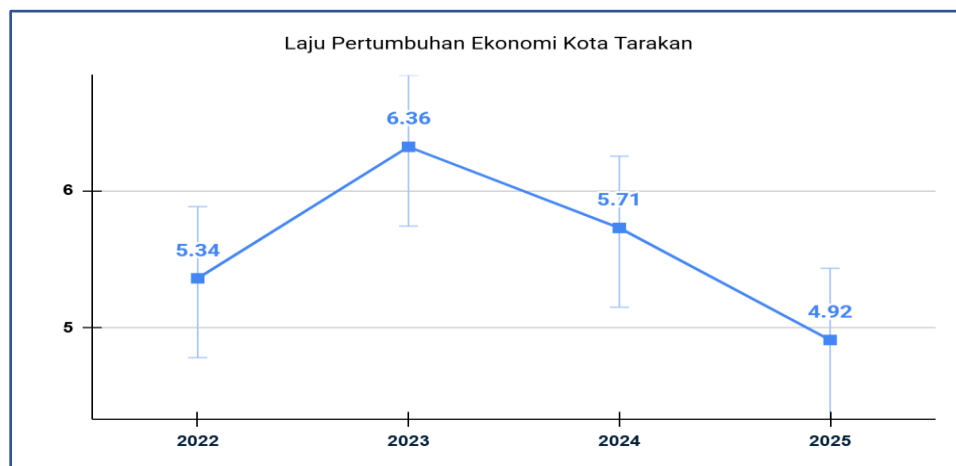
Tabel 2.35.
Capaian Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi

Indikator Kinerja	Realisasi			2025			Akhir RPJMD (2029)	
	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,34	6,36	5,71	6,09	4,92	80,79	6,49	75,81

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2026

Capaian indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tarakan menunjukkan dinamika yang fluktuatif dalam periode 2022–2025. Setelah tumbuh sebesar 5,34% pada tahun 2022 dan meningkat signifikan menjadi 6,36% pada tahun 2023, pertumbuhan kembali melambat menjadi 5,71% pada tahun 2024 dan turun menjadi 4,92% pada tahun 2025. Realisasi tahun 2025 tersebut berada di bawah target sebesar 6,09%, dengan tingkat capaian 80,79%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2029 sebesar 6,49%, capaian hingga tahun 2025 baru mencapai 75,81%.

Gambar 2.14..
Capaian Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi



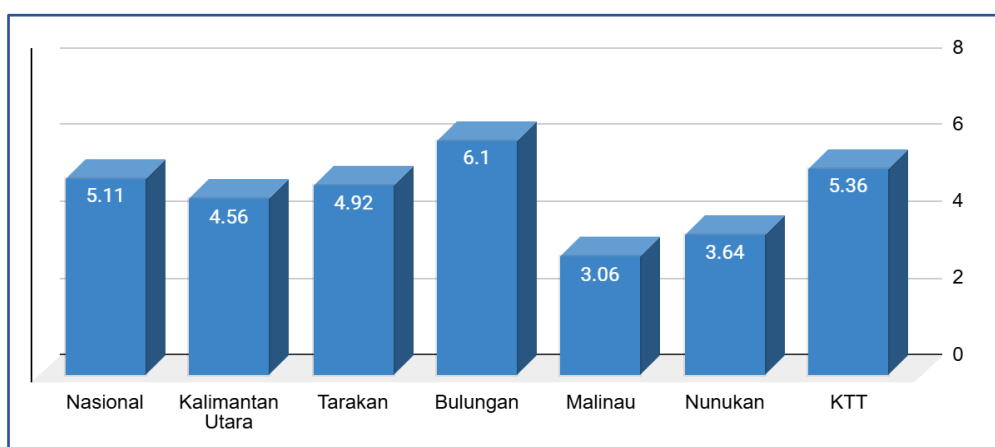
Tabel 2.36.
**Perbandingan Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Utara
dengan Capaian Nasional**

Indikator Sasaran	Realisasi						
	Nasional	Kaltara	Tarakan	Bulungan	Malinau	Nunukan	Tana Tidung
Laju Pertumbuhan Ekonomi	5.11	4.56	4.92	6.1	3.06	3.64	5.36

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2026

Apabila dibandingkan dengan capaian nasional dan regional, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tarakan sebesar 4,92% berada sedikit di bawah rata-rata nasional (5,11%), namun masih lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi Kalimantan Utara (4,56%). Hal ini menunjukkan bahwa secara makro, kinerja pertumbuhan ekonomi Tarakan masih cukup kompetitif di tingkat provinsi, meskipun belum sepenuhnya mampu melampaui pertumbuhan nasional.

Gambar 2.15
**Perbandingan Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Utara
dengan Capaian Nasional**



Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Kalimantan Utara, pertumbuhan ekonomi Tarakan berada pada posisi menengah. Capaian tersebut lebih rendah dari Bulungan (6,1%) dan Tana Tidung (5,36%), tetapi lebih tinggi dibanding Malinau (3,06%) dan Nunukan (3,64%). Posisi ini mengindikasikan bahwa struktur ekonomi Tarakan relatif stabil, namun masih memerlukan penguatan sektor unggulan, peningkatan investasi, serta optimalisasi daya beli masyarakat agar pertumbuhan dapat meningkat lebih progresif dan berkelanjutan.

Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kendala

Capaian pertumbuhan ekonomi Kota Tarakan yang sempat meningkat signifikan pada tahun 2023 menunjukkan adanya faktor pendorong berupa pulihnya aktivitas perdagangan dan jasa, meningkatnya mobilitas masyarakat, serta membaiknya daya beli pasca pemulihan ekonomi nasional. Peran sektor perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, serta konstruksi menjadi kontributor utama terhadap pertumbuhan. Selain itu, stabilitas keamanan daerah dan terkendalinya inflasi turut mendukung keberlanjutan aktivitas ekonomi, sehingga struktur ekonomi daerah tetap resilien di tengah dinamika eksternal.

Namun demikian, perlambatan pada tahun 2024 dan penurunan pada tahun 2025 hingga realisasi 4,92% dikarenakan adanya tekanan struktural dan siklikal. Beberapa kendala yang memengaruhi antara lain terbatasnya ekspansi sektor unggulan, fluktuasi harga dan distribusi barang akibat faktor eksternal, serta ketergantungan ekonomi pada sektor perdagangan dan konsumsi rumah tangga. Di sisi lain, pertumbuhan investasi baru yang belum optimal dan

terbatasnya diversifikasi sektor produktif juga membatasi akselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Secara keseluruhan, meskipun fondasi ekonomi Kota Tarakan relatif stabil, tantangan ke depan terletak pada upaya memperkuat struktur ekonomi agar lebih terdiversifikasi dan bernilai tambah. Diperlukan strategi yang lebih progresif melalui peningkatan investasi produktif, penguatan UMKM berbasis inovasi, pengembangan sektor potensial non-perdagangan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia agar pertumbuhan ekonomi dapat kembali meningkat secara berkelanjutan dan mendekati target RPJMD.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tarakan menunjukkan bahwa meskipun realisasi pertumbuhan tahun 2025 belum mencapai target, pemanfaatan sumber daya daerah relatif tetap optimal dalam menjaga stabilitas aktivitas ekonomi. Belanja daerah yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar, dukungan terhadap UMKM, serta upaya pengendalian inflasi telah memberikan efek penahan terhadap perlambatan ekonomi, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat tetap terjaga. Namun demikian, masih terdapat ruang perbaikan dalam meningkatkan efektivitas konversi belanja pembangunan menjadi akselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, mengingat struktur ekonomi yang masih didominasi sektor perdagangan dan konsumsi rumah tangga. Oleh karena itu, peningkatan efisiensi ke depan perlu difokuskan pada belanja yang lebih produktif dan bernilai tambah, seperti penguatan investasi sektor riil, peningkatan

kualitas tenaga kerja, serta pengembangan UMKM berbasis inovasi. Selanjutnya, untuk melihat tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator tersebut.

Analisis Program/Kegiatan Penunjang

Analisis program dan kegiatan penunjang terhadap pencapaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tarakan menunjukkan bahwa berbagai intervensi telah diarahkan untuk menjaga stabilitas dan mendorong aktivitas ekonomi daerah. Program pengembangan dan pemberdayaan UMKM, fasilitasi perizinan berusaha melalui penyederhanaan layanan, promosi investasi daerah, serta penguatan infrastruktur dasar menjadi instrumen utama dalam meningkatkan produktivitas dan memperluas kesempatan usaha. Selain itu, pelaksanaan pasar murah, operasi pasar, dan penguatan koordinasi pengendalian inflasi turut menopang daya beli masyarakat sehingga konsumsi rumah tangga tetap terjaga sebagai salah satu komponen utama PDRB.

Namun demikian, efektivitas program penunjang masih perlu ditingkatkan agar mampu menghasilkan dampak pertumbuhan yang lebih signifikan. Beberapa kegiatan masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya berorientasi pada outcome ekonomi jangka menengah. Ke depan, diperlukan penguatan program yang lebih fokus pada peningkatan investasi produktif, pengembangan sektor unggulan bernilai tambah, inkubasi wirausaha baru, serta peningkatan kualitas tenaga kerja berbasis kebutuhan pasar. Dengan penyelarasan program yang lebih terintegrasi dan berbasis dampak,

dukungan terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi diharapkan menjadi lebih optimal dan berkelanjutan.

Tingkat inflasi

Tingkat inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur stabilitas ekonomi suatu daerah. Inflasi yang terkendali mencerminkan kestabilan harga barang dan jasa yang berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat.

Dalam konteks Kota Tarakan, tingkat inflasi daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti distribusi barang, ketersediaan bahan pokok, kebijakan fiskal dan moneter, serta kondisi ekonomi nasional dan global. Jika inflasi terlalu tinggi, daya beli masyarakat menurun, sedangkan jika terlalu rendah, bisa menandakan lemahnya permintaan di pasar.

Ekonomi melihat inflasi sebagai indikator untuk melihat tingkat perubahan yang terjadi di masyarakat. Apabila cenderung memburuk, maka lembaga Pemerintah terkait akan melakukan intervensi agar inflasi tidak memburuk. Salah satu intervensi yang dilakukan pemerintah yang umum dilakukan adalah dengan mengimpor barang-barang yang riskan terkena inflasi. Intervensi juga dilakukan oleh lembaga moneter yaitu Bank Indonesia. Ketika inflasi cenderung bergerak ke arah yang tidak diinginkan, BI akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan intervensi pasar. Atau yang lebih global lagi dengan cara menaikkan atau menurunkan *BI Repo Reverse Rate* (Suku Bunga Bank Indonesia) untuk mempengaruhi uang beredar yang berada di Masyarakat.

Untuk mengetahui capaian kinerja sasaran dengan indikator Tingkat Inflasi, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

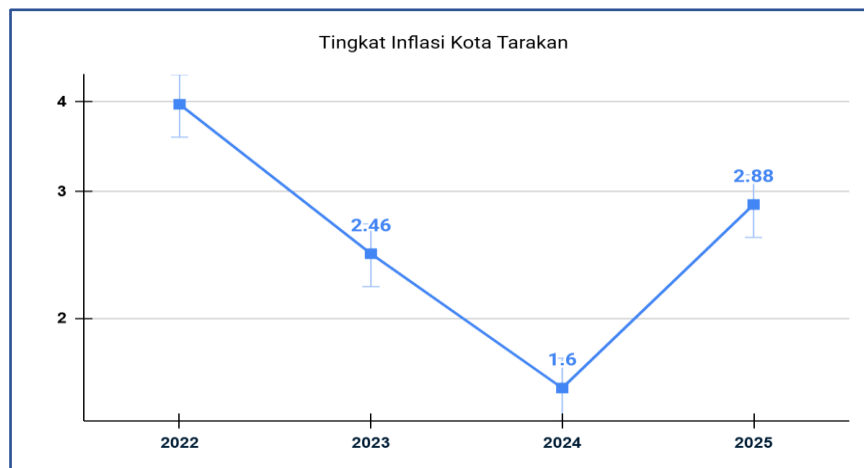
Tabel 2.37.
Capaian Indikator Tingkat Inflasi

Indikator Kinerja	Realisasi			2025			Akhir RPJMD (2029)	
	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
Tingkat Inflasi	3,97	2,46	1,6	2,5	2,88	115,20	2,00	144,00

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2026

Capaian indikator Tingkat Inflasi Kota Tarakan menunjukkan kondisi yang relatif terkendali dalam periode 2022–2025. Inflasi tercatat sebesar 3,97% pada tahun 2022, kemudian menurun signifikan menjadi 2,46% pada tahun 2023 dan kembali turun menjadi 1,6% pada tahun 2024. Pada tahun 2025, realisasi inflasi berada pada angka 2,88%, masih dalam rentang yang terkendali meskipun sedikit lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 2,5%, capaian kinerja mencapai 115,20%, yang menunjukkan pengendalian inflasi tetap berada dalam batas sasaran yang ditetapkan.

Gambar 2.16.
Capaian Indikator Tingkat Inflasi



Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2029 sebesar 2,00%, capaian hingga tahun 2025 telah mencapai 144,00%. Hal ini mengindikasikan bahwa stabilitas harga di Kota Tarakan secara umum terjaga dengan baik, didukung oleh penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok, serta sinergi kebijakan pengendalian harga. Kondisi ini menjadi fondasi penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Tabel 2.38.
Perbandingan Capaian Tingkat Inflasi Kalimantan Utara dengan Capaian Nasional

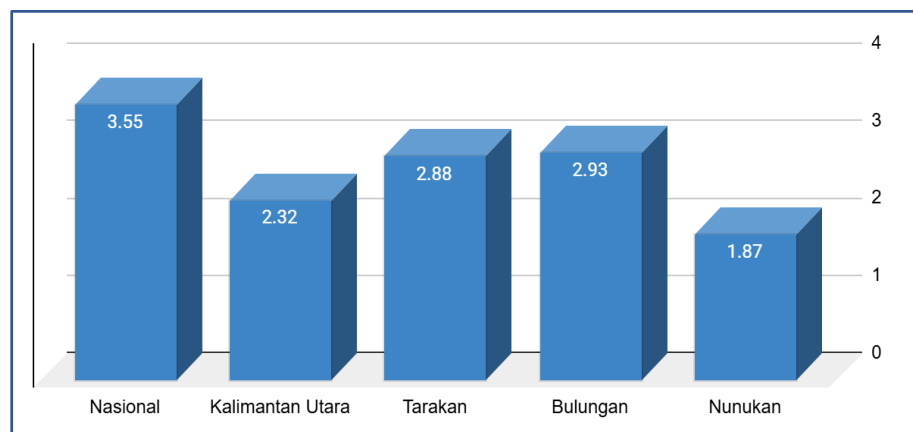
Indikator Sasaran	Realisasi						
	Nasional	Kaltara	Tarakan	Bulungan	Malinau	Nunukan	Tana Tidung
Tingkat Inflasi	3,55	2,32	2,88	2,93	N/A	1,87	N/A

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2026

Apabila dibandingkan dengan capaian nasional dan regional, tingkat inflasi Kota Tarakan sebesar **2,88%** berada di bawah rata-rata nasional (**3,55%**), namun sedikit lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi Kalimantan Utara (**2,32%**). Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum pengendalian inflasi di Tarakan cukup baik karena masih lebih rendah dari nasional, meskipun terdapat tekanan harga yang relatif lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi.

Dibandingkan kabupaten/kota lain di Kalimantan Utara, inflasi Tarakan sedikit lebih rendah dari Bulungan (**2,93%**), namun lebih tinggi dibanding Nunukan (**1,87%**). Posisi ini mengindikasikan bahwa stabilitas harga di Tarakan relatif terkendali, namun tetap memerlukan penguatan koordinasi pengendalian inflasi, khususnya pada komoditas pangan strategis dan kelancaran distribusi, agar daya beli masyarakat tetap terjaga secara berkelanjutan.

Gambar 2.17..
Perbandingan Capaian Tingkat Inflasi Kalimantan Utara dengan
Capaian Nasional



Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kendala

Keberhasilan pengendalian inflasi Kota Tarakan yang tetap berada pada level relatif terkendali tidak terlepas dari penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), intensifikasi pemantauan harga komoditas strategis, serta pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah pada periode rawan inflasi. Stabilitas pasokan bahan pokok, kelancaran distribusi barang, serta sinergi dengan instansi vertikal dan pelaku usaha turut berkontribusi dalam menjaga tekanan harga agar tidak melonjak secara signifikan. Selain itu, penguatan komunikasi publik terkait ketersediaan stok dan harga turut membantu menjaga ekspektasi inflasi masyarakat sehingga tidak terjadi panic buying yang dapat memicu kenaikan harga.

Namun demikian, Kota Tarakan sebagai wilayah kepulauan dengan ketergantungan pasokan dari luar daerah menghadapi tantangan struktural dalam pengendalian inflasi. Faktor cuaca, gangguan distribusi laut, fluktuasi harga komoditas nasional, serta peningkatan permintaan pada momen tertentu (hari besar keagamaan dan akhir tahun) menjadi risiko yang sulit sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah daerah. Struktur ekonomi yang masih didominasi konsumsi rumah tangga juga membuat tekanan harga pangan sangat sensitif terhadap perubahan pasokan. Oleh karena itu, penguatan strategi jangka menengah seperti diversifikasi sumber pasokan, pengembangan produksi lokal, dan sistem logistik yang lebih efisien menjadi kunci untuk menjaga inflasi tetap stabil secara berkelanjutan.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian indikator menunjukkan bahwa upaya pengendalian inflasi di Kota Tarakan relatif berjalan efektif dan mampu menjaga stabilitas harga pada tingkat yang terkendali. Hal ini didukung oleh penguatan

koordinasi lintas sektor melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemantauan harga secara berkala, serta pelaksanaan berbagai langkah stabilisasi seperti pengawasan pasar, imbauan kepada distributor, dan kerja sama antar daerah pemasok. Meskipun demikian, ketergantungan pasokan komoditas dari luar daerah masih menjadi tantangan yang dapat memengaruhi dinamika harga, sehingga diperlukan penguatan sistem distribusi dan pengembangan produksi lokal untuk menjaga stabilitas inflasi secara lebih berkelanjutan. Selanjutnya, untuk melihat sejauh mana pemanfaatan sumber daya dan dukungan anggaran dalam mendukung pengendalian inflasi tersebut, dilakukan analisis efisiensi penggunaan sumber daya sebagaimana disajikan pada

Analisis Program/Kegiatan Penunjang

Analisis program dan kegiatan penunjang pengendalian inflasi di Kota Tarakan menunjukkan bahwa berbagai intervensi telah diarahkan untuk menjaga stabilitas harga, khususnya pada komoditas pangan strategis. Pelaksanaan operasi pasar, pasar murah, sidak harga dan ketersediaan barang, serta rapat koordinasi rutin Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjadi instrumen utama dalam merespons potensi lonjakan harga, terutama menjelang hari besar keagamaan dan akhir tahun. Selain itu, kerja sama antar daerah pemasok serta penguatan sistem informasi harga harian turut mendukung transparansi pasar dan membantu menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.

Namun demikian, efektivitas program penunjang masih perlu diperkuat agar tidak hanya bersifat responsif jangka pendek, tetapi juga preventif dan struktural. Program pengembangan produksi lokal, penguatan ketahanan pangan rumah tangga, serta peningkatan

efisiensi distribusi dan logistik perlu diintegrasikan secara lebih sistematis dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan penyelarasan program yang lebih berbasis data dan risiko inflasi, dukungan terhadap stabilitas harga diharapkan menjadi lebih berkelanjutan dan mampu menjaga daya beli masyarakat secara konsisten.



Tabel 2.39
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran terhadap Pencapaian Kinerja Tahun 2025 Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat inflasi

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rata-Rata Capaian (%)	Program Pendukung	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Rata-Rata Capaian (%)	Tingkat Efisiensi
Laju Pertumbuhan Ekonomi	6.09	4.92	80.79	97.99	Program Penanganan Kerawanan Pangan	19,016,200.00	17,411,590.00	91.56	87.80	11,60% (Efisien)
Tingkat inflasi	2,5 ± 1	2.88	115.20		Program Pengembangan Umkm	547,582,720.00	532,746,899.00	97.29		
					Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1,702,517,030.00	1,654,286,339.00	97.17		
					Program Pemasaran Pariwisata	1,111,993,495.00	1,020,883,142.00	91.81		
					Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	24,548,200.00	22,127,139.00	90.14		
					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	323,288,400.00	316,300,188.00	97.84		
					Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	539,570,000.00	499,818,204.00	92.63		
					Program Pengawasan Keamanan Pangan	189,963,500.00	179,965,804.00	94.74		



Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rata-Rata Capaian (%)	Program Pendukung	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Rata-Rata Capaian (%)	Tingkat Efisiensi
					Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	314,698,890.00	299,129,794.00	95.05		
					Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	119,971,130.00	73,271,074.00	61.07		
					Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	24,910,300.00	21,664,830.00	86.97		
					Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	92,545,800.00	75,412,824.00	81.49		
					Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	244,771,900.00	184,145,695.00	75.23		
					Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	8,187,500.00	7,955,632.00	97.17		
					Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	23,506,000.00	18,059,672.00	76.83		
					Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1,243,036,900.00	576,313,040.00	46.36		
					Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	41,052,450.00	37,715,357.00	91.87		



Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rata-Rata Capaian (%)	Program Pendukung	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Rata-Rata Capaian (%)	Tingkat Efisiensi
					Program Pengembangan Ekspor	89,791,100.00	61,527,174.00	68.52		
					Program Penyuluhan Pertanian	1,166,118,605.00	1,116,850,567.00	95.78		
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	411,161,095.65	324,989,994.00	79.04		
					Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	20,348,500.00	17,619,589.00	86.59		
					Program Perizinan Usaha Pertanian	72,774,100.00	59,580,469.00	81.87		
					Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	315,379,400.00	285,279,681.00	90.46		
					Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1,265,097,808.00	1,231,731,202.00	97.36		
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2,865,102,469.00	2,747,731,040.00	95.90		
					Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2,370,564,300.00	2,344,630,500.00	98.91		
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	835,097,670.00	783,383,837.00	93.81		



Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rata-Rata Capaian (%)	Program Pendukung	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Rata-Rata Capaian (%)	Tingkat Efisiensi
					Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00		
					Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	49,496,100.00	43,630,134.00	88.15		
					Program Perekonomian Dan Pembangunan	1,225,844,750.00	1,134,295,948.00	92.53		

Analisis efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Tingkat Inflasi tahun 2025 menunjukkan bahwa secara umum pemanfaatan anggaran telah berjalan relatif efisien, meskipun capaian kinerja belum sepenuhnya optimal pada seluruh indikator. Pada indikator LPE, capaian kinerja sebesar 80,79% dengan rata-rata capaian program pendukung sebesar 87,80% menghasilkan tingkat efisiensi 11,60% (efisien), yang mengindikasikan bahwa dengan realisasi anggaran yang tidak terserap penuh, program tetap mampu menjaga stabilitas ekonomi meskipun belum mendorong pertumbuhan secara maksimal. Sementara itu, pada indikator inflasi, capaian kinerja yang mencapai 115,20% menunjukkan keberhasilan pengendalian harga, didukung oleh berbagai program seperti stabilisasi harga, ketahanan pangan, pengawasan distribusi, dan pemberdayaan ekonomi, dengan rata-rata realisasi anggaran program yang umumnya berada di atas 90%. Namun demikian, masih terdapat beberapa program dengan tingkat serapan rendah seperti peningkatan sarana distribusi perdagangan dan stabilisasi harga yang berpotensi memengaruhi optimalisasi dampak. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah cukup baik, namun ke depan perlu dilakukan penguatan pada kualitas belanja agar lebih fokus pada program yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga secara berkelanjutan.

Sasaran 8 : Meningkatnya stabilitas ketenteraman dan ketertiban umum**Indeks Ketenteraman dan ketertiban umum**

Meningkatnya stabilitas ketenteraman dan ketertiban umum menjadi fondasi penting dalam mendukung kelancaran pembangunan dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat Kota Tarakan, yang ditunjukkan melalui Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai indikator kinerja. Indeks ini menggambarkan tingkat keamanan, ketertiban, serta kondusivitas wilayah dalam mencegah gangguan sosial, pelanggaran peraturan daerah, maupun potensi konflik di tengah dinamika perkotaan dan mobilitas masyarakat yang tinggi. Semakin baik nilai indeks tersebut, semakin kuat pula kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap stabilitas daerah, sehingga tercipta lingkungan yang aman, tertib, dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta kualitas hidup yang berkelanjutan.

Untuk mengetahui capaian kinerja sasaran dengan indikator Indeks Ketenteraman dan Ketertiban, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.40.
Capaian Indikator Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Kinerja	Realisasi			2025			Akhir RPJMD (2029)	
	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	N/A	N/A	83	85	83,00	97,65	90,00	92,22

Sumber : Bappeda Litbang Kota Tarakan), 2026

Capaian indikator Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum menunjukkan bahwa pada tahun 2024 nilai indeks berada pada angka 83. Pada tahun 2025 pemerintah daerah menetapkan target sebesar 85, dengan realisasi sebesar 83 sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 97,65%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kondisi ketenteraman dan ketertiban masyarakat relatif terjaga dengan baik, meskipun masih terdapat selisih kecil dari target yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan upaya pengendalian gangguan ketenteraman dan ketertiban melalui peningkatan pengawasan, penegakan peraturan daerah, serta koordinasi dengan aparat keamanan dan partisipasi masyarakat.

Dalam jangka menengah, target akhir RPJMD tahun 2029 ditetapkan sebesar 90,00 dengan capaian sementara sebesar 83 atau 92,22% terhadap target akhir. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun capaian sudah berada pada kategori cukup baik, masih diperlukan upaya yang lebih sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas ketenteraman dan ketertiban umum. Penguatan strategi preventif, peningkatan kapasitas aparat penegak perda, serta kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting untuk memastikan peningkatan indeks dapat tercapai secara konsisten hingga akhir periode perencanaan.

Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kendala

Capaian Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum tahun 2025 yang mencapai 97,65% dari target menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam menjaga kondisi ketenteraman dan ketertiban masyarakat telah berjalan relatif baik. Keberhasilan ini

didukung oleh meningkatnya koordinasi antara perangkat daerah terkait dengan aparat keamanan dalam pelaksanaan pengawasan serta penegakan peraturan daerah. Selain itu, kegiatan pembinaan kepada masyarakat, peningkatan patroli dan pengawasan di wilayah rawan gangguan ketertiban, serta peran aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan turut berkontribusi dalam menjaga stabilitas kondisi ketenteraman dan ketertiban umum di daerah.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan capaian indikator belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain masih adanya potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di wilayah tertentu, keterbatasan sumber daya aparatur dalam melakukan pengawasan secara optimal, serta tingkat kesadaran dan kepatuhan sebagian masyarakat terhadap peraturan daerah yang masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi preventif melalui peningkatan sosialisasi peraturan daerah, penguatan kapasitas aparatur penegak perda, serta peningkatan sinergi dengan aparat keamanan dan partisipasi masyarakat guna mendukung terciptanya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum yang lebih baik secara berkelanjutan.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Selanjutnya, untuk melihat sejauh mana penggunaan sumber daya yang dialokasikan dalam mendukung pencapaian indikator tersebut, dilakukan analisis efisiensi penggunaan sumber daya sebagaimana disajikan pada tabel berikut.



Tabel 2.41

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran terhadap Pencapaian Kinerja Tahun 2025 Indikator Indeks Ketentraman dan ketertiban umum

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rata-Rata Capaian (%)	Program Pendukung	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Rata-Rata Capaian (%)	Tingkat Efisiensi
Indeks Ketentraman dan ketertiban umum	85	83,00	97,65	97,65	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	336.433.200,00	265.367.034,00	78,88	91,02	7,29% (Efisien)
					Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.558.461.300,00	1.451.901.620,00	93,16		
					Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Bangsa	1.672.821.790,00	1.587.522.723,00	94,90		
					Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	384.912.090,00	348.430.065,00	90,52		
					Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	110.452.750,00	109.489.890,00	99,13		
					Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.482.992.429,00	1.478.088.380,00	99,67		
					Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	641.482.300,00	518.621.323,00	80,85		

Sumber : Bappeda Litbang Kota Tarakan), 2026

Pemanfaatan sumber daya dalam mendukung pencapaian Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada tahun 2025 menunjukkan tingkat efisiensi yang baik. Hal ini tercermin dari capaian indikator kinerja sasaran sebesar 97,65% dari target yang ditetapkan, sementara rata-rata capaian realisasi anggaran pada program-program pendukung mencapai 91,02%. Kondisi ini menunjukkan bahwa dengan tingkat penyerapan anggaran yang tidak sepenuhnya mencapai 100%, pemerintah daerah tetap mampu menghasilkan capaian kinerja yang tinggi sehingga menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan sumber daya.

Program-program yang berkontribusi terhadap pencapaian indikator tersebut antara lain Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta beberapa program lain yang mendukung penguatan stabilitas sosial dan politik di daerah. Secara keseluruhan, rata-rata capaian realisasi anggaran dari program-program tersebut sebesar 91,02%, sehingga diperoleh tingkat efisiensi sebesar 7,29% yang menunjukkan kategori efisien. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan secara cukup optimal dalam mendukung tercapainya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum di daerah.

Analisis Program/Kegiatan Penunjang

Pencapaian Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum terutama didukung oleh beberapa program kunci yang memiliki keterkaitan langsung dengan upaya pemeliharaan stabilitas daerah. Program

Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitas Penanganan Konflik Sosial serta Program Peningkatan dan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum berperan dalam memperkuat deteksi dini potensi konflik, peningkatan pengawasan, serta koordinasi lintas instansi dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Di sisi lain, Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, serta Program Peningkatan Peran Partai Politik melalui pendidikan politik berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, penguatan nilai kebangsaan, serta terciptanya iklim sosial politik yang kondusif. Dukungan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya juga berperan dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat. Secara keseluruhan, pelaksanaan program-program tersebut menunjukkan kontribusi yang cukup efektif dalam menjaga kondisi ketenteraman dan ketertiban umum sehingga capaian indikator dapat mendekati target yang telah ditetapkan.

Sasaran 9 : Menurunnya pengangguran**Tingkat pengangguran terbuka**

Menurunnya pengangguran di Kota Tarakan merupakan salah satu prasyarat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat stabilitas sosial ekonomi daerah. Sebagai kota perdagangan dan jasa dengan pertumbuhan penduduk serta mobilitas tenaga kerja yang cukup tinggi, Tarakan menghadapi tantangan dalam menciptakan kesempatan kerja yang mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja setiap tahunnya. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnya kerentanan sosial, serta berkurangnya produktivitas ekonomi daerah. Oleh karena itu, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja menjadi fokus strategis dalam pembangunan ekonomi daerah.

Dalam kerangka pengukuran kinerja pembangunan, kondisi tersebut diukur melalui indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang mencerminkan persentase angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan. TPT digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai efektivitas kebijakan daerah dalam memperluas kesempatan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara berkelanjutan.

Untuk mengetahui capaian kinerja sasaran dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.42.
Capaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

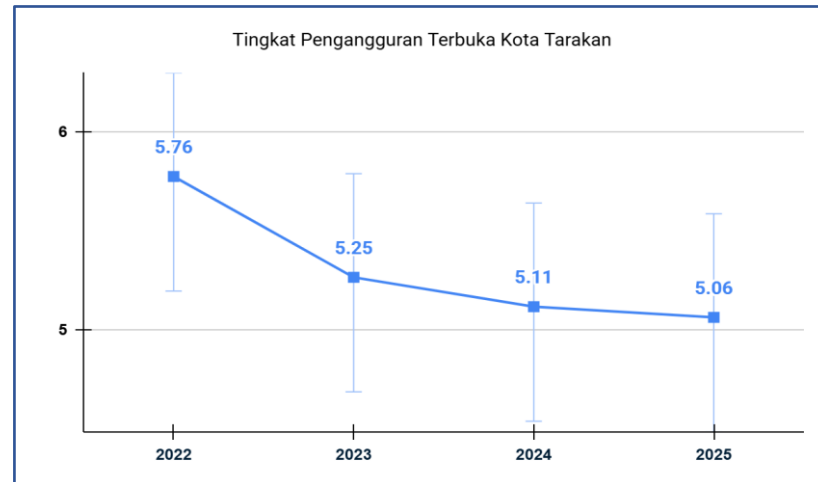
Indikator Kinerja	Realisasi			2025			Akhir RPJMD (2029)	
	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,76	5,25	5,11	4,9	5,06	96,73	4,09	76,28

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2026

Capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Tarakan menunjukkan tren penurunan yang cukup konsisten dalam periode 2022-2024, dari 5,76% pada tahun 2022 menjadi 5,25% pada tahun 2023 dan kembali turun menjadi 5,11% pada tahun 2024. Pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 4,9%, namun realisasi tercatat 5,06%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 96,73%. Meskipun belum sepenuhnya memenuhi target tahunan, capaian tersebut menunjukkan perbaikan kondisi pasar kerja dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 4,09%, capaian hingga tahun 2025 baru mencapai 76,28%, sehingga masih diperlukan upaya akselerasi untuk menurunkan angka pengangguran secara lebih signifikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun daya serap tenaga kerja menunjukkan perbaikan, tantangan dalam penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan kompetensi tenaga kerja tetap perlu menjadi prioritas agar penurunan TPT dapat berlangsung lebih optimal dan berkelanjutan.

Gambar 2.18.
Capaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)



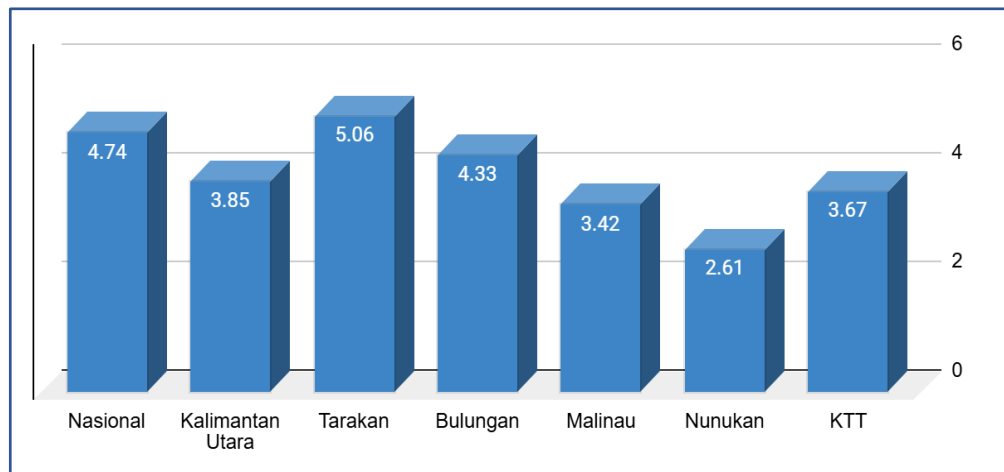
Tabel 2.43.
Perbandingan Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kalimantan Utara dengan Capaian Nasional

Indikator Sasaran	Realisasi						
	Nasional	Kaltara	Tarakan	Bulungan	Malinau	Nunukan	Tana Tidung
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,74	3,85	5,06	4,33	3,42	2,61	3,67

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2026

Apabila dibandingkan dengan capaian nasional dan regional, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Tarakan sebesar **5,06%** masih berada di atas rata-rata nasional (**4,74%**) maupun rata-rata Provinsi Kalimantan Utara (**3,85%**). Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan pasar kerja di Tarakan relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional, sehingga memerlukan perhatian lebih dalam perluasan kesempatan kerja dan peningkatan daya serap tenaga kerja. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Kalimantan Utara, TPT Tarakan juga lebih tinggi dibanding Bulungan (**4,33%**), Malinau (**3,42%**), Nunukan (**2,61%**), dan Tana Tidung (**3,67%**)

Gambar 2.19.
Perbandingan Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kalimantan Utara dengan Capaian Nasional



Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kendala

Penurunan TPT secara bertahap dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan adanya perbaikan daya serap tenaga kerja di Kota Tarakan, yang dipengaruhi oleh pemulihan aktivitas sektor perdagangan dan jasa, meningkatnya mobilitas ekonomi, serta tumbuhnya usaha mikro dan kecil pasca pemulihan ekonomi. Program pelatihan berbasis kompetensi, fasilitasi penempatan tenaga kerja, serta dukungan terhadap kewirausahaan turut berkontribusi dalam memperluas kesempatan kerja. Selain itu, stabilitas inflasi dan membaiknya distribusi barang dan jasa ikut menjaga keberlangsungan usaha, sehingga mampu mempertahankan tenaga kerja yang ada dan membuka peluang kerja baru.

Namun demikian, realisasi TPT tahun 2025 yang masih berada di atas target menunjukkan adanya tantangan struktural yang belum sepenuhnya teratasi. Tingginya arus urbanisasi dan konsentrasi angkatan kerja di Tarakan sebagai pusat aktivitas ekonomi

menyebabkan tekanan pasar kerja relatif lebih besar dibanding kabupaten lain di Kalimantan Utara. Di sisi lain, struktur ekonomi yang masih didominasi sektor perdagangan dan jasa dengan produktivitas menengah serta keterbatasan investasi skala besar membatasi penciptaan lapangan kerja formal yang signifikan. Ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan pasar (*mismatch*) juga menjadi faktor yang memperlambat penurunan pengangguran.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat kemajuan dalam pengendalian pengangguran, diperlukan strategi yang lebih terarah untuk mendorong penciptaan lapangan kerja berkualitas, memperkuat link and match antara pendidikan dan dunia usaha, serta meningkatkan investasi produktif yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Tanpa transformasi struktural tersebut, penurunan TPT berpotensi berjalan lebih lambat dari target RPJMD yang telah ditetapkan.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Selanjutnya, untuk menilai sejauh mana sumber daya yang dialokasikan pada program-program tersebut dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pencapaian indikator kinerja, dilakukan analisis efisiensi penggunaan sumber daya sebagaimana disajikan pada tabel berikut.



Tabel 2.44.

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran terhadap Pencapaian Kinerja Tahun 2025 Indikator Tingkat pengangguran terbuka

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rata-Rata Capaian (%)	Program Pendukung	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Rata-Rata Capaian (%)	Tingkat Efisiensi
Tingkat pengangguran terbuka	4.9	5.06	96.73	96.73	Program Promosi Penanaman Modal	123,186,900.00	110,741,964.00	89.90	90.74	6,60% (Efisien)
					Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	11,982,380.00	9,972,019.00	83.22		
					Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	194,792,340.00	185,974,070.00	95.47		
					Program Pengendalian Izin Usaha Industri	3,610,220.00	3,382,936.00	93.70		
					Program Penempatan Tenaga Kerja	137,456,980.00	105,878,430.00	77.03		
					Program Perencanaan Tenaga Kerja	23,600,800.00	21,267,300.00	90.11		
					Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	213,980,840.00	198,342,790.00	92.69		
					Program Hubungan Industrial	88,678,800.00	85,740,500.00	96.69		
					Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	49,867,300.00	48,850,572.00	97.96		
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	289,111,080.00	262,086,467.00	90.65		

Sumber : Bappeda Litbang Kota Tarakan), 2026

Pemanfaatan sumber daya dalam mendukung pencapaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan tingkat efisiensi yang cukup baik. Hal ini tercermin dari capaian kinerja indikator sebesar 96,73% dari target yang ditetapkan, sementara rata-rata realisasi anggaran pada program-program pendukung mencapai 90,74% dari total anggaran yang dialokasikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa dengan tingkat penyerapan anggaran yang relatif terkendali, pemerintah daerah tetap mampu menghasilkan capaian kinerja yang mendekati target sehingga menggambarkan pemanfaatan sumber daya yang cukup optimal.

Program-program yang mendukung pencapaian indikator tersebut antara lain Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Hubungan Industrial, serta berbagai program lain yang berkaitan dengan pengembangan industri dan peningkatan investasi daerah. Pelaksanaan program-program tersebut berperan dalam memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, serta mendorong pertumbuhan kegiatan usaha di daerah. Secara keseluruhan, rata-rata capaian realisasi anggaran sebesar 90,74% menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 6,60% yang termasuk dalam kategori efisien, sehingga menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah mendukung pencapaian kinerja secara relatif efektif.

Analisis Program/Kegiatan Penunjang

Analisis program dan kegiatan penunjang penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Tarakan menunjukkan bahwa intervensi telah diarahkan pada peningkatan akses dan keterhubungan antara pencari kerja dan dunia usaha. Selain program

pelatihan berbasis kompetensi, fasilitasi sertifikasi tenaga kerja, serta pembinaan dan dukungan UMKM, Pemerintah Kota Tarakan juga secara aktif menyelenggarakan job fair (bursa kerja) sebagai sarana mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan secara langsung. Kegiatan ini berperan strategis dalam mempercepat proses *matching* tenaga kerja, memperluas akses informasi lowongan kerja, serta meningkatkan transparansi pasar kerja di tingkat lokal.

Namun demikian, efektivitas program penunjang tersebut masih perlu diperkuat melalui pengukuran yang lebih terintegrasi terhadap outcome pasca kegiatan, seperti tingkat penempatan kerja setelah job fair maupun keberlanjutan usaha peserta pelatihan. Tanpa monitoring yang sistematis, kegiatan berpotensi berhenti pada capaian output (jumlah peserta dan perusahaan yang terlibat) tanpa memastikan dampak nyata terhadap penurunan TPT. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penguatan sistem pelacakan penempatan kerja, peningkatan kemitraan dengan sektor swasta, serta integrasi data ketenagakerjaan agar program-program penunjang benar-benar berkontribusi signifikan terhadap pengurangan pengangguran secara berkelanjutan.

Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif serta menjaga stabilitas ketertiban dan ketentraman kota

Tujuan 4 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan

Kota Tarakan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pintu gerbang Kalimantan Utara menghadapi dinamika perkotaan yang kompleks serta tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. Sebagai kota jasa dan perdagangan dengan mobilitas penduduk yang tinggi, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas sosial-ekonomi, meningkatkan kepercayaan publik, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. Oleh karena itu, penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional, responsif, dan berbasis kinerja menjadi kebutuhan strategis dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Penetapan tujuan “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan” dengan ukuran keberhasilan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Tarakan untuk membangun birokrasi yang efektif dan berdampak. Indeks RB tidak hanya mengukur aspek administratif, tetapi juga kualitas manajemen kinerja, akuntabilitas anggaran, penguatan pengawasan, digitalisasi pemerintahan, serta budaya kerja ASN yang berorientasi hasil. Dengan meningkatnya Indeks RB, diharapkan seluruh program pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih terintegrasi, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) merupakan instrumen evaluasi nasional yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada instansi pemerintah pusat dan daerah. Penilaian IRB berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB

Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, yang mengatur mekanisme, komponen, serta metodologi evaluasi Reformasi Birokrasi melalui pendekatan RB General dan RB Tematik. Regulasi ini menjadi dasar dalam menilai sejauh mana tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan secara efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Selain itu, arah kebijakan dan kerangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024, yang menegaskan fokus reformasi pada penciptaan birokrasi yang berdampak. Dengan demikian, nilai IRB tidak hanya merefleksikan kepatuhan administratif, tetapi juga tingkat kematangan sistem manajemen pemerintahan serta kontribusinya terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Untuk mengetahui capaian kinerja tujuan dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.45.
Capaian Indikator Tujuan Indeks Reformasi Birokrasi

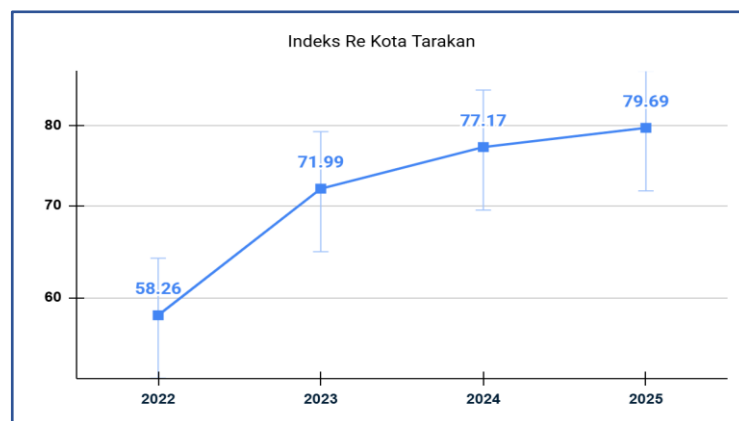
Indikator Kinerja	Realisasi			2025			Akhir RPJMD (2029)	
	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
Indeks RB	58.26	71.99	77.17	80	79.69*	99.61	84.00	94.87

Sumber: Kementerian PANRB, 2026 (nilai sementara).*

Indeks Reformasi Birokrasi Kota Tarakan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam tiga tahun terakhir, dari 58,26 pada tahun 2022 menjadi 71,99 pada tahun 2023 dan meningkat kembali menjadi 77,17 pada tahun 2024. Pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 80 dengan realisasi sementara sebesar 79,69 atau capaian kinerja 99,61%. Meskipun sedikit di bawah target, capaian

tersebut tetap mencerminkan perbaikan signifikan dalam penguatan tata kelola, manajemen kinerja, dan akuntabilitas pemerintahan. Peningkatan ini menunjukkan adanya komitmen berkelanjutan dalam implementasi reformasi birokrasi secara lebih sistematis dan terukur. Terhadap target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 84,00, capaian hingga tahun 2025 telah mencapai 94,87%. Hal ini menunjukkan progres yang sangat baik dan menempatkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan pada jalur yang positif dalam pencapaian target jangka menengah daerah. Secara umum, perkembangan nilai Indeks RB tersebut menggambarkan kemajuan yang terukur dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Tarakan.

Gambar 2.20
Capaian Indikator Tujuan Indeks Reformasi Birokrasi



Untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kualitas tata kelola pemerintahan, capaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kota Tarakan juga perlu dianalisis secara komparatif dengan kabupaten/kota lain serta rata-rata Provinsi Kalimantan Utara. Perbandingan tersebut penting untuk melihat posisi relatif Tarakan dalam implementasi reformasi birokrasi di tingkat regional, sekaligus menilai tingkat daya saing dan konsistensi perbaikan tata kelola antar

daerah. Data perbandingan Indeks RB tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.46.
Perbandingan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kalimantan Utara

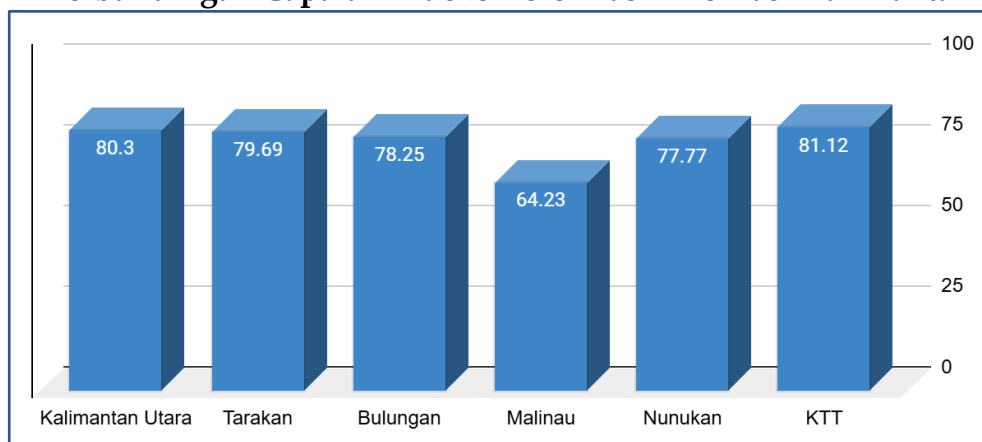
Indikator Sasaran	Realisasi					
	Kaltara	Tarakan	Bulungan	Malinau	Nunukan	Tana Tidung
Indeks RB	80,3	79,69	78,25	64,23	77,77	81,12

Sumber: Kementerian PANRB, 2026 (nilai sementara).*

Berdasarkan nilai sementara tahun 2025, Indeks Reformasi Birokrasi Kota Tarakan tercatat sebesar **79,69**, sedikit di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Utara sebesar **80,30**. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, nilai Tarakan lebih tinggi dari Bulungan (78,25), Nunukan (77,77), dan Malinau (64,23), namun masih berada di bawah KTT yang mencapai 81,12. Posisi ini menunjukkan bahwa secara relatif Tarakan berada pada kelompok daerah dengan capaian reformasi birokrasi yang cukup baik di tingkat provinsi.

Karena nilai tahun 2025 masih bersifat sementara dan berpotensi mengalami penyesuaian setelah evaluasi final, maka posisi komparatif tersebut masih dapat berubah. Namun demikian, berdasarkan data yang tersedia saat ini, capaian Indeks RB Kota Tarakan menggambarkan kinerja tata kelola yang kompetitif di antara kabupaten/kota se-Kalimantan Utara dan menunjukkan konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat daerah.

Gambar 2.21.
Perbandingan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kalimantan Utara



Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran dan indikator-indikator yang akan diukur sesuai definisi operasional dari masing-masing indikator yaitu:

Tabel 2.47.
Indikator Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	66.03	66.48	100.68
2	Meningkatnya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	N/A	N/A
3	Meningkatnya kualitas digitalisasi pelayanan publik	Indeks pelayanan publik	4.08	4.36	106.86
		Indeks SPBE	3	3.11	103.67

Adapun analisis capaian dari masing-masing Sasaran dan indikator sebagai berikut :

Sasaran 10 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja merupakan kebutuhan untuk memastikan bahwa setiap perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan daerah benar-benar berorientasi pada hasil (outcome) dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam konteks tata kelola pemerintahan modern, akuntabilitas tidak lagi dimaknai sebatas pertanggungjawaban administratif, tetapi sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya secara efektif, efisien, terukur, dan transparan. Oleh karena itu, penguatan sistem perencanaan berbasis kinerja, pengukuran capaian, serta evaluasi berkelanjutan menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan pemerintahan yang kredibel dan dipercaya publik.

Sebagai ukuran keberhasilan, digunakan indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang dievaluasi secara nasional oleh Kementerian PANRB. Nilai SAKIP mencerminkan kualitas perencanaan kinerja, keselarasan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, efektivitas pengukuran kinerja, serta pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan. Dengan meningkatnya nilai SAKIP, diharapkan terwujud birokrasi yang tidak hanya fokus pada serapan anggaran, tetapi pada pencapaian sasaran strategis pembangunan yang terukur dan berdampak.

Nilai SAKIP

Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah ukuran komposit yang mencerminkan sejauh mana instansi pemerintah telah menerapkan sistem manajemen kinerja secara efektif dan bertanggung jawab. Penilaian SAKIP mencakup kualitas

perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja (*planning and budgeting*), keselarasan antara *rencana kinerja* dan *anggaran*, kesungguhan dalam pengukuran capaian kinerja (*performance measurement*), serta pemanfaatan hasil evaluasi kinerja untuk perbaikan berkelanjutan. Nilai yang dihasilkan menggambarkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan strategis yang ditetapkan secara terukur, transparan, dan akuntabel, sehingga menjadi dasar untuk meningkatkan daya guna dan hasil program/kegiatan pemerintahan.

Penilaian dan pelaporan SAKIP diatur secara nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah beserta turunannya yang relevan. Regulasi ini mengamanatkan setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menyusun dan melaksanakan SAKIP secara konsisten, serta melaporkan Nilai SAKIP setiap tahun kepada Kementerian PANRB sebagai bagian dari evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah. Dengan dasar regulasi tersebut, Nilai SAKIP menjadi instrumen penting untuk memastikan kinerja aparatur sesuai dengan prinsip *good governance* dan berkontribusi pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Komponen penilaian utama (dengan bobot resmi) untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota (landasan: Permen PANRB No.88/2021):

1. Perencanaan Kinerja (30%)
2. Pengukuran Kinerja (30%)
3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)
4. Pelaporan Kinerja (15%)

Untuk mengetahui capaian kinerja sasaran dengan indikator Nilai SAKIP, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.48.
Capaian Indikator Nilai SAKIP

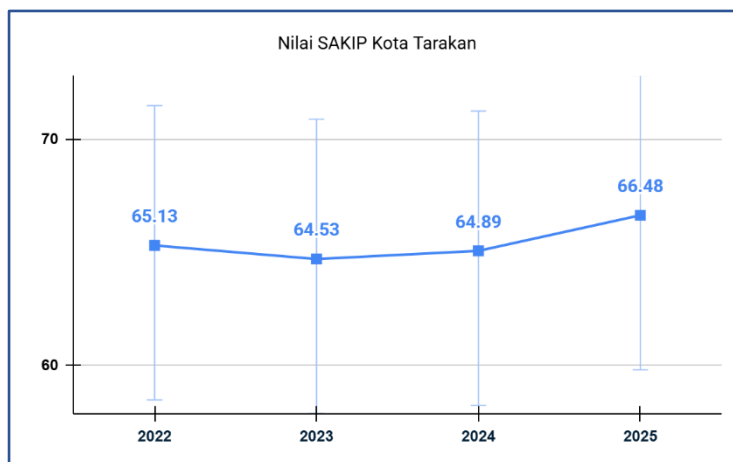
Indikator Kinerja	Realisasi			2025			Akhir RPJMD (2029)	
	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
Nilai SAKIP	65,13	64,53	64,89	66,03	66,48	100,68	72,35	91,89

Sumber: Kementerian PANRB, 2026

Nilai SAKIP Kota Tarakan dalam tiga tahun terakhir menunjukkan dinamika yang relatif stabil. Pada tahun 2022 tercatat sebesar 65,13, kemudian mengalami penurunan menjadi 64,53 pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 64,89 pada tahun 2024. Pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 66,03 dengan realisasi 66,48 atau capaian kinerja 100,68%. Capaian ini menunjukkan bahwa target tahunan berhasil dilampaui serta mencerminkan adanya perbaikan dalam implementasi sistem akuntabilitas kinerja, khususnya dalam aspek perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja.

Terhadap target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 72,35, capaian hingga tahun 2025 telah mencapai 91,89%. Hal ini menunjukkan progres yang cukup baik dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah. Secara umum, perkembangan nilai SAKIP tersebut menggambarkan adanya penguatan sistem manajemen kinerja yang semakin terarah dan konsisten dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Gambar 2.22.
Capaian Indikator Nilai SAKIP



Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai posisi kinerja akuntabilitas daerah, capaian Nilai SAKIP Kota Tarakan juga perlu dilihat secara komparatif dengan kabupaten/kota lain serta rata-rata Provinsi Kalimantan Utara. Perbandingan tersebut memberikan konteks terhadap tingkat kematangan implementasi SAKIP di daerah, sekaligus menunjukkan daya saing dan konsistensi penguatan manajemen kinerja di tingkat regional. Data capaian perbandingan tersebut disajikan pada tabel berikut sebagai dasar analisis posisi relatif Kota Tarakan dalam lingkup provinsi.

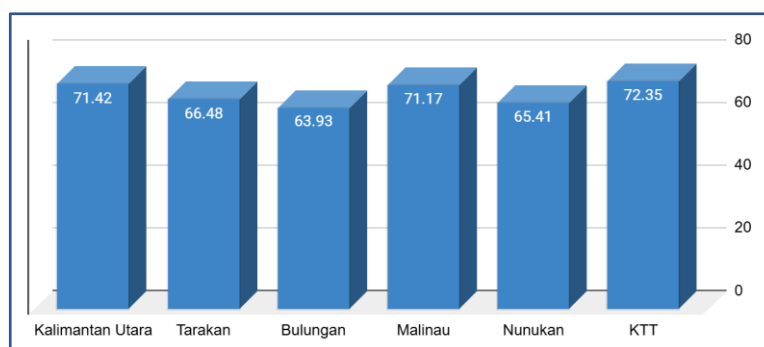
Tabel 2.49.
Perbandingan Capaian Nilai SAKIP Kalimantan Utara

Indikator Sasaran	Realisasi					
	Kaltara	Tarakan	Bulungan	Malinau	Nunukan	Tana Tidung
Nilai SAKIP	71.42	66.48	63.93	71.17	65.41	72.35

Sumber: Kementerian PANRB, 2026

Berdasarkan data realisasi terbaru, Nilai SAKIP Kota Tarakan tercatat sebesar 66,48, masih berada di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Utara sebesar 71,42. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, capaian Tarakan lebih tinggi dari Bulungan (63,93) dan Nunukan (65,41), namun masih berada di bawah Malinau (71,17) dan KTT yang mencapai 72,35. Posisi ini menunjukkan bahwa secara komparatif Tarakan berada pada kelompok menengah dalam capaian akuntabilitas kinerja di tingkat provinsi.

Gambar 2.23.
Perbandingan Capaian Nilai SAKIP Kalimantan Utara



Perbedaan nilai antar daerah menggambarkan variasi tingkat kematangan penerapan sistem akuntabilitas kinerja, terutama dalam aspek perencanaan berbasis kinerja, pengukuran capaian, serta pemanfaatan hasil evaluasi. Meskipun belum berada pada posisi tertinggi di provinsi, capaian Kota Tarakan tetap menunjukkan

kinerja yang kompetitif dan mencerminkan upaya penguatan sistem manajemen kinerja yang terus berjalan di lingkungan pemerintah daerah.

Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kendala

Keberhasilan Pemerintah Kota Tarakan dalam melampaui target tahun 2025 (100,68%) dan mempertahankan predikat “B” menunjukkan bahwa implementasi SAKIP telah berjalan cukup sistematis, khususnya pada aspek perencanaan dan pelaporan kinerja yang sudah terstruktur dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah. Evaluasi menyebutkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja sudah baik pada level pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama. Hal ini mengindikasikan adanya penguatan cascading kinerja, perumusan indikator yang semakin terarah pada outcome, serta meningkatnya kepatuhan perangkat daerah dalam penyusunan dan pelaporan kinerja berbasis regulasi SAKIP. Namun demikian, masih terdapat kendala yang menghambat akselerasi peningkatan nilai menuju target RPJMD 72,35. LHE menegaskan perlunya “sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja”, yang dapat dimaknai bahwa kualitas pengukuran kinerja berjenjang, pemanfaatan hasil evaluasi internal, serta konsistensi penerapan manajemen kinerja di seluruh perangkat daerah belum sepenuhnya merata. Tantangan lainnya adalah memastikan bahwa SAKIP tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen pengendalian dan pengambilan keputusan strategis berbasis hasil (result oriented government). Tanpa penguatan pada aspek kualitas pengukuran dan tindak lanjut evaluasi, peningkatan nilai secara signifikan hingga akhir periode RPJMD berpotensi melambat.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk melihat keterkaitan antara capaian kinerja dengan pemanfaatan sumber daya yang digunakan, dilakukan analisis efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian indikator Nilai SAKIP. Analisis ini membandingkan tingkat capaian indikator dengan realisasi anggaran program yang mendukung pencapaian sasaran tersebut, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.



Tabel 2.50.
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran terhadap Pencapaian Kinerja Tahun 2025
Indikator Nilai SAKIP

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rata-Rata Capaian (%)	Program Pendukung	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Rata-Rata Capaian (%)	Tingkat Efisiensi
Nilai SAKIP	66.03	66.48	100.68	100.68	Program Penyelenggaraan Pengawasan	235,930,000.00	167,565,000.00	71.02	85.84	17,29% (Efisien)
					Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	24,502,826,400.00	24,176,412,236.00	98.67		
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	712,822,044,795.38	635,399,173,547.62	89.14		
					Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	242,162,530.00	225,452,385.00	93.10		
					Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	459,564,970.00	318,948,110.00	69.40		
					Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	789,325,010.00	753,477,531.00	95.46		
					Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	972,002,930.00	817,324,113.00	84.09		

Sumber : Bappeda Litbang Kota Tarakan), 2026

Capaian Nilai SAKIP sebesar 66,48 pada tahun 2025 atau 100,68% dari target 66,03 menunjukkan bahwa target kinerja yang telah ditetapkan dapat terlampaui. Pencapaian ini tidak terlepas dari adanya dukungan anggaran yang diarahkan untuk memperkuat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, khususnya melalui optimalisasi pemanfaatan aplikasi e-SAKIP Pro sebagai instrumen pengelolaan kinerja terintegrasi. Dukungan tersebut berkontribusi pada peningkatan kualitas implementasi SAKIP pada empat komponen utama yang dievaluasi, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, serta evaluasi internal. Pemanfaatan sistem aplikasi yang lebih terstruktur membantu meningkatkan konsistensi cascading kinerja, ketepatan perumusan indikator, serta keterlacakan hubungan antara target kinerja, realisasi, dan dukungan anggaran.

Selain penguatan sistem, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan SAKIP juga menjadi faktor penting dalam mendorong kenaikan nilai. Penguatan kapasitas pengelola kinerja pada perangkat daerah meningkatkan pemahaman terhadap prinsip manajemen kinerja berbasis hasil serta memperbaiki kualitas penyusunan dokumen kinerja dan eviden evaluasi. Dengan demikian, peningkatan nilai SAKIP tahun 2025 tidak hanya mencerminkan perbaikan administratif, tetapi juga menunjukkan adanya kombinasi antara dukungan anggaran yang lebih terarah, pemanfaatan teknologi informasi melalui e-SAKIP Pro, serta peningkatan kompetensi SDM dalam implementasi manajemen kinerja. Keterkaitan antara peningkatan Nilai SAKIP dan dukungan anggaran dapat dilihat lebih lanjut pada tabel efisiensi penggunaan sumber daya yang disajikan berikut.

Berdasarkan tabel efisiensi penggunaan sumber daya, pencapaian indikator Nilai SAKIP didukung oleh beberapa program yang berkaitan dengan penguatan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja, antara lain Program Penyelenggaraan Pengawasan, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Program Pengembangan Sumber Daya Manusia. Secara keseluruhan, rata-rata realisasi anggaran program pendukung mencapai 85,84%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya tercatat sebesar 17,29% (efisien). Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja dapat diperoleh dengan pemanfaatan anggaran yang relatif lebih rendah dibandingkan pagu yang tersedia. Meskipun demikian, upaya penguatan integrasi antara perencanaan kinerja, penganggaran berbasis kinerja, serta evaluasi kinerja perangkat daerah tetap perlu ditingkatkan agar peningkatan nilai SAKIP pada tahun-tahun mendatang dapat dicapai secara lebih signifikan dan berkelanjutan.

Analisis Program/Kegiatan Penunjang

Peningkatan Nilai SAKIP tahun 2025 didukung oleh sejumlah program dan kegiatan strategis yang secara langsung memperkuat implementasi manajemen kinerja. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi e-SAKIP Pro menjadi instrumen utama dalam memastikan integrasi antara perencanaan, penganggaran, pengukuran, dan pelaporan kinerja secara lebih sistematis dan terdokumentasi. Melalui sistem tersebut, proses cascading kinerja hingga level perangkat daerah menjadi lebih terstruktur, indikator kinerja semakin terukur, serta keterkaitan antara target dan realisasi dapat dimonitor secara berkala. Dukungan teknis berupa pendampingan dan asistensi penyusunan

dokumen kinerja juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas eviden evaluasi.

Selain penguatan sistem, program peningkatan kapasitas SDM pengelola SAKIP melalui bimbingan teknis, coaching clinic, dan evaluasi internal berkala turut menjadi faktor penunjang utama. Kegiatan tersebut mendorong peningkatan pemahaman terhadap penyusunan indikator berbasis outcome, pengukuran kinerja berjenjang, serta pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan kinerja. Sinergi antara penguatan sistem digital dan peningkatan kompetensi aparatur inilah yang mendukung perbaikan pada empat komponen utama SAKIP, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Tarakan pada tahun 2025.

Sasaran 11 : Meningkatnya akuntabilitas keuangan

Sasaran *Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan* dilatarbelakangi oleh tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, tertib, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan APBD tidak hanya dituntut taat terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bebas dari penyimpangan. Dalam konteks otonomi daerah, akuntabilitas keuangan menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik, meningkatkan kredibilitas pemerintah daerah, serta memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai indikator keberhasilan digunakan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Opini BPK mencerminkan tingkat kewajaran penyajian laporan

keuangan berdasarkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern. Dengan perolehan opini yang baik, khususnya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), diharapkan terwujud tata kelola keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, dan berintegritas dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Opini BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan indikator utama dalam menilai tingkat akuntabilitas keuangan suatu daerah. Opini ini diberikan berdasarkan hasil audit terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang mencerminkan sejauh mana pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Opini BPK terdiri dari beberapa kategori, yaitu:

1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP), menyatakan bahwa terdapat beberapa hal dalam laporan keuangan yang perlu diperbaiki, namun secara keseluruhan masih dapat diterima.
3. Tidak Wajar (TW), menunjukkan bahwa laporan keuangan mengandung kesalahan material yang signifikan sehingga tidak dapat diandalkan.
4. Tidak Memberikan Opini (Disclaimer), menyatakan bahwa BPK tidak dapat memberikan opini karena keterbatasan data atau bukti yang cukup untuk melakukan audit.

Untuk mengetahui capaian kinerja sasaran dengan indikator Opini BPK, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.51.
Capaian Indikator Opini BPK

Indikator Kinerja	Realisasi			2025			Akhir RPJMD (2029)	
	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	N/A	N/A	WTP	100,00

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 2026

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tarakan pada periode 2022 sampai dengan 2024 menunjukkan capaian **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** secara konsisten. Pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar WTP, namun realisasi belum tersedia (N/A) karena opini BPK diberikan atas laporan keuangan tahun anggaran sebelumnya dan masih dalam proses pemeriksaan. Meskipun demikian, capaian terhadap target tetap dihitung 100% berdasarkan konsistensi perolehan opini WTP pada periode evaluasi sebelumnya.

Terhadap target akhir RPJMD tahun 2029 yang juga ditetapkan sebesar WTP, capaian hingga tahun 2025 tetap berada pada posisi 100%. Hal ini menunjukkan bahwa secara tren, Pemerintah Kota Tarakan mampu mempertahankan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah sesuai standar pemeriksaan keuangan negara, sehingga akuntabilitas keuangan daerah tetap terjaga secara berkelanjutan.

Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kendala

Keberhasilan Pemerintah Kota Tarakan dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara konsisten menunjukkan bahwa sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah telah berjalan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta didukung oleh pengendalian intern yang memadai. Konsistensi tersebut umumnya dipengaruhi oleh tertibnya proses penyusunan laporan keuangan, peningkatan kualitas rekonsiliasi antar perangkat daerah, serta penguatan fungsi pengawasan internal melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Selain itu, komitmen pimpinan dan koordinasi yang baik antara pengelola keuangan di tingkat SKPD dan Badan Pengelola Keuangan Daerah turut berperan dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi dan ketepatan waktu penyampaian laporan.

Namun demikian, mempertahankan opini WTP bukan berarti tanpa tantangan. Kompleksitas pengelolaan keuangan daerah, dinamika regulasi, serta potensi temuan berulang pada aspek administrasi dan pengendalian aset tetap menjadi kendala yang perlu terus diantisipasi. Tantangan lainnya adalah memastikan bahwa kualitas laporan keuangan tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan formal, tetapi juga mencerminkan efektivitas pengelolaan anggaran dan meminimalkan risiko ketidaksesuaian di masa mendatang. Oleh karena itu, konsistensi perbaikan sistem pengendalian intern dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan tetap menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan opini WTP.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara konsisten menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya dalam pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan secara tertib dan terkontrol. Efisiensi tercermin dari kemampuan Pemerintah Kota Tarakan dalam menyusun laporan keuangan yang andal tanpa memerlukan koreksi material yang signifikan pada saat pemeriksaan. Optimalisasi fungsi pengawasan internal, rekonsiliasi rutin antar perangkat daerah, serta pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah berkontribusi dalam meminimalkan kesalahan pencatatan dan mengurangi potensi pemborosan akibat temuan berulang. Dengan demikian, dukungan anggaran pada fungsi pengelolaan keuangan dan pengawasan mampu menghasilkan output berupa laporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu.

Namun demikian, efisiensi pengelolaan keuangan tidak hanya diukur dari keberhasilan memperoleh opini WTP, tetapi juga dari sejauh mana belanja daerah memberikan dampak nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan. Tantangan ke depan adalah memastikan bahwa sistem akuntansi dan pelaporan yang sudah tertib tersebut diiringi dengan kualitas perencanaan dan pengendalian anggaran yang semakin berbasis kinerja. Dengan penguatan sinergi antara pengelolaan keuangan, pengawasan internal, dan manajemen kinerja, efisiensi penggunaan sumber daya dapat terus ditingkatkan tanpa mengurangi kualitas akuntabilitas keuangan daerah.

Untuk mendukung pencapaian indikator **Opini BPK**, Pemerintah Kota Tarakan mengalokasikan anggaran pada sejumlah program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah. Dukungan anggaran tersebut disajikan pada tabel berikut.



Tabel 2.52

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran terhadap Pencapaian Kinerja Tahun 2025 Indikator Opini BPK

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rata-Rata Capaian (%)	Program Pendukung	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Rata-Rata Capaian (%)	Tingkat Efisiensi
Opini BPK	WTP	N/A	N/A	N/A	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2,485,117,110.00	1,812,549,732.00	72.94	73.45	
					Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	2,599,781,270.00	1,795,652,237.00	69.07		
					Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	5,889,786,820.00	5,514,749,419.00	93.63		
					Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	23,716,200.00	20,930,000.00	88.25		
					Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4,324,718,340.00	2,796,941,830.00	64.67		
					Program Pengelolaan Keuangan Daerah	8,427,710,880.00	3,046,764,813.00	36.15		
					Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	4,360,750,690.00	3,683,156,521.00	84.46		
					Program Penatagunaan Tanah	31,544,300.00	24,749,396.00	78.46		

Sumber : Bappeda Litbang Kota Tarakan), 2026

Analisis Program/Kegiatan Penunjang

Keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) didukung oleh sejumlah program dan kegiatan strategis yang berfokus pada penguatan tata kelola keuangan daerah. Kegiatan utama yang berkontribusi antara lain peningkatan kualitas penyusunan dan rekonsiliasi laporan keuangan, pembinaan dan asistensi pengelolaan keuangan pada perangkat daerah, serta optimalisasi pemanfaatan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui audit internal, reviu laporan keuangan, dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan turut memastikan bahwa potensi kesalahan dan ketidaksesuaian dapat diminimalkan sebelum dilakukan pemeriksaan oleh BPK.

Di samping itu, program peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan melalui bimbingan teknis dan pendampingan teknis akuntansi pemerintahan juga menjadi faktor penunjang penting. Upaya penertiban administrasi aset, peningkatan kualitas pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah, serta penguatan sistem pengendalian intern menjadi bagian integral dalam menjaga konsistensi opini WTP. Sinergi antara pembinaan teknis, pengawasan internal yang aktif, serta komitmen pimpinan dalam menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan menjadi fondasi utama dalam mempertahankan kualitas akuntabilitas keuangan Pemerintah Kota Tarakan.

Sasaran 12 : Meningkatnya kualitas digitalisasi pelayanan publik

Sasaran Meningkatnya Kualitas Digitalisasi Pelayanan Publik Kota Tarakan dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menjawab tantangan dinamika perkotaan dan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap layanan yang cepat, mudah, dan transparan. Sebagai kota jasa dan pusat pertumbuhan di Kalimantan Utara, mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi di Kota Tarakan relatif tinggi, sehingga menuntut sistem pelayanan publik yang adaptif dan efisien. Pola pelayanan konvensional yang masih bersifat manual dan terfragmentasi berpotensi menimbulkan keterlambatan, duplikasi proses, serta ketidakpastian waktu layanan. Oleh karena itu, transformasi digital menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas, kecepatan, dan kepastian pelayanan kepada masyarakat.

Digitalisasi pelayanan publik juga menjadi bagian dari upaya modernisasi tata kelola pemerintahan yang terintegrasi dan berbasis data. Melalui pengembangan layanan daring, integrasi aplikasi antar perangkat daerah, serta optimalisasi sistem informasi, Pemerintah Kota Tarakan berupaya menghadirkan pelayanan yang lebih responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. Peningkatan kualitas digitalisasi ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat, mendukung iklim investasi, serta meningkatkan daya saing daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi.

Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah instrumen evaluasi nasional yang digunakan untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Penilaian IPP dilaksanakan oleh Kementerian PANRB sebagai bagian dari

upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. IPP menilai sejauh mana unit pelayanan telah memenuhi standar pelayanan publik, memberikan kemudahan akses, menjamin kepastian waktu dan biaya, serta menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif dan responsif.

Komponen penilaian IPP meliputi aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan. Nilai IPP menggambarkan tingkat kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima, transparan, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.

IPP diperoleh dari hasil Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, pada 6 indikator penilaian yaitu:

1. Kebijakan Pelayanan 24%
2. Profesionalisme SDM 25%
3. Sarana Prasarana 18%
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik 10%
5. Konsultasi pengaduan 11%
6. Inovasi 12 %.

Untuk mengetahui capaian kinerja sasaran dengan indikator Indeks pelayanan publik, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.53.
Capaian Indikator Indeks Pelayanan Publik

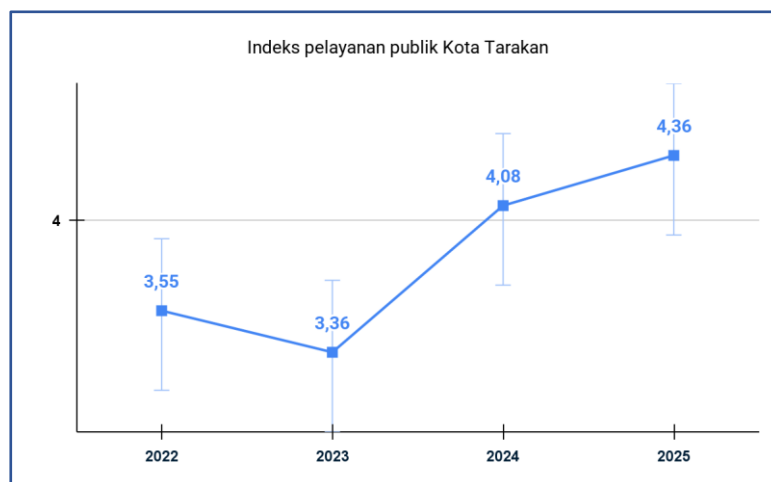
Indikator Kinerja	Realisasi			2025			Akhir RPJMD (2029)	
	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
Indeks pelayanan publik	3,55	3,36	4,08	4,08	4,36	106,86	4,10	106,34

Sumber: Kementerian PANRB, 2026

Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kota Tarakan menunjukkan dinamika yang cukup signifikan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022 tercatat sebesar 3,55, kemudian mengalami penurunan menjadi 3,36 pada tahun 2023, dan meningkat tajam menjadi 4,08 pada tahun 2024. Pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 4,08 dengan realisasi 4,36 atau capaian 106,86%. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang melampaui target tahunan, sekaligus mencerminkan penguatan standar pelayanan, sistem informasi layanan, serta inovasi pelayanan di perangkat daerah.

Terhadap target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 4,10, capaian hingga tahun 2025 telah mencapai 106,34%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik telah melampaui target jangka menengah daerah lebih awal dari yang direncanakan. Secara umum, tren peningkatan IPP tersebut menggambarkan adanya transformasi yang progresif dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Tarakan, baik dari aspek kebijakan, sarana prasarana, profesionalisme SDM, maupun pengelolaan pengaduan

Gambar 2.24.
Capaian Indikator Indeks Pelayanan Publik



Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai posisi capaian tersebut, nilai Indeks Pelayanan Publik Kota Tarakan perlu dibandingkan dengan kabupaten/kota lain serta rata-rata Provinsi Kalimantan Utara. Perbandingan tersebut disajikan pada tabel berikut sebagai dasar analisis benchmarking dan penilaian posisi relatif Kota Tarakan di tingkat regional.

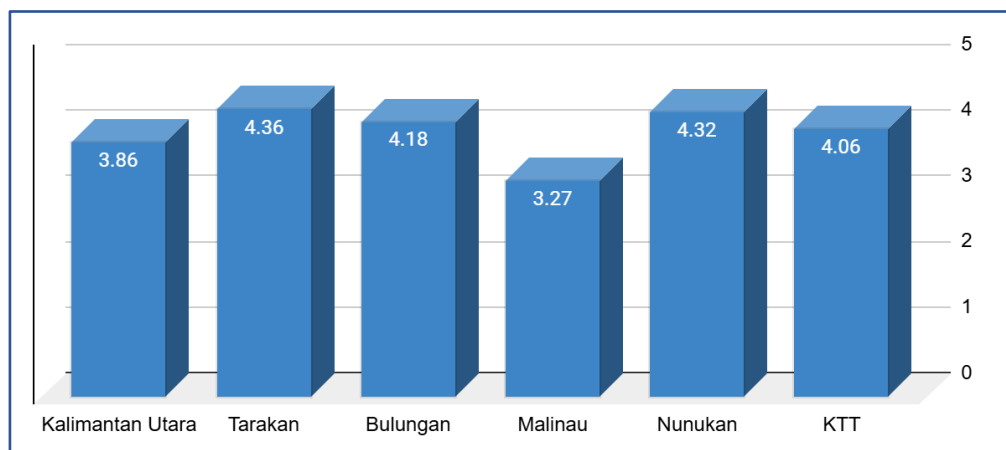
Tabel 2.54.
Perbandingan Capaian Indeks Pelayanan Publik Kalimantan Utara

Indikator Sasaran	Realisasi					
	Kaltara	Tarakan	Bulungan	Malinau	Nunukan	Tana Tidung
Indeks pelayanan publik	3,86	4,36	4,18	3,27	4,32	4,06

Sumber: Kementerian PANRB, 2026

Berdasarkan data realisasi terbaru, Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kota Tarakan tercatat sebesar 4,36, berada di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Utara sebesar 3,86. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, capaian Tarakan merupakan yang tertinggi, melampaui Bulungan (4,18), Nunukan (4,32), KTT (4,06), dan Malinau (3,27). Posisi ini menunjukkan bahwa secara komparatif kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Tarakan berada pada level sangat baik di tingkat provinsi.

Gambar 2.25.
Perbandingan Capaian Indeks Pelayanan Publik Kalimantan Utara



Capaian tersebut menggambarkan bahwa standar pelayanan, profesionalisme aparatur, ketersediaan sarana prasarana, sistem informasi pelayanan, serta inovasi layanan di Kota Tarakan telah berjalan optimal. Keunggulan nilai IPP ini sekaligus menegaskan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah Kota Tarakan telah menghasilkan kinerja yang kompetitif dan menjadi salah satu yang terbaik di Kalimantan Utara.

Selain itu, untuk melihat daya saing secara lebih luas, capaian IPP Kota Tarakan juga perlu ditempatkan dalam konteks perbandingan nasional. Data posisi Kota Tarakan pada level nasional disajikan pada bagian berikut guna memberikan gambaran mengenai tingkat kompetitivitas pelayanan publik daerah dibandingkan pemerintah kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Jika dibandingkan secara nasional, nilai 4,36 menempatkan Kota Tarakan sejajar dengan sejumlah kota besar lainnya dalam kategori A, serta mencerminkan daya saing pelayanan publik yang kuat di antara pemerintah kota di Indonesia. Hal ini mempertegas bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Tarakan tidak hanya signifikan pada level regional, tetapi juga kompetitif pada tingkat nasional

Gambar 2.26.
Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Tarakan 2025

 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN DAERAH TAHUN 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 7 ayat 4 huruf a, maka telah dilaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2025 dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik; b. bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelayanan publik pada unit telah dilaksanakan proses pengolahan, validasi, dan penentuan akhir hasil penilaian; dan c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Lingkup Kementerian, Lembaga dan Daerah Tahun 2025. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);		C. KOTA <table> <tr> <th>No</th><th>Instansi</th><th>Indeks</th><th>Kategori</th></tr> <tr><td>1</td><td>Pemerintah Kota Surabaya</td><td>4.84</td><td>A</td></tr> <tr><td>2</td><td>Pemerintah Kota Surakarta</td><td>4.80</td><td>A</td></tr> <tr><td>3</td><td>Pemerintah Kota Denpasar</td><td>4.80</td><td>A</td></tr> <tr><td>4</td><td>Pemerintah Kota Depok</td><td>4.76</td><td>A</td></tr> <tr><td>5</td><td>Pemerintah Kota Bandung</td><td>4.73</td><td>A</td></tr> <tr><td>6</td><td>Pemerintah Kota Bekasi</td><td>4.73</td><td>A</td></tr> <tr><td>7</td><td>Pemerintah Kota Pontianak</td><td>4.71</td><td>A</td></tr> <tr><td>8</td><td>Pemerintah Kota Pasuruan</td><td>4.71</td><td>A</td></tr> <tr><td>9</td><td>Pemerintah Kota Madiun</td><td>4.71</td><td>A</td></tr> <tr><td>10</td><td>Pemerintah Kota Lubuk Linggau</td><td>4.70</td><td>A</td></tr> <tr><td>11</td><td>Pemerintah Kota Balikpapan</td><td>4.70</td><td>A</td></tr> <tr><td>12</td><td>Pemerintah Kota Cirebon</td><td>4.70</td><td>A</td></tr> <tr><td>13</td><td>Pemerintah Kota Pekalongan</td><td>4.70</td><td>A</td></tr> <tr><td>14</td><td>Pemerintah Kota Bitar</td><td>4.69</td><td>A</td></tr> <tr><td>15</td><td>Pemerintah Kota Batam</td><td>4.69</td><td>A</td></tr> <tr><td>16</td><td>Pemerintah Kota Bogor</td><td>4.69</td><td>A</td></tr> <tr><td>17</td><td>Pemerintah Kota Yogyakarta</td><td>4.69</td><td>A</td></tr> <tr><td>18</td><td>Pemerintah Kota Mojokerto</td><td>4.67</td><td>A</td></tr> <tr><td>19</td><td>Pemerintah Kota Prabumulih</td><td>4.67</td><td>A</td></tr> <tr><td>20</td><td>Pemerintah Kota Samarinda</td><td>4.67</td><td>A</td></tr> <tr><td>21</td><td>Pemerintah Kota Kediri</td><td>4.66</td><td>A</td></tr> <tr><td>22</td><td>Pemerintah Kota Malang</td><td>4.64</td><td>A</td></tr> <tr><td>23</td><td>Pemerintah Kota Singarawang</td><td>4.63</td><td>A</td></tr> <tr><td>24</td><td>Pemerintah Kota Batu</td><td>4.62</td><td>A</td></tr> <tr><td>25</td><td>Pemerintah Kota Tangerang Selatan</td><td>4.62</td><td>A</td></tr> <tr><td>26</td><td>Pemerintah Kota Cimahi</td><td>4.61</td><td>A</td></tr> <tr><td>27</td><td>Pemerintah Kota Pager Alam</td><td>4.59</td><td>A</td></tr> <tr><td>28</td><td>Pemerintah Kota Banjar</td><td>4.59</td><td>A</td></tr> <tr><td>29</td><td>Pemerintah Kota Medan</td><td>4.54</td><td>A</td></tr> <tr><td>30</td><td>Pemerintah Kota Bontang</td><td>4.53</td><td>A</td></tr> <tr><td>31</td><td>Pemerintah Kota Tasikmalaya</td><td>4.50</td><td>A-</td></tr> <tr><td>32</td><td>Pemerintah Kota Sukabumi</td><td>4.50</td><td>A-</td></tr> <tr><td>33</td><td>Pemerintah Kota Palembang</td><td>4.48</td><td>A-</td></tr> <tr><td>34</td><td>Pemerintah Kota Semarang</td><td>4.48</td><td>A-</td></tr> <tr><td>35</td><td>Pemerintah Kota Padang Panjang</td><td>4.47</td><td>A-</td></tr> <tr><td>36</td><td>Pemerintah Kota Probolinggo</td><td>4.47</td><td>A-</td></tr> <tr><td>37</td><td>Pemerintah Kota Banjarmasin</td><td>4.45</td><td>A-</td></tr> <tr><td>38</td><td>Pemerintah Kota Tanjung Pinang</td><td>4.44</td><td>A-</td></tr> <tr><td>39</td><td>Pemerintah Kota Mataram</td><td>4.42</td><td>A-</td></tr> <tr><td>40</td><td>Pemerintah Kota Salatiga</td><td>4.42</td><td>A-</td></tr> <tr><td>41</td><td>Pemerintah Kota Pematangsiantar</td><td>4.40</td><td>A-</td></tr> <tr><td>42</td><td>Pemerintah Kota Tarakan</td><td>4.36</td><td>A-</td></tr> <tr><td>43</td><td>Pemerintah Kota Payakumbuh</td><td>4.35</td><td>A-</td></tr> <tr><td>44</td><td>Pemerintah Kota Palangkaraya</td><td>4.35</td><td>A-</td></tr> <tr><td>45</td><td>Pemerintah Kota Pangkal Pinang</td><td>4.32</td><td>A-</td></tr> <tr><td>46</td><td>Pemerintah Kota Lubuksumawe</td><td>4.31</td><td>A-</td></tr> <tr><td>47</td><td>Pemerintah Kota Metro</td><td>4.31</td><td>A-</td></tr> </table>		No	Instansi	Indeks	Kategori	1	Pemerintah Kota Surabaya	4.84	A	2	Pemerintah Kota Surakarta	4.80	A	3	Pemerintah Kota Denpasar	4.80	A	4	Pemerintah Kota Depok	4.76	A	5	Pemerintah Kota Bandung	4.73	A	6	Pemerintah Kota Bekasi	4.73	A	7	Pemerintah Kota Pontianak	4.71	A	8	Pemerintah Kota Pasuruan	4.71	A	9	Pemerintah Kota Madiun	4.71	A	10	Pemerintah Kota Lubuk Linggau	4.70	A	11	Pemerintah Kota Balikpapan	4.70	A	12	Pemerintah Kota Cirebon	4.70	A	13	Pemerintah Kota Pekalongan	4.70	A	14	Pemerintah Kota Bitar	4.69	A	15	Pemerintah Kota Batam	4.69	A	16	Pemerintah Kota Bogor	4.69	A	17	Pemerintah Kota Yogyakarta	4.69	A	18	Pemerintah Kota Mojokerto	4.67	A	19	Pemerintah Kota Prabumulih	4.67	A	20	Pemerintah Kota Samarinda	4.67	A	21	Pemerintah Kota Kediri	4.66	A	22	Pemerintah Kota Malang	4.64	A	23	Pemerintah Kota Singarawang	4.63	A	24	Pemerintah Kota Batu	4.62	A	25	Pemerintah Kota Tangerang Selatan	4.62	A	26	Pemerintah Kota Cimahi	4.61	A	27	Pemerintah Kota Pager Alam	4.59	A	28	Pemerintah Kota Banjar	4.59	A	29	Pemerintah Kota Medan	4.54	A	30	Pemerintah Kota Bontang	4.53	A	31	Pemerintah Kota Tasikmalaya	4.50	A-	32	Pemerintah Kota Sukabumi	4.50	A-	33	Pemerintah Kota Palembang	4.48	A-	34	Pemerintah Kota Semarang	4.48	A-	35	Pemerintah Kota Padang Panjang	4.47	A-	36	Pemerintah Kota Probolinggo	4.47	A-	37	Pemerintah Kota Banjarmasin	4.45	A-	38	Pemerintah Kota Tanjung Pinang	4.44	A-	39	Pemerintah Kota Mataram	4.42	A-	40	Pemerintah Kota Salatiga	4.42	A-	41	Pemerintah Kota Pematangsiantar	4.40	A-	42	Pemerintah Kota Tarakan	4.36	A-	43	Pemerintah Kota Payakumbuh	4.35	A-	44	Pemerintah Kota Palangkaraya	4.35	A-	45	Pemerintah Kota Pangkal Pinang	4.32	A-	46	Pemerintah Kota Lubuksumawe	4.31	A-	47	Pemerintah Kota Metro	4.31	A-
No	Instansi	Indeks	Kategori																																																																																																																																																																																																
1	Pemerintah Kota Surabaya	4.84	A																																																																																																																																																																																																
2	Pemerintah Kota Surakarta	4.80	A																																																																																																																																																																																																
3	Pemerintah Kota Denpasar	4.80	A																																																																																																																																																																																																
4	Pemerintah Kota Depok	4.76	A																																																																																																																																																																																																
5	Pemerintah Kota Bandung	4.73	A																																																																																																																																																																																																
6	Pemerintah Kota Bekasi	4.73	A																																																																																																																																																																																																
7	Pemerintah Kota Pontianak	4.71	A																																																																																																																																																																																																
8	Pemerintah Kota Pasuruan	4.71	A																																																																																																																																																																																																
9	Pemerintah Kota Madiun	4.71	A																																																																																																																																																																																																
10	Pemerintah Kota Lubuk Linggau	4.70	A																																																																																																																																																																																																
11	Pemerintah Kota Balikpapan	4.70	A																																																																																																																																																																																																
12	Pemerintah Kota Cirebon	4.70	A																																																																																																																																																																																																
13	Pemerintah Kota Pekalongan	4.70	A																																																																																																																																																																																																
14	Pemerintah Kota Bitar	4.69	A																																																																																																																																																																																																
15	Pemerintah Kota Batam	4.69	A																																																																																																																																																																																																
16	Pemerintah Kota Bogor	4.69	A																																																																																																																																																																																																
17	Pemerintah Kota Yogyakarta	4.69	A																																																																																																																																																																																																
18	Pemerintah Kota Mojokerto	4.67	A																																																																																																																																																																																																
19	Pemerintah Kota Prabumulih	4.67	A																																																																																																																																																																																																
20	Pemerintah Kota Samarinda	4.67	A																																																																																																																																																																																																
21	Pemerintah Kota Kediri	4.66	A																																																																																																																																																																																																
22	Pemerintah Kota Malang	4.64	A																																																																																																																																																																																																
23	Pemerintah Kota Singarawang	4.63	A																																																																																																																																																																																																
24	Pemerintah Kota Batu	4.62	A																																																																																																																																																																																																
25	Pemerintah Kota Tangerang Selatan	4.62	A																																																																																																																																																																																																
26	Pemerintah Kota Cimahi	4.61	A																																																																																																																																																																																																
27	Pemerintah Kota Pager Alam	4.59	A																																																																																																																																																																																																
28	Pemerintah Kota Banjar	4.59	A																																																																																																																																																																																																
29	Pemerintah Kota Medan	4.54	A																																																																																																																																																																																																
30	Pemerintah Kota Bontang	4.53	A																																																																																																																																																																																																
31	Pemerintah Kota Tasikmalaya	4.50	A-																																																																																																																																																																																																
32	Pemerintah Kota Sukabumi	4.50	A-																																																																																																																																																																																																
33	Pemerintah Kota Palembang	4.48	A-																																																																																																																																																																																																
34	Pemerintah Kota Semarang	4.48	A-																																																																																																																																																																																																
35	Pemerintah Kota Padang Panjang	4.47	A-																																																																																																																																																																																																
36	Pemerintah Kota Probolinggo	4.47	A-																																																																																																																																																																																																
37	Pemerintah Kota Banjarmasin	4.45	A-																																																																																																																																																																																																
38	Pemerintah Kota Tanjung Pinang	4.44	A-																																																																																																																																																																																																
39	Pemerintah Kota Mataram	4.42	A-																																																																																																																																																																																																
40	Pemerintah Kota Salatiga	4.42	A-																																																																																																																																																																																																
41	Pemerintah Kota Pematangsiantar	4.40	A-																																																																																																																																																																																																
42	Pemerintah Kota Tarakan	4.36	A-																																																																																																																																																																																																
43	Pemerintah Kota Payakumbuh	4.35	A-																																																																																																																																																																																																
44	Pemerintah Kota Palangkaraya	4.35	A-																																																																																																																																																																																																
45	Pemerintah Kota Pangkal Pinang	4.32	A-																																																																																																																																																																																																
46	Pemerintah Kota Lubuksumawe	4.31	A-																																																																																																																																																																																																
47	Pemerintah Kota Metro	4.31	A-																																																																																																																																																																																																

Sumber: Kementerian PANRB, 2026

Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kendala

Capaian Indeks Pelayanan Publik Kota Tarakan yang mencapai 4,36 (kategori A) dipengaruhi oleh beberapa faktor keberhasilan utama. Pertama, adanya penguatan kebijakan dan standar pelayanan yang semakin terintegrasi, termasuk penyempurnaan maklumat pelayanan, standar operasional prosedur (SOP), serta publikasi informasi layanan secara lebih terbuka dan mudah diakses. Kedua, peningkatan profesionalisme SDM pelayanan melalui pembinaan, evaluasi berkala, serta penguatan budaya pelayanan prima turut mendorong konsistensi kualitas layanan. Ketiga, optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dan kanal pengaduan masyarakat telah meningkatkan responsivitas dan akuntabilitas unit pelayanan,

sehingga aspek transparansi dan pengelolaan keluhan memperoleh penilaian yang baik dalam evaluasi PEKPPP.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala yang perlu menjadi perhatian. Beberapa unit layanan belum sepenuhnya memiliki tingkat kematangan digital yang merata, sehingga integrasi layanan berbasis elektronik belum optimal di seluruh perangkat daerah. Selain itu, kualitas sarana dan prasarana pelayanan pada sebagian titik layanan masih memerlukan peningkatan untuk memenuhi standar ideal kenyamanan dan aksesibilitas. Tantangan lainnya adalah menjaga konsistensi kualitas pelayanan di tengah dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, sehingga diperlukan penguatan monitoring internal dan inovasi berkelanjutan agar capaian kategori A dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kota Tarakan menunjukkan bahwa peningkatan nilai hingga 4,36 atau sebesar 106,86% dari target tahunan lebih banyak didorong oleh optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia dibandingkan penambahan anggaran. Penguatan standar pelayanan, digitalisasi proses layanan, serta integrasi kanal informasi dan pengaduan dilakukan dengan memaksimalkan infrastruktur dan aplikasi yang telah ada, sementara peningkatan kompetensi aparatur pelayanan dilaksanakan melalui pembinaan internal, pendampingan, dan penguatan budaya pelayanan prima. Selain itu, sinergi antar perangkat daerah dalam pemanfaatan sarana pelayanan dan sistem informasi turut menekan potensi duplikasi anggaran, sehingga capaian kategori A pada Indeks

Pelayanan Publik mencerminkan kemampuan Pemerintah Kota Tarakan dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk melihat keterkaitan antara capaian kinerja tersebut dengan pemanfaatan anggaran yang digunakan

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mendukung pencapaian indikator Pelayanan Publik, dilakukan analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui perbandingan antara capaian kinerja dengan realisasi anggaran program yang mendukung pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Analisis Program/Kegiatan Penunjang

Analisis Program/Kegiatan Penunjang terhadap capaian Indeks Pelayanan Publik Kota Tarakan menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan tidak berdiri sendiri, melainkan ditopang oleh sejumlah program strategis yang terstruktur. Penguatan peran Mal Pelayanan Publik (MPP), penyempurnaan standar pelayanan pada perangkat daerah penyelenggara layanan, serta peningkatan kualitas pengelolaan pengaduan masyarakat melalui kanal terpadu menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan nilai PEKPPP. Selain itu, program pembinaan dan monitoring berkala terhadap unit layanan turut memastikan pemenuhan komponen penilaian, mulai dari kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, hingga sarana prasarana dan sistem informasi pelayanan publik.

Di sisi lain, program digitalisasi layanan dan integrasi sistem informasi antar perangkat daerah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kemudahan akses, kecepatan, dan transparansi layanan. Kegiatan survei kepuasan masyarakat (SKM), evaluasi internal, serta tindak lanjut hasil evaluasi eksternal menjadi instrumen

penting dalam perbaikan berkelanjutan (continuous improvement). Dengan dukungan program-program tersebut, peningkatan Indeks Pelayanan Publik tidak hanya bersifat administratif untuk memenuhi indikator kinerja, tetapi mencerminkan transformasi nyata dalam tata kelola dan kualitas pelayanan publik di Kota Tarakan.

Indeks SPBE

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah ukuran tingkat kematangan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pemerintah pusat dan daerah. Penilaian Indeks SPBE dilaksanakan secara nasional oleh Kementerian PANRB sebagai bagian dari evaluasi transformasi digital pemerintahan. Indeks ini mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah telah menerapkan tata kelola, manajemen, dan layanan berbasis teknologi informasi secara terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan.

Penilaian Indeks SPBE mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta regulasi teknis turunannya. Aspek yang dinilai meliputi tata kelola SPBE, manajemen SPBE, serta layanan SPBE yang mencakup layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik. Nilai Indeks SPBE menunjukkan tingkat kematangan digitalisasi pemerintahan, mulai dari tahap inisiasi hingga terintegrasi dan optimal, sehingga menjadi indikator penting dalam mendorong terwujudnya pemerintahan yang efisien, transparan, dan berbasis data.

Untuk mengetahui capaian kinerja sasaran dengan indikator Indeks SPBE, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.55.
Capaian Indikator Indeks SPBE

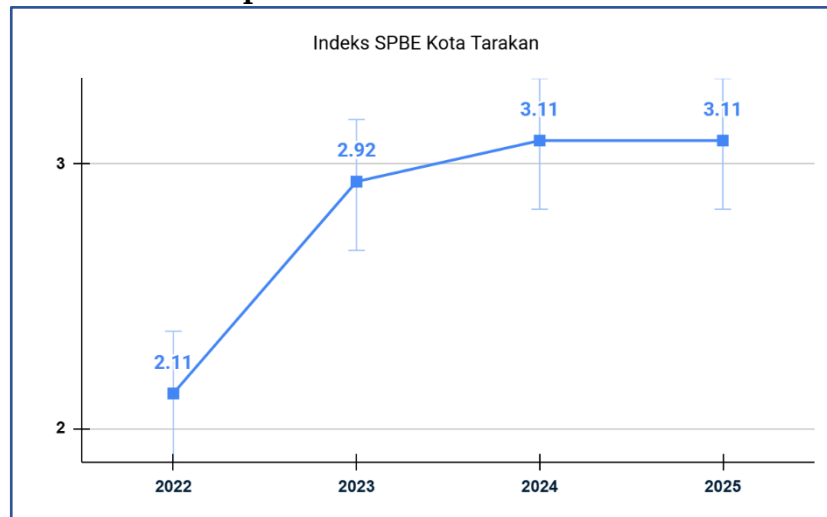
Indikator Kinerja	Realisasi			2025			Akhir RPJMD (2029)	
	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
Indeks SPBE	2,11	2,92	3,11	3,00	3,11	103,67	3,50	88,86

Sumber: Kementerian PANRB, 2026

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Tarakan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022 nilai SPBE tercatat sebesar 2,11, meningkat menjadi 2,92 pada tahun 2023, dan kembali naik menjadi 3,11 pada tahun 2024. Pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 3,00 dengan realisasi 3,11 atau capaian kinerja 103,67%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi SPBE telah melampaui target tahunan yang ditetapkan, sekaligus mencerminkan penguatan tata kelola, manajemen, dan integrasi layanan pemerintahan berbasis elektronik.

Terhadap target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 3,50, capaian hingga tahun 2025 telah mencapai 88,86%. Hal ini menunjukkan progres yang cukup baik dalam mendorong transformasi digital pemerintahan daerah, meskipun masih terdapat ruang peningkatan untuk mencapai tingkat kematangan SPBE yang lebih optimal. Secara umum, perkembangan nilai SPBE tersebut menggambarkan komitmen Pemerintah Kota Tarakan dalam mempercepat digitalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Gambar 2.27
Capaian Indikator Indeks SPBE



Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kendala

Peningkatan Indeks SPBE Kota Tarakan dari 2,11 (2022) menjadi 3,11 (2024) dan capaian 3,11 pada 2025 (103,67% dari target tahunan) menunjukkan adanya perbaikan yang cukup signifikan pada aspek tata kelola dan layanan digital. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh penguatan regulasi dan kebijakan internal SPBE, penyusunan arsitektur SPBE yang lebih terarah, serta berfungsinya Tim Koordinasi SPBE dalam mengendalikan integrasi sistem antar perangkat daerah. Selain itu, peningkatan pemanfaatan aplikasi pada proses perencanaan, penganggaran, keuangan, dan kepegawaian mendorong peningkatan maturitas domain layanan dan tata kelola. Perbaikan dokumentasi, eviden kinerja digital, serta konsistensi pelaporan juga berkontribusi terhadap peningkatan skor evaluasi. Namun demikian, masih terdapat kendala struktural yang memengaruhi laju peningkatan indeks. Integrasi dan interoperabilitas antar aplikasi belum sepenuhnya optimal, sehingga masih terdapat sistem yang berjalan parsial dan belum terhubung dalam satu

arsitektur data terpadu. Kualitas dan kapasitas SDM pengelola TIK di beberapa perangkat daerah juga belum merata, yang berdampak pada variasi tingkat implementasi SPBE. Selain itu, penguatan aspek manajemen risiko keamanan informasi dan pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan masih memerlukan pendalaman. Tantangan-tantangan tersebut menjadi faktor yang menyebabkan capaian terhadap target akhir RPJMD (3,50) baru mencapai 88,86%, sehingga diperlukan penguatan transformasi digital yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada pemanfaatan data secara strategis, bukan sekadar digitalisasi prosedur.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada capaian Indeks Pelayanan Publik Kota Tarakan menunjukkan bahwa peningkatan nilai hingga kategori A dicapai melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang sudah tersedia. Perbaikan kualitas pelayanan lebih banyak dilakukan melalui penyempurnaan standar operasional, penguatan koordinasi antar unit layanan, serta peningkatan pemanfaatan sistem informasi yang telah dikembangkan sebelumnya. Pendekatan ini memungkinkan peningkatan kualitas layanan tanpa ketergantungan pada ekspansi anggaran yang signifikan, sehingga perbaikan kinerja lebih bersifat sistemik dan berkelanjutan.

Selain itu, integrasi layanan melalui Mal Pelayanan Publik dan penguatan kanal pengaduan terpadu turut menekan duplikasi proses dan biaya operasional antar perangkat daerah. Peningkatan kapasitas SDM pelayanan dilakukan melalui pembinaan dan evaluasi internal yang terencana, sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan dengan biaya yang relatif terkendali. Dengan demikian, capaian IPP yang melampaui target menunjukkan bahwa Pemerintah Kota

Tarakan mampu mengelola sumber daya anggaran, sistem, dan SDM secara efisien dalam menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas dan kompetitif.

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mendukung pencapaian indikator Indeks SPBE, dilakukan analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui perbandingan antara capaian kinerja dengan realisasi anggaran program yang mendukung pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Kegiatan Penunjang

Peningkatan Indeks SPBE Kota Tarakan hingga mencapai 3,11 didukung oleh sejumlah program strategis yang terarah pada penguatan tata kelola dan integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Program penyusunan dan penyempurnaan arsitektur SPBE, penguatan regulasi internal, serta operasionalisasi Tim Koordinasi SPBE menjadi fondasi penting dalam meningkatkan domain kebijakan dan tata kelola. Selain itu, pengembangan serta integrasi aplikasi pada fungsi perencanaan, penganggaran, keuangan, kepegawaian, dan pelayanan publik turut mendorong peningkatan maturitas domain layanan, sehingga sistem yang ada tidak berjalan parsial melainkan semakin terhubung dalam satu kerangka digital pemerintah daerah.

Di sisi lain, kegiatan peningkatan kapasitas SDM TIK, penguatan manajemen pusat data dan jaringan, serta perbaikan aspek keamanan informasi menjadi program penunjang yang berkontribusi pada peningkatan kualitas implementasi SPBE. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap pemanfaatan aplikasi serta konsolidasi sistem yang tumpang tindih juga menjadi bagian penting dalam menjaga efektivitas dan efisiensi transformasi digital. Secara keseluruhan,

capaian Indeks SPBE mencerminkan bahwa program digitalisasi di Kota Tarakan telah bergerak menuju tahap penguatan integrasi dan tata kelola, meskipun masih memerlukan akselerasi pada interoperabilitas data dan pemanfaatan sistem secara menyeluruh untuk mencapai target akhir RPJMD.

Tabel 2.56
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran terhadap Pencapaian Kinerja Tahun 2025
Indikator Indeks Pelayanan Publik dan Indeks SPBE

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rata-Rata Capaian (%)	Program Pendukung	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Rata-Rata Capaian (%)	Tingkat Efisiensi
Indeks Pelayanan Publik	4.08	4.36	106.86	105.26	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1,039,241,700.00	1,014,919,302.00	97.66	91.63	14,88% (Efisien)
Indeks SPBE	3.00	3.11	103.67		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	380,681,600.00	366,538,288.00	96.28		
					Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	18,778,608,910.00	17,761,656,943.00	94.58		
					Program Pencatatan Sipil	10,424,800.00	9,199,800.00	88.25		
					Program Pendaftaran Penduduk	234,910,800.00	217,392,592.00	92.54		
					Program Pengelolaan Profil Kependudukan	4,159,700.00	3,359,035.00	80.75		
					Program Kepegawaian Daerah	1,001,772,150.00	698,200,703.00	69.70		
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	25,000,000.00	24,694,000.00	98.78		
					Program Pelayanan Penanaman Modal	165,233,951.00	161,129,785.00	97.52		
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	16,238,054,960.00	15,907,019,666.00	97.96		
					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1,097,140,880.00	1,030,792,454.00	93.95		

Sumber : Bappeda Litbang Kota Tarakan), 2026

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya menunjukkan bahwa pencapaian Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,36 atau 106,86% dari target 4,08 serta Indeks SPBE sebesar 3,11 atau 103,67% dari target 3,00 dapat dicapai dengan pemanfaatan anggaran yang relatif efisien. Hal ini tercermin dari rata-rata realisasi anggaran program pendukung yang berada pada kisaran 91,63%, sehingga menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 14,88% (efisien). Capaian tersebut didukung oleh berbagai program yang berkaitan dengan penguatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik, antara lain Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Program Pelayanan Penanaman Modal, serta Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik dan penerapan SPBE di Kota Tarakan tidak hanya bergantung pada besaran anggaran, tetapi juga pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya, integrasi sistem layanan, serta penguatan tata kelola pelayanan yang lebih efektif dan terkoordinasi.

Misi 5 : Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan Tangguh menghadapi bencana

Tujuan 5 : Terwujudnya lingkungan hidup berkelanjutan dan resiliensi terhadap bencana

Kota Tarakan merupakan kota kepulauan di Provinsi Kalimantan Utara dengan karakteristik wilayah pesisir, dominasi ekosistem mangrove, serta luas daratan yang terbatas. Pertumbuhan penduduk dan ekspansi kawasan terbangun sebagai pusat perdagangan dan jasa di wilayah perbatasan mendorong meningkatnya tekanan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan. Alih fungsi lahan,

persoalan persampahan dan drainase, serta peningkatan kebutuhan energi dan transportasi berimplikasi pada potensi kenaikan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penurunan kualitas lingkungan apabila tidak dikelola secara berkelanjutan.

Di sisi lain, kondisi geografis yang relatif datar dan berada di kawasan pesisir menjadikan Tarakan rentan terhadap banjir genangan, banjir rob, abrasi pantai, cuaca ekstrem, serta kebakaran permukiman padat. Dampak perubahan iklim, seperti peningkatan intensitas curah hujan dan kenaikan muka air laut, semakin memperbesar risiko tersebut. Oleh karena itu, penguatan tata ruang berbasis daya dukung lingkungan, rehabilitasi mangrove, peningkatan kualitas infrastruktur drainase, serta integrasi pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan menjadi langkah strategis untuk membangun kota yang tangguh dan adaptif.

Keberhasilan terwujudnya lingkungan hidup berkelanjutan dan resiliensi terhadap bencana diukur melalui **persentase emisi GRK** sebagai indikator keberhasilan pembangunan rendah karbon, serta **Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)** yang diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai ukuran tingkat risiko bencana daerah. Penurunan persentase emisi GRK mencerminkan efektivitas pengendalian dampak lingkungan, sementara penurunan skor IRBI menunjukkan peningkatan kapasitas mitigasi, kesiapsiagaan, dan ketahanan daerah dalam menghadapi potensi bencana

Persentase Penurunan Emisi GRK

Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan daerah dalam menekan jumlah emisi yang dihasilkan dari berbagai sektor

pembangunan, seperti energi, transportasi, limbah, industri, serta perubahan penggunaan lahan. Indikator ini menunjukkan komitmen daerah dalam mendukung pembangunan rendah karbon dan pengendalian perubahan iklim melalui kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Secara konseptual, persentase penurunan emisi GRK dihitung dengan membandingkan jumlah emisi pada tahun berjalan terhadap tahun dasar (baseline) yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Semakin besar persentasenya, semakin efektif intervensi kebijakan yang dilakukan, seperti pengelolaan sampah berbasis 3R, efisiensi energi pada bangunan pemerintah, penggunaan energi terbarukan, penguatan transportasi ramah lingkungan, serta perlindungan dan rehabilitasi mangrove sebagai penyerap karbon alami.

Bagi Kota Tarakan, indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam mewujudkan lingkungan hidup berkelanjutan, karena mencerminkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi daerah dan upaya menjaga daya dukung lingkungan. Penurunan emisi GRK tidak hanya berdampak pada kualitas lingkungan lokal, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian target penurunan emisi nasional dan komitmen global terhadap pengendalian perubahan iklim.

formulasi :

$$\text{Persentase Penurunan Emisi GRK (\%)} = \frac{\text{Emisi}_{\text{baseline}} - \text{Emisi}_{\text{tahun berjalan}}}{\text{Emisi}_{\text{baseline}}} \times 100\%$$

- **Emisi_baseline** = Total emisi GRK pada tahun dasar (ton CO₂e)
- **Emisi_tahun berjalan** = Total emisi GRK pada tahun yang dihitung (ton CO₂e)
- **CO₂e (Carbon Dioxide Equivalent)** = Satuan setara karbon yang digunakan untuk menyetarakan

Indikator penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) belum dapat disajikan pada tahun ini karena data pendukung yang diperlukan untuk perhitungan indikator masih belum tersedia secara lengkap dan valid.

Indikator : Indeks Resiko Bencana Indonesia

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) merupakan indikator nasional yang disusun dan dipublikasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk mengukur tingkat risiko bencana suatu daerah. Indeks ini menggambarkan besarnya potensi kerugian akibat bencana yang dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity) daerah dalam menghadapi bencana.

Secara konseptual, risiko bencana dihitung dengan pendekatan:

Artinya,
$$\text{Risiko} = \frac{\text{Bahaya} \times \text{Kerentanan}}{\text{Kapasitas}}$$
 semakin tinggi tingkat bahaya dan kerentanan suatu wilayah, maka resiko akan semakin besar. Sebaliknya, semakin kuat kapasitas daerah (kelembagaan, regulasi, infrastruktur mitigasi, kesiapsiagaan masyarakat), maka nilai risiko dapat ditekan.

Dalam konteks Kota Tarakan, IRBI menjadi indikator penting untuk mengukur tingkat ketangguhan daerah terhadap potensi bencana seperti banjir, abrasi, cuaca ekstrem, dan kebakaran permukiman. Penurunan skor IRBI menunjukkan adanya peningkatan kapasitas mitigasi, kesiapsiagaan, serta efektivitas pengurangan risiko bencana, sehingga mendukung terwujudnya daerah yang lebih tangguh dan resilien.

Tabel 2.57.
Capaian Indikator Tujuan Indeks Risiko Bencana

Indikator Kinerja	Realisasi			2025			Akhir RPJMD (2029)	
	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
Indeks Risiko Bencana	117,42	103,14	90,6	90,1	102,62	86,10	88,10	83,52

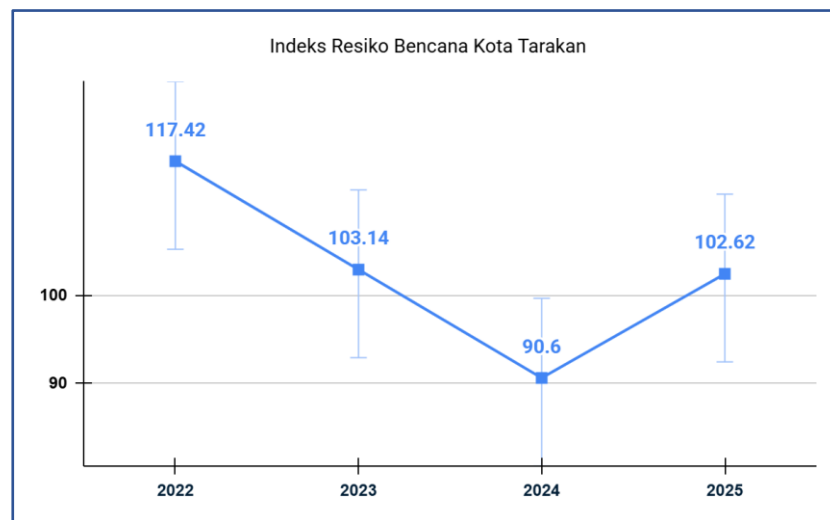
Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 2026

Indikator Indeks Risiko Bencana (IRB) yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung membaik dalam periode 2022–2024. Nilai IRB Kota Tarakan tercatat sebesar 117,42 (2022), menurun menjadi 103,14 (2023), dan kembali turun menjadi 90,60 (2024). Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan tingkat risiko bencana daerah, yang dipengaruhi oleh penguatan kapasitas mitigasi, kesiapsiagaan, serta intervensi pengurangan kerentanan.

Pada tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 90,10, namun realisasi tercatat 102,62, sehingga capaian kinerja belum memenuhi target (masih berada di atas angka yang direncanakan). Kondisi ini menunjukkan adanya faktor risiko yang meningkat, baik dari aspek bahaya (misalnya intensitas curah hujan/cuaca ekstrem), kerentanan kawasan terbangun, maupun belum optimalnya kapasitas

pengurangan risiko bencana di tingkat masyarakat dan infrastruktur. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan baseline tahun 2022, secara umum terjadi penurunan tingkat risiko.

Gambar 2.28.
Capaian Indikator Tujuan Indeks Risiko Bencana



Adapun target akhir RPJMD tahun 2029 ditetapkan sebesar 83,52, dengan capaian antara yang direncanakan pada 2029 sebesar 88,10 (atau target antara 86,10 pada tahapan sebelumnya). Dengan demikian, diperlukan percepatan penguatan kapasitas daerah melalui integrasi mitigasi bencana dalam tata ruang, peningkatan infrastruktur pengendali banjir dan abrasi, penguatan sistem peringatan dini, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat agar tren penurunan IRB dapat kembali selaras dengan target RPJMD.

Tabel 2.58.
Perbandingan Capaian Indeks Resiko Bencana Kab/Kota Kalimantan Utara

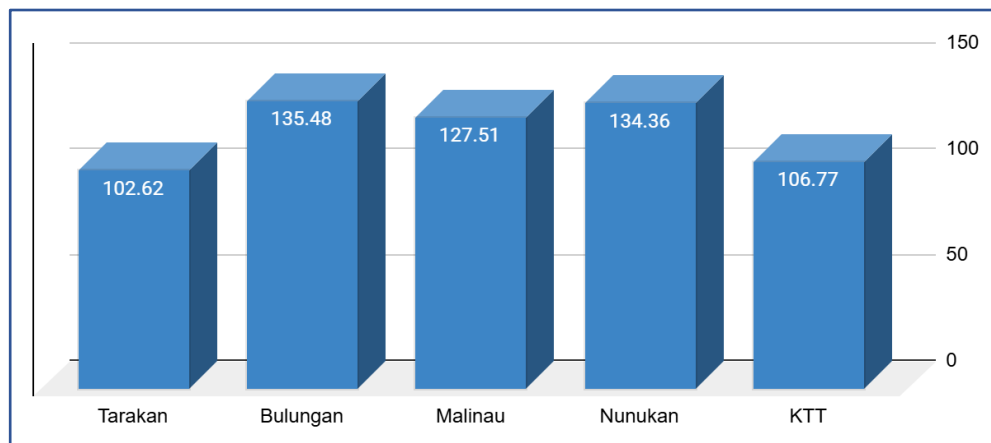
Indikator Sasaran	Realisasi				
	Tarakan	Bulungan	Malinau	Nunukan	Tana Tidung
Indeks Risiko Bencana	102,62	135,48	127,51	134,36	106,77

Sumber: Kementerian PANRB, 2026

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana (IRB) yang diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, capaian kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan variasi tingkat risiko yang cukup signifikan. Nilai IRB Kota Tarakan tercatat sebesar **102,62**, lebih rendah dibanding Kabupaten Bulungan (135,48), Kabupaten Malinau (127,51), dan Kabupaten Nunukan (134,36), serta sedikit lebih rendah dari Kabupaten Tana Tidung (106,77). Posisi ini menunjukkan bahwa tingkat risiko bencana Tarakan relatif lebih terkendali dibanding sebagian besar kabupaten lain di wilayah tersebut.

Meskipun demikian, nilai IRB Tarakan yang masih berada di atas angka 100 mengindikasikan bahwa tingkat risiko bencana masih dalam kategori sedang hingga tinggi dan memerlukan penguatan berkelanjutan. Karakteristik wilayah pesisir dan perkotaan menjadikan risiko banjir, abrasi, dan kebakaran permukiman sebagai tantangan utama. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas mitigasi, pengendalian kerentanan kawasan terbangun, serta penguatan kesiapsiagaan masyarakat tetap menjadi prioritas agar risiko bencana dapat ditekan secara konsisten ke arah yang lebih rendah.

Gambar 2.29
Perbandingan Capaian Indeks Resiko Bencana Kab/Kota Kalimantan Utara



Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran dan indikator-indikator yang akan diukur sesuai definisi operasional dari masing-masing indikator yaitu:

Tabel 2.59.
Indikator Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70.06	78.70	112.33
2	Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana daerah	Indeks Ketahanan Daerah	0.712	0.70	98.31

Sasaran 13. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Kota Tarakan sebagai kota pesisir dengan luas wilayah terbatas menghadapi tekanan lingkungan yang cukup besar akibat pertumbuhan penduduk, ekspansi kawasan terbangun, serta peningkatan aktivitas ekonomi. Dinamika pembangunan tersebut berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan lahan, energi, dan infrastruktur yang berpotensi menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan apabila tidak dikelola secara berkelanjutan. Tekanan terhadap kualitas air, udara, serta keberlanjutan kawasan mangrove menjadi tantangan utama dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat.

Dalam konteks tersebut, peningkatan kualitas lingkungan hidup menjadi prioritas pembangunan daerah yang diukur melalui indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peningkatan nilai IKLH mencerminkan komitmen dan efektivitas kebijakan daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah :

- a. Memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

- b. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Peraturan ataupun perundang-undangan yang digunakan dalam menghitung IKLH adalah sebagai berikut :

- a. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Pedoman ini digunakan untuk mengatur tata cara penghitungan Indeks Pencemaran Air (IPA).
- a. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- b. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Pencemaran Udara (IPU).
- c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Adapun aturan yang digunakan dalam menghitung IKLH untuk tahun 2021 - 2024 menggunakan metode terbaru yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup melalui Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor SE.4/Menlhk/Setjen/Kum.I/4/ 2021 adalah sebagai berikut:

$$\text{IKLH} = 37,6\% \times \text{IKA} + 40,5\% \times \text{IKU} + 21,9\% \times \text{IKL}$$

Berdasarkan rumusan diatas, komponen IKLH terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).

Untuk mengetahui capaian kinerja sasaran dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.60.
Capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi			2025			Akhir RPJMD (2029)	
	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,38	69,61	68,27	70,06	78,70	112,33	70,40	111,79

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2026

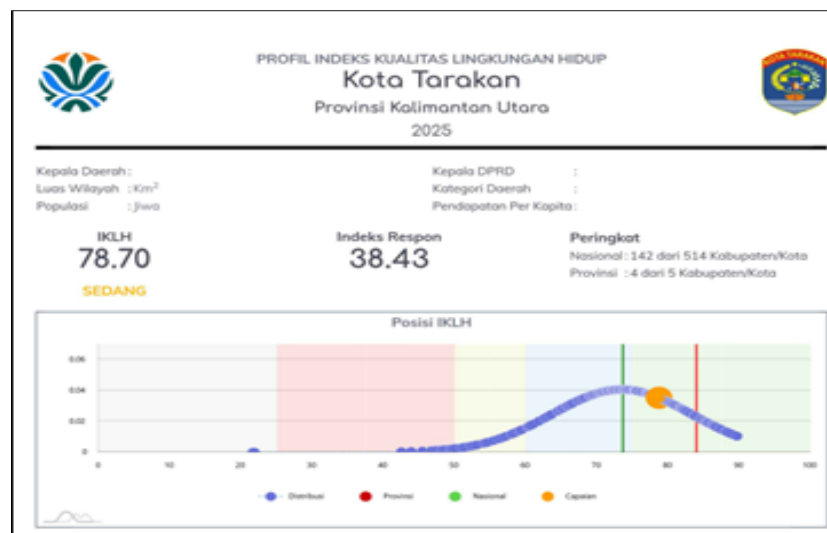
Adapun perhitungan indikator indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas lahan menghasilkan indeks kualitas lingkungan hidup Kota Tarakan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.61.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Tarakan Tahun 2025

Tahun	IKA	IKU	IKL	IKLH	Kategori
2025	75,45	89,64	64,05	78,70	Sedang

Berdasarkan nilai IKLH di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai IKLH kota Tarakan untuk tahun 2025 masuk dalam kategori SEDANG. Predikat ini sama dengan predikat IKLH pada tahun sebelumnya.

Gambar 2.30.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

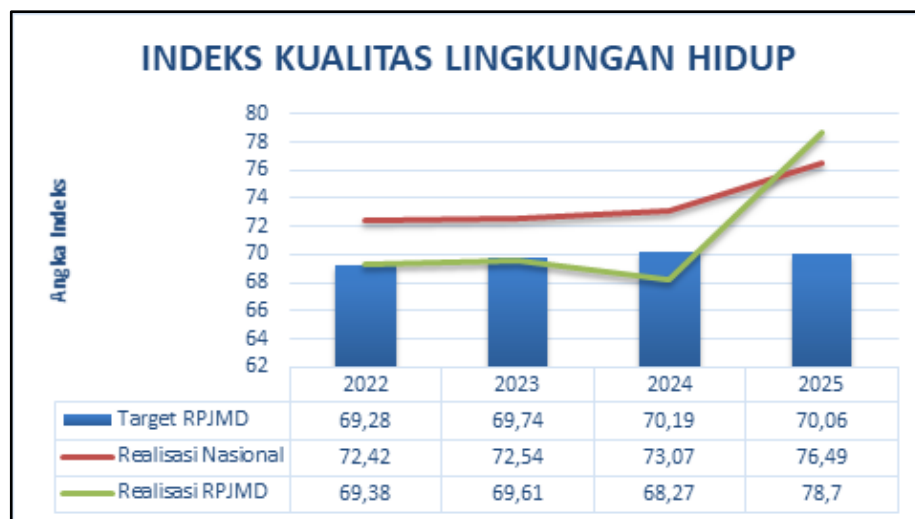


Sumber : <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/iklh>, 2025

Berdasarkan data periode 2022–2024, nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Tarakan menunjukkan tren yang relatif stabil dengan sedikit fluktuasi, yaitu 69,38 (2022), 69,61 (2023), dan 68,27 (2024). Pada tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 70,06, sementara realisasi mencapai 78,70, sehingga persentase capaian kinerja mencapai 112,33%. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup pada tahun 2025 berhasil melampaui target yang direncanakan secara signifikan.

Lebih lanjut, realisasi tahun 2025 juga telah melampaui target akhir RPJMD Tahun 2029 yang ditetapkan sebesar 70,40, dengan capaian terhadap target akhir mencapai 111,79%. Kondisi ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas lingkungan hidup yang cukup progresif, sekaligus menunjukkan efektivitas kebijakan dan program pengelolaan lingkungan yang telah dilaksanakan. Ke depan, konsistensi pengendalian pencemaran dan perlindungan kawasan lingkungan tetap perlu dijaga agar capaian yang telah melampaui target ini dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

Gambar 2.31.
Grafik Indeks Kualitas Lingkungan Hidup



Sesuai dengan Rapor IKLH tahun 2025, Kota Tarakan menempati peringkat **142 dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia**. Sementara di Tingkat provinsi Kalimantan Utara, Kota Tarakan berada di posisi terbawah diantara 4 Kabupaten/Kota

Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kendala

Capaian **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)** Tahun 2025 yang melampaui target dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci. Pertama, terkendalinya limbah kegiatan industri, pertanian, dan domestik melalui pengawasan Persetujuan Teknis/Izin Lingkungan serta monitoring berkala perusahaan. Konsistensi pemantauan kualitas air dan udara yang didukung oleh staf teknis yang kompeten serta penggunaan platform resmi seperti SIMPEL dan SIRAJA Limbah meningkatkan akurasi pelaporan dan pengukuran polutan utama. Selain itu, faktor alam berupa curah hujan Kota Tarakan yang relatif tinggi turut berkontribusi dalam proses pengenceran polutan di udara dan badan air, sehingga berdampak positif terhadap hasil pengukuran kualitas lingkungan.

Dari sisi intervensi kebijakan dan partisipasi publik, berbagai upaya seperti penguatan TPS3R dan Bank Sampah, aksi safari gotong royong rutin, rehabilitasi mangrove melalui kolaborasi CSR, pembibitan tanaman penghijauan, serta penyelenggaraan Car Free Day secara berkala turut mendukung peningkatan kualitas lingkungan. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa belum optimalnya operasional beberapa unit TPS3R, keterbatasan anggaran pada beberapa program pengawasan, serta potensi peningkatan tekanan lingkungan akibat pertumbuhan kawasan terbangun. Oleh karena itu, konsistensi pengawasan, penguatan kelembagaan, dan optimalisasi partisipasi masyarakat tetap menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan capaian yang telah diraih.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan DPPA Tahun 2025, anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan sebesar **Rp35,32 miliar**, dengan realisasi anggaran mencapai **88,35%** atau sebesar **Rp31,21 miliar**, sementara persentase capaian kinerja mencapai **92,43%**. Efisiensi tersebut didukung oleh pendekatan kolaboratif dan pemberdayaan masyarakat, seperti optimalisasi **TPS3R** dan **Bank Sampah**, kegiatan safari gotong royong, serta kerja sama penanaman mangrove melalui skema **CSR**. Selain itu, pemanfaatan sistem digital seperti **SIMPEL** dan **SIRAJA Limbah** turut meningkatkan efektivitas pengawasan lingkungan tanpa menambah beban biaya operasional secara signifikan. Meskipun demikian, masih terdapat ruang perbaikan, terutama pada optimalisasi unit **TPS3R** yang belum aktif serta peningkatan efektivitas belanja pada beberapa program dengan tingkat realisasi anggaran yang relatif rendah, sehingga ke depan diperlukan penguatan perencanaan dan evaluasi berbasis kinerja untuk menjaga keberlanjutan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Selanjutnya, untuk melihat tingkat optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam mendukung pencapaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), disajikan tabel analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang menggambarkan perbandingan antara capaian kinerja indikator dengan realisasi anggaran program pendukung.

Tabel 2.62
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran terhadap Pencapaian Kinerja Tahun 2025
Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rata-Rata Capaian (%)	Program Pendukung	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Rata-Rata Capaian (%)	Tingkat Efisiensi
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70.06	78.70	112.33	112.33	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	476,675,970.00	455,384,019.00	95.53	69.39	61,89% (Efisien)
					Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	79,790,600.00	27,174,782.00	34.06		
					Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	81,457,000.00	71,786,590.00	88.13		
					Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	101,781,240.00	97,728,116.00	96.02		
					Program Perencanaan Lingkungan Hidup	162,328,300.00	-	0.00		



Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rata-Rata Capaian (%)	Program Pendukung	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Rata-Rata Capaian (%)	Tingkat Efisiensi
					Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	40,022,500.00	31,243,725.00	78.07		
					Program Pengelolaan Persampahan	6,855,979,139.00	4,846,079,010.00	70.68		
					Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1,901,462,732.00	1,846,363,698.49	97.10		
					Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	6,780,000.00	4,400,000.00	64.90		

Sumber : Bappeda Litbang Kota Tarakan), 2026

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya terhadap pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan lingkungan di Kota Tarakan pada tahun 2025 tergolong sangat baik. Nilai IKLH terealisasi sebesar 78,70 dari target 70,06, sehingga capaian kinerja mencapai 112,33%. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pengelolaan kualitas lingkungan hidup yang dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan mampu memberikan hasil yang melampaui target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan berbagai program strategis seperti pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan persampahan, pengelolaan keanekaragaman hayati, serta peningkatan pendidikan dan penyuluhan lingkungan hidup kepada masyarakat.

Dari sisi penggunaan anggaran, realisasi belanja program-program pendukung menunjukkan tingkat serapan yang cukup bervariasi, dengan rata-rata capaian anggaran sebesar 69,39%, sementara capaian kinerja indikator mencapai 112,33%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja indikator dapat diraih dengan pemanfaatan sumber daya yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan pagu anggaran yang tersedia, sehingga menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 61,89% yang dikategorikan efisien. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program pengelolaan lingkungan hidup telah berjalan cukup optimal, baik melalui penguatan pengawasan lingkungan, pengendalian pencemaran, maupun peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan hidup di Kota Tarakan.

Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kota Tarakan didukung oleh sinergi berbagai program strategis yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan. Pada aspek pengendalian pencemaran, pelaksanaan monitoring dan evaluasi perusahaan, pembinaan pengelolaan air limbah bagi pelaku usaha kecil/ menengah, serta pengetatan Persetujuan Teknis/Izin Lingkungan berkontribusi langsung terhadap ter kendalinya sumber pencemar. Dukungan sistem digital seperti SIMPEL dan SIRAJA Limbah turut meningkatkan akurasi pelaporan dan efektivitas pengawasan, sehingga kualitas air dan udara dapat terjaga secara lebih terukur.

Pada aspek pengelolaan sampah dan partisipasi masyarakat, keberadaan 15 unit TPS3R/Depo 3R yang aktif serta 8 Bank Sampah yang beroperasi memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi volume sampah ke TPA melalui prinsip 3R. Kegiatan safari gotong royong dua kali setiap bulan memperkuat kesadaran kolektif masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Program Car Free Day secara berkala di kawasan Stadion Datu Adil juga mendukung pengurangan emisi dari sektor transportasi, meskipun sifatnya temporal.

Selanjutnya, pada aspek peningkatan tutupan lahan, kolaborasi penanaman mangrove dengan mitra seperti Telkom-IZI, Pertamina, United Tractor, dan PLN EG, serta kegiatan pembibitan di Kebun Bibit Kunak dan Hutan Kota Sawah Lunto, memperkuat rehabilitasi lahan kritis dan kawasan pesisir. Sinergi antara program pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, penghijauan, serta edukasi masyarakat tersebut membentuk pendekatan yang komprehensif,

sehingga capaian IKLH tidak bersifat parsial, melainkan didukung oleh intervensi lintas sektor yang saling memperkuat.

Sasaran 14. Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana

Kota Tarakan memiliki karakteristik wilayah pesisir dan kepulauan dengan topografi relatif datar serta kepadatan permukiman yang cukup tinggi. Kondisi ini menjadikan daerah rentan terhadap berbagai potensi bencana seperti banjir genangan, banjir rob, abrasi pantai, cuaca ekstrem, serta kebakaran permukiman. Selain faktor bahaya alam, pertumbuhan kawasan terbangun dan konsentrasi aktivitas masyarakat di wilayah perkotaan turut meningkatkan tingkat kerentanan apabila tidak diimbangi dengan sistem mitigasi yang memadai.

Dalam konteks tersebut, peningkatan kapasitas penanggulangan bencana menjadi kebutuhan strategis untuk memastikan daerah mampu melakukan upaya mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta pemulihan pascabencana secara efektif. Penguatan regulasi, kelembagaan, perencanaan berbasis risiko, serta peningkatan kapasitas aparatur dan partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci dalam membangun ketangguhan daerah.

Keberhasilan upaya tersebut diukur melalui Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sebagai indikator tingkat kesiapan dan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

Kota Tarakan sebagai kota kepulauan dengan karakteristik geografis pesisir, dinamika pertumbuhan kawasan terbangun, dan memiliki tingkat kerentanan terhadap bencana hidrometeorologi dan kebakaran permukiman.

Risiko banjir akibat intensitas hujan tinggi, genangan di beberapa titik, abrasi pesisir, serta kejadian kebakaran permukiman menjadi faktor dominan yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik. Selain itu, keterbatasan ruang evakuasi dan aksesibilitas di beberapa wilayah meningkatkan kompleksitas penanganan darurat.

Dalam konteks tersebut, Pemerintah Kota Tarakan menetapkan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana sebagai sasaran strategis karena:

1. Perlindungan masyarakat merupakan fungsi dasar pemerintah daerah.
2. Stabilitas pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh tingkat ketahanan terhadap risiko bencana.
3. Pengurangan risiko bencana merupakan prasyarat pembangunan berkelanjutan.
4. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perlindungan masyarakat.

Dengan demikian, penguatan kapasitas tidak hanya berorientasi pada respons saat terjadi bencana, tetapi juga pada mitigasi, kesiapsiagaan, dan integrasi risiko dalam perencanaan pembangunan.

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui **Indeks Ketahanan Daerah (IKD)**, yaitu indikator komposit yang menggambarkan tingkat

Range kelas pada Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah sebagai berikut					
≤ 0,4	: Rendah				
0,4 - 0,8	: Sedang				
0,8 - 1	: Tinggi				

kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

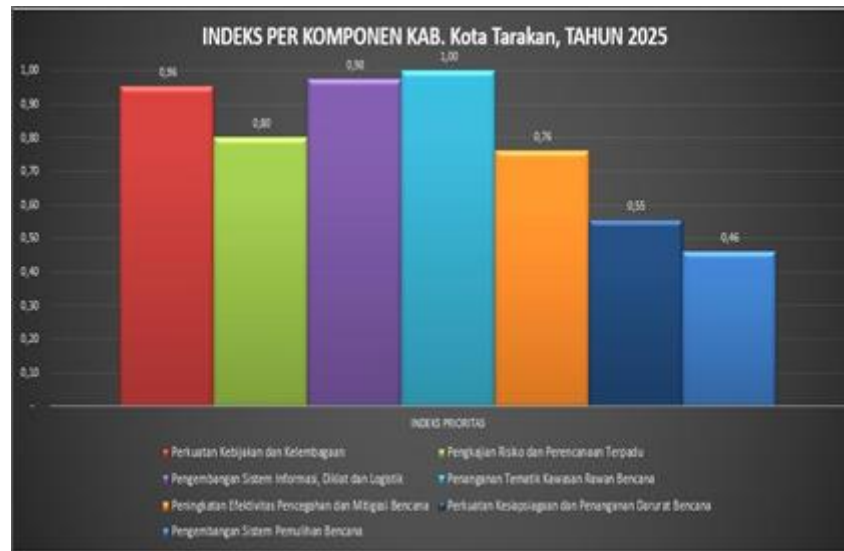
Untuk mengetahui capaian kinerja sasaran dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.63
Capaian indikator kinerja Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi			2025			Akhir RPJMD (2029)	
	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
Indeks Ketahanan Daerah	0,3966	0,6118	0,70	0,712	0,70	98,31	0,76	92,11

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 2026

Gambar 2.32.
Grafik Capaian Indeks Per Komponen yang dicapai Kota Tarakan tahun 2025

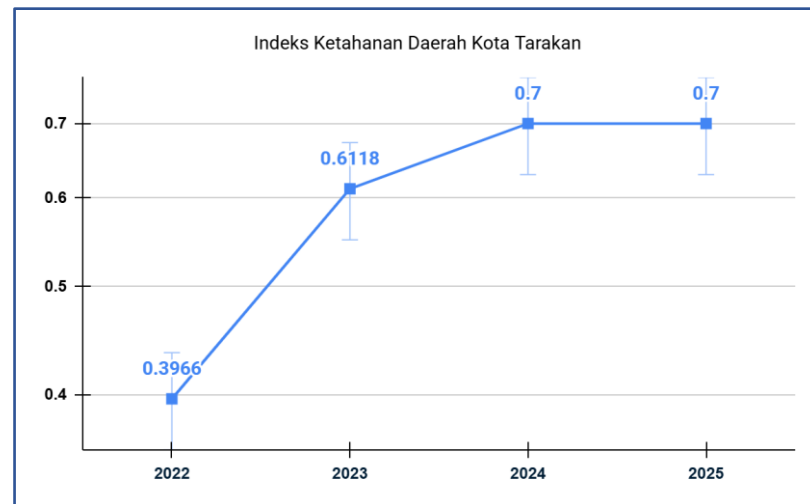


Nilai **Indeks Ketahanan Daerah (IKD)** Kota Tarakan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam periode 2022–2024, dari **0,3966 (2022)** menjadi **0,6118 (2023)** dan meningkat signifikan menjadi **0,70 (2024)**. Tren ini mencerminkan adanya penguatan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun kesiapsiagaan. Pada tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar **0,712**, dengan realisasi mencapai **0,70**, sehingga persentase capaian kinerja sebesar **98,31%**, atau sedikit di bawah target yang direncanakan.

Meskipun belum sepenuhnya memenuhi target tahunan, capaian tahun 2025 tetap menunjukkan level ketahanan yang relatif terjaga dan jauh lebih baik dibandingkan kondisi awal tahun 2022. Terhadap target akhir RPJMD Tahun 2029 sebesar **0,76**, capaian saat ini telah mencapai **92,11%**, yang mengindikasikan progres yang cukup signifikan menuju sasaran jangka menengah. Ke depan, diperlukan penguatan berkelanjutan pada aspek kesiapsiagaan, koordinasi lintas

sektor, serta peningkatan kapasitas masyarakat agar peningkatan IKD dapat terus didorong hingga melampaui target yang telah ditetapkan.

Gambar 2.33
Capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD)
Kota Tarakan



Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif terhadap posisi capaian tersebut, perlu dilakukan perbandingan nilai IKD Kota Tarakan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Utara serta rata-rata nasional. Adapun perbandingan nilai IKD Kota Tarakan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Utara disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.64.
Perbandingan Capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD)
Kab/Kota Kalimantan Utara

Indikator Sasaran	Realisasi				
	Tarakan	Bulungan	Malinau	Nunukan	Tana Tidung
Indeks Ketahanan Daerah	0.70	0.55	0.39	0.59	0.6

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 2026

Berdasarkan data perbandingan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara, nilai Indeks Ketahanan Daerah Kota Tarakan sebesar 0,70 merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan Bulungan (0,55), Malinau (0,39), Nunukan (0,59), dan Tana Tidung (0,60).

Posisi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas ketahanan daerah Kota Tarakan relatif lebih baik dalam aspek pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan bencana dibandingkan daerah lain di tingkat provinsi. Capaian ini memperkuat posisi Tarakan sebagai daerah dengan tingkat kesiapan kelembagaan dan koordinasi penanggulangan bencana yang lebih optimal, meskipun tetap diperlukan peningkatan berkelanjutan untuk mencapai target akhir RPJMD.

Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kendala

Capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2025 sebesar 0,70 (kategori sedang) menunjukkan bahwa kapasitas penanggulangan bencana Kota Tarakan telah terbangun secara cukup sistematis, terutama pada aspek perkuatan kebijakan dan kelembagaan (0,96), pengkajian risiko dan perencanaan terpadu (0,80), serta penanganan tematik kawasan rawan bencana (1,00). Stabilitas capaian ini didukung oleh penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, pelaksanaan self-assessment 71 indikator secara konsisten, serta verifikasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Selain itu, dukungan sistem informasi, diklat, dan logistik yang relatif baik (0,94) turut memperkuat fondasi manajemen risiko bencana di daerah.

Namun demikian, stagnasi nilai IKD dibanding tahun sebelumnya menunjukkan masih adanya kendala pada aspek implementasi teknis, khususnya pada efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana yang

dipengaruhi belum optimalnya pemenuhan bukti dukung seperti penerapan bangunan tahan gempa dalam IMB. Selain itu, komponen kesiapsiagaan dan penanganan darurat (0,45) serta sistem pemulihan bencana (0,40) masih relatif rendah. Ke depan, diperlukan penguatan pada aspek operasional, termasuk sistem komando darurat, rencana kontinjensi, serta mekanisme rehabilitasi dan rekonstruksi, agar capaian IKD tidak hanya stabil tetapi dapat meningkat menuju kategori ketahanan yang lebih tinggi.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

untuk melihat tingkat optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam mendukung pencapaian Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum, disajikan tabel analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang menggambarkan perbandingan antara capaian kinerja indikator dengan realisasi anggaran program pendukung.

Tabel 2.65.
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran terhadap Pencapaian Kinerja Tahun 2025
Indikator Indeks Ketahanan Daerah

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rata-Rata Capaian (%)	Program Pendukung	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Rata-Rata Capaian (%)	Tingkat Efisiensi
Indeks Ketahanan Daerah	0,712	0,70	98,31	98,31	Program Penanggulangan Bencana	2.098.258.190,00	1.951.770.341,00	93,02	93,02	5,69% (Efisien)
					Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	306.747.030,00	262.074.907,00	85,44		

Sumber : Bappeda Litbang Kota Tarakan), 2026

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya terhadap pencapaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) menunjukkan bahwa kinerja penanggulangan bencana di Kota Tarakan pada tahun 2025 tergolong cukup efektif. Indikator IKD ditargetkan sebesar 0,712 dengan realisasi sebesar 0,70 atau mencapai 98,31% dari target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan bahwa upaya penguatan ketahanan daerah melalui program penanggulangan bencana, termasuk pengurangan risiko, kesiapsiagaan, serta penanganan darurat, telah dilaksanakan secara relatif optimal meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan.

Dari sisi penggunaan anggaran, program pendukung menunjukkan tingkat realisasi sebesar 93,02%, dengan capaian kinerja indikator sebesar 98,31%, sehingga menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 5,69% yang dikategorikan efisien. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja dapat diraih dengan pemanfaatan sumber daya yang cukup optimal. Dukungan program penanggulangan bencana serta program pencegahan dan penanggulangan kebakaran berkontribusi dalam memperkuat kapasitas daerah, meskipun masih diperlukan peningkatan efektivitas pada aspek kesiapsiagaan dan pemulihan bencana agar ke depan capaian IKD dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja Indeks Ketahanan Daerah (IKD) pada tahun 2025 didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang berfokus pada penguatan sistem penanggulangan bencana secara menyeluruh. Program utama seperti Program Penanggulangan Bencana berperan dalam meningkatkan kapasitas daerah melalui

penyusunan dokumen kajian risiko bencana, rencana penanggulangan bencana, serta pelaksanaan kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan. Selain itu, dukungan kegiatan seperti pelatihan dan simulasi penanganan bencana, penguatan sistem informasi kebencanaan, serta penyediaan logistik dan peralatan darurat turut memperkuat respons daerah dalam menghadapi potensi bencana.

Di sisi lain, Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran juga memberikan kontribusi dalam mendukung ketahanan daerah, khususnya dalam aspek kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap kejadian darurat. Sinergi antara perangkat daerah, aparat keamanan, serta partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program. Meskipun demikian, efektivitas program masih perlu ditingkatkan, terutama pada aspek kesiapsiagaan dan pemulihan pascabencana, sehingga ke depan diperlukan penguatan implementasi teknis, peningkatan kapasitas operasional, serta optimalisasi koordinasi lintas sektor agar capaian IKD dapat terus meningkat

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan merujuk pada aturan atau perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam membantu tugas pemerintahan yang diamanahkan oleh pemerintah pusat. Beberapa dasar hukum utama terkait penyelenggaraan tugas pembantuan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - a) Pasal 1 Ayat (12) dalam UU ini menjelaskan bahwa tugas pembantuan adalah tugas yang dilaksanakan oleh daerah dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah pusat yang diserahkan kepada pemerintah daerah.
 - b) Pasal 12 dan 13 UU ini mengatur bahwa pemerintah daerah berhak melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui mekanisme yang jelas.
- b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 - a) PP ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang turut berperan dalam melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

- c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
 - a) Tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah harus mendukung pencapaian RPJMN, termasuk dalam hal pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur yang bersifat nasional.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
 - a) Permendagri ini memberikan petunjuk teknis dalam penyusunan APBD yang mencakup alokasi dana untuk tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat dan pelaksanaannya di daerah.
- e. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB)
 - a) Berbagai kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh MenPAN-RB memberikan pedoman mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi yang mendukung tugas pembantuan.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan Di Kota Tarakan

Kota Tarakan, sebagai salah satu kota yang berada dalam wilayah administratif Provinsi Kalimantan Utara, memiliki peranan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional di tingkat lokal. Dalam rangka mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta optimalisasi pelayanan publik, pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi menjadi suatu keniscayaan yang harus dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab. Tugas pembantuan ini merupakan bentuk delegasi sebagian kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu kepada pemerintah daerah, dengan tetap

mempertahankan prinsip pengawasan, koordinasi, dan akuntabilitas oleh pemerintah yang memberikan tugas.

Sebagai sebuah kota yang terus mengalami dinamika pertumbuhan dan perkembangan, Tarakan dipercayakan berbagai urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat yang harus diimplementasikan di tingkat daerah. Pemberian tugas tersebut tidak hanya bertujuan untuk memperluas ruang gerak pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, tetapi juga diarahkan untuk memastikan seluruh program yang dilaksanakan sejalan dengan arah kebijakan nasional serta berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, pelaksanaan tugas pembantuan harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, integritas, dan profesionalisme agar dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan seluruh warga Kota Tarakan.

Lebih lanjut, sejumlah urusan pemerintahan yang menjadi bagian dari tugas pembantuan tersebut mencakup berbagai bidang strategis yang sangat berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat dan pembangunan daerah. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. **Pendidikan** – termasuk penyelenggaraan dan pengelolaan pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk memastikan akses belajar yang merata dan berkualitas bagi seluruh peserta didik di wilayah Kota Tarakan.
2. **Kesehatan** – mencakup pelaksanaan layanan kesehatan masyarakat, kegiatan imunisasi atau vaksinasi, upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular maupun tidak menular, serta peningkatan akses dan mutu fasilitas kesehatan guna menjaga derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

3. **Infrastruktur dan Transportasi** – meliputi pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan infrastruktur dasar termasuk jalan, jembatan, drainase, serta fasilitas transportasi publik yang mendukung konektivitas antar wilayah, kelancaran arus barang dan jasa, serta memperkuat daya saing daerah di kancah regional maupun nasional.
4. **Sosial** – yang berkaitan dengan penyelenggaraan program-program pemberdayaan masyarakat, bantuan sosial bagi keluarga dan kelompok rentan, upaya pengentasan kemiskinan struktural, serta intervensi sosial lain yang bertujuan memperkuat solidaritas sosial dan keadilan sosial di tengah masyarakat.
5. **Lingkungan Hidup** – termasuk upaya perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran, rehabilitasi kawasan yang terdegradasi, serta pengembangan sistem mitigasi bencana yang efektif guna meningkatkan ketangguhan masyarakat terhadap risiko bencana alam maupun perubahan iklim.

Melalui pelaksanaan tugas pembantuan di berbagai bidang tersebut, diharapkan kemampuan pemerintah Kota Tarakan dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik dapat semakin optimal, selaras dengan amanah konstitusi, serta memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Tugas Pembantuan (TP) yang tidak tersedia menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak menerima penugasan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk melaksanakan program tertentu yang pendanaannya bersumber dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Kondisi ini perlu dipahami secara komprehensif, karena ketiadaan Tugas

Pembantuan tidak serta-merta mencerminkan rendahnya perhatian pemerintah pusat atau provinsi terhadap daerah, melainkan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor kebijakan, mekanisme perencanaan, dan skema pendanaan yang berlaku.

Salah satu penyebab utama adalah tidak adanya kebijakan tugas pembantuan yang dialokasikan untuk daerah tersebut. Dalam hal ini, pemerintah pusat atau pemerintah provinsi tidak menetapkan daerah yang bersangkutan sebagai lokasi pelaksanaan program tugas pembantuan.

Penetapan daerah penerima umumnya mempertimbangkan prioritas nasional, kebutuhan sektoral, serta ketersediaan anggaran, sehingga tidak semua daerah memperoleh penugasan pada periode tertentu. Selain itu, ketiadaan Tugas Pembantuan juga dapat disebabkan oleh tidak adanya usulan dari pemerintah daerah. Beberapa program tugas pembantuan mensyaratkan adanya pengajuan proposal atau permohonan resmi dari pemerintah daerah sebagai dasar penilaian kelayakan program. Apabila pemerintah daerah tidak mengajukan usulan, baik karena keterbatasan kapasitas perencanaan, perbedaan prioritas pembangunan, maupun pertimbangan administratif lainnya, maka peluang untuk memperoleh penugasan melalui skema tugas pembantuan menjadi terbatas.

Faktor lain yang turut memengaruhi adalah adanya perubahan mekanisme pelaksanaan program. Program yang sebelumnya disalurkan melalui skema tugas pembantuan dapat dialihkan ke skema pendanaan lain yang dinilai lebih efektif dan efisien, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) atau bentuk transfer ke daerah lainnya. Dalam kondisi ini, meskipun tidak tercatat sebagai tugas pembantuan, daerah tetap menerima dukungan pendanaan untuk pelaksanaan program pembangunan melalui mekanisme yang berbeda.

Di samping itu, dinamika kebijakan nasional maupun kebijakan daerah juga berperan penting. Pemerintah pusat secara berkala melakukan

evaluasi terhadap efektivitas berbagai skema pendanaan, termasuk tugas pembantuan. Hasil evaluasi tersebut dapat berujung pada penghentian, pengurangan, pengalihan, atau penyesuaian program tugas pembantuan. Perubahan arah kebijakan ini sering kali menjadi faktor utama mengapa suatu daerah pada periode tertentu tidak menerima penugasan melalui skema tersebut.

Dengan demikian, tidak adanya Tugas Pembantuan di suatu daerah perlu dipahami sebagai bagian dari dinamika perencanaan dan penganggaran pembangunan yang bersifat fleksibel dan adaptif. Ketiadaan TP tidak selalu menunjukkan minimnya dukungan program dari pemerintah pusat atau provinsi, melainkan dapat mencerminkan adanya pergeseran kebijakan, perbedaan mekanisme pendanaan, maupun faktor administratif lainnya yang memengaruhi distribusi program pembangunan antar daerah.

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan merupakan salah satu instrumen pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu. Melalui Tugas Pembantuan, kementerian atau lembaga pemerintah pusat memberikan penugasan kepada pemerintah daerah, termasuk kabupaten/kota, untuk melaksanakan kegiatan yang berorientasi pada percepatan pembangunan dan pelayanan publik di berbagai sektor.

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Kota Tarakan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Tugas Pembantuan Pusat adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sedangkan Tugas Pembantuan Provinsi adalah penugasan dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/ kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Pemerintah Kota Tarakan pada tahun 2025 tidak mendapatkan anggaran Tugas Pembantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi.

3.1.1 Target Kinerja

Tidak Ada

3.1.2 Realisasi

Tidak Ada



Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/ Kota Tugas pembantuan dari kementerian / lembaga yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/kota

[illegible]

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Kota Tarakan

Tugas Pembantuan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota merupakan salah satu bentuk pelaksanaan asas dekonsentrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Melalui mekanisme ini, pemerintah provinsi menugaskan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang bertujuan mendukung program prioritas daerah serta meningkatkan pelayanan publik secara lebih merata.

Bagi Kota Tarakan, Tugas Pembantuan dari pemerintah provinsi merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di tingkat lokal. Kegiatan ini biasanya mencakup berbagai sektor, seperti pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Anggaran untuk pelaksanaan tugas ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi, dengan alokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah penerima tugas.

Namun, pada tahun 2025, tidak terdapat Tugas Pembantuan Pemerintah Provinsi yang ditugaskan kepada Kota Tarakan. Kendati demikian, evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas Pembantuan pada tahun-tahun sebelumnya menjadi landasan penting dalam perencanaan dan pengajuan program yang lebih terfokus di masa mendatang.



3.2.1 Target Kinerja

Tidak Ada

3.2.2 Realisasi

Tidak Ada



Tabel 3.2. Tabel Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

No	Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Kab/ Kota	PD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.3 Permasalahan dan Kendala

Tugas Pembantuan (TP) merupakan salah satu mekanisme transfer kewenangan dan anggaran dari pemerintah pusat atau provinsi ke daerah kabupaten/kota. Tidak ada Tugas Pembantuan (TP) yang diberikan kepada Kota Tarakan, hal ini dapat menimbulkan sejumlah permasalahan dan kendala yang memengaruhi jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.

Permasalahan dan Kendala yang diakibatkan tidak adanya Tugas Pembantuan (TP) adalah:

1. Keterbatasan Anggaran untuk Program Prioritas Daerah

Keterbatasan dana untuk program infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang seharusnya bisa dibiayai melalui TP dan Beban APBD meningkat, sehingga beberapa program daerah mungkin tertunda atau tidak berjalan optimal.

2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pendampingan Teknis dari Pusat

Kurangnya pelatihan bagi pegawai daerah dalam menerapkan kebijakan nasional, dan Minimnya transfer teknologi dan inovasi yang dapat meningkatkan efektivitas program daerah.

3. Kurangnya Sinkronisasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kota

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

Saran dan Tindak Lanjut untuk kedepannya adalah:

1. Mengajukan Permohonan Kembali untuk Tugas Pembantuan
2. Mencari Alternatif Pendanaan untuk Program Prioritas
3. Meningkatkan Kapasitas SDM Daerah Secara Mandiri
4. Meningkatkan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM Pendidikan di Kota Tarakan pada Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka ditetapkan 3 jenis pelayanan dasar pendidikan dengan 3 Indikator SPM seperti yang terlihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian SPM	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar.	Mengukur cakupan layanan pendidikan dasar tingkat SD/MI bagi anak usia sekolah dasar (7-12 tahun).
		Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan menengah pertama.	Mengukur keberhasilan pelaksanaan pendidikan tingkat SMP/MTs bagi anak usia 13-15 tahun sebagai lanjutan wajib belajar.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian SPM	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan.	Memberikan akses kepada anak yang putus sekolah untuk mendapatkan pendidikan setara tingkat dasar hingga menengah.
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD.	Mengukur partisipasi anak usia dini dalam program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk mendukung perkembangan awal anak.

Sumber : Dinas Pendidikan 2026

Layanan Pendidikan Dasar berfokus pada anak-anak usia sekolah dasar (7-15 tahun) untuk memastikan mereka mendapatkan akses pendidikan yang sesuai dengan standar nasional. Indikatornya mencerminkan tingkat partisipasi anak dalam pendidikan dasar (SD/MI) dan menengah pertama (SMP/MTs).

Layanan Pendidikan Kesetaraan dirancang untuk anak-anak dan remaja usia sekolah yang tidak dapat mengakses pendidikan formal, sehingga mereka dapat menyelesaikan pendidikan setara tingkat SD, SMP, atau SMA melalui program nonformal seperti Paket A, B, dan C.

Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Fokus pada anak usia 5-6 tahun untuk memastikan mereka menerima pendidikan awal yang mendukung perkembangan kognitif, sosial, dan emosional mereka sebagai dasar untuk memasuki pendidikan dasar.

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan, pemerintah daerah diwajibkan untuk menetapkan target pencapaian SPM selama kurun waktu tertentu. Pemerintah Kota Tarakan menetapkan target 100 persen untuk mendukung terselenggaranya pendidikan dasar yang berkualitas dan merata.

Perhitungan pembiayaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tarakan melalui Dinas Pendidikan harus memperhatikan beberapa komponen penting sesuai dengan panduan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022. Berikut adalah langkah-langkah dan komponen perhitungan pembiayaan:

Komponen Pembiayaan SPM Pendidikan

Pembiayaan dalam SPM Pendidikan mencakup beberapa komponen utama yang harus diperhitungkan untuk setiap satuan pendidikan (sekolah), yaitu:

- a) Jumlah Siswa dan Jenis Pendidikan
 - i. Jenis pendidikan yang dihitung meliputi PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), Pendidikan Dasar (SD/MI dan SMP/MTs), dan Pendidikan Menengah (SMA/SMK).
 - ii. Jumlah siswa berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan catatan pendidikan setempat.
- b) Standar Biaya per Siswa
 - i. Biaya Operasional: Termasuk biaya untuk tenaga pendidik (guru, pengelola), pengadaan buku, alat

pendidikan, serta biaya operasional sekolah (listrik, air, pemeliharaan bangunan).

ii. Biaya Fasilitas dan Infrastruktur: Termasuk pembangunan atau pemeliharaan gedung sekolah, fasilitas pembelajaran (ruang kelas, laboratorium, olahraga).

iii. Biaya Pelatihan dan Pengembangan Guru: Anggaran untuk pelatihan guru, workshop, dan peningkatan kompetensi tenaga pengajar.

iv. Pengadaan Teknologi Pendidikan: Pembelian alat dan bahan ajar berbasis teknologi.

c) Indikator SPM Pendidikan

i. Setiap jenjang pendidikan memiliki standar capaian tertentu, seperti rasio guru terhadap siswa, ketersediaan sarana-prasarana pendidikan, dan kualitas pengajaran.

d) Frekuensi Layanan

i. Frekuensi yang dihitung mencakup jumlah jam pelajaran yang diberikan, kegiatan ekstra kurikuler, dan pelatihan guru yang diadakan sepanjang tahun.

Tabel 4. 2

Target Pencapaian SPM Bidang Pendidikan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	ELEMEN DATA	SATUAN	TARGET
1	Pendidikan Dasar Usia Dini	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	Persentase	100%
			Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	ELEMEN DATA	SATUAN	TARGET
		Jumlah Siswa Pendidikan Dasar Usia Dini yang di layani		Orang	4200
		Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B		Persentase	74,17
		Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)		Persentase	76,57
2	Pendidikan Dasar	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dasar	Persentase	100%
			Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan		
		Jumlah Siswa Pendidikan Dasar yang dilayani		orang	38.115
		SD			
		Kemampuan literasi		nilai	67,36
		Kemampuan numerasi		nilai	55,19
		Indeks iklim keamanan		nilai	74,48
		Indeks iklim kebhinekaan		nilai	72,77
		Indeks iklim inklusivitas		nilai	59,3

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	ELEMEN DATA	SATUAN	TARGET
		SMP			
		Kemampuan literasi		nilai	79,42
		Kemampuan numerasi		nilai	67,51
		Indeks iklim keamanan		nilai	73,7
		Indeks iklim kebhinnekaan		nilai	72,84
		Indeks iklim inklusivitas		nilai	61,68
3	Pendidikan Kesetaraan	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persentase	100%
			Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah		
		Jumlah Siswa Pendidikan Kesetaraan yang dilayani		Orang	619
		Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan		Persentase	26,81

4.1.3 Realisasi

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan tolak ukur dalam penyelenggaraan layanan pendidikan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah guna memastikan akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat. Tabel berikut menyajikan data capaian SPM di Kota Tarakan berdasarkan berbagai indikator utama, termasuk

jumlah penerima layanan, mutu layanan, serta ketersediaan tenaga pendidik dan sarana pendidikan.

Capaian pelaksanaan penerapan SPM bidang urusan Pendidikan di Kota Tarakan Tahun 2025 dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 4.3
Pencapaian target SPM Bidang Pendidikan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	ELEMEN DATA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Pendidikan Dasar Usia Dini	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	100%	$7.562/9.622 \times 100 = 78,59\%$	78,59%
			Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan			
		Jumlah Siswa Pendidikan Dasar Usia Dini yang di layani		4200	4200	100%
		Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B		74,17	74,17	100%
		Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)		76,57	76,57	100%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	ELEMEN DATA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Pendidikan Dasar	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dasar	100%	36.562/43.816 x 100 = 83,44%	83,44%
			Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan			
		Jumlah Siswa Pendidikan Dasar yang dilayani		38115	38.115	100%
		SD				
		Kemampuan literasi		67,36	67,36	100%
		Kemampuan numerasi		55,19	55,19	100%
		Indeks iklim keamanan		74,48	74,48	100%
		Indeks iklim kebhinekaan		72,77	72,77	100%
		Indeks iklim inklusivitas		59,3	59,3	100%
		SMP				
		Kemampuan literasi		79,42	79,42	100%
		Kemampuan numerasi		67,51	67,51	100%
		Indeks iklim keamanan		73,7	73,7	100%
		Indeks iklim kebhinekaan		72,84	72,84	100%
		Indeks iklim inklusivitas		61,68	61,68	100%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	ELEMEN DATA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Pendidikan Kesetaraan	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	$608/1.664 \times 100 = 36,54\%$	36,54%
			Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah			
		Jumlah Siswa Pendidikan Kesetaraan yang dilayani		619	619	100%
		Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan		26,81	26,81	100%

4.1.4 Alokasi Anggaran

Pendidikan merupakan sektor penting dalam pembangunan daerah, yang membutuhkan alokasi anggaran yang memadai agar layanan pendidikan dapat berjalan optimal. Berikut adalah rincian alokasi anggaran yang tersedia:

Tabel 4.4

Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan

No	Pendanaan	Pagu
(1)	(2)	(3)
1	APBD Kota Tarakan	1,176,463,228,204
2	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	295,632,971,811
3	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker PD	80,261,535,220
	APBD	80,261,535,220
	A APBD Murni	6,077,892,702
	B APBD Dau	24,839,408,868
	C APBD Dak Fisik	599,948,000
	D APBD Dak Non Fisik	46,174,750,000
	E Dana Bagi Hasil	2,569,535,650
	F Kerjasama	0
	G Otonomi Khusus	0
	NON APBD	0
	A Corporate Social Responsibility (CSR)	0
	APBN	0
	B APBD-Dekonsentrasi	0
	C APBD-Tugas Pembantuan	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber : Dinas Pendidikan 2026

Berdasarkan tabel di atas, Pemerintah Kota Tarakan mengalokasikan anggaran pendidikan melalui APBD dengan total pendanaan sebesar Rp80,261,535,220 untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Satker PD).

Dari total anggaran tersebut, mayoritas pendanaan bersumber dari APBD Non Fisik sebesar Rp46,174,750,000 diikuti oleh APBD Dau sebesar Rp24,839,408,868. Dana APBD Murni turut berkontribusi sebesar Rp6,077,892,702, Dana Bagi Hasil Dana sebesar Rp2,569,535,650 sementara Alokasi Khusus (DAK) Fisik menyumbang Rp599,948,000.

Namun, tidak ada anggaran yang bersumber dari Kerjasama, Otonomi Khusus, Corporate Social Responsibility (CSR), maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik dalam bentuk Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan.

Ketidakterlibatan sumber pendanaan dari Non-APBD maupun APBN dapat menjadi tantangan dalam memperluas dan meningkatkan mutu pendidikan di Kota Tarakan. Dengan ketergantungan utama pada APBD, diperlukan strategi pengelolaan anggaran yang efektif agar dana yang tersedia dapat digunakan secara optimal untuk pembangunan infrastruktur pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta pemenuhan sarana dan prasarana sekolah. Selain itu, upaya untuk memperoleh dukungan pendanaan dari sektor swasta dan pemerintah pusat perlu ditingkatkan guna memperkuat keberlanjutan program pendidikan di daerah.

4.1.5 Dukungan Personil

Pelaksanaan kedinasan didukung oleh tenaga struktural maupun fungsional dan tentunya dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda dan ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 4.5

Dukungan Personil SPM Bidang Pendidikan

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan / Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dinas Pendidikan	Urusan Pendidikan	14	18	194	226

Sumber : Dinas Pendidikan 2

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Setiap tahapan memiliki tantangan tersendiri yang dapat mempengaruhi kualitas layanan pendidikan, baik dari segi pendataan, perhitungan kebutuhan, perencanaan anggaran, hingga pelaksanaan di lapangan.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam setiap tahapan, seperti belum terintegrasinya data pendidikan, ketidakseimbangan distribusi tenaga pendidik, keterbatasan anggaran, serta rendahnya angka partisipasi pendidikan kesetaraan. Selain itu, tabel ini juga menyajikan berbagai solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala tersebut, seperti pemanfaatan teknologi informasi dalam pendataan, optimalisasi anggaran pendidikan, serta peningkatan insentif dan pelatihan bagi tenaga pendidik.

Dengan adanya identifikasi permasalahan dan solusi ini, diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, dinas pendidikan, serta masyarakat dalam merancang kebijakan dan strategi yang lebih efektif guna meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Tarakan.

Tabel 4.6

Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Pendidikan

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengumpulan Data	Sebagian satuan pendidikan tidak mengisi seluruh indikator SPM yang diminta.	Menyusun format standar pengumpulan data SPM yang wajib digunakan seluruh sekolah.
		Beberapa sekolah tidak memahami definisi indikator SPM sehingga terjadi kesalahan pengisian	Melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) pengisian data SPM kepada operator sekolah
		Banyak sekolah menyampaikan data melewati batas waktu yang telah ditentukan	Menetapkan jadwal pengumpulan data SPM yang jelas dan terstruktur setiap tahun.
		Pengumpulan data sering harus diingatkan berulang oleh dinas.	Membuat surat penegasan batas waktu penyampaian data dari kepala dinas.
		Keterbatasan waktu dan personil dalam melakukan pengecekan data.	Melakukan validasi silang dengan data Dapodik dan data sektoral lainnya.
2	Perhitungan Kebutuhan	Ketidaksesuaian Data Dasar dalam Perhitungan Kebutuhan SPM	Melaksanakan verifikasi dan validasi data secara berkala sebelum proses perhitungan dilakukan dan Melakukan sinkronisasi antara data sekolah, data dinas pendidikan, dan data perencanaan daerah.
		Kurangnya pemahaman teknis terhadap metode perhitungan menyebabkan kebutuhan layanan dasar tidak dihitung secara komprehensif, sehingga terdapat	1. Melaksanakan bimbingan teknis perhitungan kebutuhan SPM bagi pengelola program di dinas Pendidikan. 2. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi perencanaan dan keuangan daerah.
		Keterpisahan sumber data menyebabkan proses perhitungan kebutuhan SPM menjadi lebih lama dan berpotensi menimbulkan perbedaan angka antara	Membentuk tim terpadu pengelola SPM pendidikan di lingkungan dinas pendidikan

		Keterbatasan Sistem Monitoring Pemenuhan SPM	Menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi pemenuhan SPM pendidikan secara berkala
3	Perencanaan dan Penganggaran	Pemahaman terhadap indikator SPM masih terbatas	1. Melaksanakan bimbingan teknis penerapan SPM 2. Penyusunan pedoman teknis internal pemenuhan indikator SPM
		Belum optimalnya pemetaan kebutuhan layanan dasar pendidikan	1. Melakukan analisis kebutuhan layanan pendidikan berbasis indikator SPM. 2. Menyusun daftar kebutuhan program prioritas pemenuhan SPM.
		Penganggaran belum berbasis kebutuhan riil sekolah	1. Menggunakan data satuan pendidikan (Dapodik, Rapor Pendidikan) sebagai dasar penyusunan anggaran. 2. Mengintegrasikan SPM dalam perencanaan dan penganggaran daerah
4	Pelaksanaan	Keterbatasan Tenaga Pendidik	1. Melakukan redistribusi guru antar satuan pendidikan sesuai kebutuhan. 2. Mengusulkan formasi PPPK atau ASN guru sesuai analisis kebutuhan.
		Koordinasi Pelaksanaan Program Pendidikan Belum Optimal	1. Membentuk Tim Pelaksana SPM Pendidikan di daerah. 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala. 3. Mengintegrasikan pelaksanaan SPM dengan program pendidikan daerah
		Sistem Monitoring dan Evaluasi Belum Optimal	1. Memanfaatkan Rapor Pendidikan dan Dapodik sebagai sistem monitoring. 2. Menyusun laporan pelaksanaan SPM secara berkala.

Sumber : Dinas Pendidikan 2026

4.2 Urusan Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam bidang kesehatan memiliki fungsi utama untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan layanan kesehatan dasar yang bermutu, merata, dan sesuai dengan hak mereka. Fungsifungsi tersebut meliputi:

- a. Menjamin Akses terhadap Pelayanan Kesehatan Dasar
- b. Menetapkan Batasan Layanan Minimal
- c. Meningkatkan Mutu Layanan Kesehatan
- d. Memastikan Pemerataan Layanan Kesehatan
- e. Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Kesehatan Nasional

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan, maka ditetapkan 12 jenis pelayanan dasar Kesehatan dengan 12 Indikator SPM seperti yang terlihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 4.7
Jenis Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian SPM	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Pemeriksaan kehamilan, pemberian suplemen gizi, deteksi dini risiko kehamilan.
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	Pelayanan meliputi persalinan aman dengan pendampingan tenaga kesehatan terlatih.
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Imunisasi hepatitis B, ASI eksklusif, serta pemeriksaan kondisi bayi.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian SPM	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Pemantauan tumbuh kembang, imunisasi dasar lengkap, pemberian vitamin A.
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Pemeriksaan kesehatan rutin di sekolah (Usaha Kesehatan Sekolah/UKS), pemberian imunisasi, dan edukasi kesehatan.
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Skrining untuk deteksi dini Penyakit Tidak Menular (PTM), seperti hipertensi dan diabetes, serta edukasi gaya hidup sehat.
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah orang usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Pemeriksaan kesehatan berkala untuk mendeteksi dan mencegah penyakit terkait usia lanjut.
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Deteksi dini, pengobatan, dan pengelolaan tekanan darah.
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah penderita DM yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Pemantauan gula darah, pengobatan, dan edukasi pengelolaan gaya hidup untuk diabetes.
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan layanan kesehatan	Penanganan medis, pendampingan psikososial, dan rehabilitasi.
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TBC)	Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan layanan TBC sesuai standar	Pemeriksaan, pengobatan, dan pemantauan pengobatan hingga tuntas.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian SPM	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan layanan deteksi dini HIV sesuai standar	Skrining HIV, konseling, dan terapi antiretroviral (ARV) jika diperlukan.

Sumber : Dinas Kesehatan 2026

Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pemerintah Kota Tarakan harus memastikan bahwa semua ibu hamil mendapatkan pemeriksaan kehamilan secara rutin, suplemen gizi (seperti tablet zat besi/folat), serta deteksi dini risiko kehamilan untuk mencegah komplikasi seperti anemia atau preeklamsia.

Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pemerintah Kota Tarakan Fokus pada penyediaan fasilitas persalinan yang aman dengan tenaga kesehatan terlatih, untuk mengurangi risiko komplikasi selama persalinan dan memastikan keselamatan ibu dan bayi.

Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Bayi yang baru lahir harus mendapatkan imunisasi hepatitis B dalam 24 jam pertama, edukasi pemberian ASI eksklusif, dan pemeriksaan fisik untuk mendeteksi kelainan bawaan atau kondisi kesehatan lain.

Pelayanan Kesehatan Balita, Pemerintah Kota Tarakan wajib memantau tumbuh kembang balita melalui kegiatan seperti posyandu. Layanan ini juga meliputi imunisasi dasar lengkap, pemberian vitamin A, dan deteksi dini malnutrisi.

Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, Pemerintah Kota Tarakan harus memastikan Usia Pendidikan Dasar mendapatkan pemeriksaan kesehatan rutin, imunisasi tambahan, serta edukasi tentang kebersihan dan gaya hidup sehat, biasanya melalui program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, Skrining kesehatan bagi masyarakat usia 15–59 tahun bertujuan untuk deteksi dini Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti hipertensi, diabetes, dan gangguan kardiovaskular, serta edukasi gaya hidup sehat.

Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut, Pemeriksaan kesehatan berkala untuk lansia dilakukan untuk mendeteksi dan mencegah penyakit terkait usia, seperti osteoporosis, hipertensi, dan diabetes, serta memberikan edukasi kesehatan khusus untuk usia lanjut.

Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Pemerintah Kota Tarakan bertanggung jawab untuk mendeteksi dini hipertensi pada masyarakat, memberikan pengobatan, serta memastikan tekanan darah penderita tetap terkontrol melalui pemantauan rutin.

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Permenkes Nomor 6 Tahun 2024, target yang ditetapkan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan adalah memastikan bahwa setiap jenis pelayanan dasar dapat menjangkau seluruh masyarakat dengan indikator capaian tertentu dalam kurun waktu yang ditetapkan. Pemerintah Kota Tarakan menetapkan target 100 persen meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Perhitungan pembiayaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tarakan melalui Dinas Kesehatan harus memperhatikan beberapa komponen penting sesuai dengan panduan Permenkes Nomor 6 Tahun 2024. Berikut adalah langkah - langkah dan komponen perhitungan pembiayaan:

Komponen Perhitungan Pembiayaan

a) Jumlah Sasaran Populasi

- i. Data Dasar: Populasi ibu hamil, bayi, balita, usia sekolah, usia produktif, lansia, penderita penyakit tertentu (hipertensi, diabetes, TBC, HIV, ODGJ).
 - ii. Data diperoleh dari catatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) atau survei kesehatan masyarakat setempat.
- b) Jenis Pelayanan Kesehatan
 - i. Rincian jenis layanan yang akan diberikan untuk setiap kelompok sasaran (misalnya, imunisasi, ANC, skrining kesehatan, pengobatan penyakit tertentu).
- c) Standar Biaya
 - i. Biaya per layanan sesuai dengan standar teknis kesehatan yang ditetapkan, mencakup:
 - Biaya tenaga kesehatan (honorarium atau gaji).
 - Biaya sarana dan prasarana (ruang pelayanan, alat kesehatan, obatobatan).
 - Biaya operasional (transportasi, pelatihan tenaga kesehatan, penyuluhan).
- d) Frekuensi Layanan
 - i. Berapa kali layanan diberikan kepada individu dalam periode tertentu (misalnya, 4 kali pemeriksaan kehamilan untuk ibu hamil).
- e) Asumsi Cakupan Target
 - i. Mengacu pada target capaian SPM (contoh: 90% cakupan untuk penderita diabetes mellitus mendapatkan layanan kesehatan).

Tabel 4.8

Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian SPM	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	4691
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	4691
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	4468
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	25621
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	39337
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	167964
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah orang usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	17573
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	16513

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian SPM	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah penderita DM yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	5195
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan layanan kesehatan	462
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TBC)	Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan layanan TBC sesuai standar	5770
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan layanan deteksi dini HIV sesuai standar	7093

Sumber : Dinas Kesehatan 2026

4.2.3 Realisasi

Realiasi ini menyajikan data pencapaian berbagai indikator layanan kesehatan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Data mencakup cakupan pelayanan untuk berbagai kelompok sasaran, mulai dari ibu hamil, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, hingga lansia.

Tabel 4.9
Capaian Penerapan SPM Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian SPM	Tahun 2025		
			Jumlah Warga Negara yang berhak mendapatkan layanan	Jumlah Warga Negara yang terlayani	Capaian
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	4691	4566	97,34%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	4691	4613	98,34%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	4468	4485	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	25621	14373	56,10%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	39337	37546	95,45%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	167964	114165	67,97%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah orang usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	17573	16254	92,49%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian SPM	Tahun 2025		
			Jumlah Warga Negara yang berhak mendapatkan layanan	Jumlah Warga Negara yang terlayani	Capaian
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	16513	19822	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah penderita DM yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	5195	6082	100%
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan layanan kesehatan	462	439	95,02%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TBC)	Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan layanan TBC sesuai standar	5770	7159	100%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan layanan deteksi dini HIV sesuai standar	7093	7314	100%

Sumber : Dinas Kesehatan 2026

Tabel 4.10
Capaian Mutu Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan
Kesehatan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Spm	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Capaian (%)
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					97,68
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)					77,87
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	4691	4566	125	97,34
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					19,81
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM					99,05
	1 Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Vaksin	586	611	+25	100,00
	2 Tablet Tambah Darah (180 Tablet X Jumlah Ibu Hamil)	Tablet	844380	821880	22500	97,34
	3 Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Orang	6	6	0	100,00
	4 Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	6	6	0	100,00
	5 Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	6	6	0	100,00
	6 Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (Proyeksi Pengadaan 15% Dari Jumlah Ibu Hamil)	Paket	6	6	0	100,00
	7 Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Skrining Triple Eliminasi Dengan Tes Cepat Hepatitis B Dan Sifilis Dan HIV	Paket	4691	4566	125	97,34
	8 Kartu Ibu/Rekam Medis Ibu	Paket	4691	4566	125	97,34

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan Spm		Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Capaian (%)
				Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	9	Buku Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA)	Buku	4691	4566	125	97,34
	10	Media Promosi Komunikasi Informasi Dan Edukasi (KIE)	Paket	6	6	0	100,00
	11	Gel USG (Untuk Puskesmas Yang Memiliki Alat USG) (Proyeksi Pengadaan 1/15 Dari Jumlah Ibu Hamil)	Botol	626	608	18	97,12
	12	Tenaga medis : Dokter/ dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	100	100	0	100,00
	13	Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	250	250	0	100%
	14	Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	280	280	0	100,00
	15	Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	20	20	0	100,00
	16	Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	12	12	0	100,00
	17	Kunjungan 6 Kali Ibu Hamil Selama Periode Kehamilan (K6) (Satu Kali Pada Trimester Pertama, Dua Kali Pada Trimester Kedua, Tiga Kali Pada Trimester Ketiga)	Orang	4691	4566	125	97,34

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan Spm	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Capaian (%)
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					98,58
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)					78,67
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	4691	4613	78	98,34
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					19,91
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM					99,57
	1 Formulir Partograf	Formulir	4691	4631	60	98,72
	2 Kartu Ibu/Rekam Medis Ibu	Paket	4691	4631	60	98,72
	3 Buku Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA) (Terintegrasi Dengan Ibu Hamil, Sesuai Kebutuhan Bila Belum Dapat Pada Masa Kehamilan)	Buku	4691	4631	60	98,72
	4 Media Promosi Komunikasi Informasi Dan Edukasi (KIE)	Paket	6	6	0	100.00
	5 Tenaga medis : Dokter/ dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	100	100	0	100.00
	6 Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	250	250	0	100.00
	7 Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	280	280	0	100.00
	8 Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	20	20	0	100.00
	9 Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	12	12	0	100.00

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan Spm	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Capaian (%)
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					100.00
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)					80,00
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	4468	4485	-17	100.00
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20.00
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM					99.99
	1 Vaksin Hepatitis B Dosis Tunggal (Prefilled Syringe)	Vaksin	4468	4459	9	99.80
	2 Vitamin K1 Injeksi	Ampul	4468	4485	-17	100.00
	3 Salep/ Tetes Mata Antibiotik	Orang	4468	4485	-17	100.00
	4 Formulir Bayi Baru Lahir	Formulir	4468	4485	-17	100.00
	5 Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir	13404	13455	-51	100.00
	6 Buku Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA)	Buku	4468	4485	-17	100.00
	7 Media Promosi Komunikasi Informasi Dan Edukasi (KIE)	Paket	6	6	0	100.00
	8 Tenaga medis : Dokter/ Dokter Spesialis Anak	Orang	100	100	0	100.00
	9 Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	250	250	0	100.00
	10 Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	280	280	0	100.00
	11 Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	20	20	0	100.00
	12 Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	6	6	0	100.00

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Spm		Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Capaian (%)
				Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	13	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	12	12	0	100,00
	14	Kader Kesehatan	Orang	724	724	0	100,00
	Pelayanan Kesehatan Balita						57,28
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)						44,88
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		Orang	25621	14373	11248	56,10
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)						12,40
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM						62,00
	1	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) Atau Instrumen Standar Lain Yang Berlaku	Formulir	25621	14221	11400	55,51
	2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	25621	14221	11400	55,51
	3	Buku Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA)	Buku	25621	14221	11400	55,51
	4	Vitamin A Biru (Sesuai Standar 6 - 11 Bulan)	Kapsul	4468	2227	2241	49,84
	5	Vitamin A Merah (Sesuai Standar 12 - 59 Bulan)	Kapsul	41148	18894	22254	45,92
	6	Vaksin Imunisasi Dasar: BCG	Vaksin	4468	3217	1251	72,00
	7	Vaksin Imunisasi Dasar: Polio Tetes	Vaksin	13404	2473	10931	18,45
	8	Vaksin Imunisasi Dasar: IPV	Vaksin	8936	2182	6754	24,42
	9	Vaksin Imunisasi Dasar: DPT HB Hib	Vaksin	13404	2457	10947	18,33
	10	Vaksin Imunisasi Dasar: Campak Rubella	Vaksin	4468	1645	2823	36,82

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Spm		Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Capaian (%)
				Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	11	Vaksin Imunisasi Lanjutan : DPT HB Hib	Vaksin	4085	1846	2239	45,19
	12	Vaksin Imunisasi Lanjutan : Campak Rubella	Vaksin	4085	1942	2143	47,54
	13	Jarum Suntik Dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	34978	18486	16492	52,85
	14	Peralatan Anafilaktik	Paket	12	30	-18	100.00
	15	Formula Terapi Gizi Buruk	Paket	54	13	41	24,07
	16	Tenaga medis : Dokter	Orang	100	100	0	100.00
	17	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	250	250	0	100.00
	18	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	280	280	0	100.00
	19	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	12	12	0	100.00
	20	Guru PAUD	Orang	385	385	0	100.00
	21	Kader kesehatan	Orang	742	742	0	100.00
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar						92,91
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)						76,36
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		Orang	39337	37546	1791	95,45
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)						16.56
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM						82.78
	1	Form Pencatatan/Buku Rapor Kesehatanku (Sesuai Jumlah Peserta Didik Di Sekolah/Madrasah/Pesantren)	Buku	39337	5128	34209	13,04

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Spm		Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Capaian (%)
				Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	2	Form Pencatatan/Buku Pemantauan Kesehatan (Sesuai Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar Di Luar Satuan Pendidikan Dasar Seperti Di Panti/LKSA, Lapas/LPKA Dan Posyandu Remaja)	Buku	5045	0	5045	0.00
	3	Kuesioner Skrining Kesehatan (Sesuai Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar)	Dokumen	39337	37546	1791	95,45
	4	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah Dan Remaja Di Dalam Sekolah	Formulir	1312	1252	60	95,43
	5	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah Dan Remaja Di Luar Sekolah (Sesuai Kebutuhan Dengan Mempertimbangkan Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar Per Sekolah/Madrasah/Pesantren) (Sesuai Kebutuhan Dengan Mempertimbangkan Jumlah Panti/LKSA, Lapas/LPKA Dan Posyandu Remaja Per Puskesmas)	Formulir	0	0	0	0,00

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan Spm		Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Capaian (%)
				Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	6	Tablet Tambah Darah Pada Remaja Putri Kelas 79 Dan Usia 1217 Tahun Diluar Sekolah (Jumlah Remaja Putri Kelas 79 Dan Usia 1217 Tahun Diluar Sekolah Dikalikan 52 Tablet Dan Mempertimbangkan Ketersediaan Stok Opname yang Ada Di Gudang farmasi Kabupaten/Kota)	Tablet	311688	311688	0	100.00
	7	Alat Pemeriksaan Hb (Hematologi Analyzer Di Puskesmas Dan Hb Meter Untuk Skrining Anemia Di Sekolah SMP/Sederajat)	Alat	6	6	0	100.00
	8	Strip Hb Sasaran Remaja Putri Kelas 7 (Hematologi Analyzer Di Puskesmas Dan Hb Meter Untuk Skrining Anemia Di Sekolah SMP/Sederajat)	Strip	2017	1965	52	97,42
	9	Media Promosi Kesehatan (Media Khusus Remaja Sehat)	Paket	6	6	0	100.00
	10	Vaksin Campak Rubela, DT, Td Untuk Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (Sesuai Standar Kebutuhan Bagi Seluruh Sasaran Kelas 1 SD, Kelas 2 SD Dan Kelas 5 SD Dan Anak Dengan Usia Setara)	Vaksin	11813	10477	1336	88,69

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan Spm		Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Capaian (%)
				Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.	11	Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	100	100	0	100,00
	12	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	63	63	0	100,00
	13	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	73	73	0	100,00
	14	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	12	12	0	100,00
	15	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	22	22	0	100,00
	16	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	30	30	0	100,00
	17	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	10	10	0	100,00
	18	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	265	265	0	100,00
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif						72,78
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)						54,38
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		Orang	167964	114165	53799	67,97
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)						18,40
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM						92,00
	1	Media Promosi Komunikasi Informasi Dan Edukasi (KIE)	Paket	6	6	0	100,00
	2	Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat	Paket	35	35	0	100,00

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan Spm		Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Capaian (%)
				Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkaran perut, Alat ukur Lingkaran Atas (LILA)					
	3	Alat : Tensimeter	Unit	35	35	0	100.00
	4	Alat : Glukometer	Unit	35	35	0	100.00
	5	Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	12	12	0	100.00
	6	Alat : Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol	Unit	167964	114165	53799	67,97
	7	Alat : KIT IVA Tes	Unit	6	6	0	100.00
	8	Strip Dan Reagen Pemeriksaan Hb	Unit	167964	114165	53799	67,97
	9	Kit Ophthalmologi Komunitas	Unit	6	6	0	100.00
	10	Kuesioner PUMA (Deteksi Dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)	Dokumen	6	6	0	100,00
	11	Alat Pelayanan KB	Unit	30	30	0	100.00
		a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit	12	12	0	100,00
		b. Set pemasangan dan pencabutan Implan	Unit	12	12	0	100,00
		c. Vasektomi set	Unit	6	6	0	100,00
	12	Formulir Pencatatan Dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	6	6	0	100.00
	13	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	968	116	852	11,98
	14	Tenaga medis : Dokter	Orang	48	48	0	100,00
	15	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	95	95	0	100,00
	16	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	30	30	0	100,00
	17	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	12	12	0	100,00

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Spm		Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Capaian (%)
				Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	18	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	6	6	0	100,00
	19	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	120	120	0	100,00
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut						93,76
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)						74,00
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		Orang	17573	16254	1319	92,49
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)						19,77
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM						98,85
	1	Alat Pemeriksaan Deteksi Dini: Alat Ukur Berat Badan, Alat Ukur Tinggi Badan, Alat Ukur Lingkar Perut, Lingkar Lengan Atas, Dan Tensimeter	Paket	12	12	0	100.00
	2	Glukometer/ Alat Pemeriksaan Gula Darah	Paket	12	12	0	100.00
	3	Alat Pemeriksaan Kolesterol	Paket	12	12	0	100.00
	4	Bahan Medis Habis Pakai: Strip Uji Pemeriksaan Gula Darah Dan Kolesterol, Lancet, Kapas Alkohol	Paket	17573	16254	1319	92,49
	5	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), Instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	6	6	0	100.00

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Spm		Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Capaian (%)
				Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.	6	Buku Kesehatan Lansia Atau Aplikasi Pencatatan Terkait Lainnya	Buku	17573	16254	1319	92,49
	7	Media Promosi Komunikasi Informasi Dan Edukasi (KIE)	Paket	12	12	0	100.00
	8	Tenaga medis : Dokter	Orang	100	100	0	100,00
	9	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	250	250	0	100,00
	10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	280	280	0	100,00
	11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	12	12	0	100,00
	12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	12	12	0	100,00
	13	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	175	175	0	100,00
	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						100,00
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)						80,00
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		Orang	16513	19822	-3309	100,00
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)						20,00
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM						100,00
	1	Pedoman Pengendalian Hipertensi Dan Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (Panduan Dalam Melakukan Penatalaksanaan Dan	Paket	12	12	0	100.00

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan Spm		Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Capaian (%)
				Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Edukasi Sesuai Standar, Minimal 2)					
	2	Obat Hipertensi	Paket	16513	19822	-3309	67.41
	3	Tensimeter (Mengukur Tekanan Darah)	Unit	35	35	0	100,00
	4	Formulir Pencatatan Dan Pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi	6	6	0	100.00
	5	Media Promosi Komunikasi Informasi Dan Edukasi (KIE) (Peningkatan Pengetahuan Masyarakat)	Paket	6	6	0	100,00
	6	Tenaga medis : Dokter	Orang	48	48	0	100,00
	7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	95	95	0	100,00
	8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	30	30	0	100,00
	9	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	12	12	0	100,00
	10	Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	6	6	0	100,00
	11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	6	6	0	100,00
	12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	6	6	0	100,00

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Spm	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Capaian (%)
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					100.00
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)					80.00
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	5195	6082	-887	100.00
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20.00
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM					100.00
	1 Obat Diabetes Melitus (Melakukan Pemeriksaan Gula Darah, Minimal 1 Di Setiap Fasyankes Sesuai Kebutuhan)	Paket	5195	6082	-887	100.00
	2 Fotometer Atau Glukometer	Unit	35	35	0	100.00
	3 BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) Gula Darah Dalam Pemantauan Kadar Gula Dalam Darah : Reagen Glukosa Atau Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	Unit	5195	6082	-887	100.00
	4 Formulir Pencatatan Dan Pelaporan Aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	6	6	0	100.00
	5 Media Promosi Komunikasi Informasi Dan Edukasi (KIE)	Pedoman	6	6	0	100.00

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan Spm		Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Capaian (%)
				Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	6	Tenaga medis : Dokter	Orang	48	48	0	100,00
	7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	95	95	0	100,00
	8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	30	30	0	100,00
	9	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	6	6	0	100,00
	10	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	6	6	0	100,00
	11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	12	12	0	100,00
	12	Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	21	21	0	100,00
10 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgi) Berat						95,39
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)						76,02
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		Orang	462	439	23	95,02
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)						19,37
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM						96,87
	1	Buku Pedoman Penggolongan Dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) Atau Buku PPDGJ Terbaru (Bila Sudah Tersedia) (Bentuk Fisik Atau Elektronik)	Buku	6	6	0	100,00
	2	Penyediaan Psikofarmaka (Pengobatan/Medikasi)	Paket	11	9	2	81,82

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan Spm		Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Capaian (%)
				Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	3	Penyediaan Formulir Skrining Kesehatan Jiwa Dan/ Atau Penyediaan Melalui Aplikasi (Instrumen Untuk Skrining Masalah Kesehatan Jiwa/ Risiko Gangguan Jiwa Pada Caregiver)	Formulir	462	439	23	95.02
	4	Penyediaan Formulir Pencatatan Dan Pelaporan Melalui Sistem Informasi Kesehatan (Pencatatan Dan Pelaporan)	Formulir	462	439	23	95.02
	5	Media Promosi Komunikasi Informasi Dan Edukasi (KIE)	Media	6	6	0	100.00
	6	Tenaga medis : Dokter	Orang	6	6	0	100.00
	7	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	6	6	0	100.00
	8	Tenaga profesional lainnya	Orang	1	1	0	100,00
	9	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang	69	69	0	100,00
11 .	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						100,00
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)						80.00
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		Orang	5770	7159	- 1389	100.00

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Spm		Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Capaian (%)
				Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20,00
		B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM					100,00
	1	Media Promosi Komunikasi Informasi Dan Edukasi (KIE)	Paket	12	12	0	100.00
	2	Reagen Zn TB	Kit	12	93	-81	100.00
	3	Masker Bedah Dan Masker N95	Paket	200	1328	-1128	100,00
	4	Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengering	Paket	6347	9820	-3473	100.00
	5	Katrid Tes Cepat Molekuler	Tes	6347	7942	-1595	100,00
	6	Formulir Pencatatan Dan Pelaporan	Dokumen	12	12	0	100.00
	7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	12	12	0	100.00
	8	Tuberkulin	Vial	90	90	0	100,00
	9	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	20	20	0	100,00
	10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	28	28	0	100,00
	11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	22	22	0	100,00
	12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	12	12	0	100,00
	13	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	12	12	0	100,00

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Spm		Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Capaian (%)
				Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12.	14	Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	6	6	0	100,00
	15	Kader Kesehatan	Orang	24	24	0	100,00
	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)						100.00
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)						80.00
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		Orang	7093	7314	-221	100.00
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)						20.00
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM						100.00
	1	Media Promosi Komunikasi Informasi Dan Edukasi (KIE)	Paket	13	13	0	100.00
	2	Tes Cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) Pertama	Test	7093	7314	-221	100.00
	3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sput Yang Sesuai/Vacutainer Dan Jarum Sesuai	Paket	7093	7314	-221	100.00
	4	Alat Tulis, Rekam Medis Yang Berisi Nomor Rekam Medis, Nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, Nomor KTP/NIK	Paket	7093	7314	-221	100.00
	5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter	Orang	13	13	0	100,00

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan Spm		Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Capaian (%)
				Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		spesialis kulit dan kelamin					
	6	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	13	13	0	100,00
	7	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	13	13	0	100,00
	8	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	13	13	0	100,00
	9	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	6	6	0	100,00
	10	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	13	13	0	100,00
Kategori Indeks Pencapaian SPM							92.37

Sumber : Dinas Kesehatan 2026

4.2.4 Alokasi Anggaran

Sektor kesehatan merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan daerah, terutama dalam memastikan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi masyarakat. Berdasarkan data alokasi pendanaan untuk urusan kesehatan di Kota Tarakan, total anggaran yang dialokasikan untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Satker PD) mencapai Rp1.847.418.240. Berikut adalah rincian alokasi anggaran yang tersedia:

Tabel 4.11
Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan

No	Pendanaan		Pagu
1	2		3
1	APBD Kota Tarakan		1,176,463,228,204
2	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah		171,363,769,594
3	Alokasi Anggaran Penerapan Spm Pada Satker PD		1,847,418,240
	APBD		1,847,418,240
	A	APBD Murni	0
	B	APBD Dau	0
	C	APBD Dak Fisik	0
	D	APBD Dak Non Fisik	824,675,000
	E	Dana Bagi Hasil	1,022,743,240
	F	Kerjasama	0
	G	Otonomi Khusus	0
	Non APBD		0
	A	Corporate Social Responsibility (CSR)	0
	APBN		0
	B	APBN Dekonsentrasi	0
	C	APBN Tugas Pembantuan	0
	Dana Lainnya		0

Sumber : Dinas Kesehatan, 2026

Dari jumlah tersebut, sumber pendanaan berasal dari APBD Bagi Hasil sebesar Rp1,022,743,240 dan Dak Non Fisik sebesar Rp824,675,000. Tidak ada alokasi anggaran dari APBD Murni, APBD Dau Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Kerjasama, Otonomi Khusus, Corporate Social Responsibility (CSR), maupun dari APBN dalam bentuk Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Minimnya keterlibatan sumber pendanaan dari sektor APBD, nonAPBD dan APBN menunjukkan adanya tantangan dalam pembiayaan program kesehatan di Kota Tarakan. Dengan keterbatasan anggaran, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan penggunaan dana yang ada agar program kesehatan tetap berjalan secara efektif. Langkahlangkah seperti meningkatkan efisiensi belanja kesehatan, menggali potensi pendanaan dari sektor swasta melalui program CSR, serta mengajukan dukungan tambahan dari pemerintah pusat dapat menjadi solusi untuk memperkuat layanan kesehatan masyarakat.

4.2.5 Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang kesehatan melibatkan seluruh staf di lingkungan Dinas Kesehatan dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 4.12**Dukungan Personil SPM Bidang Kesehatan**

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan / Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dinas Kesehatan	Urusan Kesehatan	31	8	91	130

Sumber : Dinas Kesehatan 2026

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kota Tarakan, berbagai tahapan pelaksanaan program kesehatan dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu diatasi dengan solusi yang tepat. Tabel berikut merangkum permasalahan yang muncul pada setiap tahapan, mulai dari pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, perencanaan dan penganggaran, hingga pelaksanaan layanan kesehatan.

Beberapa permasalahan utama yang dihadapi meliputi kesulitan dalam perhitungan data karena mobilitas penduduk, keterbatasan anggaran yang masih bergantung pada Dana Alokasi Khusus, serta rendahnya kepatuhan masyarakat dalam pemeriksaan kesehatan rutin. Untuk mengatasi hal ini, berbagai solusi diusulkan, seperti penguatan sistem pencatatan digital, optimalisasi pendanaan dari berbagai sumber, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta pemanfaatan teknologi dalam layanan kesehatan.

Melalui identifikasi masalah dan penyusunan solusi yang terencana, diharapkan efektivitas layanan kesehatan dapat meningkat dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Tabel di bawah ini menyajikan lebih rinci berbagai kendala dan strategi yang dapat diterapkan untuk memperbaiki sistem pelayanan kesehatan di Kota Tarakan.

Tabel 4.13
Permasalahan dan Solusi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Urusan Kesehatan

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengumpulan Data	Perhitungan data per kelurahan sulit karena layanan pengobatan tidak sesuai domisili dan banyak yang berpindah alamat.	Menggunakan sistem pencatatan digital terintegrasi dengan data kependudukan.
		Penetapan target sasaran belum maksimal karena terdapat perbedaan perhitungan target indikator kesehatan.	Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk validasi data.
			Menetapkan metode perhitungan target yang seragam dan berbasis standar nasional.
2	Perhitungan Kebutuhan	Perhitungan mutu layanan belum maksimal karena data kebutuhan barang/jasa, sarana, prasarana, dan SDM tidak mengakomodir seluruh fasilitas kesehatan.	Melakukan pemetaan ulang fasilitas kesehatan.
			Meningkatkan sistem manajemen inventaris dan kebutuhan berbasis data.
			Melibatkan stakeholder kesehatan dalam penyusunan kebutuhan layanan.
3	Perencanaan dan Penganggaran	Terbatasnya anggaran karena masih dominan bersumber dari Dana Alokasi Khusus.	Mengoptimalkan pendanaan dari APBD, CSR, dan kemitraan swasta.
			Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran kesehatan dalam APBD.
			Melakukan efisiensi dan prioritas belanja kesehatan.
4	Pelaksanaan	Tidak semua ibu hamil melakukan pemeriksaan rutin (minimal 6 kali ke fasilitas kesehatan).	Meningkatkan sosialisasi dan edukasi ibu hamil tentang pentingnya pemeriksaan rutin.
			Memberikan layanan jemput bola dan pemeriksaan di posyandu.
		Indikator pelayanan kesehatan usia produktif belum optimal karena keterbatasan tenaga dan	Melibatkan kader kesehatan untuk mendampingi ibu hamil yang belum memeriksakan diri.
			Menambah tenaga kesehatan atau kader kesehatan untuk membantu deteksi dini PTM.

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)
		waktu untuk kegiatan di luar gedung.	Menjadwalkan layanan luar gedung agar tidak berbenturan dengan jadwal puskesmas utama.
			Memanfaatkan teknologi (aplikasi kesehatan) untuk memfasilitasi skrining mandiri.
		Data ibu bersalin dari Rumah Sakit Provinsi belum dapat diakses sehingga capaian dimasukkan ke bulan berikutnya.	Mengembangkan sistem integrasi data antara rumah sakit provinsi dan fasilitas kesehatan di Kota Tarakan.
			Mengadakan perjanjian kerja sama dengan rumah sakit provinsi untuk mempercepat akses data.
		Tidak semua penderita hipertensi melakukan kontrol rutin.	Mengoptimalkan program pengingat (SMS, aplikasi, atau kader kesehatan) untuk pasien hipertensi.
			Menyediakan layanan pemeriksaan tekanan darah gratis secara berkala di tempat umum.
			Meningkatkan keterlibatan keluarga dalam pengawasan kepatuhan kontrol kesehatan pasien.

Sumber : Dinas Kesehatan 2026

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam bidang Urusan Pekerjaan Umum memiliki fungsi utama untuk memastikan bahwa penyelenggaraan infrastruktur publik memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Beberapa fungsi utama SPM dalam bidang ini antara lain:

- Menjamin Ketersediaan Infrastruktur Dasar
- Meningkatkan Kualitas Infrastruktur

- c. Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Infrastruktur
- d. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
- e. Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah
- f. Menyediakan Dasar untuk Perencanaan Pembangunan
- g. Mendorong Pembangunan Berkelanjutan
- h. Menjamin Keadilan Akses Layanan

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum, maka ditetapkan 2 jenis pelayanan dasar Pekerjaan Umum dengan 2 Indikator SPM seperti yang terlihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 4.14

Jenis Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian SPM	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah kumulatif rumah tangga masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kota	Menjelaskan cakupan rumah tangga yang menerima layanan air minum layak sesuai standar SPM.
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	Mengukur akses masyarakat terhadap pengelolaan limbah domestik yang aman dan terstandar.

Sumber : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2026

Layanan Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap air minum yang aman dan layak. Akses ini dapat diperoleh melalui dua metode utama:

- SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) jaringan perpipaan: Air bersih yang disalurkan langsung ke rumah-rumah melalui jaringan pipa.
- SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi: Air bersih yang disediakan melalui sumur, mata air, atau sistem nonpipa lainnya, tetapi memenuhi standar perlindungan dan kebersihan.
- Indikator ini mengukur jumlah rumah tangga yang terlayani oleh kedua metode tersebut, memastikan bahwa air minum tersedia secara merata sesuai kebutuhan masyarakat perkotaan maupun pedesaan.

Layanan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik bertujuan untuk memastikan bahwa air limbah domestik (limbah dari aktivitas rumah tangga, seperti mandi, mencuci, atau toilet) dikelola dengan aman. Indikator ini mengukur cakupan rumah tangga yang memiliki akses terhadap pengolahan limbah domestik melalui beberapa metode:

- Cubluk atau septic tank: Pengolahan limbah secara individual di rumah tangga.
- Pengolahan lumpur tinja di PLT (Pengolahan Lumpur Tinja): Lumpur tinja dari septic tank diangkut dan diolah di fasilitas khusus.
- IPALD (Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik): Sistem pengolahan air limbah terpusat yang melayani sambungan dari beberapa rumah.

4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat, pemerintah daerah diwajibkan untuk menetapkan target pencapaian SPM selama kurun waktu tertentu. Pemerintah Kota Tarakan menetapkan target 100 persen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum layak untuk kebutuhan sehari-hari dan Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan sanitasi yang lebih baik.

Perhitungan pembiayaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tarakan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus memperhatikan beberapa komponen penting sesuai dengan panduan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023. Berikut adalah langkah - langkah dan komponen perhitungan pembiayaan:

1) Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum

a) Komponen Biaya:

- i. Pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) berbasis jaringan perpipaan.
- ii. Pengadaan fasilitas air minum nonpipa terlindungi (seperti sumur bor atau tangki air).
- iii. Operasi, pemeliharaan, dan perbaikan jaringan SPAM.

b) Indikator Perhitungan:

- i. Jumlah rumah tangga yang harus mendapatkan akses air minum.
- ii. Luas wilayah cakupan SPAM.

2) Pengolahan Air Limbah Domestik

a) Komponen Biaya:

- i. Pembangunan fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD).
- ii. Penyediaan tangki septik untuk rumah tangga yang belum memiliki akses.
- iii. Pengelolaan lumpur tinja melalui pengangkutan dan pengolahan di fasilitas PLT.

b) Indikator Perhitungan:

- i. Jumlah rumah tangga yang membutuhkan akses pengolahan limbah domestik.
- ii. Kebutuhan kapasitas IPALD berdasarkan populasi.

Tabel 4.15

Jenis Pelayanan Dasar Pengolahan Air Limbah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian SPM	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah kumulatif rumah tangga masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kota	100%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	100%

4.3.3 Realisasi

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang optimal, evaluasi terhadap realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor pekerjaan umum menjadi hal yang sangat penting. Laporan ini menyajikan analisis capaian layanan penyediaan air minum dan pengolahan air limbah domestik di Kota Tarakan, yang mencerminkan kinerja pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dengan memahami tingkat pencapaian serta tantangan yang dihadapi, rekomendasi strategis dapat dirumuskan guna memastikan layanan yang lebih berkelanjutan dan berkualitas di masa mendatang.

Tabel 4.16

Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Spm	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Capaian (%)
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari - hari					100.00
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)					80.00
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	14160	14160	0	100.00
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20.00
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa / SDM					100.00
	Jaringan Perpipaan					
	Kuantitas SPAM					
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari	Rumah Tangga	3540	3540	0	100.00

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Spm		Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Capaian (%)
				Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)					
		Kualitas SPAM					
		Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	Rumah Tangga	3540	3540	0	100.00
		Bukan Jaringan Perpipaan					
		Kuantitas SPAM					
		Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	0	0	0	100.00
		Kualitas SPAM					
		Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	Rumah Tangga	0	0	0	100.00
2		Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik					100.00
		Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00
		A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	140	140	0	100.00

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Spm		Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Capaian (%)
				Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)						20.00
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa / SDM						100.00
	Kuantitas SPALD						
	1	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	35	35	0	100.00
	KUALITAS SPALD						
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)						
		Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	35	35	0	100.00
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)						
	1	Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan	Rumah Tangga	50	50	0	100.00

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Spm		Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Capaian (%)
				Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota					
	2	Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	0	0	0	100,00
	Kategori Indeks Pencapaian SPM						100.00

Sumber : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2026

4.3.4 Alokasi Anggaran

Sektor pekerjaan umum memegang peranan penting dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan data alokasi pendanaan untuk urusan pekerjaan umum di Kota Tarakan, total anggaran yang dialokasikan untuk penerapan Standar

Pelayanan Minimal (SPM) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Satker PD) mencapai Rp8,180,870,050.

Tabel 4.17

Alokasi Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum

No	Pendanaan	Pagu
(1)	(2)	(3)
1	APBD Kota Tarakan	1,176,463,228,204
2	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	180,329,090,081
3	Alokasi Anggaran Penerapan Spm Pada Satker PD	8,180,870,050
	APBD	2,359,652,200
	A APBD Murni	0
	B APBD Dau	0
	C APBD Dak Fisik	0
	D APBD Dak Non Fisik	0
	E Dana Bagi Hasil	2,359,652,200
	F Kerjasama	0
	G Otonomi Khusus	0
	Non APBD	0
	A Corporate Social Responsibility (CSR)	0
	APBN	0
	B APBNDekonsentrasi	0
	C APBNTugas Pembantuan	0
	Dana Lainnya	5,821,217,850

Sumber : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2026

Pendanaan berasal dari Dana Bagi Hasil dan Dana Lainnya. Minimnya sumber pendanaan di luar APBD Murni menunjukkan keterbatasan dalam mendukung program dan proyek infrastruktur di Kota Tarakan. Untuk meningkatkan efektivitas pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah perlu mengupayakan tambahan pendanaan, baik dari pemerintah pusat melalui skema APBN maupun dari sektor swasta melalui program CSR dan kerja sama

investasi. Optimalisasi penggunaan anggaran yang tersedia juga menjadi kunci agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

4.3.5 Dukungan Personil

Untuk mencapai hasil yang diinginkan khususnya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan diperlukan sumber daya manusia atau personil yang mempunyai kualifikasi pendidikan dan golongan yang sesuai seperti yang tergambar pada tabel berikut:

Tabel 4.18

Dukungan Personil SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan / Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7	5	52	64

Sumber : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2026

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Pengelolaan air bersih dan sanitasi merupakan aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung kesehatan lingkungan. Namun, berbagai kendala masih dihadapi dalam setiap tahapan, mulai dari pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, perencanaan dan penganggaran, hingga pelaksanaan program.

Beberapa tantangan utama meliputi keterbatasan data rumah tangga yang belum mendapatkan akses air minum berkualitas, ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan infrastruktur, serta terbatasnya anggaran untuk pengembangan jaringan perpipaan dan pengolahan air limbah domestik. Selain itu, kurangnya tenaga

teknis dalam pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya air bersih dan sanitasi turut menjadi hambatan dalam implementasi program.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, sejumlah solusi telah diidentifikasi, seperti pengembangan sistem pendataan berbasis digital, optimalisasi strategi distribusi air dan limbah, peningkatan alokasi dana APBD dan APBN, serta mendorong kerja sama dengan sektor swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Selain itu, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam perencanaan anggaran juga menjadi langkah penting dalam mencegah kendala administratif yang dapat menghambat pelaksanaan program.

Tabel berikut ini menyajikan secara rinci tahapan pengelolaan akses air minum dan sanitasi, permasalahan yang dihadapi, serta solusi yang dapat diterapkan untuk memastikan layanan air bersih dan sanitasi yang lebih baik bagi masyarakat Kota Tarakan.

Tabel 4.19

Permasalahan dan Solusi SPM Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengumpulan Data	Data rumah tangga yang belum mendapatkan akses air minum berkualitas masih terbatas.	Mengembangkan sistem pendataan berbasis digital yang lebih akurat.
		Pendataan infrastruktur pengolahan air limbah domestik belum optimal.	Melakukan survei langsung ke masyarakat untuk memverifikasi data layanan air minum dan limbah.
2	Perhitungan Kebutuhan	Kebutuhan air bersih dan pengolahan limbah tidak sebanding dengan ketersediaan infrastruktur.	Menyusun kajian kebutuhan air minum dan sanitasi berbasis proyeksi jumlah penduduk.

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)
		Distribusi jaringan perpipaan belum merata.	Mengembangkan strategi distribusi air minum dan limbah yang lebih efisien.
3	Perencanaan dan Penganggaran	Anggaran masih terbatas untuk pengembangan jaringan perpipaan baru.	Mengusulkan peningkatan alokasi dana APBD dan APBN untuk pengelolaan air bersih dan limbah.
		Sumber dana untuk pengolahan air limbah domestik masih minim.	Mencari alternatif pendanaan seperti CSR dan hibah internasional.
4	Pelaksanaan	Kurangnya tenaga teknis dalam pengelolaan dan pemeliharaan SPAM.	Meningkatkan pelatihan teknis bagi petugas pengelola air bersih dan limbah.
		Minimnya edukasi masyarakat terkait pentingnya air bersih dan sanitasi.	Mengadakan kampanye kesadaran masyarakat tentang penggunaan air bersih dan sanitasi yang baik.
		Kegiatan belum dilaksanakan karena akan ada perubahan kode belanja pada APBD Perubahan, hasil dari temuan BPK 2023	Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penyusunan anggaran dan kode belanja agar lebih akurat dan sesuai ketentuan.
5	Lain-lain	Koordinasi antar instansi terkait masih lemah.	Meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah, pusat, dan sektor swasta.
		Minimnya partisipasi swasta dalam penyediaan air minum dan sanitasi.	Mendorong investasi swasta melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Sumber : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2026

4.4 Urusan Permukiman dan Perumahan Rakyat

Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam bidang Permukiman dan Perumahan Rakyat memiliki fungsi utama sebagai berikut:

- Menjamin Akses Hunian Layak
- Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
- Mengurangi Ketimpangan Akses Perumahan
- Melindungi Lingkungan dan Masyarakat

- e. Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
- f. Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Ekonomi

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Urusan Permukiman dan Perumahan Rakyat, maka ditetapkan 2 jenis pelayanan dasar Permukiman dan Perumahan Rakyat dengan 2 Indikator SPM seperti yang terlihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 4.20

Jenis Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Keterangan Tambahan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani	Termasuk pembangunan rumah baru dan rehabilitasi kerusakan rumah yang terdampak akibat bencana alam atau nonalam.
2	Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	Rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni	Meliputi proses penggantian hak tanah, subsidi sewa, serta penyediaan langsung rumah layak huni untuk mendukung program relokasi pemerintah.

Sumber : Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan 2026

Layanan Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana bertujuan untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat yang menjadi korban bencana alam (seperti

gempa bumi, banjir, atau tanah longsor) maupun bencana nonalam (seperti kebakaran atau konflik sosial).

Ruang lingkup Layanan Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana adalah

- a. Pembangunan rumah baru untuk korban yang kehilangan tempat tinggal.
- b. Rehabilitasi atau perbaikan rumah yang mengalami kerusakan sebagian.
- c. Penyesuaian desain rumah agar sesuai dengan standar hunian layak dan aman dari potensi bencana di masa depan.

Layanan Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota ditujukan bagi masyarakat yang terdampak program relokasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti pengrusakan untuk pembangunan infrastruktur umum, penataan kawasan, atau pengendalian permukiman di daerah rawan bencana.

Ruang lingkup Layanan Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat adalah

- a. Penggantian hak atas tanah atau bangunan: Memberikan kompensasi bagi masyarakat yang kehilangan tanah atau rumahnya.
- b. Subsidi uang sewa: Menyediakan bantuan biaya sewa tempat tinggal sementara hingga masyarakat mendapatkan hunian permanen.
- c. Penyediaan rumah layak huni: Menyediakan rumah baru yang memenuhi standar kelayakan sebagai tempat tinggal pengganti.
- d. Pendampingan: Memberikan sosialisasi dan dukungan kepada masyarakat terkait proses relokasi dan adaptasi ke lingkungan baru.

4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat, pemerintah daerah diwajibkan untuk menetapkan target pencapaian SPM selama kurun waktu tertentu. Pemerintah Kota Tarakan menetapkan target 100 persen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum layak untuk kebutuhan sehari-hari dan Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan sanitasi yang lebih baik.

Perhitungan pembiayaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tarakan melalui Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan harus memperhatikan beberapa komponen penting sesuai dengan panduan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023. Berikut adalah langkahlangkah dan komponen perhitungan pembiayaan:

- 1) Penyediaan Rumah Layak Huni
 - a) Komponen Biaya:
 - i. Fasilitasi pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin.
 - ii. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana.
 - iii. Subsidi uang sewa bagi masyarakat yang terkena program relokasi.
 - b) Indikator Perhitungan:
 - i. Jumlah rumah tangga sasaran yang membutuhkan intervensi.
 - ii. Kondisi fisik rumah eksisting.

c) Estimasi Biaya:

Berdasarkan standar harga bahan bangunan dan tenaga kerja di wilayah setempat.

Tabel 4.21
Target Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani	100%
2	Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	Rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni	100%

4.4.3 Realisasi

Penyediaan rumah yang layak huni bagi korban bencana serta masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk layanan dasar yang harus dipenuhi sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa masyarakat terdampak mendapatkan hunian yang layak sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar mereka. Tabel berikut menyajikan indikator pencapaian layanan yang mencakup jumlah penerima manfaat, tingkat keterlayanan, serta aspek mutu layanan yang telah dicapai.

Tabel 4.22

Realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00 %
	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)					6571
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)					80.00 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	17	17	0	100.00 %
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					100.00 %
	1 Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	17	17	0	100.00 %
	2 Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	100.00 %
	3 Pemukiman kembali bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	100.00 %
	4 Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	187	0	187	100.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					100.00 %
	Ada Relokasi Program Pemerintah					6571
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)					80
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	17	17	0	100.00%
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					100.00 %
	Kategori Indeks Pencapaian SPM					100.00 %

Sumber : Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, 2026

4.4.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk urusan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan bertujuan untuk mendukung penyediaan hunian yang layak, pengelolaan kawasan permukiman yang tertata, serta penataan pertanahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Anggaran ini dialokasikan untuk mendukung berbagai program strategis, seperti pembangunan rumah layak huni, peningkatan kualitas permukiman, serta pengelolaan aset pertanahan guna menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Tabel 4.23

Alokasi anggaran SPM Urusan Perumahan Rakyat

No	Pendanaan	Pagu
(1)	(2)	(3)
1	APBD Kota Tarakan	1,176,463,228,204
2	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	58,680,718,649
3	Alokasi Anggaran Penerapan Spm Pada Satker PD	251,999,100
	APBD	251,999,100
	A APBD Murni	251,999,100
	B APBD Dau	0
	C APBD Dak Fisik	0
	D Apbd Dak Non Fisik	0
	E Dana Bagi Hasil	0
	F Kerjasama	0
	G Otonomi Khusus	0
	Non APBD	0
	A Corporate Social Responsibility (CSR)	0
	APBN	0
	B APBNDekonsentrasi	0
	C APBNTugas Pembantuan	0
	Dana Lainnya	0

Sumber : Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, 2026

Alokasi anggaran yang tercantum dalam tabel menunjukkan sumber dan distribusi pendanaan di Kota Tarakan. Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tarakan mencapai Rp1,176,463,228,204, dengan sebagian dialokasikan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (Satker PD) sebesar Rp251,999,100. Anggaran ini sepenuhnya bersumber dari APBD Murni, tanpa adanya kontribusi dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun nonfisik, Dana Bagi Hasil, maupun bentuk

pendanaan lainnya seperti kerjasama dan otonomi khusus. Selain itu, tidak terdapat pendanaan dari sumber di luar APBD, seperti Corporate Social Responsibility (CSR), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maupun dana lainnya.

Alokasi anggaran untuk Satker PD dan penerapan SPM masih sangat kecil jika dibandingkan dengan total APBD Kota Tarakan. Hal ini mengindikasikan adanya keterbatasan pendanaan dalam pelaksanaan program-program strategis yang berhubungan dengan pelayanan dasar masyarakat. Selain itu, ketergantungan penuh pada APBD Murni menunjukkan bahwa belum ada eksplorasi terhadap potensi pendanaan alternatif yang dapat mendukung optimalisasi program. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan strategi diversifikasi pendanaan, baik melalui sinergi dengan pemerintah pusat, kerja sama dengan sektor swasta, maupun pemanfaatan hibah dan bantuan dari berbagai sumber. Dengan pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan berorientasi pada prioritas pembangunan, diharapkan pelayanan publik di Kota Tarakan dapat semakin optimal dan berkelanjutan.

4.4.5 Dukungan Personil

Untuk kelancaran semua kegiatan kedinasan OPD ini diperlukan personil yang handal dan mempunyai kualifikasi pendidikan dan golongan disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan. Adapun kualifikasi pendidikan dan golongan personil dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.24

Dukungan Personil SPM Permukiman dan Perumahan Rakyat

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan / Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	6	5	29	40

Sumber : Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan 2026, diolah

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Penanggulangan bencana merupakan proses yang kompleks dan memerlukan perencanaan yang matang serta koordinasi antara berbagai instansi terkait. Dalam implementasinya, terdapat sejumlah kendala yang harus diatasi, mulai dari pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, perencanaan dan penganggaran, hingga pelaksanaan rehabilitasi dan relokasi korban bencana.

Tabel berikut merangkum berbagai permasalahan yang dihadapi dalam setiap tahapan penanggulangan bencana serta solusi yang dapat diterapkan. Beberapa tantangan utama meliputi keterbatasan akses data bencana yang lebih banyak dikelola oleh BPBD, kurangnya anggaran untuk perhitungan kebutuhan secara menyeluruh, hingga belum tersedianya alokasi anggaran untuk relokasi korban bencana. Untuk mengatasi kendala ini, berbagai strategi diusulkan, seperti pengembangan sistem berbagi data antarinstansi, peningkatan kapasitas SDM dalam perhitungan kebutuhan, serta penguatan anggaran melalui kerja sama dengan pemerintah pusat dan sektor swasta.

Melalui identifikasi permasalahan dan solusi yang tepat, diharapkan proses penanggulangan bencana dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran, sehingga dampak bencana terhadap masyarakat dapat diminimalkan.

Tabel 4.25

Permasalahan dan Solusi SPM Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengumpulan Data	Prediksi kebencanaan di bidang perumahan yang bersifat dinamis	Estimasi berdasarkan data dan koordinasi dengan pihak berwenang
		Keterbatasan dan kualitas data serta keterbatasan SDM	Penggunaan teknologi/pertisipasi masyarakat lain seperti CSR.
			Peningkatan Kapasitas
		Data luasan lahan yang akan disertifikasi masih terdapat ketidak sesuaian dengan data awal	Verifikasi intensif, koordinasi, survay dan pemetaan ulang serta tilas balik asal lahan
		Keterbatasan jumlah sasaran penerima bantuan PSU yang memenuhi kreteria sesuai aturan	Mensosialisasikan syarat atau krteteria serta mengusulkan calon penerima bantuan PSU
2	Perhitungan Kebutuhan	Ketidaktepatan perhitungan dengan menghitung yang belum terjadi	Floting anggaran yang tersendiri
		Dinamisnya data sehingga berdampak pada keakuratan dan ketersediaan data	Peningkatan partisipasi masyarakat dan peningkatan pengalokasian sumber daya secara efektif
3	Perencanaan dan Penganggaran	Kurangnya anggaran untuk peningkatan SDM untuk bencana dan koordinasi lintas sektor	Penyiapan anggaran sesuai perencanaan
		Belum optimalnya partisipasi masyarakat dan pengalokasian anggaran yang sesuai dan tepat	Pengembangan sisitem koperasi yang tepat dalam perencanaan dan

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Pelaksanaan		penganggaran untuk mengatasi program kumuh
		Jumlah yang direncanakan belum sesuai dengan yang dianggarkan	Penetapan target yang sesuai dengan anggaran
		Jumlah sasaran penerima bantuan PSU yang kurang tersedia serta penganggaran yang disediakan melalui APBN tidak dianggarkan	Merencanakan dan mengusulkan penganggaran di pemerintah pusat dengan sasaran yang telah memenuhi kriteria/syarat
		Kondisi riil dilapangan yang tidak berkesesuaian dengan anggaran yang tersedia baik dari sisi jumlah dan kasus dan kejadian lainnya	Menyesuaikan kebijakan/peraturan yang telah ada : Perwali No 17 tahun 2024 atau menentukan SK Walikota
		Proses Sertifikasi dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional serta lembaga Otoritas Penerbit Sertifikat Tanah	Mengusulkan koordinasi terkait serifikasi lebih intens
		Peraturan dan kebijakan yang mengatur lebih detail/ketat terkait pertanahan	Melengkapi syarat-syarat yang dipenuhi
		Tidak tersedianya penerima bantuan PSU yang memenuhi kriteria atau syara	Inventarisasi dan identifikasi calon sasaran penerima PSU yang memenuhi syarat / kriteria
		Belum optimalnya partisipasi tokoh masyarakat untuk keberlanjutan penghapusan kekumuhan	Koordinasi atar lembaga dan masarakat serta peran masyarakat

Sumber : Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, 2026

4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat memiliki fungsi utama untuk menjamin rasa aman, ketertiban, dan perlindungan bagi masyarakat melalui layanan yang sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan. Fungsi tersebut meliputi:

- a. Mewujudkan Keamanan dan Ketenteraman Masyarakat
- b. Meningkatkan Ketertiban Umum
- c. Melindungi Masyarakat dari Risiko dan Bencana
- d. Peningkatan Kapasitas Aparatur
- e. Memberikan Edukasi kepada Masyarakat
- f. Menjamin Penegakan Hukum yang Humanis

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, maka ditetapkan 5 jenis pelayanan dasar Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan 5 Indikator SPM seperti yang terlihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 4.26

**Jenis Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pengaduan yang ditangani	Pengaduan masyarakat meliputi berbagai isu keamanan dan ketertiban umum, seperti keributan, konflik masyarakat, atau pelanggaran ketertiban di ruang publik.
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Informasi disampaikan melalui media komunikasi seperti sosialisasi, aplikasi, papan informasi, atau sistem peringatan dini untuk daerah rawan bencana.
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Layanan ini mencakup pelatihan masyarakat, simulasi kebencanaan, dan penyediaan sarana kesiapsiagaan seperti alat deteksi dini dan jalur evakuasi.
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Penanganan meliputi penyelamatan korban, evakuasi ke lokasi aman, serta penyediaan tempat penampungan sementara bagi korban bencana alam atau buatan manusia.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran tingkat waktu tanggap + jumlah layanan pemadaman dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan perangkat daerah	Layanan melibatkan pemadaman kebakaran secara cepat, penyelamatan korban, serta evakuasi barang dan warga terdampak, dilakukan oleh petugas atau relawan resmi.

Sumber : Satpol PP dan BPBD, 2026

Layanan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara menangani pengaduan masyarakat terkait isuisu keamanan, seperti keributan, konflik sosial, dan pelanggaran peraturan daerah. Contohnya adalah pengaduan terkait pelanggaran ketertiban di jalan raya, aksi unjuk rasa yang mengganggu ketertiban, atau gangguan lingkungan lainnya.

Layanan Pelayanan Informasi Rawan Bencana memberikan informasi kepada masyarakat tentang wilayah rawan bencana dan langkah pencegahan yang harus dilakukan. Informasi disebarluaskan melalui berbagai media, seperti papan pengumuman, aplikasi digital, sistem peringatan dini, atau melalui sosialisasi langsung ke masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi bencana di daerah kota Tarakan.

Layanan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana mencakup kegiatan edukasi dan pelatihan untuk masyarakat agar siap menghadapi bencana. Misalnya, simulasi evakuasi, pelatihan penggunaan alat keselamatan, dan pembentukan tim

relawan tanggap bencana. Selain itu, penyediaan sarana dan prasarana seperti jalur evakuasi, alat deteksi dini, dan lokasi pengungsian juga menjadi bagian dari layanan ini.

Layanan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana berfokus pada upaya penyelamatan korban bencana dan evakuasi ke tempat yang aman. Kegiatan ini mencakup pengangkutan korban dari lokasi berbahaya, pengelolaan tempat pengungsian sementara, serta penyediaan kebutuhan darurat seperti makanan, air bersih, dan obatobatan bagi korban bencana alam seperti banjir, tanah longsor, atau gempa bumi.

Layanan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran melibatkan respons cepat terhadap kejadian kebakaran, baik yang terjadi di kawasan permukiman, tempat usaha, maupun wilayah alam seperti hutan. Kegiatan meliputi pemadaman api, penyelamatan korban yang terjebak, serta evakuasi barang berharga. Pelayanan ini dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran yang dilengkapi dengan peralatan khusus, serta relawan yang dibina oleh pemerintah daerah untuk membantu dalam situasi darurat.

4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, pemerintah daerah diwajibkan untuk menetapkan target pencapaian SPM selama kurun waktu tertentu. Pemerintah Kota Tarakan menetapkan target 100 persen untuk memberikan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat secara optimal, sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah Kota Tarakan dalam melindungi warganya.

Perhitungan pembiayaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tarakan melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran harus memperhatikan beberapa komponen penting sesuai dengan panduan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018. Berikut adalah Langkah-langkah dan komponen perhitungan pembiayaan:

1) Identifikasi Jenis Layanan Dasar

Dinas Ketenteraman dan Ketertiban Umum menentukan jenis layanan dasar yang wajib dipenuhi, seperti:

- a) Penanganan pengaduan ketenteraman dan ketertiban umum.
- b) Penyebaran informasi terkait rawan bencana dan keadaan darurat.
- c) Penyediaan layanan pencegahan, penyelamatan, dan evakuasi saat terjadi bencana atau kebakaran.

2) Penentuan Standar Pelayanan

Mengacu pada indikator Standar Teknis Mutu yang diatur dalam Permendagri No. 121 Tahun 2018, seperti:

- a) Jumlah pengaduan yang ditangani dalam jangka waktu tertentu.
- b) Waktu tanggap layanan penyelamatan dan evakuasi.
- c) Jumlah masyarakat yang menerima informasi atau pelatihan kesiapsiagaan.

3) Perhitungan Kebutuhan Anggaran

Pemerintah Kota Tarakan menghitung kebutuhan pembiayaan berdasarkan Jumlah sumber daya manusia (SDM) yang dialokasi biaya untuk personel keamanan, relawan, dan petugas pemadam kebakaran, termasuk pelatihan dan honor.

4) Sarana dan prasarana:

Pengadaan dan pemeliharaan fasilitas seperti

- a) Alat pemadam kebakaran.
 - b) Sistem peringatan dini.
 - c) Kendaraan operasional.
 - d) Peralatan evakuasi dan penyelamatan.
- 5) Kegiatan operasional
- Anggaran untuk kegiatan seperti penyuluhan, simulasi bencana, dan penyebaran informasi kepada masyarakat.

Tabel 4.27
Target Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pengaduan yang ditangani	100%
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran tingkat waktu tanggap + jumlah layanan pemadaman dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan perangkat daerah	100%

Sumber : Satpol PP dan BPBD, 2026

4.5.3 Realisasi

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas dan keselamatan masyarakat. Analisis terhadap realisasi SPM di Kota Tarakan, khususnya dalam aspek ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum), kebencanaan, serta pemadam kebakaran (Damkar) bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana capaian layanan telah memenuhi target yang telah ditetapkan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas layanan di Kota Tarakan.

Tabel 4.28

**Realisasi SPM Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketenteraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)					100,00 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)					80.00 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	200	200	0	100.00 %
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)					20,00 %
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					100,00 %
	1 Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)	Unit	34	34	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM		Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
				Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	2	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)	Dokumen	28	28	0	100.00 %
	3	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	Orang	164	164	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM		Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
				Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	4	Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	Dokumen	1	1	0	100.00 %
	5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	Orang	0	0	0	100.00 %
	6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	Orang	0	0	0	100.00 %
	Kategori Pencapaian SPM KEBENCANAAN						97,96 %
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)						100.00 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)						80.00 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		Orang	746	746	0	100.00 %
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)						20.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM		Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
				Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi						100.00 %
	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana					100.00 %
	a	Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	1	1	0	100.00 %
	b	Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	dokumen	2	2	0	100.00 %
	c	Tersedianya Berita Acara Asistensi yang ditandatangani BNPB (minimal 3)	orang	3	3	0	100.00 %
	d	Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusunan KRB (sesuai dengan kebutuhan)	orang	6	6	0	100,00 %
	e	Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang	3	3	0	100,00 %
	2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana					100,00 %
	1	Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana					100,00 %
	a	Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	eksemplar	746	746	0	100,00 %
	b	Terlaksananya sosialisasi tatap muka	desa	5	5	0	100,00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM		Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
				Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	c	Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	orang	7	7	0	100,00 %
	d	Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	5	0	100,00 %
	2)	Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia					100,00 %
		Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	Media	4	4	0	100,00 %
		Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	4	4	0	100,00 %
		Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	2	2	0	100,00 %
		Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	4	4	0	100,00 %
		Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	4	4	0	100,00 %
	3)	Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik					100,00 %
		Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	36	36	0	100,00 %
		Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	20	20	0	100,00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM		Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
				Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.		Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	6	6	0	100,00 %
		Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	3	3	0	100,00 %
		Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	3	3	0	100,00 %
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)						93,89 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)						80,00 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		Orang	385	385	0	100,00 %
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)						13,89 %
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi						69,44 %
	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana		0	0	0	0,00 %
	2	Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)		0	0	0	100,00 %
	a	Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	0	100,00 %
	b	Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	dokumen	2	2	0	100,00 %
	c	Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	orang	50	50	0	100,00 %
	d	Tersedianya Penyelenggara Diskusi	orang	20	20	0	100,00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM		Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
				Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Publik (sesuai dengan kebutuhan)					
	3	Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi					91,67 %
	1)	Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur					83,33 %
	a	Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	4	4	0	100,00 %
	b	Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	8	8	0	100,00 %
	c	Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	175	175	0	100,00 %
	d	Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	0,00 %
	e	Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	8	8	0	100,00 %
	f	Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	14	14	0	100,00 %
	2)	Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara					100,00 %
	a	Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	5	5	0	100,00 %
	b	Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	2	2	0	100,00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM		Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
				Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	c	Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	60	60	0	100,00 %
	d	Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	2	2	0	100,00 %
	e	Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	5	0	100,00 %
	4	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana					100,00 %
	1)	Simulasi Dalam Ruangan (Table-Top Exercise)					100,00 %
	a	Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	0	0	0	100,00 %
	b	Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	0	0	0	100,00 %
	c	Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	0	0	0	100,00 %
	2)	Gladi Lapang					100,00 %
	a	Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	2	2	0	100,00 %
	b	Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	54	54	0	100,00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM		Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
				Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	c	Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	48	48	0	100,00 %
	5	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana					100,00 %
	1)	Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana					100,00 %
	a	Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	hari	365	365	0	100,00 %
	b	Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Pertemuan	3	3	0	100,00 %
	c	Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	Orang	1	1	0	100,00 %
	d	Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2	2	0	100,00 %
	e	Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	4	4	0	100,00 %
	2)	Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana					100,00 %
	a	Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	0	0	0	100,00 %
	b	Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama	Unit	0	0	0	100,00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM		Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
				Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		(sesuai dengan kebutuhan)					
	c	Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	0	0	0	100,00 %
	d	Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	0	0	0	100,00 %
	3)	Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast					100,00 %
	a	Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1	1	0	100,00 %
	b	Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1	1	0	100,00 %
	4)	Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat					100,00 %
	a	Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	100,00 %
	b	Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	0	0	0	100,00 %
	6	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana					25,00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM		Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
				Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	a	Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	15	15	0	100,00 %
	b	Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	0	0	0	100,00 %
	c	Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	0	0	0	100,00 %
	d	Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	0	0	0	100,00 %
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)						100.00 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)						80.00 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		Orang	0	0	0	0.00 %
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)						20.00 %
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi						100.00 %
	Kategori Pencapaian SPM KEBENCANAAN						93,89 %
1.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)						100.00 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)						80.00 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		Orang	70	70	0	100.00 %
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)						20.00 %
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi						100.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM		Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
				Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	1	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	Layanan	60	60	0	100.00 %
	2	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	11	11	0	100.00 %
	3	Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	Unit	181	181	0	100.00 %
	4	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	Orang	70	70	0	100.00 %
	5	Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Orang	10	11	-1	100.00 %
	6	Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	Orang	10	0	10	100.00 %
	Kategori Pencapaian SPM DAMKAR						100.00 %

Sumber : Satpol PP dan BPBD, 2026

4.5.4 Alokasi Anggaran

Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu urusan pemerintahan yang membutuhkan dukungan anggaran yang memadai untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program.

Tabel 4.29

**Alokasi Anggaran SPM Urusan Ketenteraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

No	Pendanaan	Pagu
(1)	(2)	(3)
1	APBD Kota Tarakan	1,176,463,228,204
2	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	8,512,572,661
3	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker PD	1,872,384,770
	APBD	1,872,384,770
	A APBD Murni	1,872,384,770
	B APBD Dau	0
	C APBD Dak Fisik	0
	D Apbd Dak Non Fisik	0
	E Dana Bagi Hasil	0
	F Kerjasama	0
	G Otonomi Khusus	0
	Non APBD	0
	A Corporate Social Responsibility (CSR)	0
	APBN	0
	B APBNDekonsentrasi	0
	C APBNTugas Pembantuan	0
	Dana Lainnya	0

Sumber : Satpol PP dan BPBD, 2026

berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa seluruh pendanaan bersumber dari APBD Murni Kota Tarakan untuk penerapan Standar

Pelayanan Minimal (SPM) dalam urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

4.5.5 Dukungan Personil

Untuk mencapai hasil yang diinginkan khususnya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan diperlukan sumber daya manusia atau personil yang mempunyai kualifikasi pendidikan yang sesuai seperti yang tergambar pada tabel berikut:

Tabel 4.30
Dukungan Personil Urusan Ketentraman dan
Ketertiban Umum

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan / Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	13	27	191	231
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Urusan Penanggulangan Bencana	10	0	26	36

Sumber : Satpol PP dan BPBD, 2026

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, pencatatan dan pengisian data menjadi aspek krusial yang menentukan keberhasilan administrasi dan pengambilan keputusan. Namun, berbagai kendala masih ditemukan dalam tahapan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan.

Tabel berikut merangkum permasalahan yang dihadapi dalam setiap tahapan, terutama terkait kesulitan dalam menemukan data

kependudukan secara akurat, kurangnya pemahaman dalam pengisian formulir tahapan, serta kendala teknis dalam penggunaan form digital. Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa solusi yang diusulkan antara lain integrasi data kependudukan dengan Dukcapil, pelatihan bagi petugas terkait, serta pengembangan form digital yang lebih userfriendly dengan sistem otomatisasi.

Dengan penerapan solusi yang tepat, diharapkan proses administrasi dapat berjalan lebih efisien, data yang dikumpulkan lebih akurat, serta perencanaan dan penganggaran dapat dilakukan secara lebih optimal dan transparan.

Tabel 4.31

**Permasalahan dan Solusi SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban
Umum dan Perlindungan Masyarakat**

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengumpulan Data	Sulitnya menemukan data kependudukan by name by address.	Mengembangkan pemanfaatan teknologi digital terintegrasi untuk pendataan langsung dari lapangan
			Melakukan validasi data secara berkala
		Data terintegrasi tidak antar instansi	Menyatukan data dari perangkat daerah dan instansi vertikal agar konsisten dan mudah diakses
		Data sering tidak terpilah	Menggunakan data terpilah untuk memastikan inklusivitas
2	Perhitungan Kebutuhan	Kurangnya pemahaman terkait pengisian form tahapan.	Melakukan pelatihan atau sosialisasi kepada petugas teknis
			Mengembangkan teknologi untuk memudahkan dalam pengisian form di aplikasi
		Keterbatasan kapasitas SDM	Melatih aparat BPBD dan dinas terkait dalam <i>perhitungan kebutuhan</i> berbasis data
3	Perencanaan dan Penganggaran	Keterbatasan sarana dan prasarana untuk memenuhi target pelayanan dasar seperti ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan Masyarakat	Memenuhi target SPM dengan memfasilitasi sarana dan prasarana yang memadai

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)
		kekurangan sumber daya manusia pelaksanaan SPM baik di lapangan maupun administrasi	Melakukan bimbingan teknis bagi staf terkait dalam pengisian form perencanaan dan penganggaran
		Dana APBD lebih banyak terserap untuk pembangunan fisik, sementara anggaran kesiapsiagaan bencana sering dianggap sekunder	Peningkatan Alokasi Dana Kesiapsiagaan
4	Pelaksanaan	Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan, tetapi menjadi masalah ketika dalam	Peningkatkan profesionalisme, pelatihan teknis, serta peningkatan komitmen pimpinan sangat krusial untuk memperbaiki capaian SPM
		Semua kelompok masyarakat, terutama yang kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan komunitas miskin belum sepenuhnya terlibat dalam simulasi, pelatihan, atau penyusunan rencana kesiapsiagaan	Pelibatan aktif Masyarakat berbasis inklusif dalam simulasi, pelatihan, atau penyusunan rencana kesiapsiagaan

Sumber : Satpol PP dan BPBD, 2026

4.6 Urusan Sosial

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial memiliki fungsi utama sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan dasar di bidang sosial oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Fungsi utama SPM di bidang sosial meliputi:

- a. Memberikan Jaminan Perlindungan Sosial
- b. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial
- c. Menyediakan Standar Kualitas Pelayanan
- d. Mencegah dan Menanggulangi Masalah Sosial
- e. Menjamin Keberlanjutan dan Kesetaraan Pelayanan

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial, maka ditetapkan 5 jenis pelayanan dasar sosial dengan 5 Indikator SPM seperti yang terlihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 4.32

Jenis Pelayanan Dasar Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti rehabilitasi sosial	Pelayanan diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan layanan kesehatan dasar.
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Pelayanan difokuskan untuk anak terlantar yang membutuhkan akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial di luar panti.
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial	Fokus layanan ini adalah memenuhi kebutuhan dasar lansia terlantar seperti makanan, kesehatan, dan perlindungan di luar panti.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Pelayanan bertujuan memberikan tempat tinggal sementara, makanan, dan layanan rehabilitasi bagi gelandangan dan pengemis di luar panti.
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Paska Bencana bagi Korban Bencana Kab/Kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	Pelayanan meliputi bantuan darurat seperti makanan, tempat tinggal sementara, dan perlengkapan dasar selama tanggap darurat dan pemulihan pascabencana.

Sumber : Dinas Sosial, 2026

4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, pemerintah daerah diwajibkan untuk menetapkan target pencapaian SPM selama kurun waktu tertentu. Pemerintah Kota Tarakan menetapkan target 100 persen untuk memenuhi standar teknis dan kebutuhan dasar masyarakat, sesuai amanat undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Perhitungan pembiayaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tarakan melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat harus memperhatikan beberapa komponen penting sesuai dengan panduan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018. Berikut adalah langkahlangkah dan komponen perhitungan pembiayaan.

1) Penetapan Jenis Layanan Dasar

Pemerintah Kota Tarakan melalui Dinas Sosial mengidentifikasi kebutuhan untuk:

- a) Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar.
- b) Rehabilitasi sosial anak terlantar.
- c) Rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar.
- d) Rehabilitasi sosial tuna sosial seperti gelandangan dan pengemis.
- e) Perlindungan dan jaminan sosial untuk korban bencana alam atau sosial.

2) Penentuan Standar Teknis dan Unit Biaya

Mengacu pada Permensos Nomor 9 Tahun 2018, standar teknis meliputi:

- a) Kebutuhan dasar yang harus dipenuhi (makanan, tempat tinggal, layanan kesehatan, dll.).
- b) Standar waktu pelayanan (misalnya harian, bulanan, atau tahunan).
- c) Biaya per unit pelayanan, termasuk biaya administrasi dan operasional.

Tabel 4.33**Target Pencapaian SPM**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti rehabilitasi sosial	100 %
2	Rehabilitasi Sosial Dasar	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi	100 %

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Anak Terlantar di Luar Panti	kebutuhan dasarnya di luar panti	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial	100 %
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Paska Bencana bagi Korban Bencana Kab/Kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	100 %

Sumber : Dinas Sosial, 2026

4.6.3 Realisasi

Pelaksanaan layanan ini bertujuan untuk memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang digunakan dalam laporan ini meliputi jumlah individu yang harus dilayani, jumlah individu yang telah terlayani, serta persentase pencapaian layanan yang dicapai.

Hasil dari pelaksanaan layanan ini menunjukkan tingkat pencapaian yang sangat baik, dengan mayoritas indikator mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini

mencerminkan seluruh target yang harus dilayani telah terpenuhi tanpa ada penerima manfaat yang tidak terlayani.

A. Kelengkapan dan Mutu Layanan

1. Pencapaian penerima layanan dasar mencapai 80 persen, sesuai dengan standar minimal layanan.
2. Mutu minimal layanan dasar sebesar 20 persen juga telah dicapai, menunjukkan bahwa aspek kualitas layanan tetap diperhatikan.
3. Seluruh jenis layanan seperti penyediaan data dan pengaduan, layanan kedaruratan, bantuan permukiman, sandang, alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan sosial, fasilitasi dokumen kependudukan, hingga reunifikasi keluarga sudah terlaksana secara penuh.

B. Konsistensi di Semua Kategori

1. Tidak ada kategori layanan yang memiliki pencapaian di bawah standar, menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan yang baik.
2. Penyediaan layanan yang lebih kompleks seperti reunifikasi keluarga dan akses pendidikan/kesehatan juga sudah mencapai target.

C. Implikasi dan Evaluasi

1. Keberhasilan 100 persen ini menunjukkan efektivitas dalam implementasi kebijakan sosial di Kota Tarakan.
2. Namun, evaluasi tetap diperlukan untuk memastikan layanan ini berkelanjutan, terutama dalam aspek mutu layanan.

3. Perlu dilakukan pemantauan lebih lanjut untuk melihat apakah layanan yang diberikan berdampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan sosial kelompok sasaran.

Berikut adalah realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial di Kota Tarakan dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 4.34
Realisasi SPM Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti					100.00 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)					80.00 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	10	10	0	100.00 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM					100.00 %
1	Layanan data dan pengaduan	Orang	10	10	0	100.00 %
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	10	10	0	100.00 %
3	Penyediaan permakanan	Orang	10	10	0	100.00 %
4	Penyediaan sandang	Orang	4	4	-8	100.00 %
5	Penyediaan alat bantu	Orang	10	18	0	100.00 %
6	Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	10	10	0	100.00 %
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	10	10	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
				Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	10	10	0	100.00 %
	9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	10	10	0	100.00 %
	10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	10	10	0	100.00 %
	11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	10	10	0	100.00 %
	12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	5	5	0	100.00 %
	13	Layanan rujukan	Orang	10	10	0	100.00 %
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti						100.00 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)						80.00 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		Orang	8	8	0	100.00 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)						20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM						100.00 %
	1	Layanan data dan pengaduan	Orang	8	8	0	100.00 %
	2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	8	8	0	100.00 %
	3	Penyediaan permakanan	Orang	8	8	0	100.00 %
	4	Penyediaan sandang	Orang	4	4	0	100.00 %
	5	Penyediaan perbekalan kesehatan di luar Panti	Orang	8	8	0	100.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
				Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	8	8	0	100.00 %
	7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	8	8	0	100.00 %
	8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	8	8	0	100.00 %
	9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	8	8	0	100.00 %
	10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	8	8	0	100.00 %
	11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	3	3	0	100.00 %
	12	Layanan rujukan	Orang	8	8	0	100.00 %
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti						100.00 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)			Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		Orang	13	14	-1	100.00 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)						20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM						100.00 %
	1	Layanan data dan pengaduan	Orang	13	14	-1	100.00 %
	2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	13	14	-1	100.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
				Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	3	Penyediaan permakanan	Orang	13	13	0	100.00 %
	4	Penyediaan sandang	Orang	4	4	0	100.00 %
	5	Penyediaan alat bantu	Orang	13	29	0	100.00 %
	6	Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	13	14	-1	100.00 %
	7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	13	14	-1	100.00 %
	8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang	13	14	-1	100.00 %
	9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	13	14	-1	100.00 %
	10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	13	14	-1	100.00 %
	11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	13	14	-1	100.00 %
	12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	5	5	0	100.00 %
	13	Layanan rujukan	Orang	13	14	-1	100.00 %
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti						99,33 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)						80.00 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		Orang	25	37	-12	100.00 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)						19,33 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
				Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM						96,67 %
	1	Layanan data dan pengaduan	Orang	25	37	-12	100.00 %
	2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	25	37	-12	100.00 %
	3	Penyediaan permakanan	Orang	25	25	0	100.00 %
	4	Penyediaan sandang	Orang	4	4	0	100.00 %
	5	Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	25	37	-12	100.00 %
	6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	25	37	-12	100.00 %
	7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	25	37	-12	100.00 %
	8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	25	37	-12	100.00 %
	9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	25	37	-12	100.00 %
	10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	25	37	-12	100.00 %
	11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	10	6	4	60.00 %
	12	Layanan rujukan	Orang	25	25	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)					80.00 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	45	192	-147	100.00 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM					100.00 %
	1 Penyediaan permakanan	Orang	45	192	-147	100.00 %
	2 Penyediaan sandang	Orang	45	192	-147	100.00 %
	3 Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	45	192	-147	100.00 %
	4 Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	45	132	-87	100.00 %
	5 Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	45	192	-147	100.00 %
	Kategori Indeks Pencapaian SPM					99,87 %

Sumber : Dinas Sosial, 2026

4.6.4 Alokasi Anggaran

Urusan sosial di Kota Tarakan berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak terlantar. Berdasarkan data alokasi pendanaan, total anggaran yang dialokasikan untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam urusan sosial mencapai Rp246.992.129.

Tabel 4.35
Alokasi Anggaran SPM Urusan Sosial

No	Pendanaan	Pagu
(1)	(2)	(3)
1	APBD Kota Tarakan	1,176,463,228,204
2	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	7,600,756,328
3	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker PD	262,867,212
	APBD	262,867,212
	A APBD Murni	262,867,212
	B APBD Dau	0
	C APBD Dak Fisik	0
	D Apbd Dak Non Fisik	0
	E Dana Bagi Hasil	0
	F Kerjasama	0
	G Otonomi Khusus	0
	Non APBD	0
	A Corporate Social Responsibility (CSR)	0
	APBN	0
	B APBNDekonsentrasi	0
	C APBNTugas Pembantuan	0
	Dana Lainnya	0

Sumber : Dinas Sosial, 2026

Seluruh pendanaan ini bersumber dari APBD Murni, tanpa adanya dukungan dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik, Dana Bagi Hasil, Kerjasama, maupun Otonomi Khusus. Selain itu, tidak terdapat pendanaan dari sumber NonAPBD seperti Corporate Social Responsibility (CSR) maupun dari APBN, baik melalui skema Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan.

Minimnya alokasi anggaran untuk urusan sosial menunjukkan adanya keterbatasan dalam penyediaan program dan layanan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Untuk meningkatkan efektivitas pelayanan sosial, pemerintah daerah perlu mengupayakan

sumber pendanaan tambahan, baik dari pemerintah pusat melalui APBN maupun dari sektor swasta melalui program CSR dan kemitraan. Dengan dukungan anggaran yang lebih memadai, program sosial dapat berjalan lebih optimal, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan.

4.6.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal

Tabel 4.36

Jumlah Dukungan Personil

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan / Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Urusan Sosial	6	3	42	51

Sumber : Dinas Sosial, 2026

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Setiap tahapan memiliki tantangan tersendiri yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelayanan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Tabel ini merinci permasalahan yang dihadapi dalam setiap tahap, mulai dari pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, hingga aspek lainlain yang turut mempengaruhi keberhasilan program sosial. Selain itu, tabel ini juga menyajikan berbagai solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi hambatan yang ada.

Dengan adanya identifikasi permasalahan dan solusi secara sistematis, diharapkan dapat membantu pemerintah daerah, dinas terkait, serta pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, meningkatkan koordinasi antarinstansi, serta mengoptimalkan sumber daya yang tersedia guna meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Kota Tarakan.

Tabel 4.37

Permasalahan Dan Solusi SPM Urusan Sosial

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengumpulan Data	Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tidak <i>update</i> atau tidak akurat (<i>by name by address</i>), Ada Beberapa Kelurahan Tidak Update Data	Terbatasnya validasi data lapangan dan kurangnya sinkronisasi data desa/kelurahan
		Data warga sasaran pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dll) tidak akurat, tidak <i>update</i> , atau tersebar di berbagai dinas.	Integrasi data (Satu Data Daerah), pemutakhiran data secara berkala, dan verifikasi lapangan secara serentak.
2	Perhitungan Kebutuhan	Kurangnya kapasitas SDM untuk memetakan kesenjangan (gap) antara capaian saat ini dengan target 100%.	Penguatan tim TPPS (Tim Penerapan Pelayanan Dasar).
3	Perencanaan dan Penganggaran	Rencana Aksi tidak terintegrasi dalam Dokumen Perencanaan Daerah (RKPD/Renstra) dan kurang anggaran.	Sinkronisasi RENAKSI SPM dengan Dokumen APBD, KUA-PPAS, dan RKPD/Renstra PD.
4	Pelaksanaan	Keterbatasan sarana/prasarana, SDM kompeten (terutama di daerah terpencil), dan anggaran.	Peningkatan komitmen tim pengampu SPM, pelaporan berkala triwulanan, dan penggunaan aplikasi/Sistem Informasi.
5	Lain-lain	Kurangnya kegiatan peningkatan kapasitas untuk petugas lapangan seperti TRC, Rehabilitasi Sosial, TKSM, dan TKSK.	Mengadakan pelatihan berkala bagi petugas lapangan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan mereka.
		Kurangnya SDM khususnya PNS di Seksi Rehabilitasi Sosial, sehingga satu orang PNS harus menangani seluruh tugas Rehsos.	Mengusulkan tambahan SDM, baik melalui pengangkatan ASN baru maupun tenaga kontrak.

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)
		Kurangnya koordinasi lintas OPD dalam penanganan PMKS di Kota Tarakan (TIMDU).	Mengoptimalkan koordinasi lintas OPD melalui pertemuan rutin dan pembentukan forum komunikasi khusus untuk penanganan PMKS.

Sumber : Dinas Sosial, 2026

4.7 Program dan Kegiatan

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kota Tarakan merupakan komitmen pemerintah daerah untuk memenuhi hak dasar masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. SPM berfungsi sebagai tolok ukur untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan layanan dasar yang layak, merata, dan berkualitas.

Sebagai salah satu kota strategis di Provinsi Kalimantan Utara, Kota Tarakan menghadapi tantangan dalam berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, program dan kegiatan yang dirancang oleh Pemerintah Kota Tarakan melalui perangkat daerahnya, termasuk dinas terkait, diarahkan untuk mendukung penerapan SPM guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Melalui perencanaan yang terintegrasi, pengalokasian anggaran yang tepat, dan sinergi antarstakeholder, pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa setiap indikator SPM dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga untuk menciptakan dampak positif yang nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan mereka yang membutuhkan layanan dasar secara langsung.

Pendekatan berbasis data, inovasi pelayanan, serta evaluasi secara berkala menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program SPM di Kota Tarakan. Dengan demikian, Pemerintah Kota Tarakan berharap dapat memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan demi mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Tabel 4.38
Urusan Pendidikan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Satuan	Perencanaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Pengelolaan Pendidikan			80,261,535,220	72,613,115,891	90.47
	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		5,493,110,445	4,053,428,904	73,79
	1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD / Sekolah Dasar / Sekolah Menengah Pertama / Nonformal/Kesetaraan	Peserta didik	2,008,550,000	1,855,075,000	92,36
	2	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	16,416,400	13,749,220	83,75
	3	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	40,000,000	38,628,000	96,57
	4	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	1,106,023,800	1,102,820,900	99,71
	5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	900,000,000	894,852,800	99,43
	6	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	1,234,000,000	0	0
	7	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	26,486,000	26,072,380	98,44
	8	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	10,004,800	9,710,000	97,05
	9	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten digital	21,841,400	18,036,764	82,58
	10	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	8,500,000	8,500,000	100,00
	11	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	8,699,000	8,020,000	92,19
	12	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	19,950,000	19,950,000	100,00
	13	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk	Orang	15,834,000	9,980,000	63,03

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Satuan	Perencanaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
		Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				
	14	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	25,905,500	20,818,840	80,36
	15	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	33,847,545	19,135,000	56,53
	16	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	17,052,000	8,080,000	47,48
2	Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama Sekolah			2,353,231,350	2,195,832,759	93,31
	1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	730,000,000	727,186,000	99.61
	2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta didik	1,404,153,450	1,309,096,602	93.23
	3	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	18,761,100	7,056,080	37.61
	4	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	40,653,000	40,645,000	99.98
	5	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	18,634,800	18,197,219	97.65
	6	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten digital	15,809,000	13,200,000	83.50
	7	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	26,757,100	23,218,840	86.78
	8	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	7,700,000	7,000,000	90.91
	9	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan pendidikan	29,919,400	20,955,398	70.04
	10	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk	Orang	10,814,800	8,000,000	73.97

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Satuan	Perencanaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
		Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				
	11	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	20,000,000	0	0.00
	12	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan pendidikan	17,741,200	11,427,620	64.41
	13	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Keluarga	12,287,500	9,850,000	80.16
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			1,641,251,250	1,563,148,143	95.24
	1	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	60,421,400	38,727,317	64.10
	2	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	546,016,000	544,169,000	99.66
	3	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	100,000,000	99,927,800	99.93
	4	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Paket	599,948,000	568,175,976	94.70
	5	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan pendidikan	232,000,000	232,000,000	100.00
	6	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten digital	21,607,400	15,292,380	70.77
	7	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	17,321,400	16,051,400	92.67
	8	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	20,291,350	18,777,340	92.54
	9	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	18,625,700	14,906,930	80.03
	10	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	25,020,000	15,120,000	60.43
4	Pendidikan Kesetaraan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi			2,565,456,020	2,444,442,764	95.28

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Satuan	Perencanaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
		Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				
	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	315,815,500	254,045,000	80.44
	5	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah		35,000,000	0	0.00
	1.	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota	Buku	35,000,000	0	0.00
Kegiatan Lainnya						
2	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Lainnya			70,423,126,675	64,546,661,085	92,00
1	Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa / SD			67,360,000.00	47,700,000.00	70.81
2	Pengadaan mabel sekolah			2,777,600,000.00	2,720,739,548.00	97.95
3	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			33,785,563,200.00	31,738,983,816.00	93.94
4	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar			4,006,500.00	2,200,000.00	54.91
5	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan / SD			8,857,000.00	0	0.00
6	Rehabilitasi sedang/berat sarana,prasarana dan utilitas sekolah			150,000,000.00	149,495,000.00	99.66
7	Pengadaan mebel			512,000,000.00	499,999,500.00	97.66
8	Pengadaan Perlengkapan Sekolah / SMP			82,301,500.00	75,494,210.00	91.73
9	Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa / SMP			248,357,300.00	170,035,353.00	68.46
10	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			20,270,970,600.00	16,930,211,968.00	83.52
11	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Pertama			3,780,000.00	0	0.00
12	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan / SMP			8,230,000.00	0	0.00
13	Pengelolaan Dana BOP PAUD			8,778,831,600.00	8,554,047,370.00	97.44
14	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD			8,345,000.00	7,223,180.00	86.56

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi		23,233,100.00	22,313,340.00	96.04
16	Penyediaan Biaya Personel Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan		83,256,025.00	45,500,000.00	54.65
17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan		31,711,350.00	31,086,240.00	98.03
18	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		3,365,787,600.00	3,359,596,760.00	99.82
19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		27,436,300.00	25,476,200.00	92.86
20	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		15,988,950.00	12,291,600.00	76.88
21	Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan		16,551,450.00	13,141,600.00	79.40
22	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		37,512,200.00	33,501,400.00	89.31
23	Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		43,189,000.00	40,884,000.00	94.66
24	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		29,658,000.00	24,740,000.00	83.42
25	Pengendalian dan Pengawasan Peirzinan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat		42,600,000.00	42,000,000.00	98.59

Tabel 4.39

Urusan Kesehatan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		1,847,418,240	1,622,475,548	87.82
1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1,847,418,240	1,622,475,548	87.82
1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	541,015,332	525,393,842	97.11
2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	56,014,400	51,050,400	91.14

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Satuan	Perencanaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	100,200,000	97,412,923	97.22
	4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	110,399,600	106,994,592	96.92
	5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	359,600,000	317,259,800	88.23
	6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	141,736,290	95,900,746	67.66
	7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	112,493,650	93,344,580	82.98
	8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	38,772,138	16,290,720	42.02
	9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	50,000,000	49,635,491	99.27
	10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	145,989,080	124,098,704	85.01
	11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	84,655,000	48,825,000	57.68
	12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	106,542,750	96,268,750	90.36
	Jumlah Indikator			1,847,418,240	1,622,475,548	87.82
	Jumlah Program			1,847,418,240	1,622,475,548	87.82
2	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Lainnya					
Tidak Ada Data Kegiatan Lainnya						

Tabel 4.40
Urusan Pekerjaan Umum

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		1,745,205,200	1,737,493,470	99.56
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		1,745,205,200	1,737,493,470	99.56
1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen	0,00	0,00	0,00
2	Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Dokumen	0,00	0,00	0,00
3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	0,00	0,00	0,00
4	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	0,00	0,00	0,00
5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	0,00	0,00	0,00
6	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Liter/Detik	0,00	0,00	0,00
7	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	SR	0,00	0,00	0,00
8	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	0,00	0,00	0,00
9	Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum	Penyelenggara SPAM	0,00	0,00	0,00
10	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha	0,00	0,00	0,00
11	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00
12	Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit	0,00	0,00	0,00
13	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit	0,00	0,00	0,00
14	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM	Penyelenggara SPAM	0,00	0,00	0,00
15	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	Unit	0,00	0,00	0,00
16	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	Unit	0,00	0,00	0,00
17	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Satuan	Perencanaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	18	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		0,00	0,00	0,00
	19	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		0,00	0,00	0,00
	20	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Unit	0,00	0,00	0,00
	21	Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Unit	0,00	0,00	0,00
	22	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	0,00	0,00	0,00
	23	Peningkatan KapasitasKelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lembaga	0,00	0,00	0,00
	24	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	0,00	0,00	0,00
	25	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen	267,212,200	263,066,670	98.45
	26	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	0,00	0,00	0,00
	27	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Desa	0,00	0,00	0,00
	28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	0,00	0,00	0,00
	29	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit	0,00	0,00	0,00
	30	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	0,00	0,00	0,00
	31	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Unit	0,00	0,00	0,00
	32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	1,477,993,000	1,474,426,800	99.76
	33	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	0,00	0,00	0,00
2	Jumlah Indikator			1,745,205,200	1,737,493,470	99.56
	Jumlah Program			1,745,205,200	1,737,493,470	99.56
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah			614,447,000	614,447,000	100.00



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota K20240327112559		614,447,000	614,447,000	100.00
1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0,00	0,00	0,00
2	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Dokumen	0,00	0,00	0,00
3	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00
4	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00
5	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00
6	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00
7	Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0,00	0,00	0,00
8	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00
9	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0,00	0,00	0,00
10	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	0,00	0,00	0,00
11	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Dokumen	0,00	0,00	0,00
12	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00
13	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit	0,00	0,00	0,00
14	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00
15	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	M ³ /Hari	0,00	0,00	0,00
16	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	M ³ /Hari	0,00	0,00	0,00



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan /perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen	0,00	0,00	0,00
18	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Unit	0,00	0,00	0,00
19	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Unit	0,00	0,00	0,00
20	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M ³ /Hari	0,00	0,00	0,00
21	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M ³ /Hari	0,00	0,00	0,00
22	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M ³ /Hari	800,000,000	793,462,400	99.18
23	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M ³ /Hari	0,00	0,00	<u>0,00</u>
24	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Unit	0	0	0%
25	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	M ³ /Hari	0,00	0,00	0,00
26	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	0,00	0,00	0,00
27	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M ³ /Hari	0,00	0,00	0,00
28	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	M ³ /Hari	0,00	0,00	0,00
29	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Unit	0,00	0,00	0,00
30	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	M ³ /Hari	0,00	0,00	0,00
31	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	M ³ /Hari	0,00	0,00	0,00
32	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M ³ /Hari	0,00	0,00	0,00



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Satuan	Perencanaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	33	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00
	34	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Desa	0,00	0,00	0,00
	35	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Penyelenggara	0,00	0,00	0,00
	36	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M³/Hari	0,00	0,00	0,00
	37	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit	0,00	0,00	0,00
	38	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Unit	200,000,000	199,150,000	99.58
	39	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rumah Tangga	514,447,000	514,447,000	100,00
	40	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan SistemPengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	0,00	0,00	0,00
	41	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	100,000,000	100,000,000	100,00
	Jumlah Indikator			614,447,000	614,447,000	100.00
Jumlah Program			614,447,000	614,447,000	100.00	
Kegiatan Lainnya						
3	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Lainnya					
	1	Sambungan Gratis Pemkot (PDAM)		5,821,217,850	5,821,217,850	100,00

Tabel 4.41

Urusan Permukiman dan Perumahan Rakyat

No	Sub Kegiatanprogram / Kegiatan		Satuan	Perencanaan (Rp)	Pelaksanaan (Rp)	Serapan (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Pengembangan Perumahan			251,999,100	235,909,760	93.62
	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		49,079,000	48,767,353	99.37
	1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	49,079,000	48,767,353	99.37
	2	Identifikasi lahanlahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	0	0	0,00
	3	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	0	0	0,00
	4	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen	0	0	0,00
	5	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0,00
	6	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen	0	0	0,00
	7	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0,00
	8	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0,00
	9	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0,00
	10	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0,00
	Jumlah Indikator			49,079,000	48,767,353	99.37
	2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		202,920,100	187,142,407	92.22
	1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	191,110,200	187,142,407	97.92
	2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED)	Dokumen	0	0	0,00

No	Sub Kegiatanprogram / Kegiatan		Satuan	Perencanaan (Rp)	Pelaksanaan (Rp)	Serapan (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
		bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota				
	3	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha	0	0	0,00
	4	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0,00
	5	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0,00
	6	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0,00
	7	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	11,809,900	0	0,00
	8	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	0,00
	9	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0,00
	10	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0,00
	11	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0,00
	12	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0,00
	Jumlah Indikator			202,920,100	187,142,407	92.22
	Jumlah Program			251,999,100	235,909,760	93.62
Kegiatan Lainnya						
2	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Lainnya					
Tidak Ada Data Kegiatan Lainnya						

Tabel 4.42

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan (Rp)	Pelaksanaan (Rp)	Serapan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kota Tarakan			1,872,384,770	1,764,309,409	94.23
1	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Trantibum)		384,912,090	384,912,090	100.00
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		199,920,790	199,920,790	100.00
	1 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	49,999,500	49,999,500	100,00
	2 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Dokumen	49,999,500	49,999,500	100,00
	3 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja Dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	0,00	0,00	0,00
	4 Kerja Sama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan Dan Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Dokumen	49,981,190	49,981,190	100,00
	5 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Unit	0,00	0,00	0,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Satuan	Perencanaan (Rp)	Pelaksanaan (Rp)	Serapan (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	6	Penyusunan SOP Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	Dokumen	0,00	0,00	0,00
	7	Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah Dan Perkada	Laporan	0,00	0,00	0,00
	8	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Pol Ppnsional Pol PP Dan Uji Kompetensi Bagi Pejabat Fungsional	Orang	0,00	0,00	0,00
	9	Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Dokumen	0,00	0,00	0,00
	10	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP Melalui Uji Kompetensi Untuk Usulan Perpindahan Jabatan Ke Jabatan Fungsional Pol PP, Promosi Dan Kenaikan Jenjang Jabatan	Orang	0,00	0,00	0,00
	11	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Orang	0,00	0,00	0,00
	12	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Dan Satlinmas Melalui Pelatihan Teknis Satpol PP Dan Satlinmas	Orang	0,00	0,00	0,00
	13	Pencegahan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini Dan Cegah Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan,	Kasus	0,00	0,00	0,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Satuan	Perencanaan (Rp)	Pelaksanaan (Rp)	Serapan (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
		Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, Dan Pengawasan				
	14	Pencegahan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini Dan Cegah Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, Dan Pengawasan	Laporan	49,990,000	49,990,000	100,00
	15	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda Dan Perkada Melalui Penertiban Dan Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa	Laporan	0,00	0,00	0,00
	16	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda Dan Perkada Melalui Penertiban Dan Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa	Kasus	0,00	0,00	0,00
	17	Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah Dan Perturan Kepala Daerah	Laporan	0,00	0,00	0,00
	18	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Unit	98.385.700	98.384.800	100
	Jumlah Indikator			199,920,790	199,920,790	100.00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Satuan	Perencanaan (Rp)	Pelaksanaan (Rp)	Serapan (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan Bupati/Wali Kota		184,991,300	184,991,300	100.00
	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	50,000,000	50,000,000	100,00
	2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	49,991,300	49,991,300	100,00
	3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	85,000,000	85,000,000	100,00
	4	Pembinaan Dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0,00	0,00	0,00
	5	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan kepala Daerah	Dokumen	0,00	0,00	0,00
	6	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, Dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Unit	0,00	0,00	0,00
	7	Penyelidikan Terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0,00	0,00	0,00
	8	Dukungan Pelaksanaan Sidang Atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Laporan	0,00	0,00	0,00
	9	Pemberkasan Administrasi Penyidikan Oleh PPNS	Dokumen	0,00	0,00	0,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Satuan	Perencanaan (Rp)	Pelaksanaan (Rp)	Serapan (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
		Penegak Peraturan Daerah				
2	10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0,00	0,00	0,00
	11	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0,00	0,00	0,00
	12	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Indikator			184,991,300	184,991,300	100.00
	3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		0	0	0
	1	Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen	0,00	0,00	0,00
	2	Kerja Sama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen	0,00	0,00	0,00
	3	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Laporan	0,00	0,00	0,00
	4	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Laporan	0,00	0,00	0,00
	5	Pengembangan Kapasitas Dan Karier PPNS	Laporan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Indikator			0	0	0
	Jumlah Program			384,912,090	384,912,090	100.00
2	Program Penanggulangan Bencana (Kebencanaan)			1,162,562,080	1,054,486,719	90.70
	4	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		780,454,400	706,656,238	90.54
	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	225,224,400	179,950,230	79.90

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Satuan	Perencanaan (Rp)	Pelaksanaan (Rp)	Serapan (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Orang	555,230,000	526,706,008	94.86
	Jumlah Indikator			780,454,400	706,656,238	90.54
	5	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		208,756,850	200,837,621	96.21
	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0,00	0,00	0,00
	2	Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Orang	47,119,500	43,591,10	92.51
	3	Pengendalian Operasi Dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	18,900,000	18,449,999	97.62
	4	Penyediaan Peralatan Perlindungan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Unit	0,00	0,00	0,00
	5	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	Kawasan	0,00	0,00	0,00
	6	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	0,00	0,00	0,00
	7	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota		0,00	0,00	0,00
	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0,00	0,00	0,00
	9	Penyusunan Rencana Kontijensi	Dokumen	45,562,800	43,078,496	94.55
	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Orang	47,350,400	46,354,106	97.90

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Satuan	Perencanaan (Rp)	Pelaksanaan (Rp)	Serapan (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Dokumen	0,00	0,00	0,00
	12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	0,00	0,00	0,00
	13	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan	0,00	0,00	0,00
	14	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0,00	0,00	0,00
	15	Penyediaan Peralatan Perlindungan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Unit	49,824,150	49,363,920	99.08
	16	Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kawasan	0,00	0,00	0,00
	17	Pengendalian Operasi Dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	0,00	0,00	0,00
Jumlah Indikator				208,756,850	200,837,621	96.21
6	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana			173,350,830	146,992,860	84.80
	1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Laporan	420,000	0,00	0,00
	2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1,700,000	0,00	0,00
	3	Pencarian, Pertolongan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	170,810,830	146,992,860	86.06
	4	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0,00	0,00	0,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Satuan	Perencanaan (Rp)	Pelaksanaan (Rp)	Serapan (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Kabupaten/Kota	Orang	0,00	0,00	0,00
	6	Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0,00	0,00	0,00
	7	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Dokumen	0,00	0,00	0,00
	8	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	420,000	0,00	0,00
	Jumlah Indikator			173,350,830	146,992,860	84.80
	7	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana K2023446		0	0	0
	1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0,00	0,00	0,00
	2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0,00	0,00	0,00
	3	Kerja Sama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0,00	0,00	0,00
	4	Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	0,00	0,00	0,00
	5	Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	0,00	0,00	0,00
	6	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0,00	0,00	0,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Satuan	Perencanaan (Rp)	Pelaksanaan (Rp)	Serapan (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	7	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0,00	0,00	0,00
	8	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0,00	0,00	0,00
	9	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0,00	0,00	0,00
	10	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0,00	0,00	0,00
	11	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dan Dunia Usahadalam Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Lembaga	0,00	0,00	0,00
	12	Fasilitasi Pengumpulan Data Penduduk Di Daerah Rawan Bencana Lintas Kab/Kota	Laporan	0,00	0,00	0,00
	13	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) Dan Rencana Rehabilitasi Dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Dokumen	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Indikator			0	0	0
	Jumlah Program			1,162,562,080	1,054,486,719	90.70
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (Damkar)			324,910,600	324,910,600	100.00
3	8	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, Dan Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun		149,956,890	149,956,890	100.00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Satuan	Perencanaan (Rp)	Pelaksanaan (Rp)	Serapan (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
		Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	1	Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	49,976,890	49,976,890	100,00
	2	Pemadaman Dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	50,000,000	50,000,000	100,00
	3	Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran Dan Non Kebakaran	Laporan	49,980,000	49,980,000	100,00
	4	Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0,00	0,00	0,00
	5	Standarisasi Sarana Dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran Dan Alat Pelindung Diri	Unit	0,00	0,00	0,00
	6	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Dokumen	0,00	0,00	0,00
	7	Pengelolaan Sistem Komunikasi Dan Informasi Kebakaran Dan Penyelamatan (SKIK)	Unit	0,00	0,00	0,00
	8	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangann Kebakaran Dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	0,00	0,00	0,00
	9	Peningkatan Kompetensi Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran Dan Analisis Kebakaran	Laporan	0,00	0,00	0,00
	10	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	0,00	0,00	0,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Satuan	Perencanaan (Rp)	Pelaksanaan (Rp)	Serapan (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	11	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Dokumen	0,00	0,00	0,00
	12	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	Dokumen	0,00	0,00	0,00
	13	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Dokumen	0,00	0,00	0,00
	14	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran Dan Alat Pelindung Diri	Unit	0,00	0,00	0,00
	15	Penyelenggaraan Kerja Sama Dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, Dan Kemitraan Dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Orang	0,00	0,00	0,00
	16	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Dokumen	0	0	0%
Jumlah Indikator				149,956,890	149,956,890	100.00
9	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			49,981,660	49,981,660	100.00
	1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen	24,981,660	24,981,660	100.00
	2	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen	25,000,000	25,000,000	100.00
Jumlah Indikator				49,981,660	49,981,660	100.00
10	Investigasi Kejadian Kebakaran			0	0	0
	1	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi	Dokumen	0,00	0,00	0,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Satuan	Perencanaan (Rp)	Pelaksanaan (Rp)	Serapan (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
		Penelitian Dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran				
	Jumlah Indikator			0	0	0
11	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran			49,982,050	49,982,050	100.00
	1	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi Dan Edukasi Masyarakat	Orang	24,992,050	24,992,050	100,00%
	2	Pembentukan Dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Desa	24,990,000	24,990,000	0,00
	3	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana Dan Prasarana	Dokumen	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Indikator			49,982,050	49,982,050	100.00
12	Penyelenggaraan Operasi Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia K2023458			74,990,000	74,990,000	100.00
	1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian Dan Pertolongan Pada Peristiwa Yang Penimpa, Membahayakan, Dan/Atau Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan	25,000,000	25,000,000	100.00
	2	Standarisasi Sarana Dan Prasarana Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Dan Evakuasi	Dokumen	0,00	0,00	0,00

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Satuan	Perencanaan (Rp)	Pelaksanaan (Rp)	Serapan (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	3	Pembinaan Aparatur Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan Dan Evakuasi	Laporan	24,990,000	24,990,000	100,00
	4	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan Dan Evakuasi	Unit	25,000,000	25,000,000	100,00
	Jumlah Indikator			74,990,000	74,990,000	100.00
	Jumlah Program			324,910,600	324,910,600	100.00
	Kegiatan Lainnya					
4	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Lainnya					
Tidak Ada Data Kegiatan Lainnya						

Tabel 4.43

Urusan Sosial

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Satuan	Perencanaan	Pelaksanaan	Serapan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Rehabilitasi Sosial			262,867,212	213,833,647	81.35
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		217,410,012	168,376,447	77.45
	1	Penyediaan permakanan	Orang	49,924,724	35,459,250	71,02
	2	Penyediaan sandang	Orang	7,935,000	7,635,690	96,22

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Satuan	Perencanaan	Pelaksanaan	Serapan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	3	Penyediaan alat bantu	Orang	90,208,300	75,714,677	83,93
	4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	23,910,580	6,286,820	26,29
	5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	8,140,000	7,650,000	93,98
	6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	69	69	100,00
	7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	69	69	100,00
	8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	69	69	100,00
	9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	3,913,420	3,627,924	92,70
	10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	26,775,612	26,496,810	98,95
	11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	69	69	100,00
	12	Pemberian layanan rujukan	Orang	6,602,100	5,505,000	83,38
	Jumlah Indikator			217,410,012	168,376,447	77.45
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			45,457,200	45,457,200	100.00
	1	Penyediaan makanan	Orang	29,940,000	29,940,000	100,00
	2	Penyediaan sandang	Orang	10,920,000	10,920,000	100,00
	3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	0,00	0,00	0,00
	4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	4,597,200	4,597,200	100,00
	Jumlah Indikator			45,457,200	45,457,200	100.00



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan	Pelaksanaan	Serapan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Jumlah Program		262,867,212	213,833,647	81.35
Kegiatan Lainnya					
2	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Lainnya				
Tidak Ada Data Kegiatan Lainnya					

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tarakan Tahun 2025 merupakan perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sepanjang tahun anggaran 2025. Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan telah berjalan sesuai dengan koridor Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tarakan Tahun 2025-2045 dan sinkron dengan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tarakan Tahun 2025 laporan tentang hasil capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kota Tarakan selama satu tahun anggaran. LPPD Kota Tarakan Tahun 2025 ini disusun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tahun 2025 merupakan periode tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029. Sepanjang Tahun Anggaran 2025 perencanaan pembangunan Kota Tarakan dapat dilaksanakan optimal sehingga mampu meningkatkan kualitas pembangunan kota. Hal tersebut dapat dilihat dari keberhasilan capaian nilai Indikator Kinerja Utama antara lain data capaian ekonomi makro Kota Tarakan yang menunjukkan perkembangan signifikan yaitu:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tarakan mengalami peningkatan dari 78,03 pada tahun sebelumnya menjadi 78,62 pada tahun 2025, dengan kenaikan sebesar 0,59 poin. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas hidup masyarakat, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, maupun standar hidup. Peningkatan ini dapat dikaitkan dengan berbagai program pemerintah yang berfokus pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, serta peningkatan daya beli masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi dan bantuan sosial.

2. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan di Kota Tarakan mengalami penurunan dari 5,56 persen menjadi 5,03 persen, atau berkurang sebesar 9,53 persen. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilakukan, seperti bantuan sosial, pemberdayaan usaha mikro, serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, telah membuahkan hasil yang positif. Penurunan angka kemiskinan ini juga mencerminkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, di mana lebih banyak penduduk yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

3. Angka Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka di Kota Tarakan mengalami sedikit penurunan dari 5,11 persen menjadi 5,06 persen, atau sebesar 0,98 persen. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja di Kota Tarakan, yang kemungkinan besar didukung oleh program pelatihan tenaga kerja, fasilitasi pencari kerja, serta pertumbuhan sektor usaha kecil dan menengah yang membuka peluang kerja baru. Meskipun penurunan ini positif, angka

pengangguran yang masih di atas 5 persen mengindikasikan perlunya upaya lebih lanjut dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan berkelanjutan.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Tarakan mengalami sedikit perlambatan dari 5,71 persen menjadi 5,02 persen, atau turun sebesar 12,08 persen. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perlambatan investasi, penurunan daya beli masyarakat, atau tantangan dalam sektor industri utama yang menjadi penggerak ekonomi daerah. Meskipun masih berada pada tingkat pertumbuhan yang positif, diperlukan strategi lebih lanjut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, seperti peningkatan investasi, penguatan sektor produktif, serta inovasi dalam ekonomi berbasis teknologi dan industri kreatif.

5. Pendapatan Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kota Tarakan mengalami peningkatan dari Rp 221,04 juta menjadi Rp 233,09 juta, atau naik sebesar 5,45 persen. Peningkatan ini mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi yang memberikan dampak positif pada pendapatan rata-rata masyarakat. Kenaikan PDRB per kapita ini menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat secara umum meningkat, yang dapat disebabkan oleh pertumbuhan sektor ekonomi yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan individu dan rumah tangga.

6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Ketimpangan pendapatan di Kota Tarakan mengalami peningkatan dari 0,232 menjadi 0,238, atau meningkat sebesar 2,59 persen. Walaupun meningkat, angka rasio gini ini masih sangat kecil yang

mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan di Kota Tarakan semakin merata, dengan adanya peningkatan kesejahteraan bagi kelompok berpenghasilan rendah. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penurunan ini dapat mencakup program subsidi, bantuan sosial, serta peningkatan kesempatan kerja yang lebih inklusif. Namun, meskipun terjadi perbaikan, tetap diperlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga distribusi pendapatan yang lebih adil dan berkelanjutan di masa depan.

Secara keseluruhan, Kota Tarakan menunjukkan beberapa pencapaian positif, seperti peningkatan IPM, penurunan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan per kapita, dan berkurangnya pengangguran. Namun, perlambatan pertumbuhan ekonomi menjadi tantangan yang perlu segera ditangani agar pembangunan ekonomi tetap inklusif dan berkelanjutan. Strategi yang lebih fokus pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, serta penguatan sektor produktif dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan tersebut.

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan ini dapat diraih tidak terlepas dari daya upaya dan kerjasama antara Pemerintah Kota Tarakan, DPRD, Forkopinda, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan berlandaskan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab masing-masing. Namun tantangan ke depan tentu lebih berat terutama dengan adanya eskalasi politik luar negeri yang tentu akan berimbas pada pembangunan di daerah. Untuk itu ke depan penyelenggaraan pemerintahan daerah dituntut untuk adaptif, kolaboratif dan inovatif.

5.2. Permasalahan dan Solusi

Meskipun banyak capaian yang diraih, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi selama tahun 2025, antara lain:

1. **Hambatan:** Adanya dinamika ekonomi global yang berdampak pada fluktuasi pendapatan daerah dan beberapa kendala teknis dalam pelaksanaan program di lapangan.
2. **Solusi:** Pemerintah Kota Tarakan telah melakukan langkah-langkah mitigasi melalui optimalisasi sumber pendapatan asli daerah (PAD) serta penguatan fungsi pengawasan dan evaluasi secara berkala.

5.3. Saran dan Harapan

Sebagai rencana tindak lanjut untuk peningkatan kinerja di tahun-tahun mendatang, disarankan:

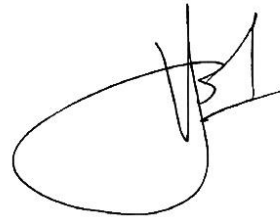
- **Peningkatan Kapasitas SDM:** Terus mendorong profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan dalam memberikan pelayanan publik.
- **Pemanfaatan Teknologi:** Memperluas digitalisasi layanan pemerintah melalui program Smart City untuk mempermudah akses masyarakat.
- **Partisipasi Masyarakat:** Meningkatkan pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini disusun. Disadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyajian maupun pelaksanaan kinerja, namun komitmen Pemerintah Kota Tarakan tetap fokus pada visi mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi yang bermanfaat bagi Pemerintah Pusat dan pihak-pihak terkait dalam menilai perkembangan pembangunan di Kota Tarakan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan laporan ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tarakan, 25 Maret 2026
Wali Kota Tarakan



dr. H. Khairul, M.Kes